

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan Ketimpangan Pendapatan. Data capaian kinerja makro Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1  
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Purbalingga

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,97	69,15	100,26
2.	Angka Kemiskinan	15,90%	16,24%	102,14
3.	Angka Pengangguran	6,10%	6,05%	99,18
4.	Pertumbuhan Ekonomi	-1,23%	3,19%	259,35
5.	Pendapatan Per Kapita	Rp.26.680.000,-	Rp.27.000.000,-	101,20
6.	Ketimpangan Pendapatan ( <i>Gini Ratio</i> )	19,57%	19,57% (data terakhir tahun 2020)	100

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Usia Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah serta pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 mencapai 69,15 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 68,97.

Angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 mencapai 16,24% meningkat dibandingkan tahun 2020 yang berada pada angka 15,90%. Salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menurun. Angka pengangguran pada tahun 2021 mencapai 6,05% mengalami



penurunan 0,05% dari tahun 2020 yang sebesar 6,10%.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 mencapai 3,19% mengalami peningkatan yang signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai -1,23%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Purbalingga mulai bangkit seiring dengan adanya percepatan ekonomi daerah.

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebesar Rp.27.000.000,- per tahun, dengan Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*) mencapai 19,57% (data *Gini Ratio* terakhir tahun 2020).

## **2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

### **2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)**

Indikator Kinerja Kunci Hasil (*IKK Outcome*) merupakan indikator kinerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 6 (enam) Urusan Pilihan.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi :

#### 1. Urusan Pendidikan

- a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD sebanyak 19.844 orang, dan Jumlah anak usia 5-6 tahun sebanyak 15.884 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 124,93%.
- b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dengan jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar sebanyak 84.235 orang, dan jumlah anak usia 7-12 tahun sebanyak 84.211 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100,03%.
- c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama dengan jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama sebanyak 38.137 orang, dan jumlah anak usia 13-15 tahun sebanyak 33.068 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 115,33%.
- d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang



berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan sebanyak 3.994 orang, dan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah sebanyak 3.994 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.

## 2. Urusan Kesehatan

- a. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk dengan jumlah daya tampung Rumah Sakit Rujukan sebanyak 1.285 orang, dan jumlah penduduk di Kabupaten sebanyak 1.021.920 jiwa, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0,13%.
- b. Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi dengan jumlah RS Rujukan yang terakreditasi minimal tingkat utama sebanyak 6 Rumah Sakit, dan jumlah Rumah Sakit di Kabupaten sebanyak 8 Rumah Sakit, sehingga tingkat capaiannya sebesar 75%.
- c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 12.775 orang, dan jumlah ibu hamil di Kabupaten sebanyak 16.086 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 79,42%.
- d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dengan jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sebanyak 13.175 orang, dan jumlah ibu bersalin di Kabupaten sebanyak 14.916 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 88,33%.
- e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 12.909 bayi, dan jumlah bayi baru lahir di Kabupaten sebanyak 14.747 bayi, sehingga tingkat capaiannya sebesar 87,54%.
- f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dengan jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 62.534 balita, dan jumlah balita di Kabupaten sebanyak 71.929, sehingga tingkat capaiannya sebesar 86,94%.
- g. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 47.703 orang, dan jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten sebanyak 73.404 orang,



- sehingga tingkat capaiannya sebesar 64,99%.
- h. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 153.453 orang, dan jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten sebanyak 637.309 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 24,08%.
  - i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 88.639 orang, dan jumlah orang warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten sebanyak 126.276 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 70,19%.
  - j. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 28.095 orang, dan jumlah penderita hipertensi di Kabupaten sebanyak 280.868 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 10%.
  - k. Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 14.035 orang, dan jumlah penderita DM di Kabupaten sebanyak 13.117 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 107%.
  - l. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 1.959 orang, dan jumlah penderita ODGJ di Kabupaten sebanyak 2.508 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 78,11%.
  - m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dengan jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 4.339 orang, dan jumlah penderita TBC di Kabupaten sebanyak 7.600 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 57,09%.
  - n. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dengan jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sebanyak 14.756 orang, dan jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten sebanyak 17.138 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar



86,10%.

### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Kabupaten dengan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten seluas 0 Ha, dan luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten seluas 0 Ha, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yaitu Urusan Sumber Daya Air (Sungai), pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten dengan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten seluas 0 m, dan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten seluas 0 m, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%. Hal tersebut dikarenakan di wilayah Kabupaten Purbalingga tidak memiliki pantai sehingga tidak ada permukiman sepanjang pantai.
- c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) di tahun eksisting seluas 11.809 Ha, dan luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten seluas 333.273 Ha, sehingga tingkat capaiannya sebesar 3,54%.
- d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten, dengan jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 230.519 rumah, dan jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten sebanyak 247.852 rumah, sehingga tingkat capaiannya sebesar 93,01%.
- e. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan Jumlah rumah yang



memiliki akses pengolahan berupa cubluk ditambah jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT ditambah jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD sebanyak 230.940 rumah, dan jumlah rumah di Kabupaten sebanyak 247.852 rumah, sehingga tingkat capaiannya sebesar 93,18%.

- f. Rasio kepatuhan IMB Kabupaten dengan jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya sebanyak 322 izin, dan jumlah IMB yang berlaku sebanyak 322 izin, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.
  - g. Tingkat kemantapan jalan dengan panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap sepanjang 788.333 km, dan panjang jalan keseluruhan di Kabupaten sepanjang 888.087 km, sehingga tingkat capaiannya sebesar 88,77%.
  - h. Tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi, dengan jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli sebanyak 40 orang, dan jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten sebanyak 0 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%. Hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Purbalingga belum memiliki data jumlah tenaga operator dan teknis/analisis.
  - i. Prosentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dengan jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi sebanyak 49 proyek, dan jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya sebanyak 49 proyek, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.
4. Urusan Perumahan Rakyat
- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dengan jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 9 rumah, dan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021 sebanyak 9 rumah, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%. Tahapan yang dilaksanakan merupakan tahapan pendataan.
  - b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten dengan jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan ditambah Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa ditambah Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni sebanyak 0



rumah, dan Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan sebanyak 0 rumah, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%.

- c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani dengan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani seluas 0 ha, dan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha seluas 21,61 ha, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021 tidak ada sisa kawasan kumuh yang ditangani di wilayah Kabupaten Purbalingga.
  - d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dengan jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni sebanyak 7.535 unit, dan jumlah total unit rumah Kabupaten sebanyak 247.852 unit, sehingga tingkat capaiannya sebesar 3,04%.
  - e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dengan jumlah unit rumah perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 1.760 unit, dan jumlah unit rumah perumahan di Kabupaten sebanyak 4.200 unit, sehingga tingkat capaiannya sebesar 41,90%.
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dengan jumlah pengaduan yang ditangani sebanyak 31 aduan, dan jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk sebanyak 31 aduan, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.
  - b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan sebanyak 7 Perda, dan jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 55 Perda, sehingga tingkat capaiannya sebesar 12,73%. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa Peraturan Daerah yang belum ada Peraturan Bupati turunannya sebagai dasar pelaksanaan, selain itu juga jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sangat terbatas.
  - c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 525 orang.
  - d. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 525 orang;
  - e. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 1.641 orang;
  - f. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban



kebakaran dengan jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran sebanyak 59 layanan, dan Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten ditangani sebanyak 59 layanan, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%;

g. Waktu tanggap (*Response Time*) penanganan kebakaran adalah 8,12 menit.

#### 6. Urusan Sosial

a. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 1.302 orang, dan populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis sebanyak 1.302 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.

b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten dengan jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran sebanyak 1.518 orang, dan populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten sebanyak 1.518 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.

#### B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi :

##### 1. Urusan Tenaga Kerja

a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja dengan jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD sebanyak 4 kegiatan, dan jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten sebanyak 10 kegiatan, sehingga tingkat capaiannya sebesar 40%.

b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dengan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 12.112 orang, dan jumlah tenaga kerja keseluruhan sebanyak 53.946 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar



- 22,45%.
- c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dengan jumlah PDRB tahun berjalan (Atas Dasar Harga Konstan) sebesar 17.731,44 (Milyar Rupiah), dan jumlah tenaga kerja sebanyak 53.946, sehingga tingkat capaiannya sebesar 32,87%.
  - d. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dengan jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 412 perusahaan, dan jumlah perusahaan sebanyak 435 perusahaan, sehingga tingkat capaiannya sebesar 94,71%.
  - e. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten dengan jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan sebanyak 6.631 orang, dan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 14.560 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 45,54%.
2. Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan jumlah ARG pada belanja langsung APBD sebesar Rp.19.206.009.006,-, dan jumlah seluruh belanja langsung APBD sebesar Rp.2.000.069.108.792,39, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0,96%.
  - b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten dengan jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi sebanyak 33 anak, dan jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) sebanyak 281.695 anak, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0,01%.
  - c. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dengan jumlah perempuan yang mengalami kekerasan sebanyak 11 orang per 100.000 penduduk perempuan, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 503.627 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0,00%.
3. Urusan Pangan
- a. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) dengan jumlah cadangan pangan sebanyak 116.444 ton, dan jumlah kebutuhan pangan sebanyak 388,15 ton, sehingga tingkat capaiannya sebesar 29.999,74%.



#### 4. Urusan Pertanahan

- a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan dengan luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi seluas 152.314 Ha, dan jumlah seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi seluas 152.314 Ha, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.
- b. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dengan jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum seluas 3.582 Ha, dan jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum seluas 3.582 Ha, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.
- c. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal dengan luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi seluas 152.314 Ha, dan luas izin lokasi yang diterbitkan seluas 152.314 Ha, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.
- d. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima  $\geq 0.5$  ha sebanyak 4.521, dan jumlah penerima tanah obyek landreform sebanyak 4.521, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.
- e. Tersedianya tanah untuk masyarakat berdasarkan Izin Membuka Tanah dengan luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah seluas 0 Ha, dan luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan seluas 0 Ha, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021 tidak ada permohonan Izin Membuka Tanah.
- f. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi dengan jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani sebanyak 0 kasus, dan jumlah pengaduan sengketa tanah garapan sebanyak 0 kasus, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%.

#### 5. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten tercapai 71,66, dengan rincian sebagai berikut :  
Indeks Kualitas Air (IKA) = 54,40  
Indeks Kualitas Udara (IKU) = 86,44  
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) = 73,94
- b. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten dengan total volume sampah yang dapat ditangani sebanyak



- 1.850.796 m<sup>3</sup>, dan total volume timbunan sampah Kabupaten sebanyak 2.022.848 m<sup>3</sup>, sehingga tingkat capaiannya sebesar 91,49%.
- c. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten sebanyak 0 perusahaan, dan jumlah usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan sebanyak 180 perusahaan, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%.
6. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Perekaman KTP Elektronik dengan jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP sebanyak 747.680 orang, dan jumlah penduduk 17 tahun ke atas sebanyak 749.474 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 99,76%.
  - b. Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan jumlah anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA sebanyak 124.805 orang, dan jumlah anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari sebanyak 271.287 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 46%.
  - c. Kepemilikan Akte Kelahiran dengan jumlah anak usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran sebanyak 262.952 orang, dan jumlah anak usia 0 – 18 tahun sebanyak 296.362, sehingga tingkat capaiannya sebesar 88,73%.
  - d. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sebanyak 1 OPD, dan jumlah OPD sebanyak 46 OPD, sehingga tingkat capaiannya sebesar 2,17%.
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Persentase pengentasan desa tertinggal dengan jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun sebanyak 7 desa, dan jumlah desa tertinggal (per awal tahun 2021) sebanyak 9 desa, sehingga tingkat capaiannya sebesar 77,78%.
  - b. Persentase peningkatan status desa mandiri dengan jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun sebanyak 30 desa, dan jumlah desa berkembang (per awal



tahun 2021) sebanyak 162 desa, sehingga tingkat capaiannya sebesar 18,52%.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. TFR (Angka Kelahiran Total) sebesar 2,05.
  - b. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR*) dengan jumlah peserta KB Aktif Modern sebanyak 147.577 peserta, dan jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 42.685, sehingga tingkat capaiannya sebesar 345,74%.
  - c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) dengan jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani sebanyak 11.953, dan jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 42.685, sehingga tingkat capaiannya sebesar 28%.
9. Urusan Perhubungan
  - a. Rasio Konektivitas Kabupaten dengan Angkutan Jalan 625, Bobot Trayek 1, Jumlah Kebutuhan Trayek 41, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) 0, sehingga tingkat capaiannya sebesar 1.524.
  - b. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota tercapai 0,27.
10. Urusan Komunikasi dan Informatika
  - a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebanyak 46 OPD, dan jumlah OPD sebanyak 46, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.
  - b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sebanyak 15 layanan, dan jumlah Layanan Publik sebanyak 42 layanan, sehingga tingkat capaiannya sebesar 35,71%.
  - c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten sebanyak 765.145 jiwa, dan jumlah penduduk sebanyak 1.021.920 jiwa, sehingga tingkat capaiannya sebesar 74,87%.



11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - a. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dengan Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset sebanyak 77 koperasi, dan jumlah seluruh koperasi 245 koperasi, sehingga tingkat capaiannya sebesar 31,43%.
  - b. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha dengan jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha sebanyak 24 unit, dan Jumlah usaha mikro keseluruhan sebanyak 97.537 unit, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0,02%.
12. Urusan Penanaman Modal
  - a. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten dengan jumlah investasi tahun 2021 sebesar Rp.1.462.142.613.812,- dan jumlah investasi tahun 2020 sebanyak Rp.758.271.424.434,-, sehingga tingkat capaiannya sebesar 92,83%.
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
  - a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dengan jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten sebanyak 15 orang, dan jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten sebanyak 217.050 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0,01%.
  - b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten sebanyak 2.396 orang, dan jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten sebanyak 217.050 orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 1,10%.
  - a. Peningkatan prestasi olahraga dengan jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional sebanyak 41 medali.
14. Urusan Statistik
  - a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sebanyak 46 OPD, dan jumlah OPD sebanyak 46 OPD, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.
  - b. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi



pembangunan daerah sebanyak 46 OPD, dan jumlah OPD sebanyak 46 OPD, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.

15. Urusan Persandian

- a. Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan jumlah nilai per area keamanan informasi sebanyak 7,87, dan Jumlah area penilaian sebanyak 4 domain, sehingga tingkat capaiannya sebesar 196,75%.

16. Urusan Kebudayaan

- a. Terlestarikannya Cagar Budaya dengan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 41, dan jumlah cagar budaya yang terdata sebanyak 288, sehingga tingkat capaiannya sebesar 14,24%.

17. Urusan Perpustakaan

- a. Nilai Budaya Baca tercapai 53,6 (Sedang).
- b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tercapai 7,94.

18. Urusan Kearsipan

- a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan 59 UU 43/2009) tercapai 43,92 dengan :
  - Persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip sebesar 27,94;
  - Persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip sebesar 110,57;
  - Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik sebesar 31,51;
  - Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN sebesar 5,66.
- b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat tercapai 2.789 dengan :
  - Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK sebesar 416;
  - Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK sebesar 23;
  - Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK sebesar 491;
  - Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK sebesar 4.747;



- Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK sebesar 11.057;
- Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK sebesar 0.

C. Urusan Pilihan meliputi :

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
  - a. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten tercapai 9.899,489 ton.
2. Urusan Pariwisata
  - a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan dengan jumlah wisatawan mancanegara tahun 2021 sebanyak 0 wisman, dan jumlah wisatawan mancanegara tahun 2020 sebanyak 50 wisman, sehingga tingkat capaiannya sebesar -100%;
  - b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten dengan jumlah wisatawan nusantara tahun 2021 sebanyak 1.070.529 wisnus, dan jumlah wisatawan nusantara tahun 2020 sebanyak 1.387.862 wisnus, sehingga tingkat capaiannya sebesar -22,86%.
  - c. Tingkat hunian akomodasi dengan jumlah kamar yang terjual sebanyak 47.276 kamar, dan Jumlah kamar yang tersedia sebanyak 373 kamar, sehingga tingkat capaiannya sebesar 12.674,53%
  - d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB harga berlaku sebesar 2.258,46 Milyar Rupiah.
  - e. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD sebesar Rp.6.624.244.555,-.
3. Urusan Pertanian
  - a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun dengan jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun sebesar 264.101,50, dan luas panen sebesar 40.717,50, sehingga tingkat capaiannya sebesar 648,62%.
  - b. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular dengan jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2021 sebanyak 58.768 kasus, dan jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2020 sebanyak 59.449 kasus, sehingga tingkat capaiannya sebesar -1,15%.
4. Urusan Kehutanan
 

Pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan urusan kehutanan, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, sehingga tingkat



capaiannya sebesar 0%.

#### 5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%.

#### 6. Urusan Perdagangan

a. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) dengan jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan sebanyak 342 pelaku usaha, dan jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten sebanyak 342 pelaku usaha, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.

b. Persentase kinerja realisasi pupuk dengan realisasi sebesar 19.018.023, dan RDKK sebesar 48.332.370, sehingga tingkat capaiannya sebesar 39,35%.

c. Persentase Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dengan jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun 2021 sebanyak 5.312 unit, dan jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten sebanyak 30.004 unit, sehingga tingkat capaiannya sebesar 17,10%.

#### 7. Urusan Perindustrian

a. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten dengan jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2021 sebanyak 21.074, dan jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2020 sebanyak 21.067, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0,03%.

b. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK dengan jumlah jenis industri prioritas Kabupaten sebanyak 3, dan jumlah jenis industri prioritas nasional sebanyak 10, sehingga tingkat capaiannya sebesar 30%.

c. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah dengan jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan sebanyak 0 izin, dan jumlah izin yang dikeluarkan sebanyak 3.226 izin, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%. Hal tersebut dikarenakan untuk IUMK data OSS



tidak termasuk dalam lokus pemantauan dan pengawasan industri.

- d. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah dengan jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan sebanyak 0 izin, dan jumlah izin yang dikeluarkan sebanyak 0 izin, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%, karena pada tahun 2021 tidak ada permohonan Izin Perluasan Industri, hanya ada permohonan izin usaha industri baru.
- e. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten dengan jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan sebanyak 0 izin, dan jumlah izin yang dikeluarkan sebanyak 0 izin, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%, karena di wilayah Kabupaten Purbalingga tidak ada Kawasan Industri.
- f. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini tidak ada karena tidak ada laporan kegiatan secara berkala dari Industri Kecil dan Menengah mengenai aktivitas industri IKM.
  - Daftar informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan tidak ada;
  - Daftar informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan tidak ada;
  - Daftar informasi produksi dan kapasitas produksi tidak ada;
  - Daftar informasi bahan baku dan bahan penolong tidak ada;
  - Daftar informasi bahan bakar/energi ada;
  - Daftar informasi tenaga kerja tidak ada.

## 8. Urusan Transmigrasi

- a. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan pembinaannya tidak ada.
  - Di wilayah Kabupaten Purbalingga tidak ada kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya;
  - Di wilayah Kabupaten Purbalingga tidak ada Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya;
  - Di wilayah Kabupaten Purbalingga tidak ada Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibina;
  - Di wilayah Kabupaten Purbalingga tidak ada Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya.



Data capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK *Outcome*) secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK *Outcome*)**

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	$\frac{19.844}{15.884} \times 100\%$	124,93%
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	$\frac{84.235}{84.211} \times 100\%$	100,03%
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang Belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	$\frac{38.137}{33.068} \times 100\%$	115,33%
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	$\frac{3.994}{3.994} \times 100\%$	100%
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{1.285}{1.021.920} \times 100\%$	0,13%
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi minimal tingkat utama}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{6}{8} \times 100\%$	75%



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{12.775}{16.086} \times 100\%$	79,42%
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{13.175}{14.916} \times 100\%$	88,33%
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{12.909}{14.747} \times 100\%$	87,54%
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{62.534}{71.929} \times 100\%$	86,94%
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{47.703}{73.404} \times 100\%$	64,99%
		8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{153.453}{637.309} \times 100\%$	24,08%
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{88.639}{126.276} \times 100\%$	70,19%
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{28.095}{280.868} \times 100\%$	10%



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{14.035}{13.117} \times 100\%$	107%
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{1.959}{2.508} \times 100\%$	78,11%
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{4.339}{7.600} \times 100\%$	57,09%
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{14.756}{17.138} \times 100\%$	86,10%
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)}} \times 100 \%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)}} \times 100 \%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
			WS Kewenangan Kabupaten				
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{11.809}{333.273} \times 100\%$	3,54%
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.}}{\text{Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut.}} \times 100 \%$	%	$\frac{230.519}{247.852} \times 100\%$	93,01%
		5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{230.940}{247.852} \times 100\%$	93,18%
		6	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$	%	$\frac{322}{322} \times 100\%$	100%
		7	Tingkat kemantapan jalan	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{788.333}{888.087} \times 100\%$	88,77%



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		8	Tenaga operator /teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli ----- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten	%	40 ----- 0 x 100%	0%
		9	Prosentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ----- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	%	49 ----- 49 x 100%	100%
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021	%	9 --- 9 x 100%	100%
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	%	0 --- 0 x 100%	0%
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	%	0 ----- 21,61 x 100%	0%
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni ----- x 100 % Jumlah total unit rumah Kabupaten	%	7.535 ----- 247.852 x 100%	3,04%
		5	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100 % Jumlah unit rumah Kabupaten	%	1.760 ----- 4.200 x 100%	41,90%



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	%	31 ----- 31 x 100%	100%
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	%	7 ----- 55 x 100%	12,73%
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	525 orang	525 orang
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	525 orang	525 orang
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	1.641 orang	1.641 orang
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah} + \text{jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten ditangani}} \times 100\%$	%	59 ---- 59 x 100%	100%
		7	Waktu tanggap ( <i>Response Time</i> ) penanganan kebakaran	Waktu tanggap ( <i>Response Time</i> ) penanganan kebakaran	menit	8,12 menit	8,12 menit



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
6	SOSIAL	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$	%	$\frac{1.302}{1.302} \times 100\%$	100%
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{1.518}{1.518} \times 100\%$	100%
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{4}{10} \times 100\%$	40%
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$	%	$\frac{12.112}{53.946} \times 100\%$	22,45%
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (Atas Dasar Harga Konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	%	$\frac{17.731,44 \text{ (Milyar)}}{53.946} \times 100\%$	32,87%
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	%	$\frac{412}{435} \times 100\%$	94,71%



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
			peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
		5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	%	$\frac{6.631}{14.560} \times 100\%$	45,54%
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100\%$	%	$\frac{19.206.009.006}{2.000.069.108.792,39} \times 100\%$	0,96%
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$	%	$\frac{33}{281.695} \times 100\%$	0,01%
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$	%	$\frac{11}{503.627} \times 100\%$	0,00%
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$	%	$\frac{116.444}{388,15} \times 100\%$	29.999,74%
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{Jumlah seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100\%$	%	$\frac{152.314}{152.314} \times 100\%$	100%



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
			dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$	%	$\frac{3.582}{3.582} \times 100\%$	100%
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$	%	$\frac{152.314}{152.314} \times 100\%$	100%
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima} \geq 0.5 \text{ ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$	%	$\frac{4.521}{4.521} \times 100\%$	100%
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah}}{\text{Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Indeks Kualitas Air (IKA) = 54,40 Indeks Kualitas Udara (IKU) = 86,44 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) = 73,94 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = 71,66	Indeks	71,66	71,66
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbulan sampah Kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{1.850.796}{2.022.848} \times 100\%$	91,49%



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten}}{\text{Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{180} \times 100\%$	0%
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	%	$\frac{747.680}{749.474} \times 100\%$	99,76%
		2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari}} \times 100\%$	%	$\frac{124.805}{271.287} \times 100\%$	46%
		3	Kepemilikan Akte Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 tahun}} \times 100\%$	%	$\frac{262.952}{296.362} \times 100\%$	88,73%
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	%	$\frac{1}{46} \times 100\%$	2,17%
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}} \times 100\%$	%	$\frac{7}{9} \times 100\%$	77,78%
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times 100\%$	%	$\frac{30}{162} \times 100\%$	18,52%



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah angka kelahiran total		2,05	2,05
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	%	$\frac{147.577}{42.685} \times 100\%$	345,74%
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	%	$\frac{11.953}{42.685} \times 100\%$	28%
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kabupaten	<p>Rasio Konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd Kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten tersebut)</li> <li>• IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd Kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten tersebut) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP</li> </ul> <p>- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil</p> <p>. Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (&gt;5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (&lt;3 dalam</p>	Angka	<p>IK1 = 625            Bobot trayek = 1            Jml kbthn trayek = 41            IK 2 = 0            Rasio Konektivitas = IK1+IK2</p> $\frac{IK1 = (203+422) \times 1}{(14+27)}$ <p>625            = -----            41            = 15,24            Bobot Angkutan Jalan =100            IK2 = 0            (15,24 x 100) + 0</p>	1.524



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
				seminggu), Bobot = 0.5 Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas :		= 1.524  = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot ASDP) = (15,24x100) + 0 = 1.524	
		2	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	Indeks	0,27	0,27
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD	%	46 ---- x 100% 46	100%
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik	%	15 ---- x 100% 42	35,71%
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten ----- x 100% Jumlah Penduduk	%	765.145 ----- x 100% 1.021.920	74,87%



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
			kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten				
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	%	$\frac{77}{245} \times 100\%$	31,43%
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	%	$\frac{24}{97.537} \times 100\%$	0,02%
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun n} - \text{jumlah investasi tahun n-1}) \text{ di Kabupaten}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{1.462.142.613.812 - 758.271.424.434}{758.271.424.434} \times 100\%$	92,83%
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{15}{217.050} \times 100\%$	0,01%
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{2.396}{217.050} \times 100\%$	1,10%
		3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		41	41
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	%	$\frac{46}{46} \times 100\%$	100%



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
			pembangunan daerah				
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD	%	46 ---- x 100% 46	100%
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	%	7,87 ----- x 100% 4	196,75%
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	%	41 ---- x 100% 288	14,24%
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai Budaya Baca	Indeks	53,6 (sedang)	53,6 (sedang)
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	7,94	7,94
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	1. $T = (a + i + s + j)/4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Angka	$T = (a+i+s+j)/4$ a = 27,94 i = 110,57 s = 31,51 j = 5,66  $T = (27,94 + 110,52 + 31,51 + 5,66) : 4$ T = 175,68 : 4 T = 43,92	43,92
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	Angka	m = 416 b = 23 g = 491 a = 4747 c = 11057 i = 0 $T = (416 + 23 + 491 + 4747 +$	2.789



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
			pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		11057 + 0) : 6  T = 16.734 : 6 T = 2.789	
<b>B URUSAN PILIHAN</b>							
1	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	ton	9.899,489 ton	9.899,489 ton
2	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan mancanegara tahun } n - \text{Jumlah wisatawan mancanegara tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan mancanegara tahun } n-1} \times 100\%$	%	$\frac{0-50}{50} \times 100\%$	-100%
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah wisatawan nusantara tahun } n - \text{Jumlah wisatawan nusantara tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan nusantara tahun } n-1} \times 100\%$	%	$\frac{-317.333}{1.387.862} \times 100\%$	-22,86%
		3	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	%	$\frac{47.276}{373} \times 100\%$	12.674,53%
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata	Rp	Rp. 2.258.460.000.000,-	Rp. 2.258.460.000.000,-
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	Realisasi PAD terhadap sektor pariwisata	Rp	Rp.6.624.244.555,-	Rp.6.624.244.555,-
3	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$	%	$\frac{264.101,50}{40.717,50} \times 100\%$	648,62%



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t)} - \text{jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$	%	$\frac{-681}{59.449} \times 100\%$	-1,15%
4	Kehutanan	1		(Tidak Dilaksanakan)	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
6	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{342}{342} \times 100\%$	100%
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	%	$\frac{19.018.023}{48.332.370} \times 100\%$	39,35%
		3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{5.132}{30.004} \times 100\%$	17,10%
7	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	$\frac{(\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n} - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1})}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}} \times 100\%$	%	$\frac{(21.074-21.067)}{21.067} \times 100\%$	0,03%



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	$\frac{\text{Jumlah jenis industri prioritas Kabupaten}}{\text{Jumlah jenis industri prioritas nasional}} \times 100\%$	%	$\frac{3}{10} \times 100\%$	30%
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{3.226} \times 100\%$	0%
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan</li> <li>- Daftar informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan</li> <li>- Daftar informasi produksi dan kapasitas produksi</li> <li>- Daftar informasi bahan baku dan bahan penolong</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
				- Daftar informasi bahan bakar/energi - Daftar informasi tenaga kerja		1 0	1 0
8	Transmigrasi	1	Jumlah Satuan Pemukiman transmigrasi yg difasilitasi pembangunan dan pembinaannya	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya		0	0



## 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*)

Data capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK *Output*) secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK *Output*)**

No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD			
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA		
1	Pendidikan	PENDIDIKAN PAUD							
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Orang	438	438		
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	0		
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	0	0		
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	0	0		
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	2.209	2.209		
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		Orang	610	610		
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah		Orang	759	759		
		PENDIDIKAN DASAR							
		1	Jumlah SD Negeri Terakreditasi		Unit	615	615		
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari		Orang	0	0				



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
			Pemerintah Daerah				
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	0
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	0	0
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	0	0
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	NA	NA
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	NA	NA
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	6.273	6.273
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	6.273	6.273
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	NA	NA
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	NA	NA
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	534	534
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	534	534
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	4.386	4.386
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan		Orang	4.386	4.386



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
			sertifikat pendidik				
		16	Jumlah kepala pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	391	391
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	66	66
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	NA	NA
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	NA	NA
		<b>PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA</b>					
		1	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi		Unit	116	116
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	0
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	0
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	0	0
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	0	0
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)		Orang	NA	NA



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)		Orang	NA	NA
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		Orang	6.132	6.132
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	2.676	2.676
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	NA	NA
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	NA	NA
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)		Orang	NA	NA
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)		Orang	NA	NA
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	2.644	2.644
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	2.644	2.644
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	391	391
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	391	391
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	NA	NA



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	NA	NA	
		<b>PENDIDIKAN KESETARAAN</b>						
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Orang	7	7	
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	0	
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	0	0	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	91	91	
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	288	288	
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		Orang	257	257	
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	NA	NA	
8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		Orang	40	40			
2	Kesehatan	<b>Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan</b>						
		1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		Unit	8	8	
		<b>Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi</b>						
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Unit	8	8	



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Unit	80.432	80.32
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		Orang	327	327
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Unit	44.747	44.747
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		Orang	327	327
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Unit	88.482	88.482
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		Orang	327	327
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Unit	647.361	647.361
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Orang	371	371
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Unit	367.020	367.020
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Orang	88	88
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Unit	1.911.927	1.911.927
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	415	415
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Unit	378.828	378.828
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	415	415



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Unit	842.604	842.604
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	393	393
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Unit	39.352	39.352
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	415	415
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Unit	10.032	10.032
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	44	44
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Unit	53.200	53.200
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	145	145
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Unit	68.552	68.552
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	415	415		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir					
1		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Ha	0	0	
2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		M	0	0	
3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Ha	0	0	
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		M	0	0		



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		Ada/tidak	Ada	Ada
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		Ada/tidak	Ada	Ada
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota		Jumlah	0	0
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kota/Kota							
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Ha	0	0
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		M	0	0
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Ha	0	0
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		M	0	0
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		Ada/tidak	Ada	Ada
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		Ada/tidak	Ada	Ada
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota		Jumlah	0	0
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi							
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dlm kondisi baik(m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi}} \times 100\%$	%	$\frac{11.809}{\text{-----}} \times 100\%$	3,54%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
				baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi sekunder (m)		333.273	
		3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi tersier (m)	%	0 --- x 100% 0	0%
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab							
		1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada/tidak	Ada/tidak	Ada	Ada
		2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada/tidak	Ada/tidak	Ada	Perbup No 75 Th 2017
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM		BUMD/UPTD	1	1
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Izin	0	0
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Kerja Sama	0	0
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik							
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Rumah	227.649	227.649
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Rumah	3.291	3.291
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Rumah	230.940	230.940



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	0	0
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Rumah	0	0
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Rumah	230.940	230.940
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septic}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha}} \times 100\%$	%	$\frac{230.940}{0} \times 100\%$	0%
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPADLS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah IPALD}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} \times 100\%$	%	$\frac{3.291}{3.291} \times 100\%$	100%
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki akses unut pengolahan setempat}}{\Sigma \text{ rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$	%	$\frac{227.959}{247.852} \times 100\%$	91,97%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\Sigma \text{ jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\Sigma \text{ sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\Sigma \text{ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\Sigma \text{ kapasitas pengolahan lumpur tinja yg dibutuhkan Kab}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\Sigma \text{ rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada Kab}} \times 100\%$	%	$\frac{3.291}{3.291} \times 100\%$	100%
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\Sigma \text{ jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\Sigma \text{ rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADL-S}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{247852} \times 100\%$	0%
<b>Rasio kepatuhan IMB kab/ kota</b>							
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
				seederhana			
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		Izin	322	322
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Ada/tidak	0	0
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		Ada/tidak	1	1
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Bangunan	17	17
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		Bangunan	0	0
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		Bangunan	5.616	5.616
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		Bangunan	5.616	5.616
<b>Rasio kemantapan jalan</b>							
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota		Km	888.087	888.087
		2	Panjang jalan yang dibangun		Km	8.205,6	8.205,6
		3	Panjang jembatan yang dibangun		M	0	0
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		Km	0	0
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		M	0	0
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		Km	5.166	5.166
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		M	5,10	5,10
		8	Panjang jalan yang dipelihara		Km	72,031426	72,031426
		9	Panjang jembatan yang dipelihara		M	37	37
<b>Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli</b>							
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		Orang	40	40



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		Orang	40	40
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		Orang	40	40
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		Ada/tidak	Ada	Ada
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		Ada/tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		Ada/tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada/tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Ada/tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi kabupaten/kota		Ada/tidak	Ada	Ada
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		Ada/tidak	Ada	Ada



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Ada/tidak	Ada	Ada
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Ada/tidak	Ada	Ada
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		Ada/tidak	Ada	Ada
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Ada/tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasannya		Ada/tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		Badan Usaha	0	0
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		Badan Usaha	0	0
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		Badan Usaha	0	0
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		Badan Usaha	101	101



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Izin	0	0
		23	Jumlah pengawasan Terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasannya		Pengawasan	0	0
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Kecelakaan Konstruksi	0	0
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	0	0
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota					
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Unit	0	0
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Unit	90	90
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Orang	90	90
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	78	78
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Unit	11	11
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	0	0
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		Unit	0	0
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Orang	90	90
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Ha	0	0



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota					
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	0	0
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	0	0
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	0	0
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	0	0
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	0	0
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Ha	0	0
		Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani					
		1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		Ha	21,61	21,61
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	0	0
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Ha	0	0
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					
		1	Jumlah rumah di kab/kota		Rumah	247.852	247.852
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH		Rumah	2.014	2.014
		3	Jumlah rumah tidak layak huni		Rumah	7.535	7.535
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni		Rumah	0	0
		5	Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}} \times 100\%$	%	$\frac{338.871}{247.852} \times 100\%$	136,72%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
		6	Jumlah rumah pembangunan baru		Rumah	470	470	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)						
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Rumah	75	75	
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah	6.102	6.102	
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		Rumah	6.102	6.102	
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		Rumah	6.102	6.102	
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumahan	75	75	
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Rumah	6.102	6.102	
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Rumah	0	0	
		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi		Rumah	0	0	
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		Rumah	0	0	
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan						
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		Jumlah	31	31	
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Orang	5.816	5.816	
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Jumlah	7	7	
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Orang	7	7	
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		Ada/tidak	Ada (1)	Ada (1)	
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		Ada/tidak	Ada (293)	Ada (293)	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					
			1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ----- x 100% Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	0 ----- x 100% 67.212	0%
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekejaan dikumen yang disusun ----- x 100% Jumlah suatu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan	%	0 --- x 100% 0	0%
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan	%	0 --- x 100% 0	0%
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dengan warga Negara yang ikut pelatihan ----- x 100% Jumlah aparatur dengan warga Negara di kawasan rawan bencana	%	0 ----- x 100% 70.051	0%
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	%	0 ----- x 100% 67.212	0%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan Pusdalops ----- x 100% Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	%	525 ----- x 100% 67.212	0,78%
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	%	525 ----- x 100% 67.212	0,78%
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ----- x 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB	%	2 --- x 100% 2	100%
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana ----- x 100% Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	%	2 ---- x 100% 2	100%
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ----- x 100% Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	%	97 ---- x 100% 97	100%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ----- x 100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	%	765 ----- x 100% 765	100 %
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota		Layanan	188	188
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Pos	3	3
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Orang	14	14
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Pos	3	3
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarpras	293	293
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Orang	2	2
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		Orang	85	85
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		Kegiatan	2	2



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD			
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA		
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti							
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki			4	4		
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM			9.999	9.999		
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk			0	0		
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau			1.302	1.302		
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki			3	3		
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi			872	872		
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar			1	1		
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang			75	75		
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu			91	91		
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter			212	212		
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia			7	7		
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			75	75		
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah			0	0		
14	Jumlah pekerja social professional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan			55	55				



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social			1.302	1.302
		16	Jumlah bimbingan social yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat			1.275	1.275
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			17	17
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar			1.302	1.302
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga			75	75
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga			75	75
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			16	16
<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab</b>							
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		Orang	1.518	1.518
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Orang	0	0
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Penampungan	0	0
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Paket	24	24
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Orang	1.518	1.518



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		6	Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social yang tersedia		Orang	74	74
7	Tenaga Kerja	Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja					
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota		Ada/Tidak	Ada	Ada
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Realisasi indikator ----- x 100% Realisasi	%	$\frac{(420,93-393,5)}{420,93} \times 100\%$	6,25%
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		Perusahaan	0	0
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi					
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n ----- x 100% Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	%	$\frac{5}{8} \times 100\%$	62,50 %
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n ----- x 100% Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	%	$\frac{18}{18} \times 100\%$	100%
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n ----- Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	%	$\frac{18}{440} \times 100\%$	4,09%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n ----- x 100% Jumlah seluruh LPK pada tahun n	%	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100%
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n ----- x 100% Jumlah LPK yang terdata pada tahun n	%	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100%
		6	Jumlah penganggur yang dilatih		Orang	440	440
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n ----- x 100% Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	%	$\frac{440}{440} \times 100\%$	100%
		8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n ----- x 100% Jumlah lulusan pada tahun n	%	$\frac{65}{440} \times 100\%$	14,77%
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pelatihan pada tahun n ----- x 100% Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	%	$\frac{64}{440} \times 100\%$	14,55%
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\Sigma \text{CPMI dilatih}}{\Sigma \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{50} \times 100\%$	0%
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		Pelatihan	0	0



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>							
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n ----- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	%	$\frac{0}{435} \times 100\%$	0%
		2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).		(-10,3)%	(-10,3)%
<b>Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>							
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n ----- x 100% Jumlah perusahaan yang memiliki tenaker 10 orang atau lebih	%	$\frac{103}{283} \times 100\%$	36,40%
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n ----- x 100% Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB	%	$\frac{24}{103} \times 100\%$	23,30%
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		SP/SB	52	52
		4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah ----- x 100% Jumlah perusahaan yang	%	$\frac{41}{103} \times 100\%$	39,81%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
				sudah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)			
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan ----- x 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	%	$\frac{398}{435} \times 100\%$	91,49%
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih ----- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	%	$\frac{5}{435} \times 100\%$	1,15%
		7	Jumlah mogok kerja		mogok	2 perusahaan 10.476 orang	2 perusahaan 10.476 orang
		8	Jumlah penutupan perusahaan		Perusahaan	0	0
		9	Jumlah perselisihan kepentingan		perselisihan	0	0
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		perselisihan	0	0
		11	Jumlah perselisihan PHK		perselisihan	4	4
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		Orang	4	4
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		perselisihan	0	0
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	<i>Ada/tidak</i>	<i>Ada/tidak</i>	Ada	Ada
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Bersama ----- x 100% Jumlah kasus perselisihan	%	$\frac{5}{5} \times 100\%$	100%
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab							
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		Lowongan kerja	8.023	8.023
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		Orang	14.560	14.560



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		BKK	25	25
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		Orang	36.149	36.149
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Orang	2	2
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja local dalam satu wilayah kab/kota		Lembaga	0	0
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota		Perjanjian	117	117
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		Orang	6.631	6.631
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum \text{CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	Orang	$\frac{0}{50} \times 100\%$	0%
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Orang	50	50
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\sum \text{fasilitas PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\sum \text{PMI}/\sum \text{TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\sum \text{PMI}/\sum \text{TKI}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{50} \times 100\%$	0%
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\sum \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI atau TKU purna dan keluarganya}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD					
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		Lembaga	28	28
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		program/kegiatan	28	28
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota					
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		media massa	1	1
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		lembaga	1	1
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi}} \times 100\%$	%	$\frac{33}{33} \times 100\%$	100%
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		lembaga	1	1
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		lembaga	32	32
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak					
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		organisasi	7	7
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		Orang	51	51
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		lembaga	1	1



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		lembaga	1	1
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		kebijakan/program	4	4
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi		lembaga	1	1
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan ----- x 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	%	$\frac{11}{11} \times 100\%$	100 %
9	Pangan	Persentase Cadangan Pangan					
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		Ada/Tidak	Ada	Ada
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		Ada/Tidak	Ada	Ada
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal		Ada/Tidak	Ada	Ada
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang		Ada/Tidak	Ada	Ada
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan		Ada/Tidak	Ada	Ada
		6	Tertanganinya kerawanan pangan		Ada/Tidak	Ada	Ada
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		Ada/Tidak	Ada	Ada
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		Ada/Tidak	Ada	Ada



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan						
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) ----- x 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0 %	
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah penerbitan SK penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee ----- x 100% Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan Landreform	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0 %	
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee ----- x 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0 %	



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
		4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak ----- x 100% Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	%	0 --- x 100% 0	0 %	
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi embangunan fisik ----- x 100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi embangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	%	0 --- x 100% 0	0 %	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kota						
		1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)			IKA = 54,40 IKU = 86,44 IKTL = 73,94	IKA = 54,40 IKU = 86,44 IKTL = 73,94	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kota						
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota				Ada	Ada
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab						
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Kab ----- x 100% Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	%	182 ----- x 100% 182	100%	



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada ----- x 100% Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Kab	%	5 ---- x 100% 182	2,75%
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Jumlah MHA yang diakui ----- x 100% Jumlah usulan MHA	%	0 --- x 100% 0	0 %
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- x 100% Jumlah MHA yang ada	%	0 --- x 100% 0	0 %
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana ----- x 100% target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	%	0 --- x 100% 0	0 %
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerahkabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani ----- x 100% Total mumlah pengaduanmasyarakat yang terintegrasi	%	4 --- x 100% 4	100%
		<b>Perekaman KTP Elektronik</b>					
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa pekawinan yang dilaporkan	%	442 ----- x 100% 443	99,77%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD			
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA		
		2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa perceraian yang dilaporkan	%	63 ---- x 100% 63	100%		
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa kematian yang dilaporkan	%	26.113 ----- x 100% 26.113	100%		
		4	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam satu tahun ----- x 100% 2 tahun	%	0 ---- x 100% 0	0%		
<b>Persentase Pengentasan Desa Tertinggal</b>									
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		desa	2	2		
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		desa	0	0		
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		lembaga	2	2		
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		desa	0	0		
		<b>Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri</b>							
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		desa	24	24		
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		desa	2	2		



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		lembaga	27	27
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		desa	37	37
TFR							
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	<i>Ada/tidak</i>	Ada/tidak	Tidak ada (0)	Tidak ada (0)
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		Nilai tengah	20,6	20,6
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i f} \times k$		2.063,5	2.063,5
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) ----- x 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	$\frac{285.800}{987.328} \times 100\%$	28,95%
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		stakeholders	7.243	7.243
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)							
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP ----- x 100% Jumlah faskes	%	$\frac{51}{51} \times 100\%$	100%
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif ----- x 100% Jumlah PUS	%	$\frac{147.577}{42.685} \times 100\%$	345,74%
		3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif			36	36



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern ----- x 100% Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	%	445 ----- x 100% 2.258	19,71%
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)							
		1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	%	72,95%	72,95%
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI ----- x 100% Jumlah keluarga PBI	%	0 ---- x 100% 0	0%
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kab					
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan type C yang tersedia ----- x 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	%	4 --- x 100% 4	100%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun ----- x 100% Jumlah kendaraan wajib uji	%	8.246 ----- x 100% 9.476	87,02%	
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan ----- x 100% Jumlah lintas peyeberangan dalam Kab	%	0 --- x 100% 0	0%	
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kab ----- x 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kab	%	2.949 ----- x 100% 2.298	128,33%	
		V/C Ratio di Jalan kab						
		1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kab ----- x 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan kab	%	2.949 ----- x 100% 2.298	128,33%	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo						
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	%	46 ----- x 100% 46	100%	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	%	46 ----- x 100% 46	100%	



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		3	Tersedianya system elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Ada/tidak		
<b>Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi</b>							
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (even) perangkat daerah dan pelayanan public pada Pemda yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi penyelenggara Negara sesuai dg PM Kominfo No 5/2015 ----- x 100% Jumlah kegiatan (even) perangkat daerah dan pelayanan public pada Pemda	%	15 ---- x 100% 42	35,71%
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	%	46 ---- x 100% 46	100%
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ----- x 100%	%	46 ---- x 100% 46	100%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
				Jumlah Perangkat Daerah			
		4	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik ----- x 100% Jumlah layanan	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		5	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik ----- x 100% Jumlah layanan	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		6	Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ----- x 100% Jumlah system elektronik	%	$\frac{7}{7} \times 100\%$	100%
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah ----- x 100% Jumlah layanan public dan layanan administrasi	%	$\frac{15}{42} \times 100\%$	35,71%
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	$\frac{46}{46} \times 100\%$	100%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
				----- x 100% Jumlah perangkat daerah			
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	%	46 ---- x 100% 46	100%
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	%	46 ---- x 100% 46	100%
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai ----- x 100% Jumlah data yang dimiliki Pemda	%	3.174 ----- x 100% 3.174	100%
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	%	46 ---- x 100% 46	100%
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah ASN pengelola TIK	%	0 --- x 100% 6	0%
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi <i>e-government</i>		Ada/tidak	Ada	Ada



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
			Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten				
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{\sum \text{komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemda yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\sum \text{komunitas masyarakat atau mitra komunikasi Pemda}} \times 100\%$	%	$\frac{14}{14} \times 100\%$	100%
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\sum \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\sum \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\sum \text{Desiminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\sum \text{Desiminasi dan layanan informasi publik}} \times 100\%$	%	$\frac{42}{42} \times 100\%$	100%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas							
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang-cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan ----- x 100% Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang-cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	$\frac{120}{245} \times 100\%$	48,98%
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	%	$\frac{140}{239} \times 100\%$	58,58%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	222 ----- x 100% 245	90,61%
		6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ----- x 100% Jumlah anggota koperasi yang ada	%	280 ----- x 100% 54.942	0,51%
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	2 ----- x 100% 245	0,82%
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak perlu diisi	Tidak perlu diisi	7	7
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	77 ----- x 100% 245	31,43%
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	7 ----- x 100% 245	2,86%
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	1 ----- x 100% 245	0,41%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	5 ----- x 100% 245	2,04%
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	4 ---- x 100% 245	1,63%
<b>Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha</b>							
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----- x 100% Jumlah wirausaha yang baru	%	24 ----- x 100% 1.243	1,93%
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam system data online (ods) ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	%	47 ----- x 100% 97.537	0,05%
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	%	41 ----- x 100% 97.537	0,04%
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standarisasi dan sertifikasi produk	%	97 ----- x 100% 97.440	0,1%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	%	264 ----- x 100% 97.273	0,27%
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	%	285 ----- x 100% 97.537	0,29%
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	%	10 ----- x 100% 97.537	0,01%
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kota					
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Ada/tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Ada/tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Jumlah laporan	0	0
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		Jumlah kegiatan	0	0
		5	Kegiatan pameran penanaman modal		Jumlah kegiatan	0	0
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		Jumlah kegiatan	0	0
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah konsultasi	5.686	5.686
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah perizinan dan non perizinan	5.686	5.686
		9	Laporan realisasi penanaman modal		Jumlah realisasi	1.462.142.613.812	1.462.142.613.812



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		10	Pembinaan aparaturnya penanaman modal tingkat kabupaten/kota		Jumlah aparaturnya	29	29
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		Jumlah perusahaan	670	670
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota		Ada/tidak	Ada	Ada
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri					
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Orang	15	15
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		orang	15	15
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan					
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepelopor pemuda		Orang	140	140
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Orang	0	0
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		Orang	67	67
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		Event	4	4
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
		1	Tersedianya buku profil daerah		Ada/tidak	Ada	Ada
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah survey	2.431	2.431
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah kompilasi	2.431	2.431
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Jumlah survey	2.431	2.431
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Jumlah kompilasi	2.431	2.431



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral ----- x 100% Jumlah kegiatan statistik sektoral	%	131 ----- x 100% 2.431	5,39%
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral ----- x 100% Jumlah indikator statistik sektoral	%	131 ----- x 100% 131	100%
		Tingkat keamanan informasi pemerintah					
21	Persandian	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan ----- x 100% Jumlah kegiatan strategis yang ada	%	0 ----- x 100% 0	0%
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektrnik atau aplikasi penyandian ----- x 100% Jumlah SE yang ada	%	7 ----- x 100% 7	100%
		3	Persentase system elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ----- x 100% Jumlah SE yang ada	%	7 ----- x 100% 7	100%
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan ----- x 100% Jumlah titik pada PHKS	%	512 ----- x 100% 544	94,21%
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya					
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		Obyek	6	6
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang		Obyek	6	6



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
			dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)				
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		Obyek	6	6
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		Orang	172	172
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		Cagar Budaya	41	41
		6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		Cagar Budaya	288	288
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data		Cagar Budaya	0	0
		8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		Cagar Budaya	11	11
		9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Cagar Budaya	288	288
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Koleksi	1.504	1.504
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum		Orang	2.199	2.199
			Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.		Orang	2.199	2.199
		12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			Tidak perlu diisi	Tidak perlu diisi
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		Tim	1	1
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi		Tim	1	1
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		Tim	1	1



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
		16	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman		Orang	7	7	
		17	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman		Orang	NA	NA	
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		Unit	12	12	
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		Kegiatan	3	3	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat						
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dlm eksemplar) ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	%	$\frac{438.702}{1.021.920} \times 100\%$	42,93%	
		2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	%	$\frac{42.061}{1.021.920} \times 100\%$	4,12%	
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	%	$\frac{502}{1.021.920} \times 100\%$	0,05%	
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ----- x 100%	%	$\frac{33}{1.025} \times 100\%$	3,22%	



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
				Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya			
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		orang	64.868	64.868
<b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>							
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya		naskah kuno	0	0
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		naskah kuno	0	0
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		budaya etnis	0	0
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- x 100% Jumlah seluruh arsip aktif	%	$\frac{2.794}{10.000} \times 100\%$	27,94%
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- x 100% Jumlah seluruh arsip inaktif	%	$\frac{11.057}{10.000} \times 100\%$	110,57%
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ----- x 100% Jumlah seluruh arsip statis	%	$\frac{4.313}{13.686} \times 100\%$	31,51%
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN ----- x	%	$\frac{170}{3.000} \times 100\%$	5,67%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
				100% Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan			
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Jumlah arsip	416	416
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Jumlah arsip	23	23
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi		Jumlah arsip	491	491
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK		Jumlah arsip	4.747	4.747
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		Jumlah arsip	11.057	11.057
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK		Jumlah arsip	0	0



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
<b>URUSAN PILIHAN</b>							
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kota/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)					
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)			Tidak Ada	Tidak Ada
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota}} \times 100\%$	%	0	0
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota yang diterbitkan		izin	0	0
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		Pembudidaya	160	160
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		Benih	280.015.000	280.015.000
2	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan					
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi			52	52
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			661	661
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota		TDUP	0	0
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		Orang	0	0
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Kegiatan	6	6
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota		Orang	0	0
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		Industri	10	10



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$	%	$\frac{78}{562} \times 100\%$	13,88%
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sector kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$	%	$\frac{119}{120} \times 100\%$	99,17%
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Lokasi		
3	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun					
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		Unit	94	94
		2	Prasaran pertanian yang digunakan			94	94
		3	Penerbitan izin usaha pertanian		Dokumen		
		4	Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$	%	$\frac{94}{94} \times 100\%$	100%
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	%	$\frac{14}{14} \times 100\%$	100%
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular					
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$	%	$\frac{77}{84} \times 100\%$	91,67%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
4	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	Dokumen	0	0
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi		0	0
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi		0	0
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun		0	0
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota					
			Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		Ada/tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan $\leq$ 5 hari kerja ----- x 100% Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar  Jumlah izin took swalayan yang diterbitkan $\leq$ 5 hari kerja ----- x 100% 100% Jumlah permohonan izin	%	17 --- x 100% 17  17 ---- x 100% 17	100%   100%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
				took swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar			
		2	Persentase penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100\%$	%	$\frac{1}{47} \times 100\%$	2,13%
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab Kota}} \times 100\%$	%	$\frac{1}{47} \times 100\%$	2,13%
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit} \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$ <p>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri :</p>	%	$\frac{17}{17} \times 100\%$	100%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
				<p>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100%</p> <p>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</p> <p>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri :</p> <p>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100%</p> <p>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</p>	%	<p>17 ---- x 100% 17</p> <p>0 ---- x 100% 0</p>	<p>100%</p> <p>0%</p>



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota ----- x 100% Jml permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	%	0 ---- x 100% 0	0%
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1x24 jam) ----- x 100% Jumlah permohonan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	%	0 ---- x 100% 0	0%
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ $K =$ Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a=Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b=sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	%	$a = \frac{22}{22} \times 100\% \times 0,5$ $= 50\%$ $b = \frac{22}{22} \times 100\% \times 0,5$ $= 50\%$ $a + b = 50\% + 50\%$ $= 100\%$	100%
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	%	0	0



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		Persentase kinerja realisasi pupuk					
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$	%	$\frac{19.018.023}{48.332.370} \times 100\%$	39,35%
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku					
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan $\frac{\text{---}}{30.004} \times 100\%$ Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wil Kab	%	$\frac{5.132}{30.004} \times 100\%$	17,10%
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku $\frac{\text{---}}{0} \times 100\%$ Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
7	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota					
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan $\frac{\text{---}}{0} \times 100\%$ Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP					
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		%	50%	50%
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan $\frac{\text{---}}{3.226} \times 100\%$ Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		$\frac{3.226}{3.226} \times 100\%$	100%



No	URUSAN	NO IKK	IKK OUTPUT	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	%	0 --- x 100% 0	0%
			Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
		1	Persentase data perusahaan industry kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industry kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industry kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SIINas ----- x 100% Total populasi perusahaan industry kecil, menengah di Kabupaten/Kota	%	57 ----- x 100% 43.698	0,13%
8	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya		Kawasan	0	0
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		Permukiman	0	0
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina		Permukiman	0	0



### 2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi :

#### 1. Perencanaan dan Keuangan

- a. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan dengan jumlah Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan sebesar Rp.183.652.995.606,-, dan jumlah APBD TA 2021 sebesar Rp.2.147.958.138.000,-, sehingga tingkat capaiannya sebesar 8,56%.
- b. Rasio PAD dengan jumlah PAD sebesar Rp.378.046.301.170,39 dan jumlah PDRB non migas sebesar Rp. 25.174.300.000.000,-, sehingga tingkat capaiannya sebesar 1,50%.
- c. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP tercapai Level 3.
- d. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP tercapai Level 3.
- e. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures) dengan jumlah belanja urusan pemerintahan sebesar Rp.1.606.742.472.640,39 dikurangi Transfer Expenditures sebesar Rp.393.326.636.152,00, dan jumlah belanja APBD sebesar Rp. 2.000.069.108.792,39, sehingga tingkat capaiannya sebesar 60,67%.
- f. Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir) :
  - 2011 : Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
  - 2012 : Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
  - 2013 : Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
  - 2014 : Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
  - 2015 : Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
  - 2016 : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  - 2017 : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  - 2018 : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  - 2019 : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  - 2020 : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

#### 2. Pengadaan

- a. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama dengan jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama sebanyak 0 kontrak, dan jumlah kontrak keseluruhan



tahun 2021 sebesar Rp. 226.019.866.755,-, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%.

- b. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dengan jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sebesar Rp.456.677.101.477,-, dan jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif sebesar Rp.226.019.866.755,-. sehingga tingkat capaiannya sebesar 202,05%.
- c. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan sebesar Rp.571.373.021.706,-, dan total belanja langsung sebesar Rp.682.696.968.232,-, sehingga tingkat capaiannya sebesar 83,69%.

### 3. Kepegawaian

- a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas sebanyak 6.052 PNS, dan jumlah total PNS sebanyak 6.995 PNS, sehingga tingkat capaiannya sebesar 86,52%.
- b. Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 399 PNS, dan seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 2.114 PNS, sehingga tingkat capaiannya sebesar 18,87%.
- c. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 399 PNS, dan seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 399 PNS, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.

### 4. Manajemen Keuangan

- a. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dengan nilai absolut dari total belanja dalam realisasi sebesar Rp.2.000.069.108.792,39, dan total belanja APBD sebesar Rp.2.147.958.138.000,00, sehingga tingkat capaiannya sebesar 93,11%.
- b. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran dalam APBD dengan nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi sebesar Rp.378.046.301.170,39, dan total PAD dalam APBD sebesar Rp.289.814.522.000,00, sehingga tingkat capaiannya sebesar 130,44%.



- c. Management Aset, meliputi :
    - Apakah ada daftar aset tetap? Ya
    - Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? Ya
    - Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? Ya
    - Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? Ya
  - d. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya dengan realisasi SILPA tahun 2021 sebesar Rp.222.497.021.458,- dan total belanja anggaran tahun 2020 sebesar Rp.2.010.965.128.000,-, sehingga tingkat capaiannya sebesar 11,06%.
5. Transparansi dan Partisipasi Publik
- a. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan yaitu realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda sebesar Rp.1.508.523.942.599,39, dan daftar belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda sebesar Rp.1.580.592.911.423,00, sehingga tingkat capaiannya sebesar 95,44%.
  - b. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah dengan jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda sebanyak 6 dokumen, dan total jumlah dokumen yang telah dirinci sebanyak 6 dokumen, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.

Data capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 2.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
1	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD TA 2021}} \times 100\%$	%	$\frac{183.652.995.606}{2.147.958.138.000} \times 100\%$	8,55%
		2	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB non migas}} \times 100\%$	%	$\frac{378.046.301.170,39}{25.174.300.000.000} \times 100\%$	1,50%
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	Level 3	Level 3
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	Level 3	Level 3
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan} - \text{Transfer Expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	%	$\frac{1.606.742.472.640,39 - 393.326.636.152,00}{2.000.069.108.792,39} \times 100\%$	60,67%
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)		2011 : WDP 2012 : WDP 2013 : WDP 2014 : WDP 2015 : WDP 2016 : WTP 2017 : WTP 2018 : WTP 2019 : WTP 2020 : WTP	2011 : WDP 2012 : WDP 2013 : WDP 2014 : WDP 2015 : WDP 2016 : WTP 2017 : WTP 2018 : WTP 2019 : WTP 2020 : WTP
2	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2021}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{226.019.866.755} \times 100\%$	0%



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
			ditandatangani pada kuartal pertama				
		2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif -----X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	%	456.677.101.477 ----- x 100% 226.019.866.755	202,05%
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- X 100% Total belanja langsung		571.373.021.706 ----- x 100% 682.696.968.232	83,69%
3	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas ----- x 100% Jumlah total PNS	%	6.052 ----- x 100% 6.995	86,52%
		2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- X 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	399 ----- x 100% 2.114	18,87%
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	399 ----- x 100% 399	100%
4	Manajemen Keuangan	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- x 100% Total belanja APBD	%	2.000.069.108.792,39 ----- x 100% 2.147.958.138.000,00	93,11%



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran dalam APBD	$\frac{\text{Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \times 100\%$	%	$\frac{378.046.301.170,39}{289.814.522.000,00} \times 100\%$	130,44%
		3	Management Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak).		1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya
		4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{\text{Realisasi SILPA tahun 2021}}{\text{Total belanja anggaran tahun 2020}} \times 100\%$	%	$\frac{222.497.021.458}{2.010.965.128.000} \times 100\%$	11,06%
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Total}} \times 100\%$ Daftar belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	%	$\frac{1.508.523.942.599,39}{1.580.592.911.423,00} \times 100\%$	95,44%
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda $\frac{\text{Jumlah dokumen}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$	%	$\frac{6}{6} \times 100\%$	100%



### 2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja, selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Akuntabilitas Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Adapun informasi capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### A. Target Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja dan pengukuran capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Target Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5
<b>MISI 1 MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF,</b>				



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5
<b>INOVATIF, BERSIH, AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT</b>				
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64	Belum Release	-
- Opini Audit Keuangan BPK	Opini	WTP	Belum Release	-
- Kategori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Kategori	B 65	Belum Release	-
- Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,0400	3,0375	99,92
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks	81	84,14	103,87
- Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	85,6 Menuju Informatif	83,96 Menuju Informatif	98,08
- Indeks SPBE	Indeks	2,8	2,23	79,64
- Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78	Belum Release	-
<b>MISI 2 MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEHADIRAT ALLAH SWT/TUHAN YME, SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA RASA AMAN DAN TENTERAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA</b>				
Persentase penurunan konflik dan SARA	Persen	14,29	50	57,14
- Angka Pelanggaran Ketertiban Umum per 10.000 penduduk	Angka Per 10.000	29,80	71,49	41,68
- Angka Kriminalitas	Angka Per 10.000	2	1,4	142,85
- Indeks Toleransi	Angka	3	2,3	76,67
- Indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Persen	70	66,7	95,29
- Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilukada, Pemilu, Pilpres)	Persen	-	-	-
<b>MISI 3 MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT</b>				



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5
<b>UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK</b>				
Angka Kemiskinan	Persen	14-16	16,24	86,20
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka/ Nilai	87,1	80,3	92,19
- Persentase Rumah Layak Huni	Persen	95,5	96,96	100,47
<b>MISI 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT</b>				
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	>69	69,15	100,22
- Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,92	7,25	91,54
- Usia Harapan Hidup	Tahun	73,3	73,21	98,88
- Cakupan Keluarga Sejahtera	Persen	80	83,02	103,77
<b>MISI 5 MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA DALAM INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDISIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA</b>				
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5-6	3,19	-
- Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	>4	6,05	48,75
- Realisasi Nilai Investasi Baru	Rp.Juta	670.000	1.462.143	218,23
- Pendapatan Daerah dari sektor pariwisata	Rupiah	51.065.238.000	11.179.948.000	21,89
- PDRB Per kapita	Rp. juta	27.500	27.000	98,18
- Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	Rp. miliar	7.108,382	7.052	95,10
- Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	Rp. miliar	8.026,144	6.380,750	79,50
<b>MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH</b>				



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5
<b>DESA, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				
Indeks Daya Saing Infrastruktur	Nilai	77,6	81,88	105,52
Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,6770	0,6919	102,20
Desa Swasembada	Desa	9 desa	25 desa	277,78
<b>MISI 7 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH/INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN</b>				
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,5	71,66	107,75

#### **B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya dan Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah**

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :



**Tabel 2.6**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

**MISI 1 :**  
**" MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, INOVATIF, BERSIH, AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT "**

**TUJUAN MISI 1 :**  
**TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT)**

Hasil evaluasi pada tujuan strategis "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*good governance and clean government*)" mendapatkan nilai rata-rata -% dengan kategori - Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Government)**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	NA	53,29	60,67	64,09	64,88	64	Belum realisasi	-

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga tahun 2021 masih dalam proses penilaian di Kementerian PAN dan RB.



Adapun capaian kinerja tahun 2020 dapat diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.8**  
**Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi**

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	11,92
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,27
	III. Reform	30,00	14,74
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,93
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,31
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,78
3.	Pelayanan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,05
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,61
	Total Komponen Hasil	40	32,95
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	64,88

Sumber : Kemenpan dan RB, 2020

Berdasarkan hasil evaluasi Refomasi Birokrasi Tahun 2020, beberapa hal yang masih harus diperhatikan yang masih menghambat kemajuan program Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga yaitu :

1. Kualitas penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah sudah berjalan cukup baik, namun penerapan pada perangkat daerah belum merata, sehingga belum mampu memberikan dampak perubahan yang signifikan;
2. Agen perubahan yang dibentuk baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah belum memiliki rencana aksi perubahan yang konkrit dan inovatif, sehingga belum mampu menunjukkan hasil nyata dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi;
3. Belum seluruh peraturan perundang-uandangan yang tidak harmonis/ sinkron teridentifikasi dan dipetakan dengan baik, sehingga belum dapat dipastikan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga harmonis dengan kebijakan lain;
4. Tindak Lanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor



- 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan secara menyeluruh;
5. Peta Proses Bisnis belum menggambarkan hubungan kinerja antara Perangkat Daerah hingga level terendah, sehingga belum terlihat keterkaitan kinerja yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi;
  6. Penerapan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya optimal, seperti belum adanya Grand Design pengembangan SPBE dan beberapa aplikasi manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/ stakeholder yang belum terintegrasi;
  7. Penguatan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/ suksesi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP) yang belum dilakukan secara menyeluruh;
  8. Indikator kinerja individu sebagai turunan dari kinerja organisasi di atasnya belum dijabarkan dengan optimal, sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai indikator capaian kinerja pegawai dan sasaran kinerja pegawai (SKP);
  9. Penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum berjalan secara efektif pada perangkat daerah;
  10. Implementasi pelayanan publik khususnya di perangkat daerah belum sepenuhnya optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya perangkat daerah yang belum menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dan menerapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

Apabila dibandingkan dengan nilai capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten/Kota se – Karesidenan Banyumas dapat disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.9**  
**Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi se – Eks Karesidenan**

NO	INSTANSI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI			
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	76,53	74,75	76,99	<b>77,05</b>



NO	INSTANSI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI			
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
2	Pemerintah Kabupaten Banyumas	63,79	66,68	68.76	69,07
3	Pemerintah Kabupaten Cilacap	Na	65,11	67.69	68,28
4	<b>Pemerintah Kabupaten Purbalingga</b>	<b>53,29</b>	<b>60,67</b>	<b>64,09</b>	<b>64,88</b>
5	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	59,70	60,96	62.54	63,01

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Berdasarkan perbandingan nilai tersebut, maka capaian kinerja reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 ada peningkatan yang cukup baik, karena menduduki peringkat ketiga di antara Kabupaten se – Eks Karesidenan Banyumas. Mendasari hasil evaluasi tersebut, beberapa upaya pada tahun 2021 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka meningkatkan implementasi reformasi birokrasi, antara lain :

1. Mendorong implementasi Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga dengan membangun website <https://wbs.purbalinggakab.go.id/> serta melaksanakan sosialisasi kepada ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga secara berkala serta melaksanakan pengendalian Gratifikasi dengan peran sebagai Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Purbalingga;
2. Mendorong implentasi SPIP serta memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan manajemen risiko oleh seluruh jajaran birokrasi dilingkungan Pemkab Purbalingga, dimana telah dipertegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 telah menetapkan Persentase Instansi Pemerintah baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan. Disamping itu, Inspektorat Daerah mendorong tersusunya Kebijakan Manajemen Resiko tingkat Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta menetapkan Personil Pengelolaan Resiko Strategis Tingkat Pemda, Pengelolaan Resiko Strategis OPD dan Pengelolaan Resiko Operasional Tingkat OPD;
3. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat khususnya



terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi serta berkoordinasi secara intensif dengan APH terkait penanganan pengaduan masyarakat yang menyebabkan adanya Kerugian Negara / Daerah;

4. Mendorong pembangunan unit Zona Integritas di lingkungan Pemkab Purbalingga, serta mendorong perangkat daerah untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM;
5. Mendorong kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dalam bentuk Audit Operasional, Audit Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Aset, Reviu maupun pengawasan lainnya;
6. Mendorong efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing masing Perangkat Daerah melalui kegiatan consulting dan Probit Audit dimana didalamnya bertujuan untuk menjamin pengelolaan keuangan perangkat daerah lebih akuntabel yang diharapkan dapat berdampak pada menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan pada perangkat Daerah;
7. Tahun 2022, sebagai implementasi Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Daerah akan melakukan pembinaan, pendampingan serta pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKASN serta mendorong tingkat kepatuhan atas penyampaian LHKASN bagi Wajib Laport di lingkungan Pemkab Purbalingga.

Dalam rangka mendukung capaian kinerja tujuan didukung oleh capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

**SASARAN 1 :**  
**TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Hasil evaluasi pada sasaran strategis “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel” mendapatkan nilai rata-rata - % dengan kategori - . Adapun capaian indikator diuraikan pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 2.10**  
**Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset**  
**Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022
Opini Audit Keuangan BPK	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Dalam proses	Dalam Proses	WTP

Laporan Keuangan Daerah (LKD) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 masih dalam proses audit oleh auditor eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga belum dapat diketahui hasil capaiannya.

Sesuai dengan pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga hambatan yang dialami untuk mengukur capaian indikator kinerja ini antara lain BPK dalam mengaudit keuangan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir belum dapat ditentukan hasil opini laporan keuangan.

Selanjutnya untuk Penilaian atas LKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : 57A/LHP/XVIII.SMG/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian Tahun 2020 telah sesuai dengan target kinerja pada Tahun 2020.

Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah dicapai selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Adapun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se-Jawa Tengah, maka dapat disajikan LHP LKPD se-Jawa Tengah sebagai berikut :



**Tabel 2.11**  
**Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

NO.	ENTITAS	OPINI					
		TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
1	Prov Jawa Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
2	Kab Banjarnegara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
3	Kab Banyumas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
4	Kab Batang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
5	Kab Blora	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
6	Kab Boyolali	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
7	Kab Brebes	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
8	Kab Cilacap	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
9	Kab Demak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
10	Kab Grobogan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
11	Kab Jepara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
12	Kab Karanganyar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
13	Kab Kebumen	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
14	Kab Kendal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
15	Kab Klaten	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
16	Kab Kudus	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
17	Kab Magelang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
18	Kab Pati	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
19	Kab Pekalongan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
20	Kab Pemasang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
<b>21</b>	<b>Kab Purbalingga</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>Proses Peny. LKD</b>
22	Kab Purworejo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
23	Kab Rembang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
24	Kab Semarang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
25	Kab Sragen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
26	Kab Sukoharjo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
27	Kab Tegal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
28	Kab Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
29	Kab Wonogiri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
30	Kab Wonosobo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
31	Kota Magelang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
32	Kota Pekalongan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
33	Kota Salatiga	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
34	Kota Semarang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
35	Kota Surakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD
36	Kota Tegal	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	Proses Peny. LKD

Sumber : BPK Provinsi Jawa Tengah, 2021



Terkait dengan capaian kinerja tersebut, BPK menyajikan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
2. Sedangkan terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, masih ditemukan adanya beberapa kelemahan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, diantaranya :
3. Pengelolaan retribusi sewa tanah yang belum memadai baik dari sisi administrasi maupun penerimaan retribusi;
4. terdapat pertanggungjawaban belanja yang tidak lengkap dan sah serta digunakan bukan untuk kepentingan operasional pemerintah;
5. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum tertib diantaranya masih terdapat tanah Pemda yang belum bersertifikat.

Selanjutnya dalam rangka mendukung capaian kinerja ini, di tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Evaluasi penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2020
  - Evaluasi terhadap proses penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2020 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja masing-masing SKPD dalam menyusun laporan keuangan. Evaluasi dilakukan mulai dari proses rekonsiliasi aset sampai dengan laporan keuangan SKPD dikirimkan kepada Bupati. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada seluruh SKPD sebagai bahan evaluasi internal guna mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2021 agar lebih baik dan tepat waktu.
2. Pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
  - Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Purbalingga, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
  - Demikian juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan



Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, laporan keuangan BOS juga harus dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan BLUD dan BOS dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik, maka di tahun 2021 telah dikembangkan dan diimplementasikan aplikasi pengelolaan keuangan BLUD dan BOS yang digunakan oleh seluruh BLUD dan sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

### 3. Rekonsiliasi keuangan dan rekonsiliasi aset Semester I tahun 2021

- Rekonsiliasi keuangan dan aset semester I merupakan amanat dari Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021. Selain itu, pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dan aset semester I tahun 2021 diharapkan dapat mengurangi beban kerja pada akhir tahun 2021 maupun awal tahun 2022 sehingga proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 diharapkan bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
- Rekonsiliasi keuangan dan aset semester I tahun 2021 diharapkan juga bisa menjadi media deteksi dini untuk pemasalahan yang ada di SKPD sehingga bisa lebih cepat dicarikan solusi terbaik.
- Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan SKPD bagi bendahara pengeluaran dan pengurus barang.
- Tahun 2021 merupakan tahun pertama penerapan regulasi baru di bidang pengelolaan keuangan daerah yaitu PP Nomor 12/2019, Permendagri Nomor 90/2019 Jo Kepmendagri Nomor 050-3708/2020 serta Perda Nomor 14/2020. Dengan terbitnya regulasi baru di bidang pengelolaan keuangan daerah, pengelola keuangan termasuk di dalamnya penyusun laporan keuangan perlu diberikan pemahaman yang memadai agar proses penatausahaan APBD sekaligus pelaporan dan pertanggungjawaban APBD bisa dilaksanakan dengan baik. Salah satu dampak dari terbitnya regulasi tersebut adalah adanya perubahan mekanisme penyusunan laporan keuangan SKPD khususnya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, dan Kecamatan Padamara, dimana SKPD tersebut harus mengkonsolidasikan laporan keuangan



unit SKPD di bawahnya.

- Melalui bimbingan teknis dimaksud, pengelola keuangan dan penyusun laporan keuangan di 6 SKPD tersebut juga dibekali dengan pengetahuan seputar teknik rekonsiliasi keuangan dan aset maupun teknik konsolidasi laporan keuangan unit SKPD
- Kegiatan yang mendukung percepatan penyusunan dan pengiriman LK SKPD 2021, antara lain :
  - Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD

**Gambar 2.1**  
**Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Tahun 2021**



- Rekonsiliasi Keuangan dengan Sub Bidang Akuntansi

**Gambar 2.2**  
**Rekon Keuangan Semester II Tahun 2021**



- Bintek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (LK SKPD),
- Penyempurnaan Buku "Mahir Menyusun Laporan Keuangan SKPD" yang dibagikan kepada seluruh Pengelola Keuangan SKPD untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD.



**Gambar 2.3**  
**Buku Mahir Menyusun Laporan Keuangan SKPD**  
**Untuk Semua Pengelola Keuangan SKPD**



4. Pembenahan pengelolaan Aset Daerah
- Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan pembenahan pengelolaan aset daerah yaitu :
- a. Pembenahan Aset Daerah, antara lain :
- Memastikan bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah teridentifikasi, tercatat dan disajikan dengan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - Pemutakhiran data aset tetap sesuai dengan kondisi terkini, termasuk didalamnya adalah melengkapi dokumen/berkas yang diperlukan terkait dengan proses mutasi aset tetap antar SKPD;
  - Labelisasi aset tetap dan aset ekstrakomptabel;
  - Melengkapi parameter/keterangan/uraian aset tetap pada SIM Aset;
  - Melakukan verifikasi pencatatan aset tetap pada SIM Aset sesuai dengan status kepemilikan termasuk melakukan proses mutasi atas aset-aset tetap yang belum dicatat di SKPD pemilik;
  - Melakukan kapitalisasi terhadap pemeliharaan yang memenuhi kriteria Belanja Modal ke dalam aset induknya;
  - Melakukan mutasi terhadap aset yang rusak berat maupun tidak ada fisiknya ke dalam kelompok aset lain-lain dan melakukan proses penghapusan atas aset tetap dimaksud;
  - Melakukan penghapusbukuan terhadap aset lain-lain setiap tahun.
- b. Pembenahan Pengelolaan Persediaan, antara lain :
- Pembenahan Pengelolaan Persediaan Obat pada



Puskesmas.

- Puskesmas harus melakukan penatausahaan terhadap persediaan yang berasal dari dropping Dinas Kesehatan maupun dari Instansi lainnya, terutama terkait dengan dokumen serah terima barang.
  - Pembenahan Pengelolaan dan pencatatan persediaan secara keseluruhan untuk menghasilkan data persediaan yang akurat yang bisa dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi penatausahaan persediaan.
  - Pengungkapan persediaan obat yang sudah kedaluarsa dalam Catatan atas laporan Keuangan.
- c. Pembenahan Realisasi Belanja
- Pemilikan rekening Belanja Modal harus sesuai dengan rencana pengadaan aset tetap.
  - Realisasi Belanja Modal harus sesuai dengan rekening yang sudah ditetapkan dalam APBD. Hal ini untuk memudahkan dalam proses pencatatan aset dalam aplikasi SIMDA Keuangan.
  - Anggaran Belanja Barang dan Jasa tidak boleh digunakan untuk pembelian aset tetap dan sebaliknya, anggaran Belanja Modal tidak boleh digunakan untuk pembelian barang/jasa.
  - Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi harus dianggarkan dalam kelompok Belanja Modal dan realisasi belanjanya harus dikapitalisasikan (ditambahkan) ke dalam aset induknya.
- d. Pembenahan Pengelolaan Belanja
- Semua proses pertanggungjawaban keuangan agar sudah selesai paling lambat tanggal 31 Desember, baik pencairan yang melalui mekanisme LS maupun Non LS, sehingga segera setelah tahun anggaran berakhir, bisa segera diperoleh angka Laporan Realisasi Anggaran yang riil.
  - Untuk belanja BOS dan BLUD, pengesahan pendapatan dan belanja juga harus diselesaikan selambat-lambatnya minggu pertama tahun anggaran berikutnya.
- e. Pengamanan Aset
- Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan pengamanan aset tanah dengan melakukan pensertipikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara bertahap.
  - Menghimpun BPKB kendaraan dinas Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Badan Keuangan Daerah.



- Mengasuransikan aset milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga berupa Pasar Segamas dan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat).
- f. Pemanfaatan Aset  
Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan pemutakhiran dokumen-dokumen penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dimanfaatkan pihak lain dengan cara Pinjam Pakai, Pengoperasian Pihak Lain.
- g. Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan penghapusan terhadap aset lain-lain pada Laporan Keuangan Daerah tahun 2020 yang telah divalidasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/370 Tahun 2021 tentang Penghapusan Aset Lain-Lain Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga LKD Tahun 2020 Pada Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata, Puskesmas, SMP, dan Korwilcam Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

Adapun kegiatan strategis yang dilakukan untuk mendukung pengelolaan Aset Daerah antara lain :

- a. Rekonsiliasi Aset oleh semua Pengurus Barang dengan Bidang Akutansi dan Aset;
- b. Pembinaan rutin Pengurus Barang terkait Aplikasi SIM Aset;
- c. Bintek aplikasi SIM ASET 90, dengan peserta dari 151 Pengurus Barang;

**Gambar 2.4**  
**Bimbingan Teknis Aplikasi SIM Aset sesuai dengan Permendagri 108 Tahun 2016**



- d. Khusus untuk SKPD yang memiliki Sub SKPD, pada tahun 2021 sudah melakukan langkah strategis dalam rangka percepatan dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Aset dengan membentuk tim Verifiakator Laporan BMD yang bertugas membantu pelaksanaan rekonsiliasi aset internal SKPD.
- e. Validasi aset lain-lain LKD Tahun 2021 di SKPD se Kabupaten Purbalingga.
- f. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)  
Pemerintah Kabupaten Purbalingga berusaha untuk menerbitkan Standar harga satuan regional yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD secara tepat waktu. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020. SSH merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. Dalam rangka percepatan penyusunan SSH, Pemerintah Kabupaten Purbalinga bekerjasama dengan Direktorat Penelitian Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kerjasama kemitraan ini mulai dilaksanakan pada tahun 2021 untuk penyusunan SSH tahun 2022. Produk yang dihasilkan, selain Buku Perbup SSH Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga juga disertai dengan SIM SSH. Dimana seluruh standard harga barang yang tertuang dalam buku Perbup bisa dengan mudah dicari lewat aplikasi berbasis Web tersebut. Setiap SKPD mendapatkan akun untuk bisa mengakses ke dalam aplikasi SIM SSH. Aplikasi hasil kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan Ditlit UGM ini juga bisa diintegrasikan dengan aplikasi SIPD besutan Kemendagri yang menjadi media dalam penysusunan Rencana Kerja Anggaran.

Program yang mendukung terwujudnya sasaran tersebut adalah :

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.



**SASARAN 2 :  
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN**

Hasil evaluasi pada sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan mendapatkan nilai rata-rata 99,92 % dengan kategori Sangat tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.12  
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Kategori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Kategori	CC 50,03	CC 57,75	CC 58,79	B 61,50	B 62,27	B 67	Belum rilis	-
Nilai Maturitas SPIP	Nilai	NA	1,898	2,725	3,0375	3,0375	3,0400	3,0375	99,92
<b>Rata – rata Capaian Kinerja</b>									<b>99,92</b>

**1. Kategori Akuntabilitas Kinerja**

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 belum rilis, sehingga belum dapat diukur tingkat capaian kinerja. Adapun capaian nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun Renstra mengalami peningkatan dengan rincian tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.13  
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

KOMPONEN	BOBOT	NILAI				
		2016	2017	2018	2019	2020
Perencanaan Kinerja	30	17,84	18,88	19,15	20,02	20,14
Pengukuran Kinerja	25	9,55	12,24	12,39	13,26	14,10
Pelaporan Kinerja	15	8,96	10,05	10,32	10,60	9,95
Evaluasi Internal	10	5,62	5,27	6,06	6,21	6,37
Capaian Kinerja	20	8,06	11,31	10,86	11,41	11,71
Nilai Hasil Evaluasi	100	50,03	57,75	58,79	61,50	62,27
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

Sumber : Bagian Organisasi dan Tataaksana Setda Kabupaten Purbalingga



Selanjutnya dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain :

- a. Meningkatkan pemahaman dan komitmen Pimpinan Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan manajemen berbasis kinerja melalui kegiatan-kegiatan Rapat Koordinasi/ Pengarahan/ Sosialisasi, Bimbingan Teknis secara berkala

**Gambar 2.5**

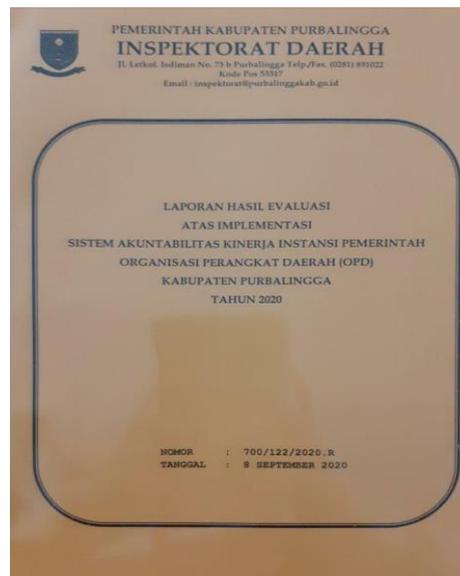
**Paparan Capaian Kinerja dan Target Kinerja Perangkat Daerah**



- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP Perangkat Daerah sebanyak 29 OPD;

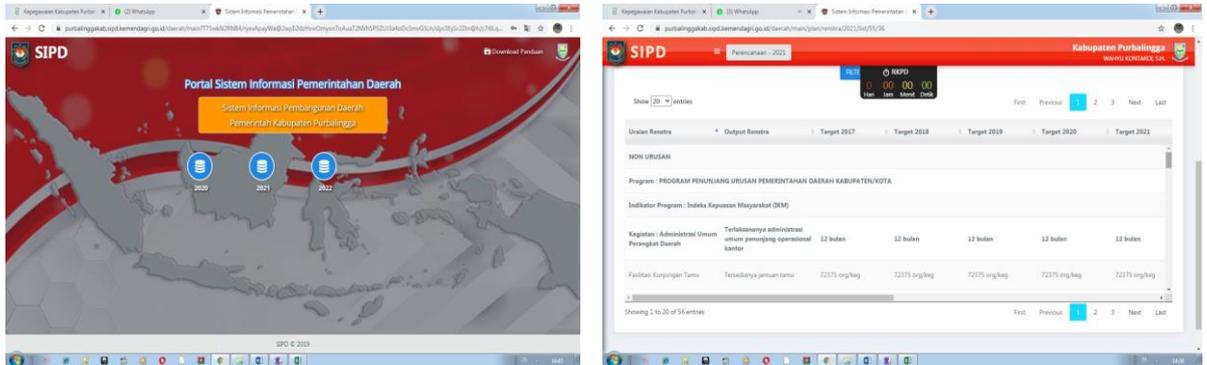
**Gambar 2.6**

**Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2021**



- c. Implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang terintegrasi melalui penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) untuk rencana kerja tahun 2022;

**Gambar 2.7**  
**Tampilan Web SIPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian akuntabilitas kinerja Kabupaten/Kota tetangga dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.14**  
**Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah se-Eks Karesidenan**

NO	INSTANSI	NILAI	KATEGORI
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	80,25	A
2	Pemerintah Kabupaten Cilacap	73,74	BB
3	Pemerintah Kabupaten Banyumas	74,96	BB
4	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	62,27	B
5	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	68,04	B

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kategori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah :

- Belum seluruh pegawai memahami indikator kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- Evaluasi internal OPD belum dilaksanakan secara berkala, sehingga hambatan dan kendala atas pelaksanaan kinerja belum terpantau dengan baik;
- Belum diterapkannya *reward* and *punishment* yang didasarkan



pada Capaian Kinerja, sehingga belum sepenuhnya mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan penggunaan SIPD pada pelaksanaan anggaran 2022;
- b. Mendorong penyusunan penjabaran kinerja sampai level individu yang selaras dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD;
- c. Mendorong evaluasi kinerja internal OPD dan menyusun kebijakan pemberian reward and punishment berbasis kinerja, sehingga akan mendorong setiap individu untuk bertanggungjawab atas target kinerja yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja yang dilaksanakan oleh APIP secara berkala.

## 2. Nilai Maturitas SPIP

Nilai Maturitas SPIP ini merupakan hasil Quality Assurance (QA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk tahun 2021, BPKP tidak melaksanakan penilaian atau evaluasi atas nilai SPIP pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Adapun berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP di Kabupaten Purbalingga masih mendasari hasil QA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2019, dengan penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dari 25 fokus maturitas dengan penjelasan sebagai berikut yaitu :

**Tabel 2.15**  
**Pendekatan Kuantitatif**

<b>NO.</b>	<b>UNSUR SPIP</b>	<b>JUMLAH FOKUS MATURITAS</b>
1.	Lingkungan Pengendalian	8
2.	Penilaian Resiko	2
3.	Kegiatan pengendalian	11
4.	Informasi dan Komunikasi	2
5.	Pemantauan	2
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>



Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut :

**Tabel 2.16**  
**Simpulan Hasil Penilaian SPIP**

TINGKAT MATURITAS	KLASIFIKASI NILAI	INTERVAL NILAI
Belum Ada	0	Nilai < 1,0
Rintisan	1	1,0 ≤ Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 ≤ Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 ≤ Nilai < 4,0
Terkelola dan terukur	4	4,0 ≤ Nilai < 4,5
Optimum	5	Nilai > 4,5

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 berdasarkan hasil Laporan Quality Assurance (QA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor : LQA-648/PW11/3.2/2019 berada pada level “terdefinisi” dengan nilai maturitas sebesar 3,0375 atau berada pada Level 3. SPIP pada tingkat terdefinisi menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.17**  
**Hasil Quality Assurance/QA Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 - 2020**

NO	FOKUS PENILAIAN	ASSESSMENT	QA	KETERANGAN
<b>I.</b>	<b>Unsur Lingkungan Pengendalian</b>			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3	3	
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3	3	
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3	3	
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	4	
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3	3	
6	Penyusunan dan Penerapan	3	3	



NO	FOKUS PENILAIAN	ASSESSMENT	QA	KETERANGAN
	Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM			
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3	3	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3	3	
<b>II.</b>	<b>Penilaian Risiko</b>			
1	Identifikasi Risiko	3	3	
2	Analisis Risiko	3	3	
<b>III.</b>	<b>Unsur Kegiatan Pengendalian</b>			
1	Reviu Kinerja	3	3	
2	Pembinaan SDM	3	3	
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3	3	
4	Pengendalian Fisik atas Aset	3	3	
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	3	3	
6	Pemisahan Fungsi	3	3	
7	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	3	3	
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	4	3	Belum terdapat bukti pendukung evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	3	3	
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	3	3	
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	3	3	
<b>IV.</b>	<b>Unsur Informasi dan Komunikasi</b>			
1	Informasi yang Relevan	3	3	
2	Komunikasi yang Efektif	3	3	
<b>V.</b>	<b>Unsur Pemantauan</b>			



NO	FOKUS PENILAIAN	ASSESSMENT	QA	KETERANGAN
1	Pemantauan Berkelanjutan	3	3	
2	Evaluasi Terpisah	3	3	
	<b>Jumlah Skor</b>	3,0602	3,0375	TERDEFINISI

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, 2021

Namun demikian, terbitnya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Resiko Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi, mengelola dan memamanajemen risiko pemerintah daerah mulai dari risiko strategis pemda, risiko strategis OPD, dan risiko operasional OPD.

Pentingnya penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah juga dipertegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 yang didalamnya menetapkan Persentase Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Nantinya secara berkala BPKP akan mengukur tingkat kematangan Implementasi SPIP melalui Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meliputi penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Penerapan Management Resiko, terdapat empat Konsep baru yang membedakan dengan konsep yang sudah pernah dikenalkan dalam SPIP antara lain :

- a. Memulai Transformasi Silo RisManagement menjadi Enterprise Risk Managmet. Dimana manajemen risiko Tidak hanya fokus pada tujuan masing-masing OPD tapi mulai diarahkan pada tujuan strategis Pemda;
- b. Gambaran Struktur dan Timeline Proses Pengelaan Risiko pada Perdep Nomor 4 Tahun 2019 ini Memperjelas peran pihak yang terlibat, dan waktu pelaksAnaan tiap tahapan pengelolaan risiko;
- c. Perdep Nomor 4 Tahun 2019 Mulai Mendorong Penciptaan



Budaya Pengelolaan Risiko, dimana budaya risiko menjadi bagian dalam identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

- d. Perdep Nomor 4 Tahun 2019 sudah Mengakomodir Penerapan PIBR. Pedoman pengelolaan risiko menunjang pelaksanaan PIBR dan pengukuran maturitas MR.

Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil QA dari BPKP antara lain :

- a. Menyusun dan mensosialisasikan Kebijakan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. Melakukan Sosialisasi implementasi pelaksanaan SPIP kepada semua OPD untuk memberikan pemahaman pentingnya penerapan SPIP dalam rangka pengendalian pelaksanaan Program/Kegiatan secara berjenjang pada setiap level Birokrasi pada Perangkat Daerah;
- c. Melakukan evaluasi secara periodik atas pelaksanaan SPIP pada Perangkat Daerah, dalam rangka memperoleh gambaran implementasi SPIP serta feed back untuk mengoptimalkan pelaksanaan SPIP pada Perangkat Daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, sebagai unit Pembina SPIP di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- a. Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum memiliki kebijakan terkait Manajemen Resiko;
- b. Personil Pengelolaan Resiko Strategis Tingkat Pemda, Pengelolaan Resiko Strategis OPD dan Pengelolaan Resiko Operasional Tingkat OPD belum ditetapkan;
- c. Proses identifikasi dan analisis resiko belum mencakup setiap tingkatan resiko yaitu resiko Strategis Tingkat Pemda, Pengelolaan Resiko Strategis OPD dan Pengelolaan Resiko Operasional Tingkat OPD;
- d. Analisis dan mitigasi Resiko korupsi belum disusun.

Adapun langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang sudah dan akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan segera Menyusun Kebijakan Manajemen Resiko tingkat Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- b. Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan menetapkan Personil Pengelolaan Resiko Strategis Tingkat Pemda, Pengelolaan Resiko



- Strategis OPD dan Pengelolaan Resiko Operasional Tingkat OPD
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Bimbingan teknis Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Tanggal 6 s.d 10 September 2021 dengan narasumber dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya menjelaskan tentang Implementasi Manajemen Resiko (MR) Tingkat Pemerintah Daerah dengan diikuti oleh personil dari Inspektorat Daerah, Bappelitbangda, Bakeuda, Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda serta Bagian Pembangunan Setda.
  - d. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga akan melakukan pendampingan identifikasi resiko Strategis Tingkat Pemda, Pengelolaan Resiko Strategis OPD dan Pengelolaan Resiko Operasional yang nantinya akan dituangkan dalam RTP

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- e. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi;
- f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

### **SASARAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

Hasil evaluasi pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik mendapatkan nilai rata-rata 100,97% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.16  
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks	77,96	78,51	79,49	82,30	83,54	81	84,14	103,87



Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	Badan Publik Terbaik ke VII	na	70,2 Cukup Informatif	82,56 Menuju Informatif	93,5 Menuju Informatif	85,6 Menuju Informatif	83,96 Menuju Informatif	98,08
<b>Rata – rata Capaian Kinerja</b>									100,97

#### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 84,14 dari target yang ditetapkan sebesar 81 atau 103,87%. Penilaian masyarakat terhadap kepuasan unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 83,54. Selanjutnya SKM pada tahun 2021 sebagaimana ketentuan dilaksanakan oleh semua unit pelayanan publik. Adapun untuk mendapatkan hasil yang akurat, ada beberapa unit pelayanan yang dipilih secara acak untuk diukur oleh unit independen, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan LPPM Universitas Jendral Soedirman Purwokerto melaksanakan survei kepuasan masyarakat pada 10 (sepuluh) UPP sampel, dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 2.17**

**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga**

No.	Instansi	Nilai SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Layanan
<b>OPD</b>				
1.	RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata	82,06	B	Baik
2.	UPTD RSUD Panti Nugroho	82,88	B	Baik
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINPENDUKCAPIL)	86,01	B	Baik
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	89,20	A	Sangat Baik
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79,08	B	Baik
<b>KECAMATAN</b>				
1.	Kecamatan Purbalingga	88,39	A	Sangat Baik
2.	Kecamatan Kalimanah	80,49	B	Baik
<b>PUSKESMAS</b>				
1.	UPTD Puskesmas Purbalingga	78,91	B	Baik
2.	UPTD Puskesmas Kalimanah	79,71	B	Baik



No.	Instansi	Nilai SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Layanan
BUMD				
1.	PDAM Tirta Perwira	81,21	B	Baik
<b>Rata-rata</b>		83,14	B	Baik

Sumber : Buku Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

Survei tersebut dilaksanakan dengan mengukur 9 (Sembilan) Unsur SKM yang selanjutnya secara umum diperoleh rincian sebagai berikut :



**Tabel 2.18**  
**Rincian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 per Unsur Layanan**

NO	UNIT LAYANAN	UNSUR LAYANAN									NILAI SKM
		Persyaratan Pelayanan	Prosedur Pelayanan	Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif Layanan	Produk Layanan	Kompetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Penanganan Pengaduan	
1	RSUD Goetheng Taruna	90,63	78,78	71,74	91,08	79,30	90,43	80,66	82,23	81,12	<b>82,06</b>
2	RSUD Panti Nugroho	90,17	79,42	77,77	90,77	83,51	91,42	81,86	76,98	81,60	<b>82,88</b>
3	DIPENDUKCAPIL	91,54	79,04	91,28	91,34	93,03	81,32	91,02	82,23	81,12	<b>86,01</b>
4	DPMPSTP	95,91	95,44	91,76	91,01	91,35	96,53	81,40	82,77	84,74	<b>89,20</b>
5	DINAS PENDIDIKAN	83,27	79,60	79,33	77,80	82,60	87,60	80,93	72,07	75,67	<b>79,08</b>
6	PDAM	91,08	80,91	76,97	85,70	77,30	85,76	81,30	76,77	82,48	<b>81,21</b>
7	KEC. PURBALINGGA	91,21	87,46	84,48	91,82	91,44	91,59	85,24	91,36	88,91	<b>88,39</b>
8	KEC. KALIMANAH	83,21	81,94	79,93	82,84	78,81	80,60	84,63	81,79	77,99	<b>80,49</b>
9	PUSK. PURBALINGGA	80,24	81,30	79,58	82,10	81,50	78,98	80,50	75,80	77,39	<b>78,91</b>
10	PUSK. KALIMANAH	79,59	81,30	80,91	82,55	79,07	80,45	80,97	78,54	81,30	<b>79,71</b>
<b>RATA - RATA</b>		<b>88,58</b>	<b>82,65</b>	<b>81,43</b>	<b>87,16</b>	<b>84,31</b>	<b>87,14</b>	83,06	80,22	81,22	<b>83,14</b>

Sumber : Buku Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021



Adapun rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik meliputi :

**Tabel 2.19**  
**Rekomendasi Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021**

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu			Penanggung jawab
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang	
1.	Persyaratan	Peningkatan kualitas pelayanan	Evaluasi persyaratan layanan	Penyederhanaan persyaratan pelayanan	-	Semua Unit Layanan
2.	Prosedur	-	-	-	-	-
3.	Waktu Pelayanan	Peningkatan kapasitas pelayanan pada jam sibuk	Pemetaan kebutuhan Sumber Daya	Implementasi Peningkatan kapasitas pelayanan pada jam sibuk	-	Semua Unit Layanan
4.	Biaya/ Tarif	-	-	-	-	-
5.	Produk layanan	Inovasi dalam peningkatan <i>quality control</i>	Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap proses kerja ( <i>business process</i> )	Penambahan fungsi <i>quality control</i> dalam menjamin produk pelayanan	-	Semua Unit Layanan
6.	Kompetensi Pelaksana	Peningkatan kompetensi pelaksana	Evaluasi kompetensi pelaksana	Diklat atau seminar peningkatan kompetensi pelaksana	Membangun kompetensi berbasis Teknologi informasi	Semua Unit Layanan
7.	Perilaku Pelaksana	Peningkatan pelayanan prima	Evaluasi pelayanan prima	Diklat pelayanan prima	-	Semua Unit Layanan
8.	Sarana & Prasarana	Penambahan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan	Pemetaan kebutuhan penambahan fasilitas pendukung layanan	Pemenuhan kebutuhan penambahan fasilitas pendukung layanan	-	Kecamatan
9.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	Optimalisasi fungsi pengaduan masyarakat	Sosialisasi Penanganan Pengaduan berbasis internet	Menyiapkan sarana & prasarana penanganan pengaduan berbasis internet	Penyelenggaraan penanganan pengaduan berbasis online	Semua Unit Pelayanan

Sumber : Buku Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

Selanjutnya pada Tahun 2021, Kementerian PAN dan RB juga telah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di 2 (dua) UPP Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu DPMPSTP dan DINPENDUKCAPIL. Akan tetapi untuk Laporan Hasil Evaluasinya belum dirilis. Berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor



111 Tahun 2020 tentang Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2020, untuk UPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 2.19**  
**Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020 pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)**  
**di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga**

NO	UPP	INDEKS PELAYANAN PUBLIK		KATEGORI
		2019	2020	2020
1.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	3,9	4,48	A -
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINPENDUKCAPIL)	3,56	4,27	A -
3.	RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata	4,29	Tidak dilaksanakan evaluasi karena Pandemi COVID – 19	
	Rata – rata	3,92	4,27	A -

Sumber : Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga, 2021

Jika diukur dari rata-rata indeks pelayanan publik pada UPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar 8,93%. Adapun evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dilaksanakan oleh Kemenpan dan RB atas aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.

Dari hasil survei kepuasan masyarakat maupun evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, masih perlu adanya pembenahan-pembenahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam upaya mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang akan berdampak pada tercapainya kepuasan masyarakat.

Hambatan/Permasalahan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik :

a. Masih kurangnya gagasan inovasi dari OPD yang



- menyelenggarakan pelayanan publik;
- b. Belum didukung oleh infrastruktur TIK yang dapat digunakan untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat memperoleh pelayanan publik.

Solusi/langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain sebagai berikut :

- a. Prioritas pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan ;
- b. Menggali lebih banyak inovasi dan replikasi pada unit pelayanan sejenis, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa pandemi COVID – 19. Beberapa inovasi yang digagas selama tahun 2021 antara lain :
- Aplikasi Jujag Jujuk pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk belanja kebutuhan pasar secara online;
  - Pendaftaran *online* rumah sakit dr. GOETENG TAROENADIBRATA dan layanan informasi *Empty Room* ;
  - Pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil melalui aplikasi Optima ;
  - Layanan SILAPAR Buku (Aplikasi Layanan Pesan dan Antar Buku Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga) ;
  - Perizinan *online* seperti IMB, Ijin Reklame melalui website [dpmptsp.purbalinggakab.go.id](http://dpmptsp.purbalinggakab.go.id);
  - Rantang Berkah bagi manula sebatang kara, khususnya di masa pandemi ;
  - [cekbansos.purbalinggakab.go.id](http://cekbansos.purbalinggakab.go.id) dalam rangka menyediakan informasi dan data penerima bansos di masa pandemi, dll.
- c. Meningkatkan pelayanan penanganan pengaduan dengan menyusun kebijakan penanganan pengaduan internal serta memperbaiki publikasi tindak lanjut pengaduan baik elektronik maupun non elektronik;
- d. Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemenuhan kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Menyusun aturan/petunjuk teknis Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik.

## 2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai Badan Publik



berkewajiban untuk memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan PPID dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 550/39 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah berupaya menerapkan keterbukaan informasi publik dengan capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh Anugerah Badan Publik dalam ketaatan melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik untuk :
  - Nominator Kategori Kelembagaan
  - Terbaik ke 3 Kategori Pelayanan Informasi Publik
  - Terbaik ke 2 Kategori Kinerja
- b. Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan penghargaan sebagai badan publik terbaik ke 3 di Jawa Tengah dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik;
- c. Tahun 2016 memperoleh penghargaan KIP Award sebagai Badan Publik Terbaik ke VII dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Tahun 2018 memperoleh Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota "Cukup Informatif" dengan nilai 70,2;
- e. Tahun 2019 memperoleh Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota "Menuju Informatif" dengan nilai 82,56;
- f. Tahun 2020 memperoleh Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota "Menuju Informatif" dengan nilai 93,5;
- g. Tahun 2021 memperoleh Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/ Kota " Menuju Informatif " dengan nilai 83,96.

Nilai Keterbukaan informasi publik tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 9,54% dibandingkan tahun 2020. Penurunan nilai ini disebabkan :

- a. Kurangnya *supporting* dari PPID Pembantu yang di Tahun sekarang penilaiannya inklude di dalamnya tidak hanya PPID Utama;
- b. Penilaian PPID Pembantu difokuskan pada lima PPID yang menangani masalah pencegahan Covid -19 tiga PPID Pembantu diantaranya sudah ditunjuk oleh Tim KIP Provinsi Jawa Tengah



yaitu : Dinas Kesehatan, DinsosdaldukKBP3A dan BPBD, sedang dua PPID Pembantu ditunjuk oleh PPID Utama yaitu, Dinas Perhubungan dan Satpol PP.

Penilaian evaluasi Badan Publik Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah meliputi :

- a. Penilaian monitoring dan evaluasi terhadap Website dan Medsos Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkab (PPID Utama);
- b. Penilaian *Self Assesment Quesioner* (SAQ) merupakan gabungan nilai SAQ PPID Pembantu dan PPID Utama;
- c. Penilaian hasil visitasi dan Verifikasi Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Penilaian hasil uji publik oleh Tim Penilai, dihadiri secara pribadi oleh Bupati Purbalingga sebagai penalis paparan uji publik.

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/KPTS/KI-JTG/XII/2021 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Badan Publik Di Lingkup Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, rincian hasil penilaian diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.20**  
**Nilai Kabupaten/Kota Di Lingkup Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik Tahun 2021**

NO	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
1	Kota Surakarta	96,00	Informatif
2	Kab. Demak	95,71	Informatif
3	Kab. Kebumen	95,09	Informatif
4	Kab.Wonogiri	94,46	Informatif
5	Kab. Karanganyar	94,15	Informatif
6	Kab. Batang	93,21	Informatif
7	Kab. Banyumas	93,21	Informatif
8	Kota Semarang	91,56	Informatif
9	Kab. Temanggung	89,56	Menuju Informatif
10	Kab. Klaten	88,96	Menuju Informatif
11	Kab.Kudus	88,44	Menuju Informatif



NO	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
12	Kab.Wonosobo	84,40	Menuju Informatif
13	Kab. Purbalingga	83,96	Menuju Informatif
14	Kab. Kendal	82,96	Menuju Informatif
15	Kab. Cilacap	80,85	Menuju Informatif

Sumber : Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, 2021

Tahapan penilaian dari Komisi Informasi Publik kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Tahap awal dengan penilaian terhadap Website dan Medsos pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Purbalingga (PPID Utama) dengan nilai 96,80 (masuk dalam 10 besar Tk Provinsi Jawa Tengah);
- b. Tahapan ke II pengisian *Self Assesment Quisioner* (SAQ), gabungan nilai dari PPID Utama dan PPID Pembantu mendapatkan nilai rendah : 60,80
  - PPID Utama : 50%
  - PPID Dinkes : 10%
  - PPID BPBD : 10%
  - PPID Dinsosdaldukkb3A : 10%
  - PPID Pembantu Pilihan : 10%
  - PPID Pembantu Pilihan : 10%
- c. Tahapan ke III tahap visitasi dan verifikasi Keterbukaan Informasi Publik dimasa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan tgl 26 Oktober 2021 bertempat di Operation Room Kab. Purbalingga dengan nilai 84,63;
- d. Tahapan ke IV Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan tanggal 24 Nopember 2021 di UNS Solo.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja diantaranya yaitu :

- a. Melakukan pembinaan dan evaluasi internal di PPID Utama maupun di PPID Pembantu sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Adapun kegiatan dimaksud antara lain :
- b. Melakukan rapat berkala internal PPID Utama terkait dengan pengelolaan data, pelayanan informasi maupun pengaduan dari



- pemohon informasi;
- c. Melakukan pertemuan secara berkala dengan Ketua PPID Pembantu dan Admin OPD dalam rangka meningkatkan berkoordinasi dalam hal pelaporan layanan informasi publik, meliputi pelayanan informasi publik, penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), serta Uji Konsekuensi untuk menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK);
  - d. Melaksanakan monitoring terhadap PPID Pembantu.
    - Kegiatan ini dilakukan dengan berkunjung ke OPD dalam rangka monitoring regulasi kelembagaan PPID Pembantu maupun ketersediaan Dokumen Informasi yang menjadi kewajiban badan publik;
    - Memantau konten website masing-masing PPID Pembantu, agar konten websitenya selalu ter-Update setiap saat, sehingga apabila ada pemohon informasi dapat segera terlayani dengan baik.

Adapun hambatan yang dihadapi antara lain :

- a. Masih kurangnya komitmen dari Pimpinan OPD untuk turun serta berpartisipasi aktif sebagai PPID Pembantu dan masih adanya anggapan bahwa keterbukaan informasi publik bukanlah permasalahan dan tanggungjawab bersama OPD, namun hal itu menjadi tanggungjawab dan urusan OPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
- b. Kurangnya SDM yang menangani secara khusus dalam pengelolaan konten website / Admin, sehingga updating data berupa informasi tidak menjadi tugas utama melainkan hanya merupakan tugas tambahan;
- c. Kurangnya supporting dari PPID Pembantu kepada PPID Utama.

Untuk mengatasi hambatan tersebut diatas, maka diperlukan solusi maupun terobosan diantaranya yaitu :

- a. Membuat surat edaran/himbauan Bupati ataupun Sekda, melaksanakan Rapat Koordinasi yang dipimpin Bupati atau Sekda dalam rangka mendorong komitmen serta dukungan dan kerjasama para Pimpinan OPD untuk berpartisipasi dalam pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Kabupaten yaitu Informatif.
- b. Menginisiasi pelaksanaan lomba Keterbukaan Informasi Publik Tingkat OPD, dengan memberikan reward bagi OPD yang support dan respon akan Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Mendorong PPID Pembantu dalam pengelolaannya agar lebih



mendukung PPID Utama

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik adalah :

- a. Program Pendaftaran Penduduk;
- b. Program Pencatatan Sipil;
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
- e. Program Pengelolaan Arsip;
- f. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD;
- g. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
- h. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.

**SASARAN 4 :**  
**MENINGKATNYA EFISIENSI KELEMBAGAAN DENGAN PENGGUNAAN**  
**TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA**  
**APARATUR YANG BAIK**

Hasil evaluasi pada sasaran strategis Meningkatnya efisiensi kelembagaan dengan penggunaan TI dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik mendapatkan nilai rata-rata 79,64% dengan kategori Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.21**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan Dengan Penggunaan TI dan**  
**Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur yang Baik**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Indeks SPBE	Indeks	na	1,94	2,6	3,04	NA	2,8	2,23	79,64
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	72	74	76	75,39	73,76	78	Belum release	-
<b>Rata – rata Capaian Kinerja</b>									<b>79,64</b>

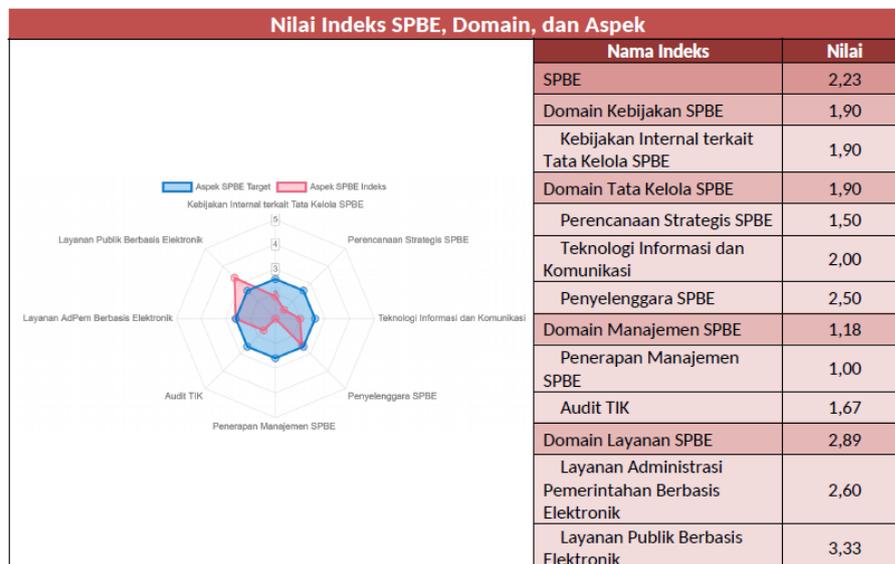
1. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi



dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Mendasari Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE Tahun 2021, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebesar 2,23. Capaian ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 2,8. Sehingga capaiannya sebesar 79,64%. Adapun rincian indeks sebagai berikut :

**Gambar 2.8**  
**Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**



Dalam rangka mengetahui perkembangan indeks SPBE setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan evaluasi SPBE dengan instrumen yang telah disesuaikan dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Noomor 59 Tahun 2021 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, hal ini dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai, dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE pada hampir menyeluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021 menjadi Baseline kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah guna peningkatan



penerapan SPBE dalam rangka meningkatkan kualitas layanan masyarakat dan terwujudnya digitalisasi Pemerintah dalam kerangka Reformasi Birokrasi Nasional.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mengembangkan implementasi SPBE antara lain :

- a. Menyusun Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas perbup nomor 90 tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi maturbup
- b. Pada Domain layanan SPBE untuk layanan publik tahun 2020 DINKOMINFO telah melaksanakan kegiatan :
  - Pembuatan aplikasi untuk layanan izin penelitian *online* (untuk Bappelitbangda) <https://siintan.purbalinggakab.go.id/>;
  - Fasilitasi perizinan online Bidang Kesehatan (untuk DPMPTSP)
  - Layanan informasi Covid 19 <https://corona.purbalinggakab.go.id/>
  - Peta Sebaran Covid 19 <https://petatematik.purbalinggakab.go.id/peta/monitoring-corona>
  - Layanan Informasi Konvergensi Stunting <https://cegahstunting.purbalinggakab.go.id/>
  - Aplikasi pengecekan data penerima bantuan sosial terdampak Covid 19 <https://cekbansos.purbalinggakab.go.id/>
  - Pembuatan web Whistle Blowing System <https://wbs.purbalinggakab.go.id/>
  - Fasilitasi domain <https://optima.purbalinggakab.go.id/> untuk pelayanan administrasi kependudukan online
  - Pembuatan aplikasi Sistem Layanan Administrasi Kepegawaian (Syantika) yang terintegrasi dengan aplikasi e-kepegawaian (link e-presensi : [bit.ly/SyantikaApp](http://bit.ly/SyantikaApp))
  - Pembuatan aplikasi untuk mengetahui kegiatan harian yang dilaksanakan pegawai/ASN <http://e-kinerja.purbalinggakab.go.id>

Beberapa permasalahan/ hambatan yang dihadapi dalam penerapan SPBE di Kabupaten Purbalingga diantaranya :

- a. Belum memiliki perencanaan strategis SPBE terkait arsitektur SPBE dan inovasi proses bisnis SPBE;
- b. Belum memiliki Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat data, Layanan Jaringan Intra dan penggunaan sistem Penghubung Layanan



- (sudah tersedia, hanya digunakan sebagian OPD);
- c. Belum memiliki tata kelola yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE;
  - d. Belum memiliki penerapan Manajemen SPBE terkait penerapan manajemen resiko SPBE, manajemen keamanan informasi, penerapan manajemen data, penerapan manajemen Asset TIK, penerapan kompetensi sumber daya manusia, penerapan manajemen pengetahuan, penerapan manajemen perubahan dan penerapan manajemen layanan SPBE;
  - e. Belum menjalankan audit TIK terkait, pelaksanaan audit infrastruktur, audit aplikasi, audit keamanan SPBE;
  - f. Belum memiliki layanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik tentang layanan kepegawaian, pengelolaan barang, pengawasan internal pemerintah, akuntabilitas organisasi, dan kinerja pegawai;
  - g. Belum memiliki layanan Publik Berbasis Elektronik terkait layanan Data Terbuka.

Solusi dalam rangka meningkatkan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu adanya langkah - langkah strategis sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan sosialisasi peta rencana, arsitektur SPBE, keterpaduan perencanaan dan penganggaran serta inovasi proses bisnis;
- b. Membangun dan mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait dengan aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra dan penggunaan sistem penghubung layanan;
- c. Kematangan Pembangunan Aplikasi, Layanan Data, Penyediaan Jaringan intra, penyediaan sistem penghubung Pemerintah dan penyediaan sistem penghubung layanan pemerintah;
- d. Menyusun dan mensosialisasikan penerapan manajemen SPBE, manajemen resiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE;
- e. Melakukan pembangunan dan pengelolaan audit TIK terkait, pelaksanaan audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan SPBE;
- f. Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data;
- g. Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi



aplikasi atau integrasi data.

## 2. Indeks Profesionalitas ASN

Hasil pengukuran indeks profesionalitas pegawai Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 belum keluar hasilnya. Tahun 2020 indeks profesionalitas pegawai Kabupaten Purbalingga sebesar 74,08 mengalami penurunan 1,74% apabila dibandingkan dengan hasil pengukuran pada Tahun 2019 sebesar 75,3 dan nilai tahun 2020 masih dalam rentang kategori "sedang". Adapun penurunan nilai tersebut dikarenakan jumlah PNS yang dilakukan pengukuran tahun 2020 sebanyak 6.907 sedangkan jumlah PNS yang dilakukan pengukuran tahun 2019 sebanyak 6.995 orang. Selanjutnya hasil pengukuran Indeks Profesionalitas Pegawai Untuk Kabupaten/ Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan hasil sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.22**  
**Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Kategori Tahun 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PROFESIONALITAS ASN	PREDIKAT	KETERANGAN
1.	Pemkot Surakarta	76,92	Sedang	
2.	Pemkab Demak	74,94	Sedang	
3.	Pemkab Pekalongan	73,34	Sedang	
4.	Pemkab Tegal	62,17	Rendah	
5.	Pemkab Pati	64,98	Rendah	
6.	Pemkab Pemalang	64,29	Rendah	
7.	Pemkab Rembang	68,74	Rendah	
8.	<b>Pemkab Purbalingga</b>	<b>73,76</b>	<b>Sedang</b>	
9.	Pemkab Purworejo	80,36	Sedang	
10.	Pemkab Semarang	48,12	Sangat Rendah	
11.	Pemkab Kendal	74,98	Sedang	
12.	Pemkab Grobogan	66,62	Rendah	
13.	Pemkab Batang	69,948	Rendah	
14.	Pemkab Brebes	73,46	Sedang	
15.	Pemkab Kudus	-	-	Mengikuti penilaian tahun 2019
16.	Pemkab Blora	60,43	Rendah	
17.	Pemkab Cilacap	71,88	Sedang	
18.	Pemkab Kebumen	61,40	Rendah	



NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PROFESIONALITAS ASN	PREDIKAT	KETERANGAN
19.	Pemkab Klaten	79,83	Sedang	
20.	Pemkab Boyolali	80,05	Sedang	
21.	Pemkab Sragen	69,80	Rendah	
22.	Pemkab Karanganyar	56,76	Sangat Rendah	
23.	Pemkab Sukoharjo	-	-	Mengikuti penilaian tahun 2019
24.	Pemkot Pekalongan	-	-	Mengikuti penilaian tahun 2019
25.	Kota Semarang	82,27	Tinggi	
26.	Kota Tegal	68,13	Rendah	
27.	Kota Magelang	73,23	Sedang	

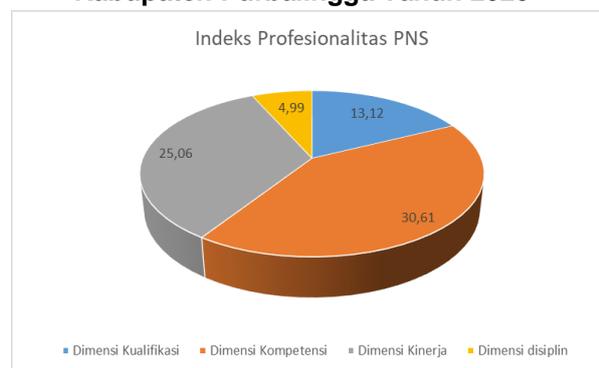
Sumber : <http://ip-jasn.bkn.go.id>

Adapun kategori predikat nilai PIP sebagai berikut :

1. Sangat Rendah (SR) : dengan Nilai PIP < 60
2. Rendah (R) : dengan Nilai PIP 61 – 70
3. Sedang (S) : dengan Nilai PIP 71 – 80
4. Tinggi (T) : dengan Nilai PIP 81 – 90
5. Sangat Tinggi (ST) : dengan Nilai PIP 91 – 100

Selanjutnya hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga tahun 2020 tersaji pada grafik di bawah ini :

**Gambar 2.9**  
**Grafik Nilai Indeks Profesionalitas (IPP) ASN**  
**Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**



Adapun perhitungan atas nilai IPP ASN Kabupaten Purbalingga tahun 2020 dapat diuraikan berdasarkan komposisi PNS di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

**Tabel 2.23**  
**Nilai Total Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga**  
**per Jenis Kelamin Laki-laki Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>DIMENSI PROFESIONALITAS</b>	<b>NILAI</b>
1	Dimensi Kualifikasi	12,47
2	Dimensi Kompetensi	27,41
3	Dimensi Kinerja	25,08
4	Dimensi disiplin	4,98

*Sumber : BKPPD Kabupaten Purbalingga, 2021*

Nilai IPP tersebut diukur terhadap PNS berjenis laki-laki yang sejumlah 3.186 orang. Sedangkan untuk pengukuran IPP bagi PNS berjenis kelamin Perempuan ditujukan kepada 3.721 PNS, dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 2.24**  
**Nilai Total Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga**  
**Per Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>DIMENSI PROFESIONALITAS</b>	<b>NILAI</b>
1	Dimensi Kualifikasi	13,78
2	Dimensi Kompetensi	33,81
3	Dimensi Kinerja	25,04
4	Dimensi disiplin	5,00

*Sumber : BKPPD Kabupaten Purbalingga, 2021*

Selanjutnya disajikan pengukuran IPP berdasarkan jenis jabatan sebagai berikut :



**Tabel 2.25**  
**Nilai Total Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga**  
**per Jenis Jabatan Tahun 2021**

NO	JABATAN	JUMLAH	DIMENSI PROFESIONALITAS			
			KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN
1	Struktural	642	15,16	23,01	25,26	4,99
2	Fungsional	4.449	14,43	37,16	25,04	4,99
3	Pelaksana	1.816	9,39	18,20	25,03	4,98

Sumber : BKPPD Kabupaten Purbalingga, 2021

**Tabel 2.26**  
**Nilai Total Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga**  
**Per Jenjang Jabatan Tahun 2021**

DIMENSI PROFESIONALITAS	JUMLAH PNS	DIMENSI PROFESIONALITAS			
		KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	30	19,00	24,00	26,00	5,00
Jabatan Administrator	136	16,88	26,54	25,63	5,00
Jabatan Pengawas	476	14,42	21,94	25,11	4,98
Jabatan Fungsional Ahli Utama	5	20,00	40,00	25,00	5,00
Jabatan Fungsional Ahli Madya	1.663	15,20	37,05	25,05	5,00
Jabatan Fungsional Ahli Muda	1.068	15,26	36,88	25,06	4,99
Jabatan Fungsional Ahli Pertama	1.033	15,00	38,21	25,04	4,99
Jabatan Fungsional Penyelia	233	10,56	37,06	25,00	4,99
Jabatan Fungsional Mahir	199	10,68	36,11	24,97	4,98
Jabatan Fungsional Terampil	235	10,06	36,21	25,00	5,00
Jabatan Fungsional Pemula	13	6,54	25,77	25,00	5,00
Jabatan Pelaksana	1.816	9,39	18,20	25,03	4,98

Sumber : BKPPD Kabupaten Purbalingga, 2021



Jika diukur berdasarkan tingkat pendidikan PNS, maka diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 2.27**  
**Nilai Total Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga**  
**Per Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PNS	DIMENSI PROFESIONALITAS			
		KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN
S3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	414	19,99	31,52	25,12	5,00
S1/D4/Sederajat	4.694	15,00	33,79	25,07	4,99
D3	808	10,00	33,38	25,01	4,99
D1/D2/SMA/Sederajat	813	5,00	13,88	25,02	4,98
SD/SMP/Sederajat	178	1,00	18,27	25,00	4,99

Selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 telah dilaksanakan langkah-langkah strategis pada tiap dimensi sebagai berikut :

- a. Dimensi Kualifikasi, yaitu mendorong para PNS untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi dan pada tahun 2021 jumlah PNS yang mengikuti Ijin Belajar sebanyak 103 PNS terdiri dari :

**Tabel 2.28**  
**Pegawai yang Mengikuti Ijin Belajar**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	IJIN BELAJAR	TUGAS BELAJAR
1.	Kejar Paket	-	-
2.	Diploma 3	-	-
3.	Strata 1	59	-
4.	Strata 2	28	-
5.	Profesi	16	-
6.	Strata 3	-	-
7.	Dokter Spesialis	-	-



b. Dimensi Kompetensi dengan mengirimkan PNS mengikuti :  
 Bahwa untuk mendukung pengembangan kompetensi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga telah melaksanakan Analisis Kebutuhan Diklat ASN yang disajikan oleh setiap Perangkat Daerah melalui SIMBANGKOM (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN) milik Pemerintah Kabupaten dan Sistem Inormasi Jaringan On Line Analisis Kebutuhan Diklat (SIJARI ON AKD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga memberikan kesempatan pengembangan kompetensi melalui pelaksanaan Diklat/ Bimtek/ Workshop/Sosialisasi/Seminar. Pada tahun 2021, PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional sebanyak 4.217 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.29**  
**PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Tahun 2021**

NO	JENIS DIKLAT	PNS YANG DIUSULKAN MENGIKUTI DIKLAT BERDASAR KAN AKD	PESERTA YANG MENGIKUTI DIKLAT	LULUS	TIDAK LULUS	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Diklat Latsar: - Triwulan II - Triwulan III - Triwulan IV	468	70	70	0	100	
2	Diklat Kepemimpinan	44	5	5	0	100	
3	Diklat Teknis/ Fungsional	3.559	4.142	4.142	0	100	
4	Bimtek/ workshop	0	0	0	0	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.071</b>	<b>4.217</b>	<b>4.217</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	

Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2021

c. Dimensi Kinerja dilaksanakan dengan mendorong ASN melakukan pengukuran kinerja antara lain melalui penyusunan dan pengukuran capaian SKP PNS. Rata-rata nilai SKP PNS Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 97,98 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :



**Tabel 2.30**  
**Rata-Rata Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN**  
**Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

NO	JABATAN	RATA-RATA NILAI SKP				RATA-RATA	KET.
		GOL 1	GOL II	GOL III	GOL IV		
1	Eselon II				109,31	<b>109,31</b>	
2	Eselon III			102,90	104,84	<b>103,87</b>	
3	Eselon IV			101,86	102,80	<b>102,33</b>	
4	PELAKSANA	91,50	95,81	100,63		<b>95,98</b>	
5	FUNGSIONAL		91,93	101,35	102,58	<b>98,62</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>91,50</b>	<b>93,87</b>	<b>101,69</b>	<b>104,88</b>	<b>97,98</b>	

Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2021

d. Dimensi Disiplin

Untuk meningkatkan kualitas ASN dari dimensi disiplin, beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu :

- Pemantauan Peningkatan disiplin PNS;
- Melakukan Fasilitasi Masalah Kepegawaian;
- Penerbitan Peraturan Bupati No. 71 Th. 2021 tentang Pedoman Teknis Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Hambatan/Permasalahan dalam pencapaian sasaran antara lain :

- a. Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN, antara lain :
  - Belum seluruh jabatan memiliki standar kompetensi jabatan, untuk tahun 2021 baru tersusun Standar Kompetensi Jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - Belum terbangunnya Database Kompetensi ASN.
- b. Perencanaan kebutuhan pegawai belum sepenuhnya berbasis perhitungan beban kerja;
- c. Belum adanya kebijakan pola karier di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- d. Belum adanya kebijakan pemberian Reward and Punishment atas capaian kinerja, dan belum didukung dengan sistem pengukuran dan penilaian kinerja yang berbasis elektronik;
- e. Evaluasi atas dampak diklat/pengembangan kompetensi belum menjadi budaya, sehingga pengukuran Indeks Profesionalitas ASN masih belum optimal.



Adapun alternatif solusi yang dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Menunggu penetapan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dan Fungsional secara nasional dan menindaklanjuti dengan penetapan melalui Peraturan Kepala Daerah;
- b. Perlu adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk menerapkan kebijakan pola karir pegawai;
- c. Melaksanakan *talent pool* secara bertahap, bekerjasama dengan unit kompetensi lain dalam rangka membangun database kompetensi ASN;
- d. Merumuskan kebijakan pemberian tunjangan kinerja berbasis Penilaian kinerja secara elektronik.

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya efisiensi kelembagaan dengan penggunaan TI dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik adalah :

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor;
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- c. Program Kepegawaian Daerah.

**MISI 2 :**

**” MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEHADIRAT ALLAH SWT/TUHAN YME, SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA RASA AMAN DAN TENTERAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ”**

**TUJUAN MISI 2 :**

**TERWUJUDNYA KETENTRAMAN, KETERTIBAN, RASA AMAN DAN PAHAM WAWASAN KEBANGSAAN DALAM MASYARAKAT**

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban, Rasa Aman dan Paham Wawasan Kebangsaan Dalam Masyarakat” mendapatkan nilai 57,14% dengan kategori Rendah. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.31**  
**Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban, Rasa Aman dan Paham Wawasan Kebangsaan Dalam Masyarakat**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Persentase penurunan konflik dan SARA	Persen	NA	NA	21,42	0	28,57	50	57,14

Persentase penurunan konflik dan SARA Kabupaten Purbalingga dihitung berdasarkan baseline data tahun 2018 sebanyak 14 konflik. Pada tahun 2019, terjadi penurunan konflik sara menjadi sebanyak 12 konflik. Pada tahun 2020 yang terjadi dan tertangani berdasarkan laporan dan data yang dikelola, tercatat 14 konflik. Pada tahun 2021, konflik yang terjadi dan tertangani sebanyak 7 konflik. Dengan demikian, target penurunan konflik pada tahun 2021 tidak tercapai, karena hanya terealisasi sebesar 50%. Selanjutnya untuk mendukung capaian kinerja tujuan, maka ditetapkan Sasaran Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

**SASARAN 1 :**  
**MENINGKATNYA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KEAMANAN DALAM MASYARAKAT**

Hasil evaluasi pada sasaran strategis Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Keamanan Dalam Masyarakat mendapatkan nilai rata-rata 128,85% dengan kategori Sangat Bagus. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.32**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Keamanan Dalam Masyarakat**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Angka Pelanggaran Ketertiban Umum per 10.000 penduduk	Angka Per 10.000	32,68	33,91	33,42	79,19	29,80	71,49	41,68
Angka Kriminalitas	Angka Per 10.000	2,46	1,73	1,62	1,90	2	1,40	142,85



Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Indeks Toleransi	Angka	Na	Na	3,6	4	3	2,3	76,67
<b>Rata – rata Capaian Kinerja</b>								<b>128,85</b>

1. Angka Pelanggaran Ketertiban Umum per 10.000 Penduduk  
Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga. Bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ditujukan untuk menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan pekerjaannya secara tertib, teratur, aman, tenteram, melalui upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta stabilitas keamanan. Selanjutnya ruang lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi :
  - a. Tertib jalan dan angkutan jalan;
  - b. Tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
  - c. Tertib sungai, saluran, dan kolam;
  - d. Tertib lingkungan;
  - e. Tertib tempat dan usaha tertentu;
  - f. Tertib bangunan;
  - g. Tertib pariwisata;
  - h. Tertib usaha rekreasi dan hiburan umum;
  - i. Tertib kesehatan; dan
  - j. Tertib peran serta masyarakat.

Dalam rangka mengukur tingkat ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat digunakan angka pelanggaran ketertiban umum per 10.000 penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebanyak 1.021.920 jiwa. jumlah pelanggaran yang terjadi selama tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini :



**Tabel 2.33**  
**Jumlah Pelanggaran Ketertiban Umum di Kabupaten Purbalingga**

No	Jenis Pelanggaran	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PGOT	22	213	396	272	198	104
2	PKL	13	2117	1654	436	211	942
3	Razia Anak Sekolah	14	52	100	122	72	-
4	Razia PSK	33	5	6	11	-	-
5	Razia Miras	19	7	6	12	6	17
6	DBHCHT	-	16	-	-	-	-
7	Razia Reklame	20	714	1127	2500	4.611	1.670
8	Protokol Kesehatan					2.910	2.498
	<b>JUMLAH</b>	<b>121</b>	<b>3.124</b>	<b>3.289</b>	<b>3.353</b>	<b>8.008</b>	<b>5.231</b>

Sumber : Data SATPOL PP Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan hasil analisis, maka angka ketertiban umum per 10.000 tahun 2021 sebesar 71,49. Capaian kinerja pada indikator 286,43% dari target yang ditetapkan sebesar 24,96. Namun demikian ada penurunan signifikan atas pelanggaran trantibum oleh masyarakat di masa Pandemi Covid-19. Dari tabel tersebut di atas dapat diuraikan beberapa hal yang mempengaruhi penurunan angka pelanggaran sebagai berikut :

- a. Angka pelanggaran yang mengalami penurunan adalah pelanggaran reklame sebanyak 4.611 ditahun 2020, adpun pada tahun 2021 pelanggar reklame sebanyak 1.670 pelanggar atau turun sebanyak 2.942 ditahun 2021 dibanding angka pelanggaran di tahun 2020. Salah satu penyebab penurunan angka pelanggaran tersebut dilakukan melalui upaya-upaya, antara lain :
  - Adanya tingkat ketaatan para pelaku usaha dan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame meningkat;
  - Intensitas razia penertiban reklame yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Purbalingga di tahun 2021, selama tahun 2021 Satpol PP melaksanakan kegiatan Penertiban sebanyak 38 (tiga puluh), disamping itu juga adanya peran aktif masyarakat dan juga didukung kegiatan melalui pemetaan jadwal patroli yang terstruktur dan sesuai target lokasi yang dilaksanakan seperti jadwal kegiatan, lokasi kegiatan penertiban di 18 kecamatan.
- b. Pelanggaran angka ketertiban umum yang mengalami penurunan juga terjadi pada protokol kesehatan melalui pencegahan penyebaran Covid-19 dengan kegiatan PPMK dari Level 4 sampai



ke Level 2 di Kabupaten Purbalingga melalui penegakan disiplin kepada masyarakat guna penggunaan masker kepada para pelaku usaha serta perusahaan, dan juga masyarakat dengan operasi gabungan bersama unsur TNI/POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Satpol PP serta BPBD di beberapa lokasi antara lain tempat umum, terminal, taman kota, Pasar Hewan Purbalingga dan beberapa wilayah kecamatan. Adapun hasil Penegakan Prokes pelanggaran trantibum sejumlah di tahun 2021 mengalami penurunan bila dibandingkan ditahun 2020. Angka penagnggaran Prokes di tahun 2020 sejumlah 2.910 pelanggaran sedangkan di tahun 2021 sebanyak 2.498 pelanggaran atau turun 412 pelanggar;

- c. Pelanggaran angka ketertiban umum yang mengalami penurunan angka pelanggaran PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) dan juga anak punk di Kabupaten Purbalingga melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan juga dengan DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga dengan lokasi kegiatan antara lain tempat umum, terminal, taman kota, Pasar Hewan Purbalingga, GOR dan perempatan traffic light. Adapun hasil Penegakan pelanggaran trantibum angka peanggaran mengalami penurunan tahun 2021, angka pelanggar PGOT ditahun 2020 sebanyak 198 pelanggar, adapun angka penagnggaran trantibum di tahun 2021 sebanyak 109 pelanggar atau turun 94 pelanggar;
- d. Pelanggaran angka ketertiban umum yang mengalami kenaikan ditahun 2021 angka pelanggaran PKL (Pedanagang Kali Lima) ataupun toko moderen adapun para pelangar seperti pusat perbelanjaan yang masih buka di atas pukul 21.00 WIB, Warung Makan Tenda/PKL dan angkringan yang masih berjualan di atas pukul 22.00 WIB jenis pelanggarannya adalah tidak mentaati berkenaan Pengawasan PPKM Berbasis Mikro serta Sosialisasi Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Purbalingga melalui kegiatan operasi gabungan dengan unsur TNI/POLRI, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Satpol PP serta BPBD Kabupaten Purbalingga, adapun hasil pelanggaran trantibum angka pelanggaran mengalami kenaikan di tahun 2021 bila dibandingkan angka pelanggar di tahun 2020, ditahun 2020 angka pelanggar trantibum sebanyak 211 pelanggar, adapun angka pelanggaran trantibum sebanyak 942 di tahun 2021 pelanggar atau ada kenaik sebanyak 731 pelanggar;



- e. Pelanggaran angka ketertiban umum yang mengalami kenaikan berikutnya pada tahun 2021 angka pelanggar Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Purbalinggaberbagai merk Minuman beralkohol yang berhasil di razia oleh Satpol PP Kabupaten Purbalingga seperti : minuman beralkohol dengan merk Dome Gin, Mix Max, Anggur Merah , Anggur Putih , Soju Seven Days, Cap Tiga Orang, dan merk lainnya jumlah yang terkena razia sebanyak 524 (lima ratus dua puluh empat) botol dan 95 (sembilan puluh lima) tuak, dengan 17 (tujuh belas) kali razia adapun jumlah pengedar/penjual yang terlena razia sebanyak 17 (tujuh belas) orang pelanggar atau mengalami kenaikan di tahun 2021 bila dibandingkan pada tahun 2020 hanya 6 (enam) orang/penjual, adapun angka pelanggar Pengawasan Minuman Beralkohol sebanyak 17 (tujuh belas) pelanggar atau naik sebanyak 11 pelanggar di tahun 2021.

Selanjutnya kegiatan teknis yang dilaksanakan untuk mendukung peningkatan Tibumtranmas antara lain :

- a. Penegakan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame, adapun penegakan yang dilakukan melalui kegiatan Razia Penertiban Reklame yang melanggar baik cara pemasangannya ataupun yang tidak berijin, adapun tujuan penegakan reklame adalah dalam rangka mendukung Pemerintah Kabupaten Purbalingga pendapatan asli daerah (PAD melalui sektor Reklame;
- b. Penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga melalui kegiatan Patroli Cipta Kondisi dalam rangka Pencegahan dan Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan tujuan meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pada masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum baik dilingkungan keluarga, tetangga ataupun dalam bermasyarakat;
- c. Peraturan Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga, melalui kegiatan patroli dan pengawasan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Virus Covid-19, adapun kegiatan dimaksud adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat guna meminimalisir jumlah angka pelanggaran penyakit masyarakat;



- d. Penegakan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Sewa Dan Rumah Kos, adapun bentuk kegiatan yaitu patroli dan pendataan jumlah rumah rumah sewa dan rumah kost, adapun tujuannya adalah guna meminimalisir adanya pemanfaatan rumah kos dijadikan tempat asusila, peredaran miras, narkoba atau pun tindak kejahatan lainnya, serta dalam rangka menekan angka kriminalitas;
- e. Penegakan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit, melalui kegiatan razia gabungan dengan dengan unsur TNI/Polri dan juga unsur Satpol PP Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Virus Covid 19, adapun tujuannya adalah agar masyarakat senantiasa mentaati Protokol Kesehatan;
- f. Penegakan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 tentang Zona PKL Wilayah Kecamatan Purbalingga, kegiatan tersebut melalui kegiatan Patroli dan juga memberikan informasi melalui pengeras suara yang ada di seputaran alun-alun purbalingga, adapun kegiatan tersebut meningkatkan ketaatan para PKL guna mentaati Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 tentang Zona PKL Wilayah Kecamatan Purbalingga dan meminimalisir angka pelanggaran;
- g. Hasil razia barang kena cukai ilegal dalam rangka penanganan pengawasan barang kena cukai ilegal (DBH-CHT) melalui kegiatan Patroli dan Pengawasan maupun kegiatan sosialisasi serta pembagian Banner dan setiker kepada para pedagang dan masyarakat, adapun tujuan yaitu tingkat pemahaman masyarakat tentang manfaat cukai sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan cukai untuk kepentingan pembangunan, selama tahun 2021 tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Berdasarkan hasil uraian pelanggaran ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat di Kabupaten Purbalingga, kendala-kendala yang dihadapi dalam menurunkan Angka Pelanggaran Ketertiban Umum di Kabupaten Purbalingga yaitu :

- a. Semakin meningkatnya gangguan tibusmtranmas yang diakibatkan oleh dinamika perkembangan sosial, ekonomi masyarakat (Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, pengamen, Orang Gila, anak punk);
- b. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Satpol PP meliputi 54 (lima puluh empat Perda dan 1 (satu) Peraturan Bupati;
- c. Beberapa konflik sosial yang umum terjadi di Kabupaten



- Purbalingga adalah rumitnya perizinan penambangan mineral batuan (Galian C) karena menjadi kewenangan ditarik oleh pusat dengan adanya undang-undang cipta kerja, sehingga berdampak pada banyaknya penambang tanpa ijin yang cenderung merusak lingkungan dan berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat;
- d. Adanya perizinan lewat OSS juga menjadi permasalahan baru adanya konflik sosial dan juga gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, apabagi sistem perijannya lebih mudah akan tetapi hanya membahas dampak lingkungan, justru dampak sosialnya tidak diatur sedangkan dampak sosialnya jauh lebih besar dan lebih penting berkaitan dengan generasi pemuda sebagai penerus bangsa dan negara, contohnya ijin tempat hiburan yang selama ini menjadi pro kontra antar masyarakat.

Adapun solusi guna mengatasi kendala permasalahan tersebut diatas, upaya yang dilakukan adalah :

- a. Adanya bentuk kerjasama berkaitan pengawasan Mineral logam bukan batu bara antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian Lingkungan Hidup;
- b. Menyusun kebutuhan PPNS di masing-masing dinas teknis, seperti PPNS Tata Ruang (DPU-PR), PPNS Pariwisata, PPNS Perhubungan, PPNS DPMPSTP dan dinas teknis lainnya di Kabupaten Purbalingga serta kebutuhan sarana dan prasarana serta anggaran operasional guna mewartahi dan mendukung operasional Sekretariat PPNS Kabupaten Purbalingga yang ada di satpol PP Kabupaten Purbalingga;
- c. Melakukan sinergitas cipta kondisi ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, serta pelaksanaan patroli kewilayahan antar kecamatan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dan juga melakukan pemetaan potensi konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Memberdayakan sumber daya masyarakat dengan membentuk Kader Siaga Tramtib (KST) atau memberdaayakan Satuan Perlindungan Masyarakat dan juga Kader Bela Negara yang sudah ada guna membantu kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga sebagai informan adanya pelanggaran Perda dan Perkada, Ketentraman dan Ketertiban



- Umum di Kabupaten Purbalingga serta dukungan anggaran operasionalnya untuk kegiatan piket di kecamatan dan juga patroli wilayah serta dukungan anggaran dan operasionalnya;
- e. Memperkuat inovasi Unit Bianglala (Unit Pembinaan Pengemis, Pengamen, Gelandangan dan Orang Terlantar) bersinergi dengan stakeholder teknis guna membentuk simpul-simpul di masing-masing desa/atau kelurahan dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat;
  - f. Pemanfaatan layanan informasi Gangguan Tibumtranmas berbasis Sistem Informasi Geospasial (SIG) dengan Inovasi SiPAGerBaya (Sistem Informasi Pelayanan Aduan Gangguan Tibumtranmas, Bencana dan Bahaya Kebakaran) yang ada pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga secara optimal dengan harapan masyarakat bisa mengakses serta dapat menyampaikan laporan adanya gangguan keamanan dan ketertiban umum;
  - g. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah membangun fasilitas untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Alun-Alun Purbalingga dan PKL lainnya yang berjualan di titik-titik utama kota di Purbalingga Food Center (PFC) dan Mayong Food Center. Dengan adanya fasilitas bagi PKL maka menjaga ketertiban umum utamanya di wilayah perkotaan dan diharapkan akan berdampak pada peningkatan usaha serta meningkatkan kesejahteraan/ perekonomian keluarga dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran;
  - h. Perlu adanya strategi baru guna menampung seniman agar eksis dinas terkait perlu adanya pembahasan bersama, sehingga para pekerja seni jalanan (PSJ) dapat menuangkan kreatifitasnya, para pekerja seni jalanan diundang oleh dinas teknis untuk selanjutnya mereka untuk membuat semacam paguyuban serta membuat jadwal kegiatan difasilitas yang perlu disiapkan misal di area Purbalingga Food Center, Usman Janatin Park, ataupun di samping area Parkir Halaman GOR Goentor Darjono Purbalingga, dengan adanya event yang dilakukan setiap hari secara bergantian sehingga menarik para penggemar seni bisa menikmati sajian hiburan serta para pedagang kaki lima (PKL) tidak kembali ke area Alun-Alun Purbalingga lagi dan juga adanya sanksi yang tegas bagi para pelanggar.

## 2. Angka Kriminalitas

Stabilitas keamanan dan ketertiban umum menjadi alasan penting guna mendukung terwujudnya rasa aman dan tentram dalam



masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Salah satu tolok ukur ketertiban dan ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat adalah minimnya kasus kriminalitas yang terjadi. Berikut *trend* kasus kriminalitas di Kabupaten Purbalingga :

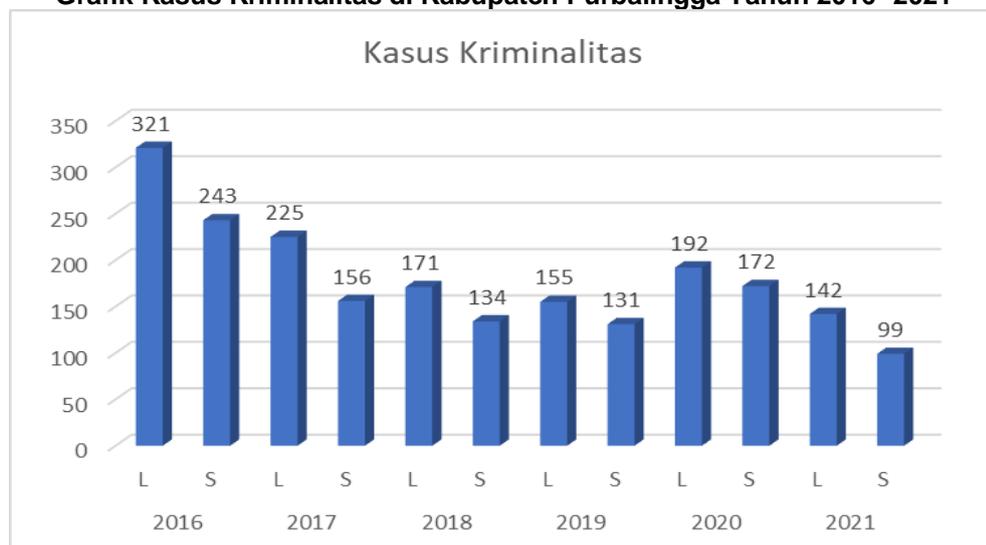
**Tabel 2.34**  
**Kasus Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 s.d Tahun 2021**

URAIAN	TAHUN											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
Kasus Kriminalitas	321	243	225	156	171	134	155	131	192	172	142	99

Sumber : Polres Purbalingga, 2021  
Ket : L = Lapor S = Selesai

Dari kasus kriminalitas yang terjadi, tercatat pada tahun 2021 terjadi 142 kasus. Berdasarkan perhitungan, maka angka kriminalitas tahun 2021 per 10.000 penduduk sebesar 1,40 dibandingkan kasus di tahun 2020. Meskipun target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 2 per 10.000 penduduk tidak tercapai, akan tetapi angka kriminalitas dapat ditekan hal ini kasus kriminalitas tahun 2021 mengalami penurunan 50 kasus dibandingkan ditahun 2020 sebanyak 192 kasus, dengan demikian angka kriminalitas sebesar 1,40 per 10.000 penduduk mengalami penurunan 1,36 poin ditahun 2021. Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Purbalingga, kenaikan kasus tersebut didominasi oleh kasus narkoba sejumlah 33 kasus.

**Gambar 2.10**  
**Grafik Kasus Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 -2021**



Selanjutnya dari grafik di atas, untuk tingkat penanganan kasus kriminalitas di Kabupaten Purbalingga untuk 3 tahun terakhir mengalami tren kenaikan dalam kisaran rata-rata penyelesaian kasus sebesar 84,15%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak terlepas dari upaya-upaya strategis yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga antara lain:

- a. Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui optimalisasi Satuan Perlindungan Masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan dengan. Adapun kegiatan teknis yang dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan pembinaan terhadap Satlinmas Eks Pembantu Bupati Wilayah Purbalingga, Bobotsari dan Bukateja;
- b. Patroli wilayah bersama dengan unsur TNI, Polri bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dengan titik sasaran daerah-daerah rawan keamanan dan ketertiban umum;
- c. Melaksanakan Rakor Tibumtranmas setiap tri wulan atau semesteran.

Kendala/atau permasalahan yang mempengaruhi Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga adalah :

- a. Minimnya peran serta masyarakat umum dalam pencegahan tindak kriminal;
- b. Dampak dari kesenjangan sosial atau kemiskinan yang menjadi salah satu faktor pendorong tindak kriminalitas;
- c. Sinergitas antara aparat keamanan lainnya seperti dengan Kepolisian, TNI, Unsur Kecamatan, Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan yang masih perlu dioptimalkan, khususnya dengan membangun jaring komunikasi intelijen;
- d. Penegakan hukum yang masih sektoral belum komprehensif;
- e. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum sehingga menyebabkan masih adanya tindak kriminalitas yang tidak dilaporkan oleh masyarakat, dan menyebabkan timbulnya kecenderungan main hakim sendiri dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hukum.

Solusi yang dilaksanakan antara lain :

- a. Peningkatan koordinasi dengan TNI dan Polri dalam penanganan gangguan kriminalitas;
- b. Meningkatkan upaya dukungan dari unsur Forkopimda melalui peningkatan intensitas rapat koordinasi jajaran Forkopimda;
- c. Peningkatan profesionalitas Sumber Daya Aparatur yang



menangani keamanan, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui Diklat Deteksi Dini Bagi Anggota Satpol PP dan Satlinmas;

- d. Peningkatan Koordinasi Pengamanan, pengembangan penyelidikan dan penguatan kelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Penguatan Kelembagaan Intelijen Daerah;
  - e. Peningkatan patroli cipta kondisi wilayah melalui kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, serta pelaksanaan patroli kewilayahan antar kecamatan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dan nsur keamanan lainnya;
  - f. Memberdayakan masyarakat melalui kegiatan jaga tangga dengan seperti ronda di masing-masing RT di Desa/Kelurahan.
3. Indeks Toleransi

Indeks toleransi diukur dari rata-rata banyaknya potensi konflik yang terjadi dan tertangani di Kabupaten Purbalingga. Dari keragaman yang ada, potensi konflik yang sering terjadi di Kabupaten Purbalingga berdasarkan data kejadian disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.35**  
**Indeks Toleransi**

No	Jenis konflik	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Yang terjadi	Yang tertangani	Yang terjadi	Yang tertangani	Yang terjadi	Yang tertangani
1	Konflik Agama	-	-	-	-	-	-
2	Gangguan Keamanan dari Kelompok Radikal	-	-	-	-	-	-
3	Konflik Sosial Lainnya	11	11	12	12	7	7
	<b>Indeks Toleransi (baris 1+2+3 dibagi 3)</b>		<b>3,6</b>		<b>4</b>		<b>2,33</b>

Kenaikan tersebut utamanya dikarenakan munculnya potensi konflik baru di tahun 2020 meliputi :

- a. Permasalahan galian C;
- b. Penolakan pembangunan pabrik beton.
- c. Permasalahan dugaan penganiayaan verbal oleh Kepala Bagian kepada Karyawan PT Boyang antara LSM Garda Anak Bangsa



- dengan manajemen PT Boyang;
- d. Unjuk rasa Calon Perangkat Desa yang tidak lulus seleksi Penjaringan Perangkat Desa.

Selanjutnya kenaikan konflik tahun 2021 dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.36**  
**Data Konflik Tahun 2021**

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	20 Januari 2021	Penyampaian Aspirasi Galian C warga desa Selanegara Kecamatan Kejobong
2	15 Januari 2021	Mediasi Galian C Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon di pendopo kecamatan kemangkon
3	25 Januari 2021	Penolakan pembangunan pabrik beton (mini rateling plant) CV. Mandiri Rizky Rangga Teknik Beton warga perumahan Griya Perwira Desa Padamara Kecamatan Padamara karena sudah beroperasi
4	1 Februari 2021	Mediasi Galian C Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon di aula balai desa Kemangkon
5	24 Februari 2021	Mediasi penolakan warga Desa Jetis adanya PT Universal Fishing Gear Solution
6	23 Desember 2021	Mediasi permasalahan dugaan penganiayaan verbal oleh Kepala Bagian kepada Karyawan PT Boyang antara LSM Garda Anak Bangsa dengan manajemen PT Boyang
7	31 Desember 2021	Unjuk rasa Calon Perangkat Desa yang tidak lulus seleksi Penjaringan Perangkat Desa di Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target yang telah di tetapkan tidak tercapai, hal ini dikarenakan konflik yang terjadi mengalami penurunan menjadi adalah 7 (tujuh) kejadian. Adapun penyebab yang paling dominan dari potensi kenaikan konflik di tahun 2021 adalah adanya aktivitas penambangan Galian C yang berdampak kerusakan jalan dan lingkungan. Selanjutnya dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, langkah-langkah strategis yang telah ditempuh adalah :

- a. Optimalisasi sasaran program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- b. Optimalisasi pemantauan kegiatan WNA dan NGO di masyarakat, agar dapat dilakukan antisipasi jika ada kegiatan yang mengarah pada penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan nilai-



- nilai Pancasila dan potensi ke kriminal;
- c. Memperkuat kelembagaan FKDM sebagai upaya memperkuat deteksi dini dan cegah dini terhadap segala kemungkinan masalah IPOLEKSOSBUDHANKAM;
  - d. Optimalisasi koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
  - e. Optimalisasi koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
  - f. Meningkatkan fasilitasi forum kemitraan FKUB, meningkatkan sosialisasi Kerukunan Hidup Beragama dan sosialisasi wawasan kebangsaan serta pembauran kebangsaan;
  - g. Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan keormasan;
  - h. Memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai berita hoax, melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh keagamaan.

Dalam upayanya untuk menurunkan konflik di Kabupaten Purbalingga beberapa langkah yang telah ditempuh antara lain :

- a. Membentuk dan memfasilitasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purbalingga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Purbalingga guna mendapatkan penyelesaian diantara pihak-pihak yang bermasalah;
- c. Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Konflik Sosial ke masyarakat bersama instansi terkait. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang setiap saat bisa muncul seiring dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah dan berkaitan erat dengan fenomena sosial yang terjadi saat itu;
- d. Memberdayakan masyarakat utamanya para tokoh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan cegah dini melalui wadah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Hal ini diantaranya dilakukan melalui pertemuan operasional FKDM sebagai wahana menggali informasi, menyikapi dan mengevaluasi



dinamika sikonca setempat;

- e. Memberdayakan masyarakat utamanya para tokoh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan cegah dini melalui wadah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Hal ini diantaranya dilakukan melalui pertemuan operasional FKDM sebagai wahana menggali informasi, menyikapi dan mengevaluasi dinamika sikonca setempat;
- f. Memberdayakan para tokoh agama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui wadah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB). Hal ini diantaranya dilakukan melalui pertemuan FKUB sebagai sarana silaturahmi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul antar umat beragama, serta menyikapi dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah dengan cepat yang dapat mempengaruhi kehidupan umat beragama;
- g. Memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk turut serta menjaga kerukunan dan meminimalisir potensi konflik SARA;
- h. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba melalui penyuluhan P4GN di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk meminimalisir kasus narkoba yang dapat berakibat pada permasalahan sosial dan kriminal;
- i. Membentuk dan memfasilitasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- j. Mengadakan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Organisasi Kemasyarakatan;
- k. Mengadakan sosialisasi pemantapan faham Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Program yang mendukung capaian sasaran tersebut adalah :

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
- c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.



**SASARAN 2 :**  
**MENINGKATNYA KETAHANAN DAERAH DALAM**  
**PENANGGULANGAN BENCANA**

Hasil evaluasi pada tujuan sasaran strategis Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana mendapatkan nilai rata-rata 95,28% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.37**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketahanan daerah**  
**Dalam penanggulangan bencana**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Persen	65,69	66,11	66,53	66,53	70	66,7	95,28

Indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui rata-rata persentase cakupan pelayanan bencana alam dan cakupan Desa tangguh bencana yang diperoleh melalui pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam. Adapun perhitungan sebagaimana tabel terlampir :

**Tabel 2.38**  
**Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana**  
**Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Cakupan pelayanan bencana alam	%	100	100
2	Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam	%	40	33,4
	<b>Indeks Ketahanan Daerah Dalam penanggulangan Bencana (Realisasi Kinerja Baris 1 + 2 dibagi 2)</b>			<b>66,7</b>

Sumber : BPBD Kabupaten Purbalingga, 2021

Dengan capaian tersebut tersebut, diharapkan korban bencana alam yang terjadi di Wilayah Kabupaten Purbalingga semakin sedikit, walaupun Wilayah Kabupaten Purbalingga dinilai masuk dalam wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi.

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan oleh BNPB Tahun 2020 (update terakhir), Kabupaten



Purbalingga menempati rangking 9 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, dan pada peringkat 161 secara nasional. Indeks tersebut diukur dengan memperhitungkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana didukung upaya-upaya sebagai berikut :

a. Cakupan Pelayanan Bencana Alam

Cakupan Pelayanan Bencana Alam pada dasarnya merupakan penanganan terhadap kejadian bencana yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2021, pelayanan penanggulangan bencana alam tercapai. Adapun pelayanan penanggulangan bencana diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.39**  
**Pelayanan Korban Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

NO	JUMLAH KORBAN BENCANA (BERAT/SEDANG/RINGAN)	JUMLAH KORBAN BENCANA YANG TERTANGANI	REALISASI %
1	14	14	100

Pada tahun 2021, tercatat kejadian bencana sebanyak 92 kali meliputi : meliputi kejadian bencana angin ribut sebanyak 28 kali, bencana kebakaran sebanyak 38 kali, bencana banjir sebanyak 7 kali, bencana tanah longsor sebanyak 19 kali dan kekeringan sebanyak 1 kali. Sedangkan musim kemarau yang terjadi pada bulan Agustus-Oktober juga berdampak kekeringan/kekurangan air bersih pada 4 (empat) Desa di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Kejobong, Kemangkon dan Karangmoncol.

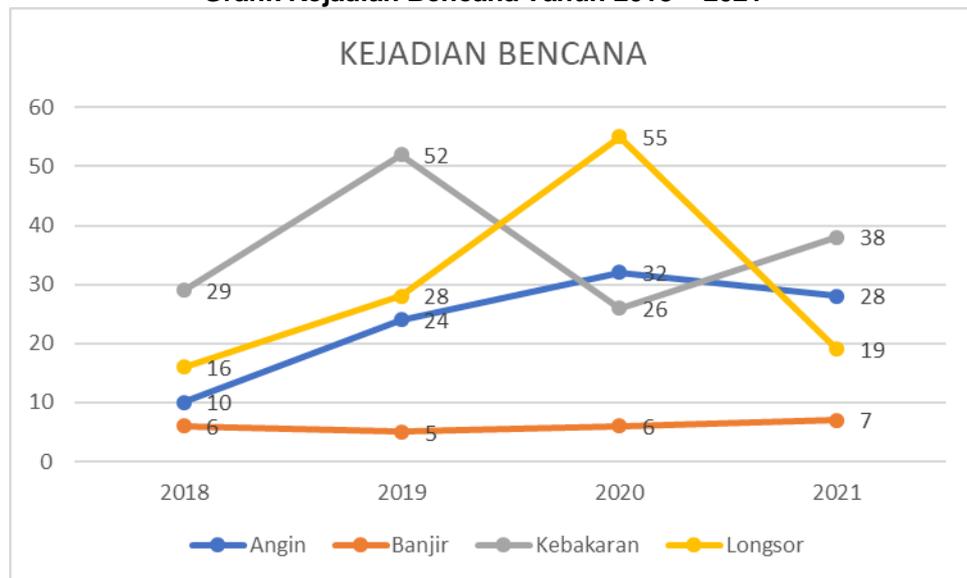


**Tabel 2.40**  
**Kejadian Bencana Alam Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Purbalingga**

No.	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian (kali)	Terdampak							
			Jiwa		Rumah					
			Meninggal (org)	Luka (org)	Roboh (unit)	Rusak berat (unit)	Rusak Sedang (unit)	Rusak ringan (unit)	Terancam (unit)	Jumlah (unit)
1	ANGIN	28	-	-	4	9	24	199	-	236
2	KEBAKARAN	38	1	1	3	19	8	3	-	33
3	BANJIR	7	-	-	3	-	-	80	251	334
4	TANAH LONGSOR	19	-	-	-	-	6	6	12	24
5	GEMPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KEKERINGAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>288</b>	<b>263</b>	<b>627</b>

Sedangkan kejadian bencana pada Tahun 2018 – 2021 disajikan pada grafik sebagai berikut :

**Gambar 2.11**  
**Grafik Kejadian Bencana Tahun 2018 – 2021**



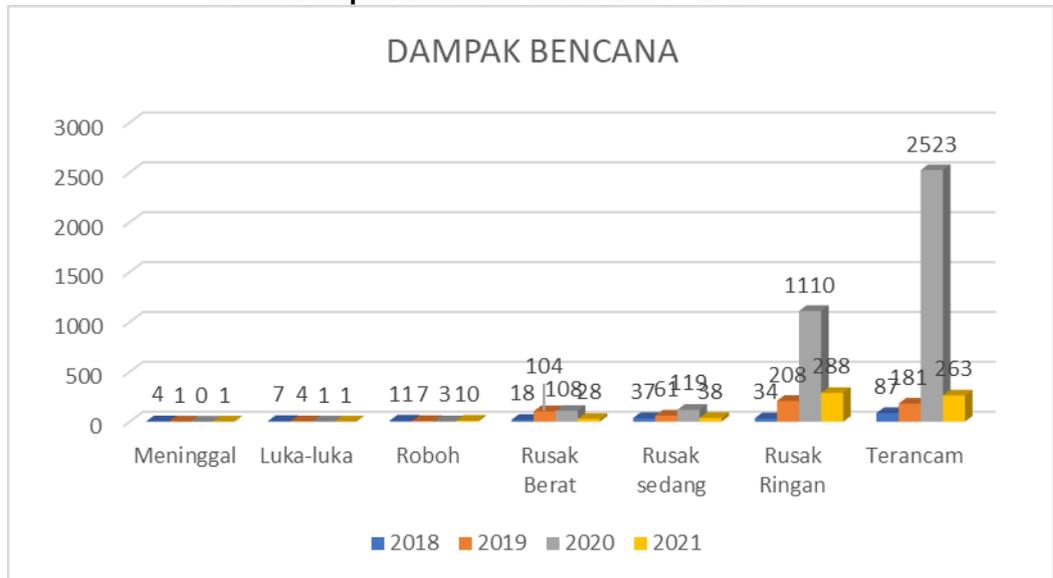
Sumber : BPDB Kabupaten Purbalingga

Dampak dari kejadian bencana tersebut mengakibatkan kerusakan rumah di sekitar wilayah yang terkena bencana. Rumah yang terdampak bencana pada tahun 2021 sebanyak 627 unit, terbagi menjadi beberapa kriteria yaitu roboh, rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, terancam dan terendam. Nilai kerugian yang dialami sebesar Rp. 4.130.475.000,00. Berikut disajikan grafik dampak dan

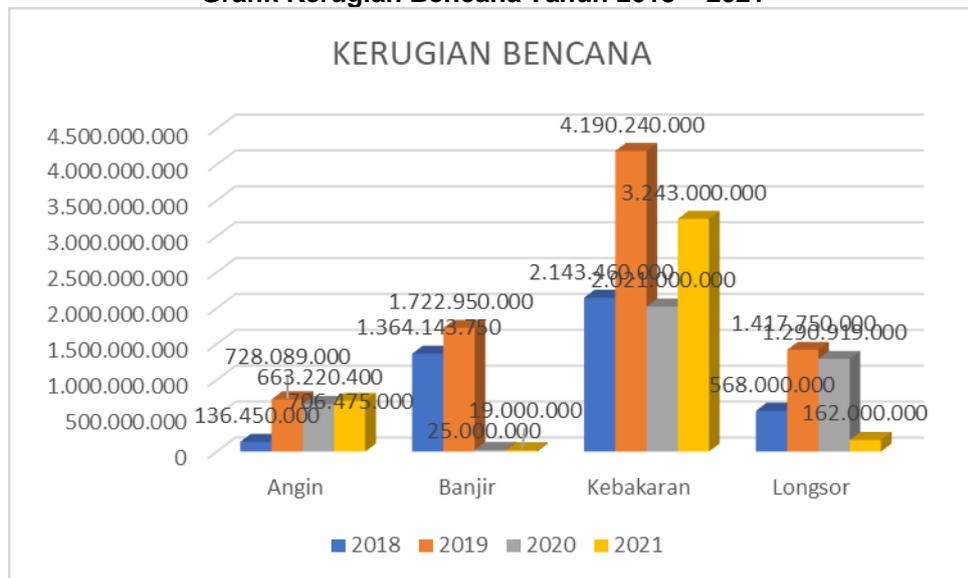


kerugian akibat bencana sebagai berikut :

**Gambar 2.12**  
**Grafik Dampak Bencana Tahun 2018 – 2021**



**Gambar 2.13**  
**Grafik Kerugian Bencana Tahun 2018 – 2021**



Dari grafik dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tidaklah sedikit, tapi disisi lain tampak bahwa korban terdampak dari bencana di wilayah Kabupaten Purbalingga semakin menurun, sehingga beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan waspada bencana cukup berhasil. Upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menangani korban bencana sebagai berikut :

**Tabel 2.41**  
**Bantuan Bencana Tahun 2021**

NO	BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH KERUGIAN	JUMLAH PENERIMA BANTUAN	
				JUMLAH KK	BESAR BANTUAN
1	Angin	28 Kali	Rp. 706.475.000,-	5 orang	Rp. 2.850.000,-
2	Kebakaran	38 Kali	Rp. 3.243.000.000,-	8 orang	Rp. 5.000.000,-
3	Banjir	7 Kali	Rp. 19.000.000,-	- orang	Rp. -
4	Tanah longsor	19 Kali	Rp. 162.000.000,-	1 orang	Rp. 300.000,-
5	Gempa	-	Rp. -	-	-
6	Kekeringan	1 Kali	Rp. -	4 Desa (3 Kec)	62 tangki
	<b>Total</b>	<b>93 Kali</b>	<b>Rp. 4.130.475.000,-</b>	<b>14 orang</b>	<b>Rp. 8.250.000,-</b>

Bantuan kepada korban bencana diberikan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Bantuan uang yang diberikan kepada korban yang mengalami dampak kerugian berat/sedang sejumlah 66 orang dengan total bantuan uang sebesar Rp. 8.250.000,00 yang berasal dari PMI Kabupaten Purbalingga
- b. Untuk bencana kekeringan yang melanda 4 Desa di 3 Kecamatan wilayah Kabupaten Purbalingga, telah dilaksanakan dropping air bersih sebanyak 62 tangki yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui BPBD Kabupaten Purbalingga nilai sebesar Rp. 10.850.000,00

**Tabel 2.42**  
**Bantuan Bencana Kekeringan Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TANGKI
1	Kejobong	1	55
2	Kemangkon	2	6
3	Karangmoncol	1	1
4	<b>Jumlah Total</b>	<b>4</b>	<b>62</b>



b. Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam

Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam untuk tahun 2020 masih sama dengan capaian pada tahun 2019 yaitu sebanyak 79 Desa Tangguh Bencana, dengan persentase sebesar 33,05%. Ketidaktercapaian target kinerja tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 40% karena pada tahun 2020 tidak melaksanakan kegiatan pembinaan Desa tangguh bencana karena adanya refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Selanjutnya data jumlah desa tangguh bencana di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

**Tabel 2.43**  
**Jumlah Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	JUMLAH	DESA
1.	Karangmoncol	6	Rajawana, Tajug, Baleraksa, Tunjungmuli, Kramat dan Sirau
2.	Karanganyar	9	Kaliori, Kalijaran, Karanganyar, Karanggedang, Maribaya, Bungkanel, Ponjen, Kalijaran dan Brakas
3.	Purbalingga	1	Desa Toyareja
4.	Kaligondang	1	Desa Cilapar
5.	Bobotsari	7	Banjarsari, Pakuncen, Gunungkarang, Tlagayasa, Limbasari, Palumbunganwetan dan palumbunganWetan
6.	Mrebet	3	Binangun, Pangalusan, dan Sangkanayu
7.	Kertanegara	8	Margasana, Kertanegara, Kasih, Karangasem, Adiarsa, Langkap, Darma, Kranean (8)
8.	Bojongsari	1	DesaBumisari
9.	Karangreja	7	Gondang, Kutabawa, Serang, Siwarak, Karangreja, TlahabLor dan TlahabKidul
10.	Karangjambu	6	Sirandu, Purbasari, Karangjambu, Sanguwatang, Jingsang dan Danasari
11.	Rembang	12	Wlahar, Bantarbarang, Gunungwuled, Losari, Bodaskarangjati, Wanogarawetan, WanogaraKulon,



NO	KECAMATAN	JUMLAH	DESA
			Makam, Tanalum, Panusupan dan Karangbawang Sumampir,
12.	Kemangkon	19	Kedungbenda, Bokol, Palumutan, Majatengah, Kedunglegok, Kemangkon, Panican, Bakulan, Karangkemiri, Pegandekan, Senon, Sumulir, Kalialang, Karangtengah, Muntang, Gambarsari, Toyareka, Jetis dan Majasem
	<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	

Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan dan mitigasi bencana yang meliputi Sosialisasi, Simulasi maupun pelatihan-pelatihan kebencanaan di daerah-daerah rawan bencana ataupun di sekolah sekolah sebagai bekal dasar bagi masyarakat apabila terjadi bencana.

**Gambar 2.13 Grafik Trend Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam**



Berdasarkan grafik di atas, cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana mengalami kenaikan dari tahun



2017 sebanyak 75 desa dengan persentase mencapai 31,38 %, menjadi sebanyak 80 desa atau 33,4 % dari total jumlah 239 desa/kelurahan di Kabupaten Purbalingga.

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja :

- a. Pada tahun 2021 dengan masih adanya pandemi COVID-19, beberapa kegiatan rutin dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga fokus pada kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, antara lain melaksanakan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat pelayanan publik, tempat ibadah, sampai dengan ke tingkat Desa;
- b. OPD yang menangani urusan kebencanaan dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 360/290 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Purbalingga berkedudukan sebagai anggota sekretariat, sehingga sebagian pelaksanaan tugas dan fungsi terfokus pada penanganan Covid-19.

Selanjutnya untuk beberapa kegiatan teknis yang tetap dilaksanakan antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak teknis terkait dalam mengupayakan pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanganan bencana;
- b. Melaksanakan monitoring daerah potensi bencana terutama pada daerah-daerah yang sering terkena bencana;
- c. Melakukan pendataan laporan masyarakat yang terkena bencana sebagai rujukan upaya pencegahan selanjutnya;
- d. Menyalurkan bantuan kepada korban bencana;
- e. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana;
- f. Melaporkan kejadian bencana ke tingkat provinsi (BPBD Provinsi Jateng) dan ke BNPB di Jakarta.

Strategi ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah :

- a. Melaksanakan kerja sama dengan akademisi penggiat kebencanaan dalam rangka penyusunan kajian daerah rawan bencana, dan;
- b. Melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka



pemenuhan sarana prasarana kebencanaan di bidang mitigasi berupa pemasangan alat peringatan dini (early warning system) bencana tanah longsor dan rambu peringatan bencana di beberapa lokasi daerah rawan bencana yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana adalah :

- a. Program Penanggulangan Bencana
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

**SASARAN 3 :  
MENINGKATNYA PAHAM DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

Hasil evaluasi pada sasaran strategis Meningkatnya Paham dan wawasan Kebangsaan mendapatkan nilai rata-rata -. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.44  
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Paham dan wawasan Kebangsaan**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi i 2021	Capaian %
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilukada, Pemilu, Pilpres)	%	-	68,39	77,8	73	-	-	-



Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dihitung berdasarkan rata-rata angka partisipasi pemilihan legislatif, pemilihan presiden/ wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Pada tahun 2021, Kabupaten Purbalingga tidak melaksanakan pesta demokrasi. Upaya yang dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah :

- a. Fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik dalam rangka melibatkan peran ormas/orsospol guna menggandeng masyarakat lebih aktif/proaktif dalam pelaksanaan Pemilu sebagai pemilih;
- b. Menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi melalui forum koordinasi pimpinan daerah/muspida, tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap elemen masyarakat;
- c. Sosialisasi kepada warga masyarakat umum pada momen kegiatan kemasyarakatan yang rutin dilaksanakan, seperti Subuh Berjamaah, Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Gotong Royong. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan pada setiap kesempatan lainnya yang dihadiri langsung oleh Kepala Daerah, maupun Kepala Wilayah seperti Camat/Lurah;
- d. Melalui media elektronik seperti Lembaga Penyiaran Lokal "Suara Perwira", facebook resmi Pemkab Purbalingga (Dinkominfo dan Humas Protokol Purbalingga, dan metode lain yang dipandang efektif.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut adalah :

- a. Masyarakat merasa partisipasi mereka tidak akan memberikan perubahan berarti bagi kehidupan mereka terutama dari segi sosial dan ekonomi;
- b. Masyarakat kurang mampu memahami dinamika serta proses politik yang terjadi, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan cenderung apatis terhadap politik atau Pemilu;
- c. Masih marak dan membudayanya praktik money politic, sehingga ada anggapan di masyarakat pada umumnya kapan lagi mendapatkan uang dari kontestan pemilu kalau bukan pada saat mereka membutuhkan hak pilih masyarakat, maka apabila tidak dikasih uang untuk memilih dalam pemilu, mereka tidak akan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya;
- d. Belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan



pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula

Solusi yang dilakukan adalah :

- a. Diadakan sosialisasi, fasilitasi, peningkatan pendidikan politik masyarakat khususnya melalui peran partai politik;
- b. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pendidikan bela negara dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air.

Program yang mendukung capaian sasaran tersebut adalah :

- a. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

**MISI 3 :**  
**” MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT  
UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK”**

**TUJUAN MISI 2 :**  
**MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP PENDUDUK MISKIN**

Hasil evaluasi pada tujuan strategis Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin mendapatkan nilai 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.45**  
**Capaian Indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
Angka Kemiskinan	Persen	18,98	18,80	15,62	15,03	15,9	13-15	16,24	100

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata



pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non makanan lainnya. Dengan batas Garis Kemiskinan (GK) 2.100 kkal/kapita/hari ditambah pengeluaran paling dasar non makanan menghasilkan angka GK Maret 2021 di Kabupaten Purbalingga Rp 384.183,00/kapita/bulan. Hal ini bermakna mereka yang berada di bawah garis tersebut memang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup paling dasar. Angka tersebut masih berada di bawah Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.472.525 dan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.409.193,00.

**Tabel 2.46**  
**Garis Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga 2016-2021**

<b>GARIS KEMISKINAN (GK)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kabupaten Purbalingga (Rp)	301.862	313.343	324.735	355.702	375.199	384.183
Provinsi Jawa Tengah (Rp)	317.348	333.224	350.875	369.385	395.407	409.193
Nasional (Rp)	364.527	374.478	401.220	425.250	454.652	472.525

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2016-2021

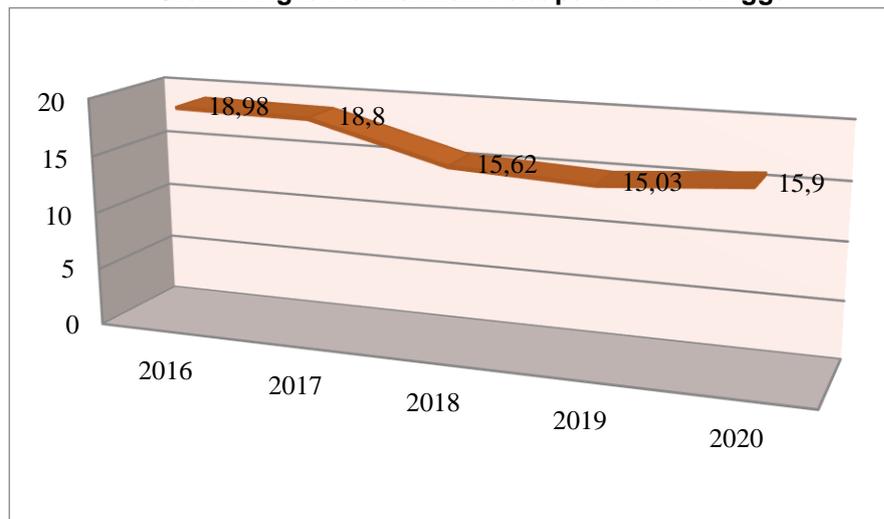
Penghitungan kemiskinan pada dasarnya dapat menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendapatan, namun di negara berkembang seperti Indonesia, pencatatan pendapatan tidak semudah di negara maju yang mampu melaporkan catatan pendapatan penduduknya dengan baik, oleh karena itu pencatatan data pengeluaran cenderung lebih menggambarkan kondisi ekonomi/daya beli sebuah rumah tangga.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2016 - 2021 menunjukkan fluktuasi. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dari 18.98 menjadi 15.03 namun kemudian pada tahun 2020 naik lagi menjadi 15.90 dan



tahun 2021 kembali naik menjadi 16,24 persen. Salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menurun.

**Gambar 2.14**  
**Grafik Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga**



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 – 2021

Adapun bila kinerja angka kemiskinan ini dibandingkan dengan kabupaten sekitar antara lain Cilacap, Banyumas, dan Banjarnegara maka kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga menempati posisi tertinggi setelah Kabupaten Banyumas bahkan jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 2.47**  
**Perbandingan Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan tahun 2016 s.d 2021**

KABUPATEN	KINERJA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
Cilacap	2,45
Purbalingga	2,74
Banjarnegara	1,23
Banyumas	3,57
Provinsi Jawa Tengah	1,48

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga



Penurunan angka kemiskinan ini diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebesar 149.480 jiwa atau turun sekitar 22.300 jiwa dari tahun 2016 lebih baik dari kabupaten tetangga yakni Kabupaten Banjarnegara yang turun sebesar 22.104 jiwa. Sedangkan garis kemiskinan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebesar Rp.375.199,- perkapita perbulan atau naik sebesar Rp.73.337,- dari tahun 2016. Kenaikan garis kemiskinan Kabupaten Purbalingga merupakan tertinggi bila dibandingkan dengan 3 kabupaten tetangga yakni Banyumas, Cilacap dan Banjarnegara. Besarnya kenaikan garis kemiskinan tersebut menggambarkan bahwa kenaikan harga-harga di kabupaten purbalingga lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten tetangga. Sehingga kerja keras TPID harus lebih difokuskan pada harga-harga yang mempengaruhi kebutuhan keluarga miskin (garis kemiskinan). Kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.48**  
**Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan dan Angka Kemiskinan**  
**Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2021**

KARAKTERISTIK KEMISKINAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	171,78	171,88	144,16	140,07	149,48	153,10
Persentase penduduk miskin (P0)	18,98	18,80	15,62	15,03	15,9	16,24
Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	301.862	313.343	324.735	355.702	375.199	384.183
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,85	2,79	2,79	2,24	2,32	2,10
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	1,20	0,68	0,74	0,47	0,44	0,41

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index – P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin



jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Baik Indeks Kedalaman Kemiskinan maupun Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2021 (2,10 dan 0,41) mengalami perbaikan di banding tahun 2016 (3,85 dan 1,20) sebesar (1,75 dan 0,79). Penurunan nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa semakin mendekatnya rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan semakin berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Adapun kinerja penurunan persentase penduduk miskin tahun 2016 sampai dengan 2021 di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.49**  
**Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga 2016 – 2021**

KARAKTERISTIK KEMISKINAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3.85	2.79	2.79	2.24	2,32	2,10
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1.20	0.68	0.74	0.47	0,44	0,41

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2016 – 2021

Kinerja penurunan kedua indikator ini terbaik dari 3 kabupaten tetangga (Banyumas, Banjarnegara, Cilacap).

**Tabel 2.50**  
**Perbandingan Kinerja Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan**

KABUPATEN	KINERJA PENURUNAN	
	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)	INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)
Cilacap	1,10	0,40
Banyumas	0,73	0,28
Purbalingga	1,75	0,79
Banjarnegara	0,06	0,01

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

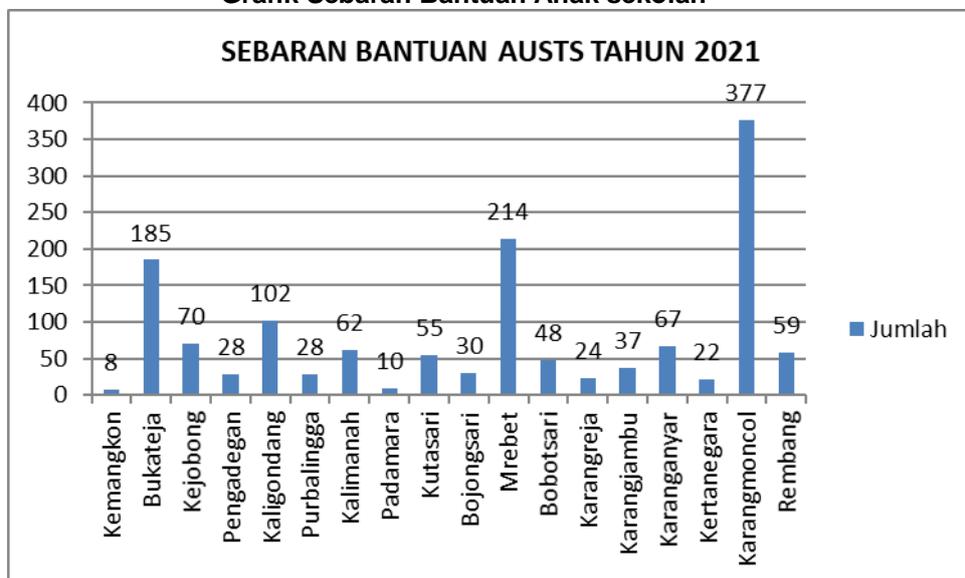
Peningkatan Kualitas kesejahteraan penduduk miskin kabupaten purbalingga pada tahun 2021 tidak lepas dari program yang telah dilakukan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun para filantropis, baik dilaksanakan sendiri maupun sinergi dengan pemerintah daerah. Strategi yang dilakukan dalam



peningkatan kesejahteraan keluarga miskin adalah dengan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan peningkatan pendapatan keluarga miskin. Program Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah dijalankan antara lain :

- a. Beasiswa anak usia sekolah tidak sekolah yang mayoritas diberikan kepada anak dari keluarga miskin, program ini dianggarkan sebesar Rp.1.462.692.000,- dengan banyak sasaran sebanyak 1.500 anak dan realisasi 1.426 anak yang tersebar di 18 kecamatan, sebagaimana grafik di bawah ini.

**Gambar 2.15**  
**Grafik Sebaran Bantuan Anak sekolah**



- b. Rehabilitasi rumah tidak layak huni, program ini pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.7.020.498.000,- yang digunakan untuk merehabilitasi 488 rumah tidak layak huni, selain itu terdapat bantuan rehabilitasi dari provinsi untuk merehabilitasi 318, dana DAK 27, dana BSPS 300, Dana Desa 881 dan Dana CSR 5.

**Tabel 2.51**  
**Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Sampai Dengan 2021**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	20.527	19.302	15.433	13.990	9.544	2.014
2.	Persentase rumah tidak layak huni	%	8,32	7,83	6,26	4,33	3,86	3,04



- c. Jambanisasi, program ini diarahkan untuk penyehatan lingkungan sebagai program preventif di bidang kesehatan lingkungan. Jambanisasi adalah sarana yang juga mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

**Tabel 2.52**  
**Anggaran Program Jambanisasi**

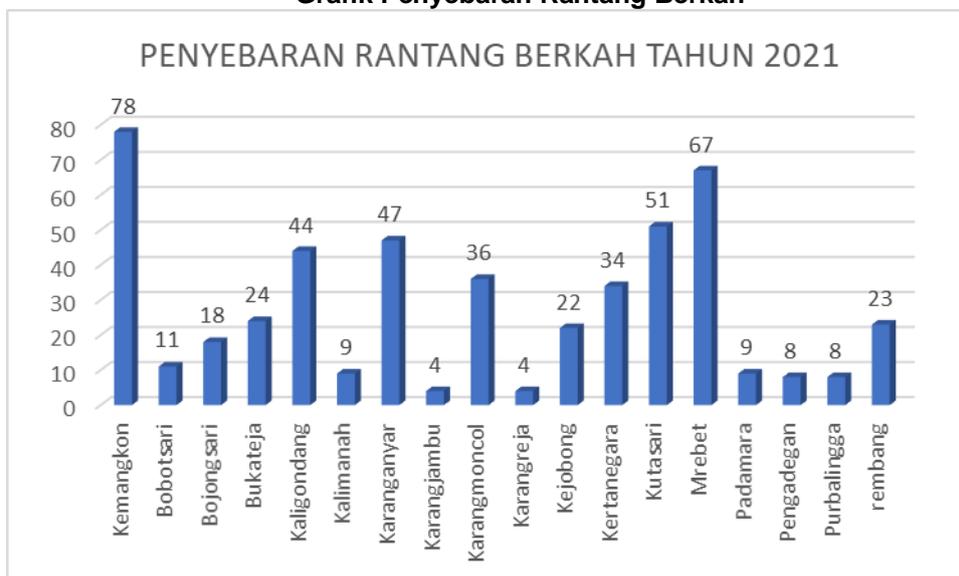
<b>TAHUN</b>	<b>JAMBAN TERSALUR</b>	<b>ANGGARAN</b>
2016	4263	3.000.000.000
2017	4500	3.056.000.000
2018	4000	2.500.000.000
2019	3450	2.372.003.000
2021	620	618.140.000

d. Rantang Berkah

Program Rantang Berkah yaitu pemberian makanan siap santap setiap hari sejumlah 2 porsi kepada para lansia kurang mampu dan sebatangkara. Penerima rantang berkah telah melalui seleksi dari tim kabupaten yang terdiri dari unsur kecamatan sampai dengan desa yang juga mengikutsertakan tokoh masyarakat di wilayah tersebut dan diharuskan datang langsung melaksanakan survei ke rumah masing-masing penerima manfaat rantang berkah untuk mengetahui layak atau tidaknya orang tersebut mendapatkan rantang berkah. Penyalur program rantang berkah bekerjasama dengan pemilik warung UMKM sebagai penyedia rantang berkah. Jumlah lansia di Kabupaten Purbalingga yang tercatat lebih dari 7.000 orang, namun yang miskin dan sebatang kara kurang lebih 2.000 orang dari usulan desa ke dinas sosial yang disaring lagi menjadi 497 orang. Pada tahun 2021 penyaluran kepada lansia dengan anggaran sebesar Rp.4.448.000.000 yang berikan dalam paket nasi dan lauk sebanyak 178.920 paket selama 360 hari untuk 497 orang lansia kurang mampu sebatang kara di 18 kecamatan.



**Gambar 2.16**  
**Grafik Penyebaran Rintang Berkah**



Sumber : DKPP Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

e. Operasionalisasi Rumah Singgah

Kabupaten Purbalingga sudah memiliki Rumah Singgah Dharma Perwira Purbalingga yang diresmikan pada tanggal 8 April 2019, dengan kapasitas 10 shelter, 4 ruang isolasi dan dapat menampung 25 orang. Rumah singgah diperuntukkan sebagai transit/penampungan sementara bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. PMKS yang terdapat pada rumah singgah, biasanya diperoleh dari hasil penjangkaran gabungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja, laporan kepolisian, maupun dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Adapun jumlah hasil penjangkaran yang diperoleh sebagai berikut :

**Tabel 2.53**  
**Data jumlah PMKS yang terkena operasi Tahun 2018-2021**

PMKS	SATUAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Anak Jalanan	Orang	73	117	29	16
Anak Nakal	Orang	2	-	-	14
Eks Napi	Orang	1	-	-	-
Gelandangan	Orang	12	4	7	5
Lansia terlantar	Orang	2	7	6	2
Pemulung	Orang	35	-	-	-



PMKS	SATUAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Pengamen	Orang	34	30	11	32
Pengemis	Orang	69	42	7	35
Psikotik Jalanan	Orang	21	37	7	11
Tunasosial	Orang	6	16	-	-
Waria	Orang	2	2	-	-
Orang Terlantar	Orang		1	7	1
Total	Orang	232	256	74	116

f. Bantuan Sosial kepada Anak Yatim

Dalam pengentasan permasalahan kemiskinan, salah satu program yang dikeluarkan adalah bantuan sosial kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu. Bantuan ini diperuntukan agar dapat dipergunakan untuk biaya pendidikan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu. Besarnya bantuan sosial yang diberikan yaitu untuk 5000 Orang yang terbagi pada seluruh Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Kabupaten Purbalingga. Masing-masing penerima ini mendapatkan bantuan sosial uang senilai Rp.200.000,- dan diberikan dalam satu kali penerimaan.

g. Bantuan Orang dengan Kecacatan Berat

Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Purbalingga terhadap penyandang disabilitas adalah dengan mengeluarkan bantuan sosial bagi Orang dengan Kedisabilitas Berat. Bantuan sosial ODKB ini diharapkan dapat dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam memenuhi hak dasarnya seperti untuk pemeriksaan kesehatannya dan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Bantuan sosial ODKB ini diberikan kepada 300 Orang yang mana setiap orang memperoleh Rp.300.000,- per bulannya, sehingga diperoleh dalam satu tahun yaitu Rp.3.600.000,-.

h. Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperluas kebijakan jaminan perlindungan kesehatan dari penduduk miskin menjadi seluruh penduduk miskin Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target Universal Health Coverage (UHC). Selain memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin pemerintah daerah juga menggratiskan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat



miskin serta di tingkat pelayanan rujukan disediakan subsidi obat bagi masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS. BPJS yang dibayarkan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp.13.907.375.800,- untuk 27.945 jiwa sedangkan capaian UHC Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebesar 864.249 jiwa atau (84,61%) dari jumlah penduduk menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 85,41%.

**Tabel 2.54**  
**Kepesertaan BPJS tahun 2021 Kabupaten Purbalingga**

JENIS IUR BPJS	JUMLAH PESERTA
PBI APBN	553.985
PBI APBD	27.945
Pekerja Penerima Upah	175.352
Pekerja Bukan Penerima Upah	89.688
Bukan Pekerja	17.279
Jumlah	864.249

i. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Rastra, Daging dan Lele)

Bantuan Rastra Purbalingga (Rasbanga) yang meliputi bantuan beras dan daging diberikan kepada masyarakat miskin dengan volume yang sama dengan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Mekanisme bantuan pangan daging dilakukan dengan pemusatan alokasi berdasarkan kecamatan yang dikordinasikan oleh panitia kurban daerah sehingga dapat memperluas cakupan sasaran bantuan.

**Tabel 2.52**  
**Peningkatan ketahanan pangan keluarga**

TAHUN	VOLUME	NILAI (RP)	PENERIMA
<b>1. Beras dan lele</b>			
2021	Beras 52.276 kg dan 15.766 penerima 1 kg lele	820.670.709	33.192
2020	5451 paket (beras dan lele)	299.961.000	5.451
2019	116.776 kg	1.210.207.635	37.794
2018	165.555 kg	1.796.292.550	34.237
2017	199.015 kg	1.984.327.145	41.523



TAHUN	VOLUME	NILAI (RP)	PENERIMA
<b>Jumlah</b>		<b>6.111.459.039</b>	
<b>2. Daging Sapi</b>			
2021	18 ekor	455.400.000	18
2020	18 ekor	404.982.000	18
2019	18 ekor	465.993.000	18
2018	20 ekor	504.000.000	20
2017	20 ekor	312.000.000	20
<b>Jumlah</b>	<b>94 ekor</b>		<b>94</b>

j. Usaha Mikro Naik Kelas

Program ini mendorong agar usaha mikro naik kelas, Hal ini dilakukan dengan menyiapkan tenaga pendamping UMKM di setiap kecamatan, melakukan kerjasama dengan LIPI untuk alih teknologi, pelatihan teknis, fasilitasi teknologi dan kewirausahaan yang menelan anggaran sebesar 2.704.592.400 dengan rincian sebagai berikut :

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Anggaran Rp.1.347.799.400,-;
- Dan Program Pengembangan UMKM dengan Anggaran Rp.1.356.793.000,-.

k. Kartu Tani

Program ini dimaksudkan untuk menjamin akses petani pada pupuk bersubsidi guna mendukung program ketahanan pangan dan menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. Secara filosofis, program ini dilandasi akan pentingnya menjamin produksi dan produktivitas komoditas pertanian, mendukung program ketahanan pangan, dan meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pupuk berimbang. Manfaat Kartu Tani yang diberikan petani adalah :

- Kepastian ketersediaan saprotan bersubsidi/non subsidi;
- Kemudahan penjualan hasil panen oleh off taker (tanpa melalui perantara);
- Kemudahan akses pembiayaan (KUR);
- Menumbuhkan kebiasaan menabung (tidak konsumtif);
- Biaya simpanan lebih ringan;
- Mendapatkan program Prona (BPN);
- Kemudahan mendapatkan subsidi (Kemenkeu, Kementan,



Kemenkop);

- Kemudahan mendapatkan bansos.

Kartu tani yang aktif di kabupaten purbalingga sebanyak 41.744 kartu tani atau 69,32 persen dari total kartu tani yang terbagi yakni 60.220 kartu tani. Jumlah kartu tani yang tercetak 66.698 kartu tani, belum terdistribusi 6.478 kartu tani. Kartu tani aktif Kabupaten Purbalingga diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang hanya 48,78 persen merupakan cakupan tertinggi ke 4 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Batang. Jumlah penebusan pupuk dengan menggunakan kartu tani, urea sebesar 8.827.723 kg, SP-36 : 209.220 kg, ZA : 215.136 kg, NPK : 3.817.953 kg, pupuk organik 187.831 kg.

#### I. Tuka Tuku Produk Purbalingga

Tuka-Tuku adalah sebuah *platform* yang digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk membantu pemasaran produk UMKM. Tuka-Tuku akan mendorong dan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran, terutama pasar *online*. Sebagai akselerasi/percepatan, Tuka-Tuku menggandeng PT Bukalapak, salah satu perusahaan *e-commerce* terkemuka di Indonesia. Programnya bernama “Tuka Tuku Produk UMKM Purbalingga x Bukalapak”, dan Bekerja sama dengan Perusahaan Waralaba Alfamart dan Indomaret di Wilayah Kabupaten Purbalingga sampai saat ini berjumlah 45 Gerai Alfamart dan 25 Gerai Indomaret. Tuka-Tuku menyediakan personel untuk membantu branding produk yang ditampilkan, antara lain membantu foto, editing, deskripsi produk. Hasil yang dicapai :

- Sampai saat ini program tuka tuku telah ada 68 item barang. Barang-barang tersebut sudah melalui kurasi dan branding;
- Omset total sejak MoU 31 Agustus 2019 s/d Desember 2021 sebesar Rp.224.806.000;
- Produk yang paling laku Makaroni Keju Alfath, Kacang Mirasa, Abon Sapi Cap Koki, Koktail Nanas, Nanasqu, Koktail Nanas Al Meidah.

#### m. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa

Rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun oleh pemerintah dalam satu lingkungan tempat hunian dan disewakan kepada keluarga kurang mampu dengan cara pembayaran per bulan. Syarat untuk dapat tinggal di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kabupaten Purbalingga adalah WNI penduduk Kabupaten Purbalingga yang



dikhususkan bagi pekerja pabrik, masyarakat berpenghasilan rendah (kurang dari Rp.2.000.000,-), belum memiliki rumah dan mengisi formulir pendaftaran sesuai ketentuan. Jumlah Penghuni pada tahun 2021 adalah sebanyak 58 kepala keluarga.

n. Subsidi Bunga untuk UMK

Program subsidi bunga kepada UMK adalah untuk memfasilitasi pelaku mikro dan kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan perbankan secara profesional. Subsidi Bunga diberikan dalam bentuk subsidi Imbal Hasil bagi Pelaku UMKM yang memiliki Pinjaman Di Lembaga Keuangan dalam Bentuk potongan Imbal Hasil sebesar 50%. Tujuan dari subsidi bunga kepada UMK adalah :

- Pembelajaran kepada pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengakses permodalan kepada lembaga keuangan perbankan
- Menyediakan permodalan bagi usaha mikro dan kecil dengan suku bunga rendah
- Membantu melepaskan usaha mikro dan kecil dari jeratan pelapas uang
- Memulihkan Kegiatan Usaha Mikro Kecil Dari Dampak Covid-19
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Pada tahun 2021 anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp 500.000.000,- dengan banyaknya usaha mikro dan kecil yang dilayani adalah 1.318 usaha mikro dan kecil dengan jumlah dana yang tersalur Rp. 17.302.065.000 ,-

**Tabel 2.56**  
**Realisasi penyaluran Subsidi bunga Kabupaten Purbalingga tahun 2016 s.d 2021**

TAHUN	ANGGARAN	USAHA MIKRO DAN KECIL TERLAYANI	DANA PINJAMAN TERSALUR
2016	500.000.000	843	8.527.334.000
2017	500.000.000	1.031	9.109.450.000
2018	500.000.000	1.158	8.412.900.000
2019	1.000.000.000	2.112	14.507.470.000
2020	1.000.000.000	20.170	14.220.025.807
2021	500.000.000	1.318	17.302.065.000



o. Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh TPID adalah :

- Peningkatan kualitas koordinasi tim pengendali inflasi daerah, mendorong struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, khususnya untuk komoditas kebutuhan pokok masyarakat serta mengelola dampak dari penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- Perbaikan kualitas sarana perdagangan terutama pasar rakyat.
- Peningkatan kegiatan operasi pasar khususnya operasi pasar bahan pokok masyarakat.
- Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi
- Penyusunan laporan hasil analisis permasalahan ekonomi sektor riil untuk memberikan rekomendasi kebijakan pengendalian pangan di daerah.

Selanjutnya untuk mendukung capaian kinerja tujuan, maka ditetapkan Sasaran Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

**SASARAN 1 :  
MENINGKATNYA STATUS PANGAN MASYARAKAT**

Secara umum ketahanan pangan Kabupaten Purbalingga cukup baik dari sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Pada sistem ketersediaan pangan berdasarkan hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 produksi komoditas pangan utama menunjukkan surplus apabila dibandingkan dengan konsumsi penduduknya. Untuk komoditas beras mengalami surplus sebanyak 9.748 ton. Namun demikian terdapat beberapa komoditas yang produksinya lebih sedikit dibandingkan dengan konsumsinya.

**Tabel 2.57  
Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85,21	85,5	86,9	88,8	87,1	80,3	92,19



Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menemukan pola penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 80,3 lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 87,1. Dibandingkan tahun tahun 2017 sebesar 85,21 dan tahun 2018 sebesar 85,5 dan tahun 2019 sebesar 86,9 dan 2020 sebesar 88,8. Dari tahun ke tahun pencapaian skor pola pangan harapan kabupaten Purbalingga Terdapat penurunan konsumsi sejumlah bahan pangan penting dibandingkan hasil penghitungan tahun sebelumnya. Terlihat dari penurunan skor Pola Pangan harapan yang berasal antara lain dari konsumsi umbi-umbian sebesar 0,8 lebih rendah dari konsumsi tahun sebelumnya sebesar 1,1; pangan hewani sebesar 17,1 lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 18,7; kacang-kacangan skor hanya mencapai 5,5 menurun dari tahun sebelumnya 6,2 dan sayuran dan buah sebesar 24,7 lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 30, serta buah dan biji berminyak masih tetap sebesar 0,2. Untuk konsumsi padi-padian sebesar 25 dan minyak sebesar 5 sudah tercukupi. Pada sistem konsumsi pangan, langkah yang telah ditempuh adalah peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan. Hal tersebut dapat diukur dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang menunjukkan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat.

**Tabel 2.58**  
**Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

NO	KELOMPOK PANGAN	BERAT (Gram)	KKAL/ KAP	%	AKE	BOBOT	SKOR AKTUAL	Skor AKE	SKOR MAKS	SKOR PPH
1	Padi-padian	267,9	1.095	58,6	52,2	0,5	29,3	26,1	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	31,3	34	1,8	1,6	0,5	0,9	0,8	2,5	0,8
3	Pangan Hewani	66,5	179	9,6	8,5	2,0	19,2	17,1	24,0	17,1
4	Minyak/ Lemak	28,0	252	13,5	12,0	0,5	6,7	6,0	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,3	7	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	1,0	0,2
6	Kacang-kacangan	24,0	58	3,1	2,8	2,0	6,2	5,5	10,0	5,5
7	Gula	21,9	82	4,4	3,9	0,5	2,2	2,0	2,5	2,0



NO	KELOMPOK PANGAN	BERAT (Gram)	KKAL/ KAP	%	AKE	BOBOT	SKOR AKTUAL	Skor AKE	SKOR MAKS	SKOR PPH
8	Sayur dan buah	227,0	104	5,5	4,9	5,0	27,7	24,7	30,0	24,7
9	Lain-lain	74,9	58	3,1	2,8	-	-	-	-	-
			1.871	100	89,1		92,4	82,3	100,0	80,3

Sumber : DKPP Kabupaten Purbalingga

Dari 9 komponen bahan makanan yang dikonsumsi bisa kita ukur skor PPH konsumsi rata-rata Masyarakat Purbalingga. Konsumsi beras sudah mencukupi, dengan skor 25 dari 25 yang dipersyaratkan. Konsumsi minyak dan lemak sudah mencapai 5 dari 5 yang dipersyaratkan. Pangan hewani baru mencapai skor 17,1 dari 24 skor yang dipersyaratkan.

Konsumsi umbi-umbian sudah mencapai skor 0,8 dari skor 2,5 yang dipersyaratkan. Konsumsi buah/ biji berminyak baru mencapai 0,2 dari skor 1 yang dipersyaratkan. Konsumsi kacang-kacangan sudah mencapai skor 5,5 dari skor 10 yang dipersyaratkan. Konsumsi gula sudah mencapai skor 2,0 dari skor 2,5 yang ideal. Konsumsi sayur-sayuran sudah mencapai skor 24,7 dari skor 30 yang dipersyaratkan. Itu artinya konsumsi masyarakat Purbalingga yang masih kurang adalah konsumsi pangan hewani dan kacang-kacangan. Dari skor pola pangan harapan diatas bisa terlihat bahwa angka konsumsi protein hewani masih kurang. Oleh sebab itu perlu adanya intervensi terhadap peningkatan angka konsumsi hewani.

**Tabel 2.59**  
**Neraca Bahan Makan Tahun 2021**

KELOMPOK BAHAN PANGAN	ENERGI (KALORI/HARI)	PROTEIN (GRAM/HARI)	LEMAK (GRAM/HARI)
1. Padi-padian	1.364	31,05	10,87
2. Makanan berpati	211	1,39	0,48
3. Gula	578	4,57	15,24
4. Buah biji berminyak	259	15,53	17,60
5. Buah-buahan	98	1,36	0,75
6. Sayur-sayuran	57	2,47	0,67



KELOMPOK BAHAN PANGAN	ENERGI (KALORI/HARI)	PROTEIN (GRAM/HARI)	LEMAK (GRAM/HARI)
7. Daging	42	3,15	3,19
8. Telur	66	5,08	4,77
9. Susu	42	2,20	2,40
10. Ikan	20	3,76	0,45
11. Minyak dan Lemak	873	0,13	52,39
<b>Total</b>	<b>3.610</b>	<b>70,70</b>	<b>108,81</b>
<b>Nabati</b>	<b>3.437</b>	<b>56,51</b>	<b>97,65</b>
<b>Hewani</b>	<b>173</b>	<b>14,19</b>	<b>11,16</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 11 bahan makanan tersebut, ketersediaan energy sebesar 3.610 kkal/kap/hari yang berasal dari pangan nabati sebesar 3.437 kkal/kap/hari (95,2%) dan yang berasal dari pangan Hewani sebesar 173 kkal/kap/hari (4,8%). Ketersedian protein sebanyak 70,70 gram/kap/hari, yang berasal dari pangan nabati sebesar 56,51 gram/kap/hari (79,92%) dan yang berasa dari pangan hewani sebesar 14,19 gram/kap/hari (20,08%). Adapun untuk ketersediaan lemak sebesar 108,81 gram/kap/hari. Berasal dari nabati sebesar 97,65 gram/kap/hari (89,74 %) dan yang berasal dari pangan hewani sebesar 11,16 gram/kap/hari (10,26%). Jika dibandingkan dengan kebutuhan yang dihitung dari PPH konsumsi yakni sebesar 3.610 kkal/kap/hari maka jumlah ketersediaan sebesar 121%. Ketersediaan protein sebesar 70,70 sementara kebutuhannya sebesar 108,81 gram/kapita/hari atau tingkat ketersediaan sebesar 121,6%. Dengan demikian dengan penghitungan NBM ini ketersediaan pangan tercukupi dengan baik.

**Tabel 2.60**  
**Kebutuhan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

NO	KELOMPOK BAHAN PANGAN	KEBUTUHAN/TAHUN (TON)	KEBUTUHAN/BULAN (TON)	KEBUTUHAN HARIAN (TON)
1.	Padi-Padian	112.989	9.416	310
2.	Umbi-umbian	24.551	2.046	67
3.	Pangan Hewani	28.028	2.336	77



NO	KELOMPOK BAHAN PANGAN	KEBUTUHAN/ TAHUN (TON)	KEBUTUHAN/ BULAN (TON)	KEBUTUHAN HARIAN (TON)
4.	Minyak dan Lemak	11.797	983	32
5.	Buah/Biji Berminyak	545	45	1
6.	Kacang-kacangan	10.130	844	28
7.	Gula	9.222	768	25
8.	Sayur dan Buah	95.728	7.977	262
9.	Lain-lain			

Sumber : DKPP Kabupaten Purbalingga

Dari sisi cadangan pangan masyarakat, berdasarkan hasil pendataan lumbung pangan di Kabupaten Purbalingga jumlahnya masih banyak, lumbung yang masih aktif, berkembang dan dikelola oleh masyarakat berjumlah di tahun 2021 masih 144 unit pada 75 desa/kelurahan. Lumbung pangan masyarakat tersebut berupa lumbung desa, lumbung kelompok tani, lumbung RT, lumbung RW, lumbung dusun dan lumbung mardilayon. Ditahun 2021 mendapat alokasi DAK lumbung sebanyak 1 unit di desa karangjambe dengan Nilai Rp 520.000.000. Secara umum pengelolaannya bersifat sederhana dan bersifat sosial untuk simpan pinjam gabah, dengan aset rata-rata setiap lumbung berkisar 5 ton gabah.

Untuk gabah cadangan pemerintah kabupaten Purbalingga masih utuh dengan stok 41,150 ton GKG dan belum digunakan karena hanya sebagai gabah cadangan pemerintah yang digunakan untuk penanganan bencana atau kerawanan pangan. Pada sistem distribusi pangan, secara umum distribusi pangan berjalan lancar. Demikian juga dari akses dan harga pangan relatif stabil. Hanya beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan pada saat-saat tertentu dan bahan pangan yang masih mengalami ketergantungan pada impor.

Kendala yang dihadapi antara lain belum optimalnya upaya pemenuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih di bawah standar pola pangan harapan. Dalam rangka pemenuhan pangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan terobosan-terobosan untuk mengadakan kegiatan pembagian Raskwas untuk rakyat miskin.



Program yang mendukung sasaran tersebut adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

**SASARAN 2 :  
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN KEPEMILIKAN  
RUMAH LAYAK HUNI**

Kebutuhan rumah layak huni tidak hanya dicukupi melalui perbaikan fisik rumah, namun juga perlu dilengkapi dengan ketersediaan akan akses sarana prasarana yang menunjang antara lain dengan adanya akses air minum dan sanitasi limbah rumah tangga, sehingga diharapkan dengan ketersediaan sarana prasarana tersebut akan meningkatkan kualitas rumah layak huni yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat.

**Tabel 2.61  
Capaian Kinerja Persentase Rumah Layak Huni**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Persentase rumah layak huni	Persen	93,28	93,63	95,21	96,09	95,5	96,96	100,47

Jumlah kepala keluarga yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebanyak 338.871 KK, yang terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah rumah tangga yang sudah mempunyai rumah sebanyak 247.852 KK atau 73,14% dan yang belum mempunyai rumah sebanyak 91.019 KK atau 26,86%. Dari data diatas, rasio kepemilikan rumah yang ada di Kabupaten purbalingga adalah 1,37%. Bisa diartikan bahwa satu rumah ditempati oleh lebih dari satu keluarga. Dari jumlah rumah tersebut, terbagi menjadi dua kategori yaitu rumah yang layak huni sebesar 240.371 rumah atau 96,96% dan rumah yang tidak layak huni sebanyak 7.535 rumah atau 3,04%.



**Tabel 2.61**  
**Data Rumah Tahun 2020**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KK	JUMLAH RUMAH	SISA RTLH	JUMLAH RLH
1	Kemangkon	18.322	12.320	0	12.320
2	Bukateja	20.996	14.803	711	14.092
3	Kejobong	26.484	20.636	822	19.814
4	Pengadegan	22.881	16.400	40	16.360
5	Kaligondang	19.577	14.810	0	14.810
6	Purbalingga	13.842	9.542	243	9.299
7	Kalimanah	9.112	6.106	115	5.991
8	Padamara	19.095	13.417	445	12.972
9	Kutasari	15.124	10.115	461	9.654
10	Bojongsari	17.825	12.899	509	12.390
11	Mrebet	22.336	18.268	347	17.921
12	Bobotsari	12.336	8.469	651	7.818
13	Karangreja	21.582	15.321	367	14.954
14	Karangjambu	26.881	18.600	869	17.731
15	Karanganyar	15.346	10.846	0	10.846
16	Karangmoncol	14.036	10.966	1.231	9.735
17	Kertanegara	20.351	14.563	0	14.563
18	Rembang	22.717	19.771	724	19.047
Jumlah			338.871	247.852	7.535

Sumber : DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang merupakan program Kemenpera untuk mendorong Pemda dalam memfasilitasi penyelenggaraan perumahan swadaya serta membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat menempati rumah dan lingkungan yang layak huni. Disamping bantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga mengeluarkan kebijakan di sektor perumahan dan permukiman yaitu program pengembangan dan peningkatan kualitas perumahan dengan Kegiatan Fasilitas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni. Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendorong peningkatan jumlah rumah layak huni sebanyak 2.014 rumah dengan perincian 488 rumah dari APBD Kabupaten, dan penambahannya adalah kontribusi dari kegiatan rehab RTLH yang didanai dari APBD



Provinsi sejumlah 313, dana DAK 27, dana BPS 300, Dana Desa 881 dan Dana CSR 5 rumah. Pada tahun 2021, karena adanya Covid-19 Pemugaran RTLH dari DAU Kabupaten Purbalingga yang semula dianggarkan sebanyak 727 rumah tidak bisa dilaksanakan seluruhnya karena anggaran dialihkan untuk mendukung penanggulangan Covid-19.

**Tabel 2.63**  
**Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni**

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pemugaran rumah tidak layak huni	Buah	2.150	5.602	3.617	3.883	2.293	2.014

Sumber : Dinrumkim Kabupaten Purbalingga

Kendala dalam pelaksanaan adalah :

- a. Penyusunan Pedoman Umum Rehabilitasi RTLH tidak selesai tepat waktu;
- b. Sebagian anggota Pokmas RTLH dalam pengajuan proposal pencairan tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan rehab RTLH jadi mundur;
- c. Tingkat gotong royong sebagian masyarakat sudah mulai menurun sehingga kesulitan mencari tenaga kerja/tukang;
- d. Adanya tradisi yang diyakini sebagian masyarakat tentang perhitungan waktu untuk memulai rehab rumah akibatnya waktu pelaksanaan rehab rumah tidak sesuai rencana.

Upaya yang ditempuh adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan OPD/instansi terkait dalam penyusunan pedoman umum;
- b. Koordinasi dengan Pokmas di masing-masing desa bersama Tim Pembina pada masing-masing kecamatan memberikan perhatian lebih guna percepatan pelaksanaan rehab rumah;
- c. Memberikan informasi/sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap warga yang membutuhkan bantuan termasuk dalam rehab RTLH;
- d. Memberikan perhatian lebih guna percepatan pelaksanaan rehab RTLH untuk wilayah yang masyarakatnya memegang tradisi perhitungan waktu.

Strategi untuk pencapaian tersebut dengan melakukan sosialisasi arti pentingnya rumah layak huni yang juga merangkul para stakeholder



untuk berpartisipasi dalam pemugaran RTLH serta meningkatkan kepemilikan rumah di Purbalingga antara lain dengan membantu kepemilikan bagi masyarakat melalui :

a. Pembangunan Perumahan

**Tabel 2.64**  
**Data Perumahan**

NO	PERUMAHAN	BENTUK RUMAH	JUMLAH
1	2	3	5
1	Puri Bobotsari	Tapak	75 unit
2	Mutiara Asri Baru	Tapak	42 unit
3	Mardlatilah Galuh	Tapak	42 unit
4	Grand Safira Patemon	Tapak	84 unit
5	Kajongan	Tapak	15 unit
6	Perumahan Samudra Kencana	Tapak	118 unit
7	Gondang Village	Tapak	31 unit
8	Perum Kalika Regency	Tapak	25 unit
9	Perumahan Citra Kalika	Tapak	17 unit
10	Babakan Estate	Tapak	20 unit
11	Perumahan Griya Satria Purbalingga	Tapak	234 unit
12	Kampoeng Rambutan Indah	Tapak	30 unit
13	Griya Perwira Asri II	Tapak	60 unit
14	Puri Babakan Baru	Tapak	83 unit
15	Permata Regency	Tapak	90 unit
16	Griya Safira Selabaya	Tapak	34 unit
17	Grand Safira Babakan	Tapak	146 unit
18	Perumahan Permata Sentosa 1	Tapak	59 unit
19	Perumahan Permata Sentosa 2	Tapak	60 unit
20	Perum Puri Kalimanah	Tapak	54 unit
21	Perum Graha Permata Selabaya	Tapak	179 unit
22	Perumahan Selabaya Indah	Tapak	113 unit
23	Shamara House	Tapak	61 unit



NO	PERUMAHAN	BENTUK RUMAH	JUMLAH
1	2	3	5
24	Alam Kembang Regency	Tapak	19 unit
25	Perumahan Puri Indah Karangjambe	Tapak	40 unit
26	Puri Tama Indah	Tapak	255 unit
27	Griya Perwira Asri I	Tapak	186 unit
28	Puri Boja	Tapak	102 unit
29	Permata Karsen Regency	Tapak	36 unit
30	Griya Safira 3	Tapak	54 unit
31	Perumahan Klaster Taman Hijau	Tapak	18 unit
32	Perum Custer Gading Permai	Tapak	27 unit
33	Green Kanaya	Tapak	60 unit
34	Perumahan Abdi Negara	Tapak	290 unit
35	Puri Padamara Baru	Tapak	33 unit
36	Perumahan Bina Griya Perwira	Tapak	51 unit
37	Perumahan Cluster Berlian	Tapak	41 unit
38	Perumahan Dawuhan Asri Sejahtera	Tapak	25 unit
39	Perumahan Citra Perwira - Karangjambe	Tapak	86 unit
40	Perumahan Penambongan	Tapak	212 unit
41	Mutiara Regency I	Tapak	29 unit
42	Mutiara Regency II	Tapak	80 unit
43	Taman Permata	Tapak	100 unit
44	Mardlatilah Wirasana	Tapak	32 unit
45	Wirasana Regency	Tapak	55 unit
46	Griya Safira Wirasana	Tapak	39 unit
47	Perum Traju Malang	Tapak	45 unit
48	Magantan Asri	Tapak	8 unit
49	Perumahan Sehat Bojong	Tapak	101 unit



NO	PERUMAHAN	BENTUK RUMAH	JUMLAH
1	2	3	5
50	Perumahan Wirasana Indah	Tapak	170 unit
51	Perum Asabri Wirasana	Tapak	291 unit
52	Perum Gemuruh Estate	Tapak	20 unit
53	Perum Bina Graha Residence	Tapak	23 unit
JUMLAH			4.200 unit

Sumber : Dinrumkim Kabupaten Purbalingga

- b. Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa;
- c. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- d. Penunjang bantuan stimulan perumahan swadaya.

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni adalah :

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman
- c. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- e. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah *Absentee*
- f. Program Penatagunaan Tanah

**Misi 4 :**  
**” MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT”**

**TUJUAN MISI 4 :**  
**MENINGKATNYA SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING**

IPM merupakan penjelasan kemampuan penduduk untuk menikmati pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dihitung dari agregasi



tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah 25+ dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

**Tabel 2.66**  
**Capaian Indeks Pembangunan Manusia**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Indeks Pembangunan Manusia	indeks	67,72	68,41	68,99	68,97	>69	69,15	100,22

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Usia Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah serta pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Selama lima tahun terakhir IPM Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 67.72 di tahun 2017 menjadi 69.15 pada tahun 2021. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. IPM Purbalingga pada rentang 60 hingga 70 yang artinya berada pada klasifikasi sedang. Meskipun begitu IPM Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2017-2021. Nilai IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tercatat 69.15. Walaupun nilai ini masih dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 72.86 pada Tahun 2021. IPM Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebesar 69,15 atau mengalami kenaikan sebesar 0,18 point dibanding tahun 2020 yang sebesar 68,97. Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar IPM Kabupaten Purbalingga masih berada diatas Kabupaten Banjarnegara tetapi masih dibawah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Perkembangan indikator komposit IPM Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat



dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.67**  
**Nilai IPM Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun 2013-2021**

KABUPATEN	NILAI IPM								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Purbalingga	65,53	66,23	67,03	67,48	67,72	68,41	68,99	68,97	69,15
Cilacap	66,80	67,25	67,77	68,60	68,90	69,56	69,98	69,95	70,42
Banyumas	68,55	69,25	69,89	70,49	70,75	71,30	71,96	71,98	72,44
Banjarnegara	62,84	63,15	64,73	65,52	65,86	66,54	67,34	67,45	67,86
Kebumen	-	-	-	-	68,29	68,80	69,60	69,81	70,65
Jawa Tengah	68,02	68,78	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16
Nasional	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Empat komponen penghitungan IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Angka harapan hidup Kabupaten Purbalingga terus mengalami kenaikan dari 72,91 pada tahun 2017 menjadi 73,21 pada tahun 2021. Ini berarti bahwa bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 73,21 tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.68**  
**Komponen IPM Kabupaten Purbalingga 2013-2020**

KOMPONEN IPM	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,76	72,80	72,81	72,86	72,91	72,98	73,02	73,14	73,21
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,10	11,51	11,78	11,93	11,94	11,95	11,98	11,99	12
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,68	6,84	6,85	6,86	6,87	7,00	7,14	7,24	7,25
Pengeluaran per kapita disesuaikan : 96 komoditas (ribu rupiah/ orang/ tahun)	8.535	8.539	8.938	9.159	9.340	9.786	10.131	9.914	10.032

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah



Komponen IPM lainnya adalah Pengeluaran Per Kapita Riil yang disesuaikan/*Purchasing Power Parity* (PPP) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur daya beli masyarakat yang dapat diperbandingkan dengan daerah lain secara adil. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat untuk mengukur kualitas hidup layak masyarakat. Pengeluaran per kapitas di hitung dari pengeluaran rumah tangga terdiri atas dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pada kondisi pendapatan terbatas, kebutuhan makanan didahulukan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan.

Pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100. Pengeluaran per kapita diambil dari data pengeluaran 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita kabupaten purbalingga sebesar 10.032 atau naik 118 point dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 9.914. Capaian ini masih berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 11.034. kontribusi komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan terhadap IPM sudah cukup baik yang kenaikannya diatas rata-rata provinsi jawa tengah.

Dari sisi perbandingan pengeluaran per komoditas, pengeluaran untuk non makanan masih lebih tinggi dibanding non makanan yakni sebesar 51,68. Bahkan untuk golongan keluarga miskin perbandingan makanan dengan non makanan mencapai 65,50. Tingginya proporsi pengeluaran makanan karena keterbatasan pendapatan yang diterima oleh masyarakat.

Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan peningkatan produktivitas kerja dan berusaha. Program yang telah dilakukan Pemerintah Daerah adalah :

- a. Pelatihan tenaga kerja di BLK;
- b. Pembangunan dan Pengembangan kepariwisataan;
- c. Program Tuka- Tuku;
- d. Pelatihan kewirausahaan;
- e. Pelatihan teknis dan bantuan peralatan usaha;



- f. Alih teknologi pertanian dengan mekanisasi mesin pertanian;
- g. Pengembangan sentra ikan hias;
- h. Pelatihan budidaya ikan (gurameh dan lele kolam dangkal).

Selanjutnya untuk mendukung capaian kinerja tujuan, maka ditetapkan Sasaran Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

**SASARAN 1 :  
MENINGKATNYA KUALITAS DAN TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang ditempuh. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP 9 tahun dan seterusnya.

**Tabel 2.69  
Rata- rata Lama Sekolah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
Rata - rata lama sekolah	Tahun	6,87	7,00	7,33	7,14	7,24	7,61	7,25

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebesar 7,25. Capaian ini meningkat 0,01 dari tahun 2020. Pada tahun 2020 sebesar 7,24 mengalami kenaikan sebesar 0,1 poin dibandingkan pada tahun 2019 yang naik 0,14 poin dari capaian tahun 2018. Dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, rata – rata lama sekolah Kabupaten Purbalingga selalu menunjukkan tren positif. Capaian tahun tahun 2016 adalah 6,86 tahun naik menjadi 6,87 pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 7,00 pada tahun 2018 serta pada tahun 2021 menjadi 7,25. Hal ini menunjukkan rata-rata penduduk Kabupaten Purbalingga usia 25 tahun ke atas telah menempuh 7,00 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas VII (kelas 1 SMP). Apabila dilihat data di eks Karesidenan Banyumas, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2020 dan 2021 Purbalingga masih peringkat kedua, tahun 2021 sebesar 7,25 dan



di tahun 2020 sebesar 7,24. Angka tersebut masih di bawah Kabupaten Banyumas yang di tahun 2020 sebesar 7,52 dan tahun 2021 sebesar 7,63. RLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 7,75 tahun. Bila dilihat secara peringkat, RLS Purbalingga menduduki peringkat ke 15 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Capaian tersebut juga masih dibawah rata-rata lama sekolah nasional sebesar 8,54. Capaian rata-rata lama sekolah tahun 2015-2021 menurut kabupaten/kota se eks Karesidenan Banyumas dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.70**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Eks Karsidenan Banyumas**

KABUPATEN	TAHUN						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cilacap	6.58	6.90	6.91	6.92	6.93	6.97	7,07
Banyumas	7.31	7.39	7.40	7.41	7.42	7.52	7,63
Purbalingga	6.85	6.86	6.87	7.00	7,14	7,24	7,25
Banjarnegara	6.17	6.26	6.27	6.28	6,50	6,74	6,75
Provinsi Jawa Tengah	7.03	7.15	7.27	7.c35	7,53	7,69	7,75
Nasional	7,84	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Sedangkan apabila dilihat dari data angka penduduk usia sekolah terdapat Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah BARU di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 terbanyak berada di Kecamatan Karangmoncol dan terkecil di Kecamatan Kemangkon.

**Tabel 2.71**  
**Jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah**

NO	KECAMATAN	USIA (Tahun )			JUMLAH
		7 th-12 th	13 th-15th	16 th-18th	
1	Kemangkon	0	8	0	8
2	Bukateja	137	48	0	185
3	Pengadegan	49	21	0	70
4	Kaligondang	16	12	0	28
5	Kejobong	77	25	0	102



NO	KECAMATAN	USIA (Tahun )			JUMLAH
		7 th-12 th	13 th-15th	16 th-18th	
6	Purbalingga	5	23	0	28
7	Kalimanah	20	42	0	62
8	Padamara	5	5	0	10
9	Kutasari	22	33	0	55
10	Bojongsari	17	13	0	30
11	Mrebet	169	45	0	214
12	Bobotsari	44	4	0	48
13	Karangreja	1	23	0	24
14	Karangjambu	8	29	0	37
15	Karanganyar	47	20	0	67
16	Kertanegara	1	21	0	22
17	Karangmoncol	328	49	0	377
18	Rembang	41	18	0	59
	JUMLAH	987	439	0	1426

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Angka Harapan lama sekolah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebesar 12,00 meningkat 0,01 dari tahun 2020 sebesar 11,99 dan tahun 2019 sebesar 11,98. Angka Harapan lama sekolah dari 11,93 tahun 2016 menjadi 11,94 pada tahun 2017, pada tahun 2019 menjadi 11,98. Dan tahun 2020 naik lagi menjadi 11,99. Rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai sekolah diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 12 tahun atau setara dengan SLTA. Angka tersebut tidak terlepas dari peran serta dari pihak pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu adanya program beasiswa, dana biaya operasional sekolah (BOS) dan program pemerintah lainnya yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua siswa.

Hal-hal yang mempengaruhi rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah antara lain :

- Akses Pendidikan

Akses pendidikan juga bisa digambarkan oleh beberapa data lain seperti Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Selain itu, juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau, seperti data tentang rasio antara jumlah sekolah dengan jumlah penduduk atau sarana dan



prasarana pendidikan yang lain. Bagian berikut akan menguraikan situasi untuk beberapa aspek tersebut di atas

- Angka Partisipasi Kasar
  - PAUD Formal tahun 2021 sebesar 164,71%;
  - SD/MI tahun 2021 sebesar 112,32%;
  - SMP/MTs tahun 2020 sebesar 100,30%.
- Angka Partisipasi Murni
  - SD/MI Tahun 2020 sebesar 100,03%;
  - SMP/MTs tahun 2020 sebesar 115,33%.
- Tingkat kelulusan
  - SD/MI sebesar 100%;
  - SMP sebesar 100%.

**Tabel 2.72**  
**APK dan APM Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021**

Uraian	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Angka Partisipasi Kasar (APK)							
- SD/MI	Persen	110,34	109,91	107,01	120,37	117,49	112,32
- SMP/MTs	Persen	100,36	102,36	102,36	139,47	138,57	100,30
Angka Partisipasi Murni (APM)							
- SD/MI	Persen	92,61	95,34	94,37	105,70	107,49	100,03
- SMP/MTs	Persen	69,40	73,73	72,03	102,51	64,21	115,33

Sumber : Dindikbud Kabupaten Purbalingga

- Biaya Pendidikan  
Guna meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk SD sederajat dan SMP sederajat. Selain itu pemerintah juga menyalurkan dana BOS Afirmasi dan Kinerja SD, SMP Tahun 2020. BOS Reguler diberikan kepada SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB berdasarkan Hasil *cut off* Dapodik. Penyaluran dana BOS Reguler bertujuan untuk :
  - Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah;
  - Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah;
  - BOS Reguler pada SD dan SMP bertujuan untuk



membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk jenjang SD/MI Rp.900.000,-/peserta didik/ tahun, sedangkan untuk jenjang SMP/MTS Rp.1.100.000,-/peserta didik/tahun. Hal yang juga mendukung ketersediaan dan perbaikan yang dicapai dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat Purbalingga salah satunya adalah Pengembangan Perpustakaan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Pengelolaan Sekolah, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor termasuk honor guru.

**Tabel 2.73**  
**Besaran BOS SD dan SMP (Ribu Rupiah), Jumlah SD dan SMP**

URAIAN	SATUAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
BOS SD	Rupiah	58.854.240	58.106.400	62.642.000	62.559.875.000
BOS SMP	Rupiah	32.923.200	90.625.400	35.672.120	68.999.040.000
Jumlah SD	Sekolah	650	648	467	469
Jumlah SMP	Sekolah	117	117	77	77

Sumber : Dindikbud Kabupaten Purbalingga

Selain BOS Reguler, pemerintah juga menyalurkan BOS Kinerja yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan pada tahun 2021. 469 SD yang ada di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 hanya menerima BOS Kinerja sebanyak 4 SD sedangkan BOS Afirmasi tidak menerima. Untuk SMP sejumlah 77 sekolah hanya menerima BOS Reguler.

**Tabel 2.74**  
**Besaran BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2021 untuk SD dan SMP**

NO	JENJANG	JML	JUMLAH DANA BOS KINERJA	TOTAL
1.	SD	4	Rp. 240.000.000	Rp. 240.000.000



NO	JENJANG	JML	JUMLAH DANA BOS KINERJA	TOTAL
	JUMLAH	4	Rp. 240.000.000	Rp. 240.000.000

Sumber : DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga

- Sarana dan Prasarana Pendidikan  
Bagian penting dari perluasan akses pendidikan adalah ketersediaan sarana Pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai, seperti gedung sekolah yang layak bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kualitas guru yang memadai serta kualitas sekolah yang ditandai dengan akreditasi sekolah.
- Gedung SD Sederajat dan SMP Sederajat  
Jumlah gedung SD/MI yang ada di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebanyak 652 unit, jumlah tersebut naik 7 unit dari 645 unit di tahun 2020, di tahun 2020 turun 3 unit dari tahun 2019 sebanyak 648 dan tahun 2018 sebanyak 650 unit. Pengurangan jumlah SD/MI dikarenakan adanya penggabungan sekolah dengan alasan kurangnya kuota anak didik. Untuk jenjang SMP/ MTs pada tahun 2021 terdapat 118 gedung sekolah, jumlah tersebut naik 1 unit dari tahun 2020 terdapat 117 gedung sekolah. Jumlah tersebut sama dengan tahun 2018. Tahun 2015 dan 2017 terdapat 117 gedung sekolah. Pada tahun 2019, rasio gedung sekolah SD/MI sebesar 66/10.000 penduduk. Sedangkan untuk rasio Gedung SMP/ MTs sebesar 27/10.000 penduduk.
- Guru SD Sederajat dan SMP Sederajat  
Jumlah guru SD/ sederajat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebanyak 6.161 orang. Sedangkan jumlah murid SD/ sederajat sebanyak 94.590 siswa. Rasio guru terhadap muridnya 1 : 16. Itu artinya satu orang guru mengajar 16 orang siswa SD/ sederajat. Jumlah guru SMP/ sederajat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebanyak 2.647 orang. Sedangkan jumlah murid SMP/ sederajat sebanyak 45.237 siswa. Rasio guru terhadap muridnya 1 : 17. Itu artinya satu orang guru mengajar 17 orang siswa SMP/ sederajat.



**Tabel 2.75**  
**Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs**

Uraian	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah SD/ MI	Sekolah	465	465	650	648	645	652
Jumlah SMP/ MTs	Sekolah	77	76	117	117	117	118

Sumber : Dindikbud Kabupaten Purbalingga

**Tabel 2.76**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Purbalingga**

JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
<b>SD/MI</b>					
Jumlah Gedung sekolah	465	650	648	645	652
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	91.401	93.445	98.929	99.042	84.211
Rasio (Per 10.000)	51	70	66	65	77
<b>SMP/ MTs</b>					
Jumlah Gedung sekolah	76	117	117	117	118
Jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 tahun	44.201	45.899	43.047	44.566	33.068
Rasio (Per 10.000)	17	25	27	26	35

Sumber : Dindikbud Kabupaten Purbalingga

**Tabel 2.77**  
**Rasio Guru**

JENJANG PENDIDIKAN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
<b>SD/MI</b>			
Jumlah Guru	6.435	6.132	6.273
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	98.929	99.042	94.590
Rasio (Per 10.000)	15	16	15
<b>SMP/ MTs</b>			
Jumlah Guru	2.651	2.530	2.647
Jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 tahun	43.047	44.566	45.237
Rasio (Per 10.000)	17	18	17



Sebagai upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga meluncurkan inovasi yaitu Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS). Tujuan inovasi tersebut adalah guna :

- a. Meningkatkan derajat pendidikan warga masyarakat dalam rangka pembangunan sumber daya manusia;
- b. Mencegah terjadinya putus sekolah maupun drop out di setiap jenjang sekolah;
- c. Meningkatkan APM dan APK PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Meningkatkan Ketrampilan masyarakat.

Program AUSTS memberikan bantuan berupa beasiswa kurang mampu yang diberikan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka, bantuan tersebut diberikan untuk 1 tahun selama anak-anak tersebut masih bersekolah sampai tamat sekolahnya. Tahun 2021 sasaran program AUSTS selain untuk Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah juga untuk peserta didik yang rentan putus sekolah, tertuang dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nmor 52 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Program Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah Di Kabupaten Purbalingga

Program yang mendukung adalah :

- a. Program Pengembangan Kebudayaan
- b. Program Pembinaan Sejarah
- c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
- d. Program Pengelolaan Permuseuman
- e. Program Pengelolaan Pendidikan

## **SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT**

**Tabel 2.78  
Usia Harapan Hidup**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Capaian %
Usia Harapan Hidup	Tahun	72,91	72,98	73,02	73,4	73,4	73,21	99,78



Pada tahun 2021 angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purbalingga sebesar 73,21 tahun. Angka tersebut meningkat 0,09 dari tahun 2020 sebesar 73,14 tahun. Pada Tahun 2019 sebesar 73,02 tahun. Ketercapaian usia harapan hidup di Kabupaten Purbalingga juga menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa umur harapan hidup penduduk Kabupaten Purbalingga dari lahir hingga meninggal mencapai 73 tahun 02 bulan. Capaian UHH Kabupaten Purbalingga ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup di Jawa Tengah yang mencapai rata-rata 74,47 tahun, namun lebih tinggi dibandingkan capaian UHH nasional yaitu sebesar 72,29 tahun.

**Gambar 2.17**  
**Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2021**



Sumber : Rilis BPS per Oktober 2021

Salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengadakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Tujuan GERMAS diantaranya menurunkan resiko penyakit menular dan tidak menular yang menimbulkan kematian maupun kecacatan, menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk dan pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit. GERMAS dimulai dengan 3 fokus kegiatan, yaitu meningkatkan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah serta deteksi dini penyakit tidak menular. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka Germas adalah :



- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan;
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

Guna mendukung pencapaian indikator tersebut, hal-hal yang dilakukan antara lain dengan :

a. Penyebaran Tenaga Kesehatan

Untuk mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan telah dilakukan pemenuhan kebutuhan dengan menempatkan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Kabupaten baik sebagai PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Honor Daerah. Adapun jenis tenaga kesehatan yang ada dikelompokkan menjadi 8 profesi kesehatan yaitu :

- Tenaga Medis ( Dokter umum, Dokter Gigi , Dr/Drg Spesialis);
- Tenaga Keperawatan ( Bidan, Perawat Umum & Perawat Gigi);
- Tenaga Kefarmasian (Apoteker) dan Asisten Apoteker (Tenaga Teknis Kefarmasian);
- Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan;
- Tenaga Gizi (Nutritionis dan Dietisen);
- Tenaga Keterampilan Fisik (Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Akupuntur);
- Tenaga Keteknisian Medis;
- Tenaga Kesehatan Lain (Pengelola Program);
- Tenaga Penunjang/ Pendukung Kesehatan (Non Kesehatan).

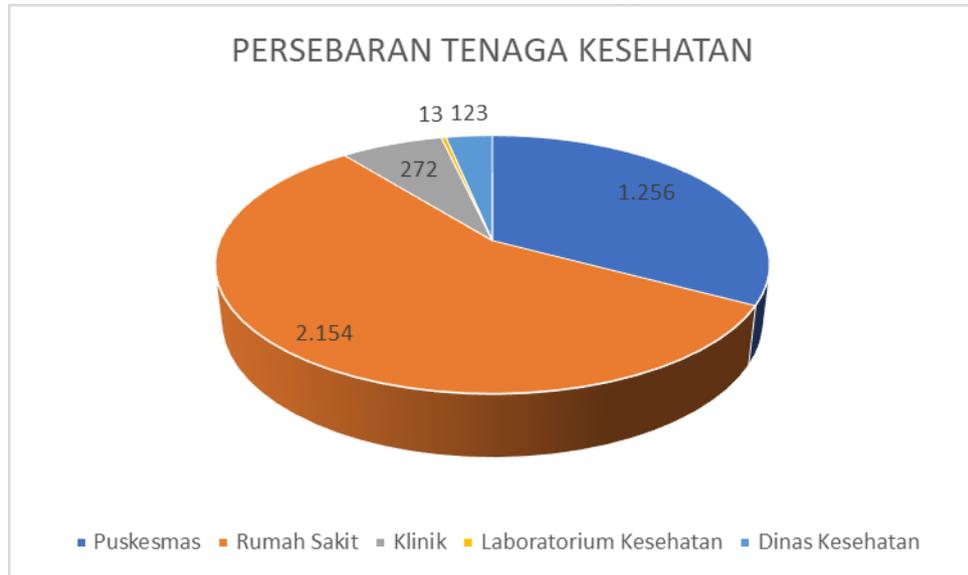
Persebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 dari 3.818 orang tenaga kesehatan yang ada, terdiri dari PNS sebanyak 1.317 orang dan Non PNS sebanyak 2.301 orang, terbagi dalam unit kerja sebagai berikut :

**Tabel 2.79**  
**Persebaran Tenaga Kesehatan**

UNIT	JUMLAH	PERSENTASE
Puskesmas	1.256	32,9%
Rumah Sakit	2.154	56,4%
Klinik	272	7,12%
Laboratorium Kesehatan	13	0,34%
Dinas Kesehatan	123	3,27%



**Gambar 2.18**  
**Grafik Persebaran Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja**  
**Di Kabupaten Purbalingga**

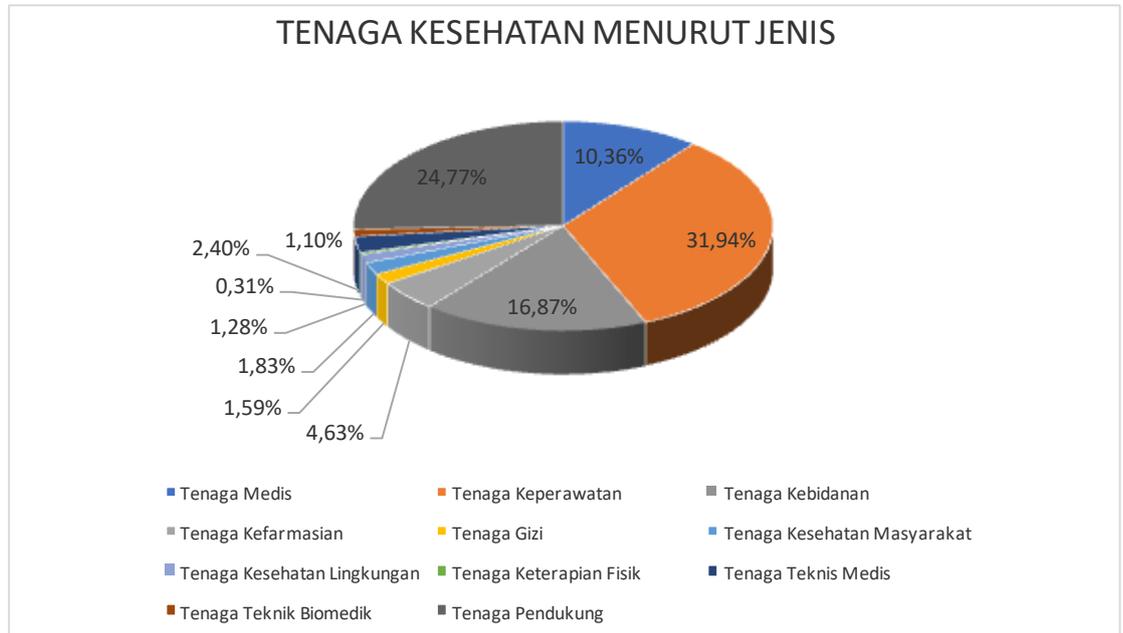


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Sedangkan persebaran tenaga kesehatan menurut jenisnya adalah sebagai berikut : tenaga medis sejumlah 397 orang (10,36%), tenaga keperawatan sejumlah 1.221 orang (31,94%), tenaga kebidanan sejumlah 645 orang (16,87%), tenaga kefarmasian sejumlah 177 orang (4,63%), tenaga kesehatan masyarakat sejumlah 70 orang (1,83%), tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 49 orang (1,28%), tenaga gizi sejumlah 61 orang (1,59), tenaga keterampilan fisik 12 orang (0,31%), tenaga teknis medis sejumlah 92 orang (2,40%), tenaga teknik biomedik sejumlah 42 orang (1,10%), tenaga pendukung 967 orang (24,77%).



**Gambar 2.19**  
**Grafik Persebaran Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Purbalingga**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

**b. Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2021**

- Rasio Dokter Spesialis per-100.000 Penduduk

Jumlah tenaga dokter spesialis di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sejumlah 155 orang dengan rasio perbandingan dokter spesialis sebesar 15,3 per 100.000 penduduk. Artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 15 orang dokter spesialis. Rasio tersebut sudah sesuai target Indonesia Sehat sebesar 6 per 100.000 penduduk.

- Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk

Jumlah tenaga dokter umum yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sejumlah 196 orang dengan rasio perbandingan tenaga dokter umum sebesar 19,6 per 100.000 penduduk. Artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 19-20 orang dokter umum. Rasio tersebut masih jauh di bawah target Indonesia Sehat sebesar 40 per 100.000 penduduk.



**Tabel 2.80**  
**Rasio Dokter**

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Dokter Umum	142	116	181	264	196
Jumlah Dokter Spesialis	62	72	129	135	155
Jumlah Penduduk	955.865	985,543	925.193	1.011.425	1.021.920
Rasio Dokter Umum (per 100.000 penduduk)	15,72	12,66	19,56	26,10	19,18
Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	6,86	8,07	13,94	13,35	15,17

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

- Puskesmas

Di Kabupaten Purbalingga jumlah Puskesmas sebanyak 22 unit yang terdiri dari Puskesmas Non Rawat Inap 11 unit dan Puskesmas dengan Rawat Inap 11 unit. Pada tahun 2021, telah terbangun satu Puskesmas Baru di Kecamatan Kemangkon, namun puskesmas tersebut belum dapat dioperasikan karena masih dalam tahap pemenuhan perijinan operasional dan pemenuhan sarana dan prasarananya. Sebagai dukungan terhadap pemerataan akses pelayanan kesehatan masyarakat di beberapa kecamatan terdapat puskesmas pembantu yang berjumlah 48 unit dan puskesmas keliling yang berjumlah 22 unit.

Dengan jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebanyak 1.021.920 jiwa berarti 1 Puskesmas beserta jaringannya rata-rata melayani penduduk sebanyak 46.451 jiwa, atau rasionya adalah 2,15/100.000 penduduk. Padahal jika mengacu pada target Renstra Kemenkes 2014-2020, pada akhir tahun 2020 target rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 3,5/100.000 penduduk. Maka untuk mencapai target tersebut Kabupaten Purbalingga masih kekurangan 13 puskesmas baru untuk mencapai kondisi ideal. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah puskesmas seperti pembangunan puskesmas baru maupun peningkatan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas induk.



- Rumah Sakit  
Indikator perkembangan sarana Rumah Sakit (RS) dapat dilihat dari perkembangan fasilitas perawatan yang diukur dari banyaknya rumah sakit dan kapasitas tempat tidurnya serta rasio terhadap jumlah penduduk. Untuk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 jumlah Rumah Sakit ada 8 unit yang terdiri dari 2 unit RSUD dan 5 Rumah Sakit Umum Swasta dan 1 Rumah Sakit Khusus Swasta, yaitu : RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata, RSUD Panti Nugroho, RSUD Nirmala, RSUD Harapan Ibu, RSUD Siaga Medika, RSUD At tin, RSUD PKU Muhammadiyah, RS Ibu dan Anak Ummu Hani. Seluruh Rumah Sakit tersebut telah mempunyai kemampuan pelayanan gawat darurat level satu.
- Laboratorium  
Laboratorium sebagai sarana pendukung pemeriksaan kesehatan sangat penting keberadaannya. Pada Tahun 2021, Laboratorium kesehatan tersedia 3 buah terdiri dari 1 laboratorium kesehatan daerah milik pemerintah dan 2 Laboratorium kesehatan swasta.
- Apotek  
Dalam rangka mendukung akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan Kabupaten Purbalingga didukung oleh kalangan swasta ditandai dengan banyaknya jumlah apotek yang ada. Sepanjang tahun 2021 jumlah apotek yang ada sebanyak 80 buah yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Purbalingga.
- Klinik  
Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga juga didukung oleh adanya klinik-klinik yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. Adapun klinik yang terdaftar pada Dinas Kesehatan sebanyak 22 Klinik yang terdiri dari 3 Klinik Utama, yang didukung dengan pelayanan Dokter Spesialis dan 19 Klinik Pratama.
- Optik  
Pelayanan kesehatan mata juga didukung dengan adanya optik. Pada tahun 2021 terdapat 11 Optik yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan.



d. Sarana Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Diantaranya melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) seperti : Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) KB-Kesehatan, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) sektor informal, Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Desa Siaga/Desa Sehat Mandiri (DSM).

- Posyandu KB- Kesehatan

Posyandu KB Kesehatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh, dari dan untuk masyarakat. Sasaran Posyandu KB Kesehatan adalah Pasangan Usia Subur (PUS), Ibu Hamil, Bayi dan anak usia dibawah lima tahun (Balita) serta masyarakat umum. Sedangkan kegiatannya meliputi: pelayanan Keluarga Berencana (KB), pelayanan kesehatan Ibu dan anak (KIA), Imunisasi, Gizi, dan pencegahan Diare serta kegiatan lain sebagai upaya pengembangan Posyandu.

Di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 terdapat Posyandu KB Kesehatan sejumlah 1.240 Posyandu yang terdiri dari: Posyandu Mandiri sejumlah 955 (77,02%), Posyandu Purnama sejumlah 238 (19,19%), Posyandu Madya sejumlah 46 (3,71%), dan Posyandu Pratama sejumlah 1 (0,08%), Dari data tersebut dapat diketahui seluruh Posyandu yang ada merupakan Posyandu aktif yaitu Posyandu dengan tingkat Posyandu Mandiri dan tingkat Posyandu Purnama, Posyandu Madya dan Posyandu Pratama.

- Poliklinik Kesehatan Desa ( PKD)

PKD merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes), yang pada tahun 2009 jumlah PKD di Purbalingga bertambah dari 168 unit, menjadi 183 unit pada tahun 2010, tahun 2011 sebanyak 187 unit, tahun 2012 sebanyak 194 unit, tahun 2013 sebanyak 199 unit, tahun 2014 hingga 2021 sebanyak 199 unit. Dengan berkembangnya Polindes menjadi PKD maka fungsinya juga bertambah. Disamping pelayanan kesehatan ibu dan anak, juga sebagai tempat untuk memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan masyarakat, melakukan pembinaan kader, pemberdayaan masyarakat serta forum komunikasi pembangunan kesehatan di desa, serta



sebagai tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar termasuk kefarmasian sederhana serta untuk deteksi dini dan penanggulangan pertama kasus gawat darurat.

Lebih jauh lagi PKD yang ada dijadikan sebagai gerbang untuk mewujudkan Desa Sehat Mandiri (DSM). Disamping bidang sebagai koordinator dalam mewujudkan DSM juga dibantu oleh tenaga pendamping DSM yang memiliki latar belakang pendidikan medis maupun paramedis.

**Tabel 2.81**  
**Layanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga**

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Rumah Sakit Umum	4	4	4	7	7
Rumah Sakit Bersalin	1	1	1	0	0
Rumah Sakit Ibu dan Anak	1	1	1	1	1
Klinik Utama	3	3	3	3	3
Klinik Pratama	14	22	20	19	19
Puskesmas rawat inap	11	11	11	11	11
Puskesmas non rawat inap	11	11	11	11	11
Puskesmas pembantu	48	48	48	48	48
Puskesmas keliling	22	22	22	22	22
PKD	199	199	199	199	199
Posyandu	1.206	1.215	1223	1235	1235
Posyandu lansia	475	475	475	645	645
Apotek	73	72	77	80	80
Laboratorium	3	3	3	3	3
Optik	7	7	11	11	11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Seiring dengan program nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang tercakup oleh program Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 864.249 jiwa atau ( 84,61%). Dari jumlah tersebut, 581.985 atau 56,97% merupakan peserta JKN bagi penduduk miskin.

Pelaksanaan program JKN masih terdapat beberapa kekurangan pada aspek kepesertaan, antara lain masih ada masyarakat tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan, sehingga menuntut pemerintah kabupaten untuk memfasilitasi masyarakat tidak mampu dalam hal jaminan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan



jaminan kesehatan masyarakat tidak mampu dalam program Kartu Purbalingga Sehat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Program Kartu Purbalingga Sehat. Program KPS ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan agar dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah. Pelayanan kesehatan program KPS dapat dilakukan di Puskesmas, RSUD Dr. Goeteng Taroenadibrata dan RS rujukan meliputi RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, RSUD Dr. Karyadi Semarang, RSUD Dr. Sardjito Yogyakarta dan RSJ Soeroyo Magelang. Jumlah peserta Kartu Purbalingga Sehat adalah 86.955 jiwa. Ditambah dengan masyarakat miskin non kuota yang membutuhkan pelayanan kesehatan, dengan melampirkan Surat Keterangan Miskin. Sehingga 100% masyarakat miskin di Purbalingga mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan.

**Tabel 2.82**  
**Peserta Jaminan Kesehatan**

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
BPJS	<b>740.673</b>	<b>740.673</b>	<b>859.886</b>	<b>860.320</b>	<b>869.258</b>
BPJS PBI	553.715	553.715	603.297	596.634	583.101
BPJS Non PBI	186.958	186.958	256.589	263.686	286.157
KPS	19.200	19.200	86.955	86.955	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat angka kematian, namun tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor akseptabilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah pola kehidupan tradisional yang bertentangan dengan kesehatan. Kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat angka kematian tersebut.

a. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka Kematian ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 191,64 per 100.000 kelahiran hidup dengan 27 kasus kematian ibu. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021, yaitu 61/100.000 per Kelahiran Hidup, maka capaian target masih



sangat jauh, yaitu hanya tercapai 31,83%. Angka tersebut juga mengalami kenaikan tajam jika dibandingkan capaian tahun lalu, yaitu 81/100.000 KH. Kondisi tersebut terjadi tidak lepas dari adanya pandemi Covid-19. Dari 27 kematian ibu, 19 kasus diantaranya merupakan kematian ibu karena infeksi Covid-19. Sedangkan sisanya disebabkan oleh PEB/ Eklamsia 3 kasus, HIV AIDS 1 kasus, Penyakit jantung 1, Penyakit penyerta lain 3 kasus. Tempat kematian 26 di Rumah sakit, dan 1 kasus meninggal di rumah karena penyakit jantung yang tidak terdeteksi, Jumlah kematian ibu tertinggi terdapat di Puskesmas Kalimanah dan Kutasari yaitu sebanyak 5 Kasus.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan soisal ekonomi. Apabila AKB tinggi pada suatu wilayah, maka status kesehatan di wilayah tersebut rendah. AKB Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 9,72 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 137 kasus. Capaian target AKB tercapai 62,73, turun dari capaian tahun lalu yaang mencapai 83,66%, yaitu pada angka 7,77 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi tertinggi terdapat di Puskesmas Karangmoncol yaitu sebanyak 16 Kasus, sedang terendah adalah Puskesmas Kalikajar dengan 0 Kasus. Penyebab kematian bayi di usia 0–28 hari diantaranya adalah BBLR sebanyak 40 kasus dengan prematur 25 kasus, covid 5 kasus, asfiksia 12 kasus, kelainan jantung 11 kasus, kelainan kongenital lainnya 15 kasus serta penyebab lain lain. Strategi dalam upaya penurunan AKB merupakan satu kesatuan dengan upaya penrunan AKI yaitu Peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila melalui upaya-upaya sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

c. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKABA merupakan jumlah kematian Balita 0-5 tahun di satu wilayah per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Kematian Balita didalamnya mencakup jumlah kematian bayi umur 0-11 bulan. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan Balita, tingkat pelayanan KIA/ Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan.

Angka Kematian Balita Kabupaten Purbalingga tahun 2021



sebesar 11,64 per 1.000 kelahiran hidup. Dilihat dari jumlah kasusnya, tercatat tahun 2021 sebanyak 164 kasus kematian, naik dibandingkan tahun lalu yaitu 137 kasus kematian. Target tahun 2021 adalah 7,2 per 1000 Kelahiran Hidup, sehingga capaian targetnya hanya 61,85. Tahun lalu capaian target mampu mencapai 82,16. Penyebab kematian Balita sebagian besar sama dengan penyebab kematian bayi namun penyebab lainnya adalah kelainan bawaan, penyakit pneumoni, diare serta kecelakaan. Jumlah kematian balita tertinggi terdapat di Puskesmas Karangmoncol yaitu sebanyak 17 kasus yang terdiri dari 11 kasus kematian bayi 0-11 bulan dan 1 kasus kematian anak Balita 1-5 tahun. Upaya yang dilakukan guna menurunkan AKABA merupakan satu kesatuan dengan upaya penurunan AKI yaitu Peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila melalui upaya-upaya sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya

d. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Perkembangan keadaan gizi masyarakat yang dapat dipantau berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan (RR) program Perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dalam hasil penimbangan balita setiap bulan di Posyandu. Data tahun 2021 jumlah Balita yang dilaporkan sejumlah 67.505 Balita, dari jumlah tersebut yang datang dan ditimbang 57.128 Balita (84,63%). Jumlah Balita gizi kurang yang ditemukan sebanyak 2.020 (2,99%) sedangkan untuk kasus gizi buruk pada tahun 2020 terdapat 95 kasus dan semuanya telah mendapatkan penanganan perawatan, dengan angka prevalensi Balita gizi buruk Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 0,14%. Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan pengukuran antropometri yang menggunakan indeks Berat Badan dan Tinggi Badan (BB/TB).

e. Cakupan Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pencegahan dan pengendalian penyakit menular merupakan upaya terpadu yang meliputi upaya preventif, promotif dan kuratif untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang optimal. Capaian kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit menular tahun 2021 sebesar 60,28% dari target yang akan dicapai yaitu 62%, sehingga capaian terget sebesar 97,22%. Dibandingkan capaian target



tahun lalu, terdapat penurunan. Tahun lalu mencapai 105,75%. Indikator penentu dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di sesuaikan dengan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, yaitu pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit TB dan HIV/AIDS.

- Tuberkulosis (TB)

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TB di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan TB sesuai standar bagi orang terduga TB meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, edukasi.

- HIV/ AIDS

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yaitu *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/AIDS di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining.

f. Cakupan Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Capaian kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebesar 61,54% dari target yang akan dicapai yaitu 54%, sehingga capaian target sebesar 113,96%. Capaian tersebut melampaui target tahun 2021, sama seperti capaian tahun lalu sebesar 126,42%. Indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sebagaimana disebutkan dalam SPM, yaitu pelayanan terhadap pasien hipertensi, Diabetes Melitus dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.

- Pelayanan Hipertensi

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

- Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali



- sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat;
  - Melakukan rujukan jika diperlukan.
- Pelayanan Diabetes Melitus (DM)  
Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita DM usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar meliputi pengukuran gula darah, edukasi, terapi farmakologi.
- Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat  
Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh ODGJ berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi.

Program yang mendukung pencapaian sasaran Usia Harapan Hidup adalah :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

### **SASARAN 3 : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT**

Keluarga sejahtera adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang sama, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan ketentraman hidup. Keluarga Sejahtera terdiri dari 4 tahapan keluarga atau 4



indikator, yaitu : Keluarga Sejahtera Tahap I atau indikator “Kebutuhan Dasar Keluarga” (*basic needs*), Keluarga Sejahtera Tahap II atau indikator “Kebutuhan Psikologis” (*psychological needs*), Keluarga Sejahtera Tahap III atau indikator “Kebutuhan Pengembangan” (*develomental needs*), dan Keluarga Sejahtera Tahap III Plus atau indikator “Aktualisasi Diri” (*self esteem*).

**Tabel 2.83**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Cakupan Keluarga Sejahtera	%	78.01	80.29	80.57	83.02	80	83.02	103.77

Pada tahun 2021 berdasarkan hasil pendataan keluarga sebanyak 309.273 keluarga. Dari pendataan tersebut, jumlah keluarga sejahtera berjumlah 256.777 keluarga atau 83.02% dari jumlah keluarga seluruhnya. Capaian tersebut meningkat bila dibandingkan dengan realisasi pada setiap tahunnya. Data pencapaian Tahapan Keluarga Sejahtera hasil Pendataan Tahun 2020 adalah jumlah keluarga yang di data pada tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga sebanyak 309.273 keluarga, dengan menggunakan 21 indikator keluarga sejahtera yang dibedakan menjadi 5 tahapan yaitu :

- a. Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 524.96 keluarga atau 16.96% dari jumlah keluarga yang ada, yaitu 309.273 keluarga;
- b. Keluarga Sejahtera Tahap I sebanyak 65.149 keluarga atau 21.06% dari jumlah keluarga yang ada, yaitu 309.273 keluarga;
- c. Keluarga Sejahtera Tahap II sebanyak 90.339 keluarga atau 29.22% dari jumlah keluarga yang ada, yaitu 309.273 keluarga;
- d. Keluarga Sejahtera Tahap III sebanyak 96.829 keluarga atau 31.30% dari jumlah keluarga yang ada, yaitu 309.273 keluarga;
- e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus sebanyak 4.400 keluarga atau 1.42% dari jumlah keluarga yang ada, yaitu 309.273 keluarga.



Tabel 2.84 Data Keluarga Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	KELUARGA PRA SEJAHTERA	KELUARGA SEJAHTERA I	KELUARGA SEJAHTERA II	KELUARGA SEJAHTERA III	KELUARGA SEJAHTERA III PLUS	JUMLAH
1.	KEMANGKON	2847	4906	4294	7930	413	17543
2.	BUKATEJA	4904	4166	6309	7817	620	18912
3.	KEJOBONG	4299	2595	4460	5299	61	12415
4.	KALIGONDANG	3797	5291	6897	5062	142	17392
5.	PURBALINGGA	878	1899	3623	10606	547	16675
6.	KALIMANAH	1414	3385	7234	5886	173	16678
7.	KUTASARI	3287	7753	6255	2587	53	16648
8.	MREBET	4555	4419	6098	9958	115	20590
9.	BOBOTSARI	2998	3421	4436	5634	367	13858
10.	KARANGREJA	2074	3316	2957	5727	158	12158
11.	KARANGANYAR	2403	2601	3911	3406	276	10194
12.	KARANGMONCOL	3207	4654	5280	3647	315	13896
13.	REMBANG	5057	4088	5174	5456	377	15095
14.	BOJONGSARI	2431	3807	6220	6408	202	16637
15.	PADAMARA	1100	2940	6407	3013	452	12812
16.	PENGADEGAN	3406	1813	2484	5431	68	9796
17.	KARANGJAMBU	2707	911	3757	666	5	5339



NO.	KECAMATAN	KELUARGA PRA SEJAHTERA	KELUARGA SEJAHTERA I	KELUARGA SEJAHTERA II	KELUARGA SEJAHTERA III	KELUARGA SEJAHTERA III PLUS	JUMLAH
18.	KERTANEGARA	1132	3184	4603	2296	56	10139
<b>J U M L A H</b>		<b>52496</b>	<b>52496</b>	<b>65149</b>	<b>90399</b>	<b>96829</b>	<b>256.777</b>



Hal-hal yang mempengaruhi indikator keluarga sejahtera antara lain :

a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Angka penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Purbalingga yang terlayani pada tahun 2017 sebesar 68,56%, dan pada tahun 2018 realisasi sebesar 85,58% sehingga bila dibandingkan antara realisasi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan sebesar 17,02%. Pada tahun 2019 sebesar 75,96% dan pada tahun 2020 sebesar 77,09%, sehingga bila dibandingkan antara realisasi pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,13%. Angka PMKS pada tahun 2021 sebesar 88,73%, apabila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 77,09% PMKS yang tertangani mengalami kenaikan sebesar 11,64%. Pada tahun 2021, jumlah PMKS yang terdata sebanyak 167.317 orang. Sedangkan yang sudah tertangani sebanyak 148.641 orang atau 88,73% sudah tertangani. Apabila dibandingkan PMKS yang terlayani pada tahun 2019 sebesar 75,96% dan tahun 2020 sebesar 77,09%, sehingga apabila dibandingkan antara realisasi pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan sebesar 1,13%. PMKS yang terlayani pada tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.85**  
**Jumlah Rincian PMKS yang Terlayani di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

No.	Jenis PMKS	Yang Seharusnya Menerima Bantuan	Yang Diberikan Bantuan				Yang Belum Menerima Bantuan
			APBD II	APBD I	APBN	Jumlah	
1.	Anak Balita Terlantar (ABT)	23	23	-	-	23	-
2.	Anak Terlantar	1,285	1,285	-	-	1,285	-
3.	Anak yang mengalami Masalah Hukum (AMH)	18	18	-	-	18	
4.	Anak Jalanan (AJ)						
5.	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	41	41	-	-	41	0
	a. Anak Dengan Disabilitas Fisik	424					
	a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	147	29	-	-	29	118
	b.2. Mata Tuna Netra	15	-	-	-	-	15



No.	Jenis PMKS	Yang Seharusnya Menerima Bantuan	Yang Diberikan Bantuan				Yang Belum Menerima Bantuan
			APBD II	APBD I	APBN	Jumlah	
	(TN)						
	a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	101	3	-	-	3	98
	b. Disabilitas Mental	106					
	b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	104	-	-	-	-	104
	b.2. Mental Exs Psikotik (Tuna Laras)	2	-	-	-	-	2
	c. Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	55	-	-	-	-	55
6.	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	43	-19	-	-	19	24
7.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	
8.	Lanjut Usia Terlantar	2024	1557			1557	467
9.	Penyandang Disabilitas	8470					
	1. Penyandang Disabilitas Fisik	4610					
	a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	2727	110	-	9	119	2,608
	a.2. Mata Tuna Netra (TN)	1144	16	-	-	16	1128
	a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	739	144	-	-	144	595
	2. Penyandang Disabilitas Mental	3035					
	b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	1859	13	-	-	13	1846
	b.2. Mental Exs Psikotik (Tuna Laras)	1176	25	-	-	25	1,151
	3. Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	825	315	-	-	315	510
10.	Tuna Susila (TS)	1	1	-	-	1	
11.	Gelandangan	6	6	-	-	6	-
12.	Pengemis	41	41	-	-	41	0
13.	Pemulung	25	-	-	-	-	25
14.	Kelompok Minoritas/Waria	-	-	-	-	-	-
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)	124	124	-	-	124	0
16.	Orang dengan	40	40	-	-	40	0



No.	Jenis PMKS	Yang Seharusnya Menerima Bantuan	Yang Diberikan Bantuan				Yang Belum Menerima Bantuan
			APBD II	APBD I	APBN	Jumlah	
	HIV/AIDS (ODHA)						
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	79	-	-	79	79	-
18.	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	43	19	-	-	19	24
20.	Pekerja Migran Bermasalah	-	-	-	-	-	-
21.	Korban Bencana Alam	59	-	-	59	59	0
22.	Korban Bencana Sosial	37	-	-	37	37	-
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1416	-	-			1416
24.	Fakir Miskin	153,100	-	-	144,430	144,430	8,670
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	18	-	-	-	18	0
26.	Komoditas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>167,317</b>	<b>3829</b>	<b>-</b>	<b>144,614</b>	<b>148,461</b>	<b>18,856</b>

Sumber : DINSOSDALDUKKBP3A 2021

Dari data diatas, jumlah PMKS yang ada sebanyak 167.317 PMKS, yang telah ditangani yaitu 148.461 PMKS, dan yang belum ditangani yaitu 18.856 PMKS.

Dari persentase tingkat pencapaian kinerja dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial yang telah diberikan kepada publik atau masyarakat tidak bersifat pelayanan natural saja. Selain pelayanan yang bersifat natural juga dilakukan bantuan yang bersifat konsultatif ataupun koordinatif yang bersifat persuasif dan motivasi kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara perorangan, keluarga, kelompok, maupun kelembagaan sosial lainnya

Kendala yang dihadapi :

Permasalahan Pelayanan Urusan Sosial di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yaitu Data PMKS selalu berubah setiap saat, hal ini terjadi karena beberapa alasan antara lain :

a. Kurangnya koordinasi dengan petugas di tingkat kecamatan



- dan desa untuk selalu mengupdate data PMKS yang ada, sehingga untuk mendorong keberhasilan Penanganan PMKS di kabupaten purbalingga perlu melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. Data PMKS selalu berubah setiap saat;
  - c. Motivasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan keterampilan masih menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi untuk mengharapkan imbalan;
  - d. Masih sulitnya PMKS khususnya anak drop out, anak nakal, dan anak jalanan untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi pada lembaga sosial yang telah disediakan oleh pemerintah dengan alasan masih ingin berfikir bebas walaupun ada dari beberapa dari mereka yang mau untuk direhabilitasi. Hambatan lainnya juga muncul dari keluarga anak drop out, anak nakal, dan anak jalanan yang kurang peduli untuk ikut memotivasi anak mereka dengan alasan sudah tidak bisa memotivasi mereka. Selain itu ada juga alasan keluarga yang merasa berat hati untuk merehabilitasi anak mereka baik yang bermasalah difabel ataupun drop out. Keluarganya merasa tidak tega untuk anaknya direhabilitasi sehingga ada juga dari pihak anak mau untuk direhabilitasi tetapi keluarga tidak setuju;
  - e. Dunia usaha yang ada belum bisa memberikan lapangan kerja kepada penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria pekerja yang ditentukan;
  - f. Banyak kondisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sebagai contoh banyak PMKS yang sebetulnya mampu untuk bekerja dan masih produktif tetapi mereka cenderung pasrah dengan keadaan;
  - g. Kegiatan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dalam artian kadang penerima manfaat kondisinya sudah bukan kategori PMKS. Permasalahan ini dikarenakan data dari Kementrian Sosial tidak sinkron dengan data yang diperoleh dari lini lapangan yang didapatkan langsung dari pendamping tingkat Kecamatan TKSK;
  - h. Untuk pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama ( KUBe ) masih banyak yang menafsirkan bahwa program tersebut dapat dilaksanakan atau untuk perorangan sehingga yang mendapat bantuan berupa hewan ternak merasa ingin memelihara dan



memiliki secara perorangan. Dari pengertian tersebut menyebabkan program ini sulit untuk berkembang;

- i. Belum adanya bantuan sarana transportasi bagi Karang Taruna guna memfasilitasi kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna. Selain itu kurangnya penguatan di tingkat kecamatan se Kabupaten Purbalingga dikarenakan tidak adanya tanggapan di tingkat kecamatan sebagai komunikator Karang Taruna tingkat Desa.

Upaya yang dilaksanakan :

- a. Koordinasi dengan petugas di tingkat Kecamatan dan Desa untuk selalu update data PMKS yang ada;
- b. Dalam Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi PMKS dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Pendekatan langsung (*direct*) yaitu dalam pendekatan PMKS kita langsung menemui orangnya dengan memberikan motivasi untuk menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan sehingga tumbuh responsive sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan. Pendekatan tidak langsung (*indirect*) yaitu dalam pendekatan PMKS dilakukan secara tidak langsung atau melalui pihak ketiga, baik melalui tokoh masyarakat, melalui desa, atau lembaga lain yang dipandang perlu;
- c. Selalu melakukan koordinasi dengan lembaga terkait ataupun balai rehabilitasi yang telah disediakan oleh Pemerintah, dengan melakukan pembinaan, memberikan motivasi, memberikan pemantapan kecepatan dalam pemecahan masalah sehingga PMKS yakin bahwa mereka siap untuk ditolong dan tidak menimbulkan keraguan dengan menggunakan sarana yang ada;
- d. Pendamping tingkat Kecamatan TSKK harus setiap saat siap data yang diperlukan untuk penanganan PMKS;
- e. Sebelum melaksanakan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebaiknya di survey ulang agar tepat sasaran;
- f. Pendamping Keluarga Harapan (PKH) harus mendampingi seluruh keluarga penerima manfaat disaat penarikan tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
- g. Melakukan pendekatan kepada penerima manfaat untuk sabar dalam menunggu pencairan bantuan;
- h. Mengusahakan agar tahun berikutnya dapat memberikan bantuan ke seluruh panti sosial dan panti rehabilitasi yang ada



di Kabupaten Purbalingga, yaitu sebanyak 25 panti;

- i. Memberikan pengertian tentang pengkoordinasian Kelompok Usaha Bersama ( KUBe ) agar bisa diterima dan dilaksanakan oleh anggota kelompok sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan berkembang;
- j. Meningkatkan koordinasi Petugas Sosial Kemasyarakatan (PSM) yang ada di tingkat kecamatan untuk segera dibentuk Paguyuban PSM sebagai Petugas Sosial Kemasyarakatan;
- k. Mengusulkan fasilitas kendaraan untuk memperlancar kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna dalam meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak;
- l. Perlu adanya intensitas kunjungan dengan keluarga atau anak yang berhadapan dengan masalah hukum agar ada keterbukaan, sehingga permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan dan tertangani;
- m. Mengajukan permohonan bantuan logistik untuk bantuan korban bencana alam maupun korban bencana sosial.

#### 1. *Total Fertility Rate* (TFR)

Pada tahun 2021 nilai TFR Kabupaten Purbalingga sebesar 2,05%. TFR Tahun 2017 sebesar 1,96%, tahun 2018 sebesar 1,99%, tahun 2019 sebesar 2,25% dan tahun 2020 nilai TFR 2,05%. Bila dibandingkan antara realisasi pada tahun 2017, 2018 dan 2019 TFR terjadi peningkatan sebesar 0,03% di tahun 2017 sampai dengan 2018 sebesar 0.26% pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Bila di lihat pada realisasi setiap tahunnya, TFR mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 target sebesar 2,05% dengan relasasi sebesar 2,05%. pada tahun 2021 target sebesar 2.13 dengan realisasi sebesar 2.05%, sehingga bila di bandingkan antara tahun 2020 dengan 2021 TFR di kabupaten purbalingga tercapai, karena TFR memiliki tren capaian yang menurun.

Dengan demikian TFR pada tahun tersebut tercapai. TFR merupakan pengukuran yang menyatakan fertilitas pada akhir masa reproduksi dari suatu kohor perempuan. Keunggulan TFR adalah angka tersebut dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama masa reproduksinya dan telah memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan pada masing-masing kelompok umur.

Banyak hal yang mempengaruhi meningkatnya Angka Kelahiran Total / TFR yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi dan tingkat



urbanisasi. Tingkat pendapatan dapat diwakili oleh pendapatan perkapita. Keterkaitan pada pendapatan terhadap fertilitas adalah ketika pendapatan seseorang naik akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi.

Kendala yang dihadapi :

Kendala dalam Pemutakhiran Data Keluarga (proses pengambilan data)

- a. Pengetahuan petugas/ kader pendata masih belum memahami secara detail indikator data yang diharapkan;
- b. Periode pendataan relatif pendek dan menjelang akhir tahun periode yaitu bulan Desember;
- c. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam peningkatan ekonomi produktif,
- d. Produktifitas Ekonomi Perempuan di Kabupaten Purbalingga masih minim.

Upaya yang dilaksanakan dalam Pemutakhiran Data Keluarga

- a. Pelatihan teknis untuk petugas/ kader pendata di tingkat desa/ kelurahan;
- b. Memajukan dan memperpanjang jadwal kegiatan pendataan.
- c. Dilaksanakan pelatihan dalam mengelola produk ekonomi produktif;
- d. Permodalan dan sosialisasi perizinan produk.

Strategi Pencapaian Sasaran Kinerja :

- a. Dilaksanakan Pendataan Keluarga guna mengetahui kondisi tingkat kesejahteraan keluarga yang sebenarnya;
- b. Dilaksanakan pengembangan cakupan dan kualitas kelompok UPPKS guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam peningkatan ekonomi produktif. Pelaksanaan pelatihan dalam mengelola produk UPPKS dan dibuka pameran produk UPPKS guna sarana promosi produk UPPKS;
- c. Dibentuk kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak dan remaja dan juga meningkatkan kualitas keluarga lanjut usia;
- d. Penyampaian advokasi melalui gerak Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB dengan cara pemutaran film diselingi penyampaian pesan-pesan kepada masyarakat;
- e. Metode penyampaian pesan melalui media radio juga dilakukan, tetapi metode ini kurang efektif karena hanya berupa pesan searah sehingga kurang mendapat tanggapan



pendengar radio;

- f. Pembentukan kelompok Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Kelompok ini berfungsi untuk sarana sosialisasi dan konseling bagi remaja dalam meningkatkan pengetahuan reproduksi remaja. Karena dengan meningkatkan pengetahuan reproduksi remaja dapat mencegah atau mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi. Karena tingkat kematangan usia perkawinan berpengaruh pada kualitas keluarga. Kelompok ini juga melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Generasi Berencana (GenRe) di sekolah – sekolah yang tujuannya untuk memotivasi siswa siswi lebih merencanakan masa depannya;
- g. Program Kampung KB yang sarasanya adalah Rukun Warga tertinggal/ ranking class nya lebih rendah dari Rukun Warga lainnya di 18 Kecamatan Kabupaten Purbalingga. Untuk tahun 2018 sudah dicanangkan 36 Kampung KB untuk seluruh Kabupaten Purbalingga. 36 Kampung KB yang sudah dicanangkan sebagai berikut.
  - Kampung KB Kecamatan Bukateja Desa Bajong RW 05;
  - Kampung KB Kecamatan Bobotsari Desa Talagening RW. 11;
  - Kampung KB Kecamatan Bojongsari Desa Bumisari RW 12;
  - Kampung KB Kecamatan Kemangkong Desa Jetis RW 03;
  - Kampung KB Kecamatan Bukateja Desa Wirasaba RW 04;
  - Kampung KB Kecamatan Kejobong Desa Langgar RW 01;
  - Kampung KB Kecamatan Kaligondang Desa Brecek RW 04;
  - Kampung KB Kecamatan Purbalingga Desa Toyareja RW 01;
  - Kampung KB Kecamatan Kalimanah Desa Karang Sari RW 05;
  - Kampung KB Kecamatan Kutasari Desa Karangcegak RW 01;
  - Kampung KB Kecamatan Mrebet Desa Karangangka RW 02;
  - Kampung KB Kecamatan Bobotsari Desa Palumbungan RW 02;
  - Kampung KB Kecamatan Karangreja Desa Gondang RW 01;
  - Kampung KB Kecamatan Karanganyar Desa Brakas RW 02;
  - Kampung KB Kecamatan Karangmoncol Desa Baleraksa RW 09;



- Kampung KB Kecamatan Rembang Desa Bantarbarang RW 08;
- Kampung KB Kecamatan Bojongsari Desa Pekalongan RW 04;
- Kampung KB Kecamatan Padamara Desa Mipiran RW 01;
- Kampung KB Kecamatan Pengadegan Desa Pasunggingan RW 01;
- Kampung KB Kecamatan Karangjambu Desa Sirandu RW 04;
- Kampung KB Kecamatan Kertanegara Desa Kasih RW 01;
- Kampung KB Kecamatan Kertanegara Desa Langkap RW 03 dengan keterangan Desa Tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Bukateja Desa Karanggedang RW 02 dengan keterangan Desa Tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Bobotsari Desa Tlagayasa RW 07 dengan keterangan Desa Tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan pengadegan Desa Pengadegan RW 05 dengan keterangan Desa Tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Padamara Desa Kalitinggar kidul RW 01 dengan keterangan Desa Gizi Buruk (*Stunting*);
- Kampung KB Kecamatan Karangreja Desa Tlahab Kidul RW 04 dengan keterangan Desa Tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Kutasari Desa Candinata RW 03 dengan keterangan Desa Gizi Buruk (*Stunting*);
- Kampung KB Kecamatan Kemangkong, Desa plumutan RW 05 dengan keterangan Gizi Buruk (*Stunting*);
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang Desa Sempor Lor RW 02 dengan kategori Desa Gizi Buruk (*Stunting*);
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang Desa Cilapar RW 02 dengan kategori Desa Gizi Buruk (*Stunting*);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet Desa Selaganggang RW 01 dengan kategori Desa Gizi Buruk (*Stunting*);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet Desa Keradenan RW 03 dengan kategori Desa Gizi Buruk (*Stunting*);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet Desa Sangkanayu RW 05 dengan kategori Desa Gizi Buruk (*Stunting*);
- Kampung KB Kecamatan Karangmoncol Desa Sirau RW 04 dengan kategori Desa Tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Karangjambu Desa Jinkang RW 02 dengan keterangan Desa Tertinggal.



Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga adalah :

- a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- c. Program Rehabilitasi Sosial;
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- f. Program Perlindungan Khusus Anak.

**MISI 5 :**

**” MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA DALAM INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA”**

**TUJUAN MISI 5 :**

**MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT**

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan didalamnya terdapat kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Purbalingga dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan



tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tanpa ada pengaruh dari kenaikan harga (inflasi). Nilai PDRB Purbalingga tahun 2019 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 24,918 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 23,190 triliun rupiah pada tahun 2018. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar 16,458 triliun rupiah, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 17,387 triliun rupiah. Dengan kata lain selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen. Gambaran capaian indikator kinerja terkait Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.86**  
**Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,37	5,42	5,65	- 1,23	5-6	- 1,23	(24,6)

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar – 1,23 persen yang berarti belum dapat memenuhi target yang ditetapkan antara 5 hingga 6 persen. Pertumbuhan yang mencapai minus 1,23 persen selama tahun 2020 tentu karena dampak pandemi covid 19, yang tidak hanya berdampak kepada perekonomian nasional, namun juga global yang tentu saja berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam kurun waktu 2016-2019, pertumbuhan tiga besar lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga yakni Jasa Informasi dan Komunikasi sebesar 11,65 %, Jasa Perusahaan sebesar 10,95 %, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,06 %. Namun, dampak pandemic Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan beberapa lapangan usaha mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga terutama pada sektor lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Konstruksi.

Apabila melihat pertumbuhan ekonomi dalam cakupan yang lebih



luas, yaitu nasional dan provinsi pada tahun 2020, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga (- 1,23 persen) lebih bagus dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (-2,07%) maupun pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah (-2,65%). Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan aktivitas perekonomian di Kabupaten Purbalingga cukup tertekan, namun masih lebih baik dibanding rata-rata nasional maupun Jawa Tengah. Selanjutnya untuk mendukung capaian kinerja tujuan, maka ditetapkan Sasaran Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

**SASARAN 1 :  
MENURUNNYA PENGANGGURAN TERBUKA**

Penganggur adalah angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selain itu penganggur memiliki potensi negatif yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial yang dapat mengganggu keamanan politik secara keseluruhan.

**Tabel 2.87  
Tingkat Pengangguran Terbuka**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,33	6,06	4,78	6,10	<4	6,05	48,75

Pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,05 persen lebih besar dari target yang ditentukan sebesar <4 persen. Dibandingkan tahun 2020 sebesar 6,10 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,5 persen. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya relatif naik turun perkembangannya. Pada tahun 2017 angka TPT sebesar 5,33% meningkat pada tahun berikutnya tahun 2018 sebesar 6,06% persen, selanjutnya menurun kembali pada tahun 2019 TPT sebesar 4,78% dan kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 6,10%. Jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2021 sebesar 503.682 orang. Jumlah tersebut dibagi menjadi 2 kategori yaitu penduduk



yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja sebesar 473.232 orang dan yang masih menganggur sebanyak 30.450 orang. Dari data diatas, penduduk yang belum bekerja masih didominasi oleh laki-laki, pengangguran terdiri dari 20.000 orang laki-laki dan 10.450 orang perempuan.

**Tabel 2.88**  
**Ketenagakerjaan**

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Angkatan Kerja	299.139	204.543	503.682
- Bekerja	279.139	194.093	473.232
- Pengangguran Terbuka	20.000	10.450	30.450
Bukan Angkatan Kerja	56.240	164.548	220.788
- Sekolah	<b>355.379</b>	<b>369.091</b>	<b>724.470</b>
- Mengurus Rumah Tangga			
- Lainnya	<b>84,17</b>	<b>55,42</b>	<b>69,52</b>
<b>Total</b>	<b>6,69</b>	<b>5,11</b>	<b>6,05</b>
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>	299.139	204.543	503.682
<b>Tingkat Pengangguran</b>	279.139	194.093	473.232

Sumber : Purbalingga Dalam Angka

Jumlah pencari kerja yang terdata pada tahun 2021 sebanyak 14.560 orang. Perempuan masih mendominasi sebanyak 9.122 orang dan laki-laki sebanyak 5.438 orang. Sedangkan lowongan kerja pada tahun 2021 sebanyak 8.023 orang. Terkait permintaan tenaga kerja di Purbalingga masih banyak dibutuhkan tenaga kerja wanita sebanyak 7.044 orang dan laki-laki sebanyak 979 orang. Tingkat pendidikan pencari kerja yang diterima kebanyakan adalah Pendidikan SLTA sebanyak 4.805 orang, disusul dengan Pendidikan SLTP sebanyak 1.638 orang. Hal ini dikarenakan mayoritas perusahaan yang berinvestasi di Purbalingga berfokus pada hasil produksi yang membutuhkan ketelitian dan keuletan sehingga kebanyakan perusahaan lebih cenderung merekrut perempuan dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi sebagai karyawannya.



**Tabel 2.89**  
**Pencari Kerja**

	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>Pencari Kerja</b>	5.438	9.122	14.560
<b>Permintaan Tenaga Kerja</b>	979	7.044	8.023

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga

**Tabel 2.90**  
**Data Pencari Kerja yang Sudah Bekerja**

<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>Tamat SD</b>	2	164	166
<b>Tamat SLTP</b>	118	1.520	1.638
<b>Tamat SLTA</b>	395	4.410	4.805
<b>Diploma</b>	4	12	16
<b>Tamat Sarjana</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga

Permasalahan ketenagakerjaan ini disebabkan oleh :

- a. Pandemi Covid-19 yang berawal pada tahun 2020 masih berlangsung hingga tahun 2021 mengakibatkan banyak perusahaan yang mem PHK kan karyawan dan sebagian lagi merumahkan bahkan beberapa perusahaan terpaksa harus tutup karena sudah tidak bisa beroperasi. Perusahaan yang paling banyak terkena imbasnya adalah perusahaan rambut. PHK pada perusahaan rambut tersebut ditambah dengan angkatan kerja baru pada tahun 2021 ini masih banyak yang belum terserap di lapangan kerja;
- b. Belum tersedianya data Pengangguran di kabupaten Purbalingga secara rinci dan update;
- c. Masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran;
- d. Terbatasnya lapangan kerja khususnya yang menampung tenaga kerja laki-laki sehingga harus didukung dari sektor yang lain seperti investasi, pariwisata, pendidikan dan lainnya, tidak cukup hanya dari sisi pelatihan dan penempatan kerja saja;
- e. Jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja;
- f. Kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar



kerja.

Dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Purbalingga, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga antara lain :

a. Melaksanakan Pelatihan Kerja

Pelatihan berbasis kompetensi

Pelatihan klasikal yang berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah ditentukan dengan Instruktur yang memiliki kompetensi di bidang kejuruan meliputi kejuruan Las, Otomotif, Menjahit, PHP, TIK, Design Grafis, Teknik Pendingin dan lainnya. Pelatihan berbasis kompetensi ini dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Purbalingga. Adapun peserta pelatihan sejumlah 299 orang. Dengan pelatihan tersebut diharapkan akan dapat membekali peserta untuk mendapatkan pekerjaan baik wirausaha mandiri maupun bekerja di Perusahaan sehingga dapat mengurangi pengangguran.

b. Melaksanakan Penempatan Kerja :

Penempatan Kerja yang dimaksud adalah :

- Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) di wilayah kabupaten Purbalingga pada Perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten Purbalingga;
- Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) di luar Jawa Tengah seperti di Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan, Perusahaan Garmen di Bandung;
- Antar Kerja Antar Negara (AKAN) seperti ke Jepang, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura;
- *Job Canvasing* ke Perusahaan-perusahaan di sekitar Kabupaten Purbalingga untuk mendapatkan data lowongan kerja sekaligus menempatkan melalui seleksi dan rekrutmen;
- Penempatan Kerja melalui Program Unggulan Kartu Prakerja Kabupaten Purbalingga;
- Pada tahun 2021 ini untuk pertama kalinya dilaksanakan Program Unggulan Kartu Prakerja yang meliputi pelatihan kerja dan sekaligus penempatan di Perusahaan sebanyak 132 orang.

Terkait upaya penempatan kerja, ada beberapa perusahaan dan Instansi yang telah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan seleksi seperti Pizza Hut, Bank BTPN, Asuransi Sinar Mas, Mitra Karya Utama, PNM Mekar,



Alfamart, Indomart dll. Pada tahun 2021 maka dari sejumlah pencari kerja sebanyak 14.560 orang yang telah ditempatkan sebanyak 6.631 orang, dengan rincian penempatan kerja di kabupaten Purbalingga (AKAL) sebanyak 6.580 orang, di luar kabupaten Purbalingga (AKAD) tidak ada, dan di luar negeri (AKAN) sebanyak 51 orang. Data pencari kerja dan penempatan kerja secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 2.91**  
**Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2019**

NO	BULAN	PENEMPATAN											
		AKL			AKAD			AKAN			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Januari	25	407	432	0	0	0	0	6	6	25	413	438
2.	Februari	0	187	187	0	0	0	0	3	3	0	190	190
3.	Maret	10	304	314	0	0	0	2	5	7	12	309	321
4.	April	11	147	158	0	0	0	0	6	6	11	153	164
5.	Mei	0	188	188	0	0	0	0	4	4	0	192	192
6.	Juni	199	2,499	2,698	0	0	0	0	7	7	199	2,506	2,705
7.	Juli	70	919	989	0	0	0	0	2	2	70	921	991
8.	Agustus	20	229	249	0	0	0	0	1	1	20	230	250
9.	September	6	283	289	0	0	0	0	1	1	6	284	290
10.	Oktober	81	96	177	0	0	0	1	1	2	82	97	179
11.	November	89	676	765	0	0	0	1	4	5	90	680	770
12.	Desember	0	134	134	0	0	0	5	2	7	5	136	141
	<b>Jumlah</b>	511	6,069	6,580	0	0	0	9	42	51	520	6,111	6,631



Program yang mendukung sasaran tersebut adalah :

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
- c. Program Hubungan Industrial

## **SASARAN 2 : MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI**

Perkembangan investasi berdasarkan kepatuhan dan perhatian pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan, kemudahan telah diberikan kepada para investor melalui pelayanan dan informasi yang jelas. Sinergitas antara pelaku usaha dan pemerintah daerah yang telah melakukan berbagai upaya melalui kegiatan pemantauan, pembinaan maupun pengawasan sehingga kendala yang terjadi bisa terpantau dengan baik.

**Tabel 2.92  
Capaian Indikator Jumlah Realisasi Nilai Investasi Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Realisasi Nilai Investasi	Rp. juta	547.462	622.870	679.696	758.271	770.000	1.462.143	113,17

Nilai investasi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebesar Rp.1.462.142.613.812,-. Nilai tersebut sudah melampaui target yang ditentukan sebesar Rp.720.000.000.000,-. Jika dibanding tahun 2020 sebesar Rp.758.271.424.434,- tahun 2019 sebesar Rp.679.695.974.162,- dan tahun 2018 sebesar Rp.622.870.314.578,-. Realisasi nilai investasi tersebut mengalami trend meningkat setiap tahunnya. Ada dua macam perusahaan yang berinvestasi di Purbalingga yaitu Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi baru dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu pengembangan perusahaan dan perusahaan yang baru. Perusahaan yang melakukan investasi di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebanyak 3.485 proyek. Dari data tersebut, dibagi menjadi 2 yaitu PMA sebanyak 72 proyek dan PMDN sebanyak 3.413 proyek baik yang melakukan pengembangan maupun baru.



Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan pengembangan maupun baru sebanyak 3.413 proyek dengan nilai investasinya sebesar Rp. 1.208.249.784.309,00,-. Pengembangan perusahaan yang paling besar adalah disektor perdagangan dan reparasi sebanyak 1316 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 296.450.850.285,-. Sementara sektor yang paling kecil adalah sektor industri barang dari kulit dan alas kaki dengan 2 proyek perusahaan dan nilai investasi sebesar Rp.120.000.000,-.

**Tabel 2.93**  
**Nilai Investasi PMDN Per Sektor**

NO	SEKTOR / SUB SEKTOR	JML PROYEK	NILAI INVESTASI
1.	Tanaman pangan dan perkebunan	78	8.830.092.536
2.	Peternakan	104	12.588.156.810
3.	Kehutanan	1	150.000.000
4.	Perikanan	41	1.156.500.000
5.	Pertambangan	5	7.513.050.000
6.	Industri makanan	598	29.579.347.352
7.	Industri tekstil	80	21.533.119.185
8.	Industri barang dari kulit dan alas kaki	2	120.000.000
9.	Industri kayu	47	44.734.271.599
10.	Industri kertas dan percetakan	34	4.589.525.060
11.	Industri Kimia dan farmasi	59	2.039.399.200
12.	Industri karet dan plastik	18	4.132.470.318
13.	Industri mineral non logam	11	9.024.000.000
14.	Industri logam, mesin dan elektronik	18	1.899.000.000
15.	Industri instrumen kedokteran presisi optic dan jam	8	582.000.000
16.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya	16	2.465.000.000
17.	Industri lainnya	180	28.178.795.974
18.	Listrik, gas dan air	45	21.793.278.462
19.	Konstruksi	71	84.244.660.393
20.	Perdagangan dan reparasi	1.316	296.450.850.285
21.	Hotel dan restaurant	252	136.497.766.564
22.	Transportasi gudang dan komunikasi	63	216.707.551.476
23.	Perumahan kawasan industry dan perkantoran	28	59.952.093.774
24.	Jasa lainnya	338	213.575.575.321



NO	SEKTOR / SUB SEKTOR	JML PROYEK	NILAI INVESTASI
	Jumlah	3.413	1.208.249.784.309

Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Purbalingga sebesar Rp.253.892.829.502,-. Dan nilai investasi tersebut berasal dari 25 (dua puluh lima) unit perusahaan PMA yang melakukan pengembangan yaitu :

- a. PT Royal Korindah;
- b. PT Boyang Industrial;
- c. PT Indokores Sahabat;
- d. PT Kesan Baru Sejahtera;
- e. PT Sung Chang Indonesia;
- f. PT Sung Shim International;
- g. PT Hasta Pustaka Sentosa;
- h. PT Yuro Mustika;
- i. PT Hanmi Hair International;
- j. PT Interwork Indonesia;
- k. PT Due Dream International;
- l. PT Midas Indonesia;
- m. PT Milan Indonesia;
- n. PT Won Jin Indonesia;
- o. PT Ye Jin Beauty Ornament;
- p. PT. Sophian Indonesia;
- q. PT Hyup Sung Indonesia;
- r. PT Bouyoung Profesional;
- s. PT Eye Rich;
- t. PT Chunil Indonesia;
- u. PT Inter Costech Indonesia;
- v. PT John Toys Indonesia;
- w. PT Nina Venus Indonesia;
- x. PT Universal Fishing Gear Solutions;
- y. PT Buyoung Profesional Indonesia.

Nilai investasi yang terbesar adalah pada sektor industri lainnya sebanyak 71 proyek dengan nilai Rp.253.806.109.502,-. Sementara sektor yang paling kecil adalah sektor industri kayu dengan 1 proyek dan nilai investasi sebesar Rp.86.720.000,- PMA yang berkembang di Purbalingga paling banyak bergerak di bidang rambut dan bulu mata palsu.



**Tabel 2.94**  
**Nilai Investasi PMA Per Sektor**

<b>NO</b>	<b>SEKTOR / SUB SEKTOR</b>	<b>JML PROYEK</b>	<b>NILAI INVESTASI</b>
1	Tanaman pangan dan perkebunan	-	-
2	Peternakan	-	-
3	Kehutanan	-	-
4	Perikanan	-	-
5	Pertambangan	-	-
6	Industri makanan	-	-
7	Industri tekstil	-	-
8	Industri barang dari kulit dan alas kaki	-	-
9	Industri kayu	1	86.720.000
10	Industri kertas dan percetakan	-	-
11	Industri Kimia dan farmasi	-	-
12	Industri karet dan plastic	-	-
13	Industri mineral non logam	-	-
14	Industri logam, mesin dan elektronik	-	-
15	Industri instrumen kedokteran presisi optik dan jam	-	-
16	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya	-	-
17	Industri lainnya	71	253.806.109.502
18	Listrik, gas dan air	-	-
19	Konstruksi	-	-
20	Perdagangan dan reparasi	-	-
21	Hotel dan restaurant	-	-
22	Transportasi gudang dan komunikasi	-	-
23	Perumahan kawasan industri dan perkantoran	-	-
24	Jasa lainnya	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>72</b>	<b>253.892.829.502</b>



Upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Purbalingga untuk menarik para investor agar mau berinvestasi di Kabupaten Purbalingga antara lain:

- a. Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi;
- b. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi;
- c. Mendorong terjalinya kemitraan investasi;
- d. Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi;
- e. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi.

Permasalahan yang masih menjadi kendala pertumbuhan realisasi investasi baru adalah antara lain :

- a. Keterbatasan ketersediaan lahan peruntukan investasi dengan lokasi yang strategis khususnya industri, perdagangan dan jasa serta properti;
- b. Belum tersedianya bahan promosi investasi yang memadai dalam bentuk *Feasibility Study* dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga promosi investasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Upaya mengatasi permasalahan / kendala tersebut adalah :

- a. Mendorong dan mengkoordinasikan secara intensif materi review RTRW agar dapat terakomodir kebutuhan lahan untuk pengembangan investasi;
- b. Mendorong masing-masing OPD teknis untuk dapat menyusun kajian peluang investasi dalam bentuk *Feasibility Study* sebagai bahan promosi investasi;
- c. Meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai event promosi investasi skala nasional, maupun melalui media teknologi informasi.

Strategi yang telah dilakukan guna meningkatkan daya tarik investasi ke depan antara lain :

- a. Mendorong ketersediaan lahan peruntukan investasi (industri, perdagangan, jasa dan properti) dengan luasan yang memadai pada lokasi yang strategis, didukung dengan ketersediaan infrastruktur penunjang dan aksesibilitas yang semakin baik;
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparat yang bertugas memfasilitasi penanaman modal, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
- c. Meningkatkan fungsi fasilitasi dan pendampingan tahapan penanaman modal bagi calon investor;



- d. Menyiapkan bahan promosi investasi yang komprehensif dan *up to date*;
- e. Meningkatkan kemudahan, kecepatan dan kepastian proses perizinan usaha;
- f. Meningkatkan koordinasi dan mendorong agar setiap OPD disamping tugas pokok fungsinya juga dapat menjalankan tugas untuk mempromosikan peluang investasi di Kabupaten Purbalingga;
- g. Memelihara dan meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat dalam menjaga iklim yang kondusif untuk investasi.

Program yang mendukung sasaran tersebut adalah :

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Program Promosi Penanaman Modal;
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

### **SASARAN 3 : MENINGKATNYA PENDAPATAN DARI SEKTOR PARIWISATA**

**Tabel 2.95  
Pendapatan Sektor Pariwisata**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
Pendapatan Sektor Pariwisata	Rp. ribuan	14.977.961	44,781,457	7.060.328	70,97	51.065.238.000	11.179.948.019	21,89

Peranan sektor pariwisata menjadi penting bagi perkembangan perekonomian di suatu daerah, hal ini sejalan dengan kontribusi yang diberikan oleh sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah. Pada tahun 2021 pendapatan sektor pariwisata (kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Purbalingga) sejumlah Rp.11.179.948.019,-.



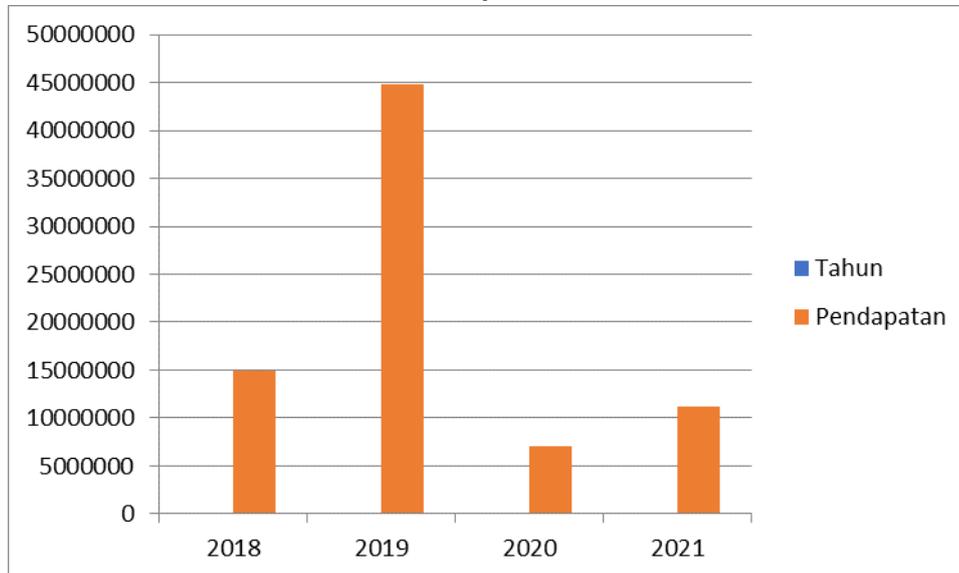
**Tabel 2.96**  
**Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SUMBER</b>
1.	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	Rupiah	3.870.000	Buper Munjulluhur, GOR Mahesajenar dan Stadion Goentoer Darjono, sedangkan untuk retribusi tempat rekreasi bersumber dari retribusi Buper Munjulluhur, GOR Mahesa Jenar, Stadion Goentoer Darjono dan Petilasan Ardilawet
2.	Retribusi Tempat Rekreasi	Rupiah	24.830.000	Bagi hasil antara Objek wisata dan Pemerintah Daerah
3.	Pajak Hotel	Rupiah	700.718.125	Owabong Cottage dan TWP Purbasari Pancuran Mas
4.	Pajak Restoran	Rupiah	4.934.556.505	Owabong dan Grafika Resto (TWP Purbasari Pancuran Mas).
5.	Pajak Hiburan	Rupiah	947.776.568	Owabong, TWP Purbasari Pancuran Mas dan Tirto Asri Walik
6.	Pajak Parkir	Rupiah	12.493.357	Perumda Owabong, TWP Purbasari Pancuran Mas, Pemandian Tirto Asri Walik

Apabila dibandingkan antara pendapatan sektor pariwisata tahun 2021 dengan tahun 2020 tampak bahwa pendapatan tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pendapatan sektor pariwisata menunjukkan angka sejumlah Rp. 7.060.328.000,- dan pada 2021 sebesar Rp. 11.179.948.019,-. Peningkatan ini terjadi salah satunya diakibatkan pandemi Covid-19 sudah mulai melandai. Perusahaan Umum Daerah Owabong yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga saat ini mengelola Obyek Wisata Air (Owabong Waterpark), Taman Sanggaluri, Hotel (Owabong Cottage), Goa Lawa (GOLAGA/Goa Lawa Purbalingga), Monumen Tempat Lahir Jenderal Besar Soedirman dan Taman Usman Janatin



**Gambar 2.20**  
**Grafik Pendapatan Sektor Pariwisata**



Pada tahun 2021 wisatawan yang berkunjung ke berbagai Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 1.068.495 wisatawan yang terdiri dari 100 persen wisatawan nusantara. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2020 sejumlah 1.381.862 wisatawan dan wisatawan mancanegara 50 orang. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 masih berlangsung di sepanjang tahun 2021. Guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19 maka Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten menyusun berbagai regulasi guna membatasi atau mengendalikan penularan Covid-19. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah antara lain melakukan penutupan daya tarik wisata, pembatasan kegiatan masyarakat dan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan serta pemberlakuan persyaratan yang lebih ketat untuk pelaksanaan perjalanan dari dan keluar daerah/masuk daya tarik wisata. Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Owabong maupun oleh pihak swasta yang pada tahun 2021 berkontribusi terhadap jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Purbalingga adalah Golaga, MTL. Jend. Soedirman, Petilasan Ardi Lawet, Owabong Water Park, Sanggaluri Park, Kolam Renang Tirto Asri Walik, TWP Purbasari Pancuran Mas, Buper Munjulluhur, Taman Usman Janatin Purbalingga, Kolam Renang Ciblon Bobotsari, Kutabawa Flower Garden, Rainbow Garden Kutabawa, Rest Area RM Siregol, Wisata Edukasi Kampung Marketer, Kampung Duku Kembaran Wetan, Rest Area Berkah Mulia/Cheng Hoo, Green Sabin, Bendina Hills, Sefa



Garden. Selengkapnya jumlah kunjungan daya tarik wisata pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.97**  
**Kunjungan Wisata di Daya Tarik Wisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

NO.	DAYA TARIK WISATA	KUNJUNGAN		
		WISMAN	WISNUS	JUMLAH
1.	Golaga	0	75.677	75.677
2.	MTL. Jend. Soedirman	0	6.211	6.211
3.	Petilasan Ardi Lawet	0	2.725	2.725
4.	Owabong Water Park Family	0	289.832	289.832
5.	Sanggaluri Park	0	33.272	33.272
6.	Kolam Renang Tirta Asri Walik	0	17.691	17.691
7.	TWP Purbasari Pancuran Mas	0	77.627	77.627
8.	Buper Munjulluhur	0	150	150
9.	Taman Usman Janatin Purbalingga	0	451	451
10.	Kolam Renang Ciblon Bobotsari	0	25.140	25.140
11.	Kutabawa Flower Garden	0	0	0
12.	Rainbow Garden Kutabawa	0	11.287	11.287
13.	Kampung Warna Bobotsari	0	0	0
14.	Rest Area RM Siregol	0	248	248
15.	Wisata Edukasi Kampung Marketer	0	0	0
16.	Kampung Duku Kembaran Wetan	0	0	0
17.	Rest Area Berkah Mulia/Cheng Hoo	0	69.344	69.344
18.	Green Sabin	0	22.571	22.571
19.	Bendina Hills	0	13.981	13.981
20.	Sefa Garden	0	58.468	58.468
	Agro Eduwisata Katelklawu	0	422	422
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>705.097</b>	<b>705.097</b>



Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa penyumbang kunjungan terbesar ada di Owabong sejumlah 289.832 wisatawan. Berkaitan dengan peningkatan ekonomi dari sektor pariwisata, hal ini sudah barang tentu menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi masyarakat desa untuk melihat potensi lokal yang ada di desa yang sekiranya dapat dikembangkan dan berkelanjutan sebagai daya tarik wisata. Potensi lokal yang dikembangkan sebagai daya tarik wisata merupakan salah satu embrio untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2021 terdapat 25 desa sebagai penyumbang kontribusi kunjungan wisatawan. Dari sejumlah desa tersebut kunjungan pada tahun 2021 tercatat sejumlah 358.119 (100% wisatawan nusantara). Selengkapnya kunjungan wisata tahun 2021 di desa wisata/desa potensial wisata sebagai berikut :

**Tabel 2.98**  
**Kunjungan Wisata di Desa Wisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

NO.	NAMA DESA WISATA	KUNJUNGAN		
		WISMAN	WISNUS	JUMLAH
1.	Desa Wisata Panusupan	0	239	239
2.	Desa Wisata Tanalum		5.687	5.687
3.	Desa Wisata Serang		217.744	217.744
4.	Desa Wisata Limbasari		1.708	1.708
5.	Desa Wisata Onje		3.390	3.390
6.	Desa Wisata Tlahab Kidul		10.291	10.291
7.	Desa Wisata Karangcegak		68.155	68.155
8.	Desa Wisata Kedungbenda		8.884	8.884
9.	Desa Wisata Cipaku		0	0
10.	Desa Wisata Karangreja		2.434	2.434
11.	Desa Wisata Siwarak		0	0
12.	Desa Wisata Bumisari		3.809	<b>3.809</b>
13.	Desa Wisata Karangcengis		852	852
14.	Desa Wisata Gunungwuled		7.101	7.101



NO.	NAMA DESA WISATA	KUNJUNGAN		
		WISMAN	WISNUS	JUMLAH
15.	Desa Wisata Karangbanjar		7.074	7.074
16.	Desa Wisata Sirau		5.780	5.780
17.	Desa Wisata Sangkanayu		2.496	2.496
18.	Desa Wisata Selakambang		2.158	2.158
19.	Desa Wisata Slinga		5.685	<b>5.685</b>
20.	Desa wisata Karangjengkol		1.262	1.262
21.	Desa Wisata Tumanggal		300	300
22.	Desa Wisata Pepedan		65	65
23.	Desa Wisata Kutabawa		0	<b>0</b>
24.	Desa Wisata Pagerandong		293	293
25.	Desa Wisata Serayu Larangan		2.712	2.712
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>358.119</b>	<b>358.119</b>

Berbagai upaya dan strategi dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata yaitu :

- a. Penambahan wahana dan daya tarik baru;
- b. Promosi melalui berbagai media dan komunitas. Promosi yang paling efektif saat ini dilaksanakan melalui berbagai media sosial dan dengan mengundang biro-biro perjalanan wisata sebagai mitra untuk mendatangkan wisatawan;
- c. Menyelenggarakan dan mengikuti berbagai event kegiatan festival dan event lainnya baik di Kabupaten Purbalingga maupun di Provinsi Jawa Tengah;
- d. Meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) dengan melaksanakan pelatihan bagi pengelola wisata dan pemandu wisata baik pemandu di lokasi wisata, desa wisata dan pelaku usaha jasa pariwisata;
- e. Pelibatan dengan organisasi atau komunitas kepariwisataan lain, antara lain dengan biro-biro wisata, pengusaha jasa pariwisata (akomodasi wisata, rumah makan, jasa hiburan dan usaha lainnya) yang mampu mendatangkan wisatawan;
- f. Meningkatkan daya tarik wisata dan pengembangan pariwisata di desa wisata dengan memberikan bantuan pengembangan wisata



- ke desa antara lain Desa Panusupan, Desa Banjaran, Desa Karangbawang, Desa Serang (Gardu Pandang Gunung Malang);
- g. Memberikan hibah sebesar Rp.405.000.000,- terhadap 26 kelompok masyarakat dan lembaga terkait wisata, antara lain, 23 kelompok sadar wisata (Pokdarwis), PHRI, HPI dan Harpi;
  - h. Memfalisitasi pemberian bantuan keuangan melalui APBD Propinsi untuk 11 desa wisata sebesar Rp.1.900.000.000,-;
  - i. Sertifikasi CHSE dan sertifikasi hotel dan restoran sebanyak 16 (Hotel 11, restoran dan rumah makan 5);
  - j. Pembuatan *booklet/leaflet*, narasi wisata, vidio wisata, lomba foto wisata untuk membantu promosi daya tarik wisata;
  - k. Penyelenggaraan Fam Trip yang melibatkan biro wisata se-Banyumas Raya, Pematang, Wonosobo, Pekalongan dan Tasikmalaya.

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target jumlah kunjungan wisata berasal dari faktor eksternal, yakni

- a. Pengembangan destinasi pariwisata memerlukan komitmen, koordinasi dan kolaborasi seluruh stakeholder baik masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha. Pemerintah mendorong dalam bentuk penyusunan regulasi, promosi dan penyediaan infrastruktur. Masyarakat mendukung dalam bentuk pelaksanaan aksi sapta pesona pariwisata. Koordinasi dan kolaborasi belum berjalan dengan efektif;
- b. Penurunan angka kunjungan wisata tahun 2021 disebabkan adanya Pandemi Covid-19, penutupan daya tarik wisata dan pembatasan kegiatan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan event/pameran terkendala dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Sehingga pada tahun 2021 hanya mengikuti 1 kegiatan yakni mengikuti event bersama se Barlingmascakeb yang diselenggarakan secara virtual oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, ada kegiatan Festival Ngapak di Golaga dan Festival Kopi di Purbalingga Food Center.

Solusi yang dilakukan adalah :

- a. Melakukan penambahan dan pembenahan daya tarik wisata;
- b. Memperbanyak dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan event;
- c. Meningkatkan kompetensi SDM dan pelayanan kepada para pengunjung;
- d. Melakukan protokol Kesehatan yang ketat untuk mencegah



penularan Covid-19 tanpa mengurangi kenyamanan pengunjung.

Program dan kegiatan yang mendukung antara lain :

- a. Program Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- d. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- e. Program Pemasaran Pariwisata.

## 2. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator *proxy* tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDORB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB Perkapita Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Namun akibat pandemi covid-19, terjadi penurunan PDRB Perkapita pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020. Gambaran capaian indikator kinerja terkait nilai PDRB Perkapita Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.99**  
**Capaian PDRB Per kapita (ADHB)**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
PDRB Per kapita (ADHB)	Rp. ribu	23.395	25.062	26.680	25.118	27.500	27.000	98,18

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa PDRB Per Kapita tiap tahun selalu meningkat, dimana pada tahun 2018 PDRB Per Kapita ADHB mencapai Rp. 26.680 juta kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 26,680 juta, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 25,118 juta. Realisasi capaian PDRB Perkapita pada tahun 2020 tersebut berarti masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 27 juta atau tingkat



ketercapaian sebesar 93,03%. Selanjutnya untuk mendukung capaian kinerja tujuan, maka ditetapkan Sasaran Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

**SASARAN 1 :  
MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING KOPERASI DAN  
USAHA KECIL MIKRO**

Sektor sekunder adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi, seperti pada manufaktur dan barang jadi. Dalam proses produksinya, industri sektor ini mengkonsumsi energi dalam jumlah besar, serta memerlukan pabrik dan mesin. Sektor Sekunder dalam PDRB digambarkan oleh sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian kabupaten Purbalingga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan menggeser sektor pertanian sebagai sektor utama. Kecenderungan terus meningkatnya peran sektor ini mengubah identitas kabupaten Purbalingga dari kota agraris menjadi kota industri

**Tabel 2.100  
Capaian Nilai PDRB Sektor Sekunder**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Nilai PDRB Sektor Sekunder	Rp. miliar	5.741	6.216	6.787	6.919	7.108,382	7.052	95,1



Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai PDRB Sektor Sekunder (Sektor Industri Pengolahan) tiap tahun selalu mengalami kenaikan. Realisasi capaian tahun 2020 sebesar Rp. 6,919 triliun masih dapat melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 6,912 triliun. Hal ini menunjukkan sektor sekunder ini merupakan sektor yang masih dapat diandalkan.

Dilihat dari sisi pertumbuhan, sektor sekunder (Industri pengolahan) pada tahun 2021 mengalami kontraksi pertumbuhan tipis sebesar 1,88 persen. Pertumbuhan ini merupakan capaian yang baik dimasa pandemi yang telah memporak porandakan perekonomian Nasional dalam kurun Waktu 3 (tiga) tahun ini. Meski demikian, kontribusi sektor industri pengolahan masih menduduki posisi yang berpengaruh dalam perekonomian daerah yaitu menyumbang sebesar 63,56 persen terhadap struktur perekonomian daerah

**Tabel 2.101**  
**PDRB Sektor Sekunder**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Industri Pengolahan</b>	5.741.515,96	6.216.692,26	6.787.106,26	6.919.000	7.052.000

Sementara itu Kontribusi UMKM terhadap PDRB Purbalingga di tahun 2021 tumbuh sebesar 1,8% sepanjang tahun 2021 dari realisasi kontribusi UMKM terhadap PDRB nasional tahun 2020 sebesar 63,56%, kontribusi tahun 2021 mencapai 63,79%, kontribusi ini naik sebesar 0,23%. Kenaikan ini tidak lepas dari peran serta Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang senantiasa mendorong UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang melalui berbagai kebijakan diantaranya adanya kemudahan akses permodalan melalui program KUR, Kredit Mawar dan Subsidi Bunga, adanya kerjasama Pemasaran online antara Pemda Purbalingga dengan BUKALAPAK, Pemerintah Purbalingga dengan Perusahaan waralaba yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga serta pembukaan pusat-pusat pemasaran produk UMKM Seperti Gerai Tuka Tuku, dan Wastralingga.

Di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021, jumlah koperasi yang ada sebanyak 245 buah. Dari jumlah tersebut, dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori yaitu Koperasi Aktif sejumlah 172, Koperasi Sehat sejumlah 135, Koperasi Berkualitas sejumlah 15 dan Koperasi Sangat Berkualitas sebanyak 6 Koperasi. Perkembangan



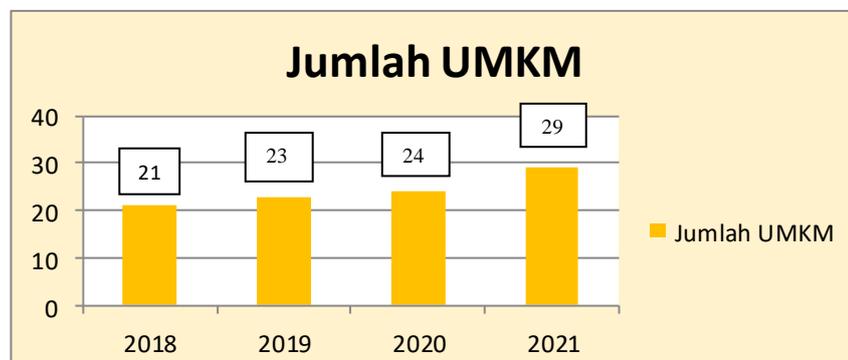
koperasi di Kabupaten Purbalingga dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terdapat 246 koperasi akan tetapi di tahun 2021 berkurang 1 (satu) koperasi menjadi koperasi Provinsi sehingga jumlah koperasi menjadi 245 koperasi di tahun 2021.

Peningkatan jumlah koperasi dan Kontribusi UMKM terhadap PDRB juga diikuti oleh peningkatan jumlah UMKM yang naik kelas. Pada tahun 2021 sebanyak 29 UMKM yang naik kelas. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2020 sebanyak 24 Usaha Mikro telah berhasil di naikkan Menjadi Usaha kecil.

**Gambar 2.21**  
**Grafik Capaian Kinerja Koperasi Sehat**



**Gambar 2.22**  
**Grafik UMKM Naik Kelas**



Realisasi Kinerja secara keseluruhan dengan 2 (dua) indikator selalu mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2021.

Strategi guna meningkatkan jumlah koperasi yang sehat dan UMKM naik kelas antara lain :

a. Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian Kesehatan Koperasi ditahun 2021 dilakukan dalam rangka menilai Kesehatan Koperasi yang dilakukan oleh Tim Monev yang terdiri dari Tim dari DINKOP UKM dan Tim dari DEKOPINDA serta Tokoh Perkoperasian Kab.Purbalingga. Penilaian Monev dengan melihat data penilaian melalui Laporan Keuangan pada Laporan RAT dan keterangan pada waktu dilaksanakannya kegiatan monitoring dan Evaluasi, koperasi sasaran monev tahun ini 98 koperasi yang telah melakukan RAT diakhir Tahun 2020, Penilaian dilakukan dalam rangka evaluasi rutin tahunan dan dalam rangka menilai koperasi berprestasi Tahun 2021.



b. Pengawasan Koperasi

Pengawasan Koperasi berupa kegiatan Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan instrumen pengawasan berupa kertas kerja pengawasan. Untuk tahun 2021 Sasaran Pengawasan dilakukan terhadap 120 koperasi. Selain Monitoring dan Evaluasi, dilaksanakan juga Rapat Koordinasi Pengawasan yang mengundang narasumber dari luar dimana materinya berkaitan dengan pengawasan koperasi. Tahun 2021 telah dilakukan Rapat Koordinasi yang mengundang 40 Peserta yang terdiri dari pengurus dan pengawas Koperasi. Narasumber berasal dari



Kepolisian, Kejaksaan dan Bagian Hukum Setda Purbalingga.



c. Penghargaan Kesehatan KSP/USP

Telah dilakukan Penilaian terhadap Koperasi yang berpredikat Sehat pada tahun 2021, dari hasil penilaian Kesehatan Sejumlah 30 Koperasi, yang telah dinilai dengan menggunakan instrumen Kertas kerja Penilaian Koperasi Berprestasi. Dari hasil Penilaian Koperasi tahun 2021 dihasilkan 15 Koperasi Kategori Koperasi Berkualitas yang kemudian di nilai kembali tersaring sebanyak 6 Koperasi yang mendapat predikat Koperasi Sangat Berkualitas, dari 6 Koperasi ini kemudian terpilih 3 Koperasi Terbaik yang dinobatkan sebagai Koperasi Berprestasi Tahun 2021 yaitu KPRI Guyub Rukun, KPRI Sekar dan KPRI Mempeng.



d. Pelatihan-Pelatihan Perkoperasian

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Koperasi Dalam pengelolaan keuangan Dinas Koperasi dan UKM Kab.Purbalingga Menyelenggarakan Pelatihan-pelatihan Perkoperasian yang diadakan di Bidang koperasi di Tahun 2021 terakomodir di dalam Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas SDM Koperasi dimana tahun 2021 terlaksana pelatihan sebagai berikut :

- Pelatihan Akuntansi Koperasi diikuti oleh 40 Peserta;
- Pelatihan perpajakan Koperasi diikuti oleh 40 Peserta;
- Pelatihan Pengawasan Koperasi diikuti oleh 40 Peserta;
- Pelatihan Manajemen Keuangan Koperasi (DAK) 30 Peserta;
- Pelatihan Penyusunan SOP dan SOM Koperasi (DAK) 30 Peserta;
- Pelatihan Manajemen Resiko Koperasi (DAK) 30 Peserta.



e. Adanya Bimtek Perkoperasian

Penyelenggaraan sosialisasi/ pelatihan tentang perkoperasian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 diikuti oleh 40 orang, selain Bimtek perkoperasian di Bidang Koperasi juga dilakukan Bimtek Inovasi Koperasi yang diikuti oleh 30 peserta dari pengelola dan pengurus Koperasi di Kabupaten Purbalingga.

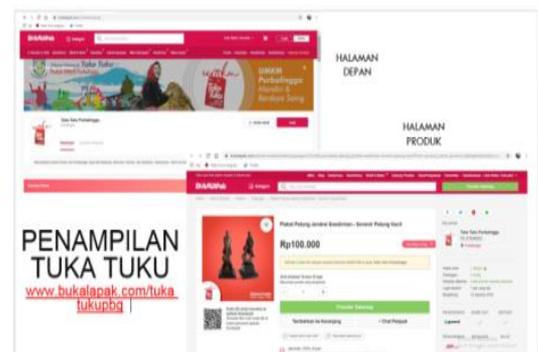


f. Hibah Keuangan

Selain Pelatihan dan Monev Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga memberikan Bantuan keuangan bagi Koperasi di tahun 2021 diberikan kepada KSPSS Bangku El Pena Sebesar Rp. 75.000.000,- dan Hibah kepada DEKOPINDA Kab.Purbalingga Sebesar Rp.50.000.000,-.

g. Perluasan Pemasaran melalui jejaring plafon daring atau pemasaran online

Produk UMKM dengan menggandeng BUKALAPAK, kerjasama ini merupakan kegiatan unggulan dan sekaligus bentuk inovasi dengan program Tuka Tukunya, dalam rangka memperluas pemasaran produk UMKM ke pasar Nasional ataupun Internasional. Dengan kerjasama ini selain Produk UMKM menjadi dikenal Masyarakat luas juga Produk UMKM menjadi lebih baik dari sisi kemasan maupun jaminan yang lainnya seperti Halal dan Merk karena produk yang dipasarkan di BUKALAPAK adalah produk dengan kemasan standar nasional dan harus memiliki label halal serta melalui proses kurasi dan branding. Secara tidak langsung kerjasama ini telah mengangkat produk UMKM di Purbalingga yang awalnya sederhana menjadi produk yang memiliki Brand.



h. Perluasan Pemasaran Produk Tuka Tuku

Melalui kerja sama dengan Perusahaan Waralaba Indomaret dan Alfamart, dimana produk Tuka Tuku dipasarkan melalui Gerai tersebut. Di tahun 2020 kerjasama ini telah menggandeng 25 Gerai Indomaret dan 14 Gerai Alfamart, dengan 41 jenis Produk yang tersebar diseluruh wilayah Purbalingga. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas Pemasaran Produk UMKM sehingga produk UMKM Purbalingga tidak hanya dikenal sebagai produk kelas pasar tradisional tetapi sebagai produk yang memiliki Brand



pasar Modern, selain itu juga dengan masuknya produk UMKM di Gerai Waralaba masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan produk UMKM Purbalingga.



i. Bantuan Fasilitas Hak Merk

Melalui Sub kegiatan Fasilitas Kemudahan Perijinan Pelaku UMKM yang memiliki produk potensial untuk dikembangkan mendapatkan bantuan pengurusan Hak Merk untuk produk Makanan. Program ini juga ikut mendukung program Tuku Tuku yang sedang di galakkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Di tahun 2021 ada 40 pelaku yang mendapatkan bantuan Fasilitas Hak Merk.

j. Bantuan Peralatan

Bantuan peralatan diberikan kepada pelaku UMKM guna memperlancar Proses Produksi, di tahun 2021 diberikan kepada Kelompok pengrajin yaitu pengrajin gagang sapu Desa Tunjungmuli, Paguyuban Sablon Desa Wanogara Wetan, bantuan alat kepada Pengrajin Molen Desa Tangkisan, bantuan untuk kelompok jajan Desa Sumampir.



k. Kemasan Produk

Bantuan kemasan produk guna memberikan bantuan Kemasan dan label bagi pelaku UMKM untuk perbaikan kemasan dari kemasan yang sederhana menjadi kemasan yang lebih bagus dan terstandar sehingga produk UMKM memiliki nilai tambah dengan berubahnya kemasan. Tahun 2021 bantuan kemasan diberikan sebanyak 44 Paket senilai Rp. 127.500.000,-. Fasilitas Kemasan Godiebag dan Paperbag untuk Tuka Tuku 2 (dua) paket @ Rp.10.000.000.



l. Bantuan Keuangan Subsidi Bunga

Bantuan Subsidi Bunga disalurkan melalui Lembaga Keuangan penyalur dimana sasaran dari Subsidi bunga adalah Para pelaku UMKM di Wilayah Kab.Purbalingga, dalam bentuk subsidi imbal hasil sebesar 50%. Tahun 2021 Subsidi bunga disalurkan melalui 18 Lembaga Keuangan Penyalur sebesar Rp.500.000.000,-. Penyaluran dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap :

Tahap I : Rp. 250.000.000,-

Tahap II : Rp. 250.000.000,-

Sampai dengan Tribulan 3 September 2021 tersalurkan Rp. 432.759.198 (86,55%) dengan jumlah penerima 1.318 pelaku. Selain Penyaluran dilaksanakan juga Monev Subsidi Bunga bersama Tim Monev Subsidi Bunga yang melibatkan Lintas Sektoral.



m. Sosialisasi Keamanan dan Legalitas Usaha Pangan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembekalan keamanan dan legalitas produk pangan agar sesuai dengan standart BP-POM, kegiatan ini dilaksanakan di Griya UMKM Purbalingga dengan Narasumber dari BP-POM Kabupaten Banyumas dengan 40 peserta dari Pelaku UMKM Produk Pangan.

n. Fasilitasi Pendampingan Usaha

Dalam rangka Peningkatan kemampuan Manajerial maka dilakukan pendampingan Usaha untuk UMKM yang dilaksanakan di Griya UMKM untuk Komunitas Pedagang Siomay dengan narasumber dari BKK Purbalingga, Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 kali.

o. Hibah Keuangan

Di Tahun 2021 diberikan Hibah Keuangan kepada 82 Kelompok Pelaku UMKM di beberapa desa dengan Besaran Hibah berbeda2 dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp. 771.000.000,- tujuan dari hibah ini adalah penguatan Permodalan Pasca Pandemi Covid-19.

p. Fasilitasi Bahan Baku

Fasilitasi bahan baku diberikan kepada :

- Bantuan Bahan baku Olahan Nanas dan Makaroni sebagai Produk Unggulan Kabupaten Purbalingga yang jenis resep yang dipraktekkan adalah Nastart Nanas Toping Makaroni keju, Pie TartSelai Nanas, Cake Nastrart Nanas, Bolu Nanas lapis, Choco Nanas, Pie Brownies, Bolu Nanas Ori.
- Bahan baku kopi sebanyak 100 pouch;
- Bahn Kain untuk Pembuatan Blankon Soedirman berupa kain Batik sebanyak 10buah;
- Bahan baku biji kopi dalam rangka kegiatan gelar produk UMKM sebanyak 30 kg biji kopi;
- Bahan Baku Craft berupa papan kayu, kaso, paku, cat dll;
- Bahan Baku Produk Siomay yang diberikan kepada Paguyuban Pedagang Siomay berupa tepung aci, kacang tanah, telur, gula merah dll.

q. Souvenir/Cinderamata

Souvenir atau Cinderamata selama tahun 2021 diberikan denagn serapan dana Rp.246.838.220,- denagn rincian sebagai berikut :

- Paket Produk UMKM sebanyak 467 paket;
- Batik khas Purbalingga sebanyak 120 buah;
- Plakat Jenderal Soedirman sebanyak 25 paket;



- Paket Kopi sebanyak 2.184 pouch;
  - Makroni Keju sebanyak 2.103 pouch;
  - Blankon sebanyak 60 Buah.
- r. Fasilitasi Narasumber
- Sebagai bentuk Partisipasi dalam Pengembangan SDM pelaku Usaha, Dinkop UKM memfasilitasi Narasumber pada pelatihan :
- Pelatihan Kewirausahaan tentang Pengolahan Buah Nanas;
  - Pelatihan Buah Parijoto;
  - Pelatihan Teknik Produksi Kerajinan Bambu;
  - Pelatihan pengolahan makanan dan minuman.
- s. Pembiayaan Dekorasi/Tata Ruang
- Dengan serapan Anggaran Rp.58.100.000,- dilaksanakan di beberapa tempat antara lain :
- Dekorasi Purbalingga Food Center Barat;
  - Dekorasi Obyek wisata D'Las Serang;
  - Dekorasi Display Produk UMKM Khas Purbalingga di Golaga;
  - Dekorasi Display Produk UMKM Khas Purbalingga di Obyek Wisata Pancuran Mas dan Parara D' Pie;
  - Dekorasi untuk galery UMKM dan Dekranasda Bandara Jenderal Soedirman;
  - Dekorasi Gelar Produk UMKM.
- t. Program Kemitraan
- Program Kemitraan dengan Universitas AMIKOM. Program kemitraan yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah bermitra dengan Universitas AMIKOM dimana kerja sama ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :
- Dinkop UKM :
    - Memberikan Training dalam kegiatan Kemahasiswaan;
    - Memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Universitas AMIKOM untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Praktek Kerja/Magang, Penelitian, dan Pengabdian di lokasi Dinkop UKM;
    - Menyediakan tenaga pengajar/staff ahli untuk mengajar dalam program ini bila dibutuhkan oleh AMIKOM;
    - Memberikan kemudahan akses digital sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kegiatan Akademik yang diselenggarakan oleh Universitas Amikom.
  - Universitas AMIKOM
    - Memperoleh kemudahan perijinan dari DINKOP UKM dalam program praktek kerja/pemagangan;



- Membiayai sendiri mahasiswa yang akan atau ditugaskan untuk program praktek kerja/pemagangan, yang meliputi akomodasi dan konsumsi untuk perjalanan ke lokasi yang dituju;
  - Membantu menyediakan ruangan untuk penyelenggaraan kegiatan seminar ataupun workshop yang diadakan oleh Dinkop UKM.
- u. Kemitraan antara PT Pertamina (Persero) melalui *Refinery Unit (RU) IV Cilacap* dengan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Purbalingga di Tahun 2020 masih berjalan hingga saat ini dalam bentuk *maintenance* pinjaman kepada pelaku UMKM.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dari indikator jumlah koperasi sehat dan jumlah anggota koperasi yaitu Program Penumbuhan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Penumbuhan Koperasi
- b. Pengembangan Koperasi

Dalam rangka mencapai target sasaran Kontribusi UMKM terhadap PDRB, Persentase Koperasi sehat dan UMKM Naik Kelas, ada beberapa kendala yang dihadapi, kendala-kendala tersebut adalah:

- a. Kurangnya kapasitas SDM pengelola dan pengurus Koperasi;
- b. Manajerial Koperasi yang belum Profesional;
- c. Rendahnya produktivitas;
- d. Keterbatasan akses kepada sumber daya produktif seperti modal, teknologi, informasi dan keterbatasan jangkauan pasar dan jejaring kerja;
- e. Kualitas Sumber Daya manusia yang rendah serta iklim usaha yang belum menunjang secara optimal;
- f. Kelembagaan koperasi dan UMKM yang belum cukup kuat.

Solusi-solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi :

- a. Dalam rangka mengatasi Kurangnya kapasitas SDM pengelola dan pengurus Koperasi, dilakukan dengan cara menyelenggarakan monev secara rutin dan terjadwal serta mengadakan Bimtek dan Pelatihan perkoperasian bagi pengelola, pengawas maupun pengurus koperasi serta melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang perkoperasian di RAT;
- b. Manajerial Koperasi yang belum Profesional, dalam rangka mengatasi permasalahan ini dengan cara menyelenggarakan workshop dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola maupun



- pengurus dan pengawas koperasi. Pada tahun 2020 pelatihan dan Bimtek dilakukan sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta total 80 orang pengelola dan pengurus koperasi se Kabupaten Purbalingga;
- c. Peningkatan kualitas produksi dengan adanya kreativitas dan inovasi;
  - d. Menjalin kemitraan dengan lembaga riset dan Perguruan Tinggi serta swasta untuk meningkatkan kualitas produk UMKM serta memperbaiki manajemen usaha pelaku UMKM yang masih sangat sederhana terutama usaha mikro dan mengembangkan pemasaran ke luar Purbalingga;
  - e. Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan secara intensif.

Pada tahun 2021, Nilai PDRB Purbalingga atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 26,393 triliun rupiah, angka tersebut naik sebesar 1,3 triliun rupiah dari tahun 2020 yaitu sebesar 25,093 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 17,182 triliun rupiah, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 17,731 triliun rupiah. Dengan kata lain selama tahun 2020 s/d 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,19%. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan PDRB Sektor Perdagangan. Dengan meningkatnya sarana perdagangan dapat memperlancar aktifitas perdagangan sehingga pergerakan ekonomi di Purbalingga semakin lancar. Peningkatan kualitas sarpras perdagangan di Kabupaten Purbalingga di tahun 2021 baik itu dalam bentuk pembangunan maupun rehabilitasi masih di fokuskan pada peningkatan sarana fisik Pasar Rakyat dan Sentralisasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk Kegiatan peningkatan sarana prasarana Pasar Rakyat di tahun 2021 ada sebanyak 11 paket pekerjaan baik itu berupa peningkatan fisik/rehab maupun pembangunan pasar, adapun paket pekerjaannya sebagai berikut :

- a. Revitalisasi Pasar Rakyat Panican;
- b. Pembangunan Kios Cabut Bulu Pasar Segamas;
- c. Pembuatan Drainase Pasar Segamas;
- d. Pembuatan Pintu Besi Pasar Rakyat Kertanegara;
- e. Penataan Halaman Pasar Rakyat Tobong;
- f. Pembangunan Pagar Keliling Pasar Rakyat Tobong;
- g. Penataan Lingkungan Pasar Rakyat Bobotsari;
- h. Penataan Lingkungan Pasar Rakyat Bukateja;



- i. Penataan Lingkungan Pasar Rakyat Kutawis;
- j. Perbaikan MCK Pasar Rakyat Karanganyar;
- k. Pematangan Lahan Revitalisasi Pasar Badog Bancar.

Sedangkan untuk Kegiatan Sentralisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ada sebanyak 3 paket pekerjaan dan 1 paket pekerjaan diluncurkan di tahun 2022 yaitu Pembangunan Kawasan PFC Tahap 4, adapun paket pekerjaan tersebut yaitu :

- a. Pembangunan Lapak Kopi PFC Barat;
- b. Pembangunan Kawasan PFC Tahap 3;
- c. Penataan Lingkungan Curgecang Kuliner Center (CKC);
- d. Pembangunan Kawasan PFC Tahap 4.

Guna menjaga eksistensi pasar rakyat ditengah pertumbuhan toko swalayan maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan upaya peningkatan daya saing pasar rakyat melalui kegiatan revitalisasi pasar rakyat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Purbalingga juga berupaya meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pasar dan daya saing pengelola pasar melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan pasar, study banding pengelolaan pasar serta mengikuti lomba pasar tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kedepan, disamping meningkatkan pengawasan dan pembinaan kebersihan pasar, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga akan mengaplikasikan program e-Retribusi guna meningkatkan pelayanan retribusi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor layanan pasar

**Gambar 2.23**  
**Revitalisasi Pasar**



Selain melalui revitalisasi pasar, dalam rangka mewujudkan pasar sehat dan bersih juga telah dilakukan peningkatan koordinasi dengan OPD terkait untuk meningkatkan intensitas pengambilan sampah di TPS Pasar. Selain itu, juga menambah container sampah serta meningkatkan intensitas pembinaan terhadap para petugas kebersihan pasar agar lebih disiplin dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya. Para Pedagang juga didorong secara swadaya dan kesadaran sendiri memiliki budaya “resik-resik dewek” di lingkungan kios, los dan lapak masing-masing. Guna mewujudkan pasar sehat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan BPOM secara berkala juga melakukan pengawasan peredaran makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya.

**Gambar 2.24**  
**Pengawasan Peredaran Makanan/Minuman**



Dalam rangka meningkatkan layanan pasar berupa informasi perkembangan harga pasar telah mengimplemtasikan Program Sistem Informasi Harga Pasar melalui SIM HP dengan penempatan Running Teks di Pasar Segamas, Bobotsari dan Bukateja. Melalui sistem ini, perkembangan harga pasar sejumlah barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya akan terus termonitor oleh petugas yang telah ditetapkan di masing-masing pasar. Para petugas selanjutnya melakukan imputing data perkembangan harga melalui aplikasi yang disediakan setiap hari paling lambat jam 10.00 WIB. Data hasil monitoring selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat di layar monitor yang telah dipasang serta dapat diakses oleh Pejabat melalui aplikasi SIM HP di HP Android. Mewujudkan pasar sehat diperlukan upaya yang tersinergi dan terintegrasi dari berbagai stakeholders terkait untuk mewujudkan kondisi pasar yang bersih, nyaman, aman dan sehat sehingga seluruh aktivitas didalam pasar rakyat dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan



peruntukannya. Situasi pasar rakyat tersebut akan sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar rakyat antara lain keberadaan produsen hulu (penyedia bahan segar), pemasok, penjual, konsumen, aparatur pengelola dan petugas pasar, pedagang serta masyarakat dan tokoh masyarakat sekitar pasar.

Kendala di dalam mewujudkan pasar sehat antara lain

- a. Pertama; masih perlunya peningkatan koordinasi, partisipasi dan sinkronisasi program baik antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan organisasi swasta, BUMD/BUMN serta organisasi sosial masyarakat lainnya;
- b. Kedua; menyangkut budaya bersih dan sehat para pedagang dan pengunjung pasar. Selama ini para pedagang menganggap bahwa kebersihan hanya menjadi tugas para petugas kebersihan karena mereka sudah membayar retribusi kebersihan. Di sisi lain jumlah petugas kebersihan di setiap pasar rakyat masih belum representatif dibanding luasan pasar dan jumlah pedagang;
- c. Ketiga; perlunya peningkatan partisipasi warga masyarakat sekitar pasar untuk secara bersama-sama pedagang pasar turut menciptakan pasar sehat dan bersih;
- d. Keempat; menyangkut ketersediaan sarana prasarana kebersihan seperti alat-alat kebersihan, gerobak sampah, bahan-bahan pembersih serta kurangnya intensitas waktu pengambilan sampah di masing-masing TPS pasar;
- e. Masih banyaknya pedagang yang menjual makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya, juga menunjukkan masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan dan pedagang terhadap larangan penjualan makan yang mengandung bahan berbahaya.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan 1 program dan 7 kegiatan, yaitu Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan.

Pandemi Covid-19 sejak awal 2019 yang melanda negara-negara hampir diseluruh benua telah berdampak negative secara signifikan terhadap transaksi perdagangan (ekspor-impor) Kabupaten Purbalingga tahun 2020. Berbagai kebijakan dibidang kesehatan dan ekonomi yang diambil negara-negara dalam mengatasi penyebaran Covid-19 mulai dari pembatasan kegiatan sosial dan budaya masyarakat, pembatasan mobilitas penduduk, barang serta jasa



sampai dengan pemberlakuan lockdown dalam berbagai skala kewilayahan di masing-masing Negara telah menyebabkan sulitnya distribusi barang antar Negara (ekspor-impor). Kondisi tersebut terjadi di hampir semua negara tujuan ekspor Purbalingga seperti Cina, Korea, Amerika, Jepang dan Taiwan. Produk ekspor andalan Kabupaten Purbalingga ke Negara-negara tersebut meliputi bulu mata palsu, wig, *manequin*, *lunch box*, *laminating board* dan lain sebagainya. Sehingga secara otomatis perusahaan-perusahaan eksportir barang-barang tersebut pun mengalami penurunan nilai ekspor, meskipun ada juga beberapa perusahaan yang masih mampu meningkatkan nilai ekspornya. Nilai ekspor Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tercatat sebesar Rp.3.495.934.505.965,74,-. Nilai impor sebesar Rp.703.560.038.389,15,-, dengan demikian nilai ekspor bersih tercatat sebesar Rp.2.792.374.467.576,59,-. Dibanding tahun 2020, capaian nilai ekspor tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.1.176.695.829.154,28 atau 51%, dimana pada tahun 2020 nilai ekspor Kabupaten Purbalingga mencapai Rp.2.319.238.676.811,46,-. Adapun data penyumbang nilai ekspor Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.102**  
**Nilai Ekspor**

NO	PERUSAHAAN	KOMODITAS	NILAI EKSPOR (RP)
1	PT. ROYAL KORINDAH	Bulu mata palsu	155.111.847.260,00
2	PT. HYUP SUNG INDONESIA	Bulu mata palsu	67.895.698.137,15
3	PT. INDOKORES SAHABAT	Rambut palsu (Wig) & Perhiasan Imitasi	137.095.580.078,49
4	PT. YURO MUSTIKA	Boneka Manequin dan Wig	27.683.381.982,50
5	PT. SUNG CHANG INDONESIA	Wig (Rambut Palsu)	812.483.109.115,73
6	PT. KESAN BARU SEJAHTERA	Manequin (Boneka), Rambut Palsu	35.943.091.127,00
7	PT. HASTA PUSAKA SENTOSA	Rambut palsu (Wig) dan Accessories Wig	16.116.573.318,69
8	PT. SUNG SHIM INTERNASIONAL	Bulu mata palsu dan Kuku Palsu	92,095.161.511,89
9	PT HANMI HAIR INDONESIA	Wig Hairpieces dan Manequin	34.344.406.282,76
10	PT. BOYANG INDUSTRIAL	Wig, dan Accesoris	556.350.793.297,35
11	PT INTERWORK INDONESIA	Bulu mata palsu	10.282.133.409,75
12	PT.MILAN INDONESIA	Wig (rambut Palsu) dan Asesoris	36.542.172.755,41



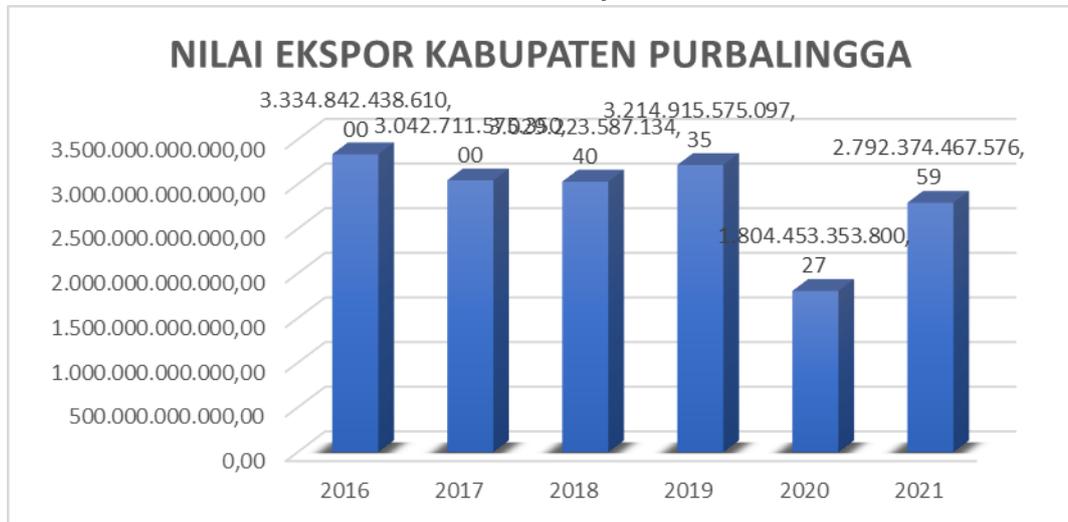
NO	PERUSAHAAN	KOMODITAS	NILAI EKSPOR (RP)
13	PT.WON JIN INDONESIA	Wig (rambut Palsu)	9.532.539.298,00
14	PT. SOPHIAN INDONESIA	Wig (Rambut palsu)	9.608.009.030,39
15	PT. EYE RICH	Coconut Mat dan Turunannya	-
16	PT. BOUYONG PROFESIONAL Indonesia	Sapu	-
17	PT. JHON TOYS INDONESIA	Boneka	46.128.022.780,00
18	PT. TIGA PUTRA ABADI PERKASA	Bulu mata palsu	-
19	PT.MAHKOTA ESTETIKA ABADI	Bulu mata palsu	4.880.419.826,00
20	PT. SUNSTARINDO WIRAHUSADA	Wig (Rambut palsu) dan Bulu Mata Palsu	14.956.444.802,00
21	TIGA PUTRA ABADI PERKASA	Bulu mata palsu	21.902.804.070,00
20	PT. SHINHAN CREATINDO	Bulu mata palsu	43.219.614.034,00
21	PT. BINTANG MAS TRIYASA	Bulu mata palsu	56.167.067.018,09
22	PT. SINAR CENDANA ABADI	Bulu mata palsu	54.667.141.621,33
23	PT. MAHKOTA TRI ANGJAYA	Bulu mata palsu	38.859.523.699,00
24	PT. ROSA SEJAHTERA EYELASHES	Bulu mata tiruan	9.445.815.379,48
25	PT. BIMA NUGRAHA	Wooden Sheet	34.204.361.689,07
26	PT. MAJAPURA	Lunch box	63.797.442.941,64
27	CV. PURBAYASA	Laminating board	300.524.698.747,87
28	CV. SN JAYA PRIMA	Kamaboko-lta, Wooden Round Stick dan Laminating	24.565.609.149,00
29	CV. PHOENIK AGUNG PRIMA	Industri pengolahan kayu	77.971.005.214,00
30	CV. RAYUNG PELANGI	Sapu	-

Sumber : Dinperindag Tahun 2021

Upaya lain untuk meningkatkan nilai ekspor di Kabupaten Purbalingga juga dilakukan melalui fasilitasi perijinan ekspor sesuai ketentuan berlaku, aktif mengikuti kegiatan promosi/pameran/misi dagang baik dalam skala regional, nasional maupun internasional serta turut mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif di Kabupaten Purbalingga. Kegiatan monitoring perkembangan ekspor di setiap Perusahaan eksportir secara berkala juga terus dilakukan untuk memantau perkembangan nilai ekspor serta mengetahui secara dini kemungkinan adanya kendala/hambatan yang ditemui eksportir.



**Gambar 2.25**  
**Grafik Nilai ekspor**



Program yang mendukung sasaran tersebut adalah :

- a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
- b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
- d. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
- e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
- f. Program Pengembangan UMKM;
- g. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
- h. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- i. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- j. Program Pengembangan Ekspor.

**SASARAN 2 :**  
**MENINGKATNYA DAYA SAING INDUSTRI DAN PELAYANAN**  
**PERDAGANGAN**

Sektor primer adalah sektor ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya alam secara langsung. Sektor primer dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digambarkan oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan. Meski secara umum tingkat pertumbuhan sektor primer relatif lebih rendah dibanding pertumbuhan sektor lain, namun khusus untuk Sektor pertanian masih merupakan sektor utama dalam perekonomian kabupaten Purbalingga bersama sektor industri.



**Tabel 2.103**  
**Nilai PDRB Sektor Primer**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Nilai PDRB Sektor Primer	Rp. miliar	7.347	7.664	7.922	8.428	6.380	101,2

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai PDRB Sektor Primer (Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan) tiap tahun selalu mengalami kenaikan. Realisasi capaian tahun 2021 sebesar Rp. 6.380 milyar lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 8.428 milyar, meskipun angka pelampauannya terbilang kecil.

**Tabel 2.104**  
**PDRB Sektor Primer**

URAIAN	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.895.984,78	6.319.885,18	6.533.311,46	6.997.820
Pertambangan dan Penggalian	1.010.453,47	1.071.644,41	1.130.710,29	1.205.930
<b>Jumlah</b>	<b>6.906.438,25</b>	<b>7.391.529,59</b>	<b>7.664.021,75</b>	<b>8.230.750</b>

Sektor pertambangan menduduki urutan ke-6. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sektor primer pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 8.230 milyar atau meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp. 7.664 milyar. Pada tahun 2021, nilai produksi pertanian sebesar Rp. 2.859.776.587.060. Nilai produksi tersebut berasal dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

**Tabel 2.105**  
**Nilai Produksi Pertanian dari komoditas Tanaman Pangan**

NO	KOMODITAS	PRODUKSI	SATUAN	HARGA (Rp)	NILAI PRODUKSI (Rp)
1	Padi	179.004.000	kg	8.148	1.458.443.743.152
2	Jagung	40.300	kg	4.820	194.250.767
3	Kedelai	443	kg	9.121	4.040.653
Sub Total					1.458.642.034.571



Nilai produksi dari tanaman pangan sebesar Rp.1.458.642.034.571 dari total nilai produksi pertanian Rp.2.630.804.899.000 atau sebesar 55,44%, persentase tertinggi sumbangan nilai produksi tanaman pangan berasal dari komoditas padi (99,98%) hal ini menunjukkan bahwa nilai produksi tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh komoditas padi, sedangkan jagung dan kedele hanya menyumbang 0,2% dari nilai produksi tanaman pangan.

**Tabel 2.106**  
**Nilai Produksi Komoditas Hortikultura dan Perkebunan**

NO	KOMODITAS	PRODUKSI	SATUAN	HARGA (RP)	NILAI PRODUKSI (RP.)
1	Manggis	1.272.000	Kg	18.000	22.896.000.000
2	Durian	4.669.000	Kg	35.000	163.415.000.000
3	Kelapa	67.188.820	Kg	4.031	270.838.133.420
4	Lada	185.380	Kg	66.279	12.286.801.020
5	Kopi	290.992	Kg	28.072	8.168.727.424
Sub Total					477.604.661.864

Dari tabel diatas, sumbangan nilai produksi dari tanaman hortikultura dan perkebunan sebesar Rp. 477.604.661.864 dari total nilai produksi pertanian Rp. 2.630.804.899.000 atau sebesar 16,70%, persentase tertinggi sumbangan nilai produksi hortikultura dan perkebunan berasal dari komoditas kelapa (56,71%).

**Tabel 2.107**  
**Nilai Produksi Komoditas Peternakan**

NO	KOMODITAS	POPULASI	SATUAN	KONVERSI (Kg)	HARGA (Rp)	NILAI PRODUKSI (Rp)
1	Sapi	12.524	ekor	120	121.000	181.848.480.000
2	Kambing	285.120	ekor	8	150.000	342.144.000.000
3	Broiler	4.954.700	ekor	1	33.750	167.221.125.000
4	Layer (telur)	165.202.692	butir	10.325.168	22.500	232.316.285.625
Sub Total						923.529.890.625



Sumbangan nilai produksi dari komoditas peternakan sebesar Rp.923.529.890.625 dari total nilai produksi pertanian Rp.2.630.804.899.000 atau sebesar 32,29%, persentase tertinggi sumbangan nilai produksi peternakan berasal dari komoditas kambing (37,04%). Perhitungan komoditas peternakan untuk masing-masing komoditas dilakukan konversi daging, hal ini disebabkan karena harga jualnya berdasarkan berat daging (kg), konversi sapi 1 ekor diprediksi bisa menghasilkan 120 kg daging, konversi 1 ekor kambing 8 kg, konversi 1 ayam broiler 1 kg dan konversi telur untuk 1 kg terdapat sekitar 16 butir. Di negara maju, sudah banyak orang yang mengubah pola konsumsi pangan hewannya, dari red meat (daging-dagingan) ke white meat (ikan-ikanan), karena makan ikan lebih menyehatkan daripada makan daging. Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kap/tahun. Capaian angka konsumsi ikan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 (sementara) adalah sebesar 26,39 kg per kapita /tahun naik sekitar 5,09% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 25,11 kg/kapita/tahun. Peningkatan angka konsumsi ikan di Kabupaten Purbalingga disebabkan karena naiknya konsumsi di rumah tangga, kampanye gemarikan pada 1.000 anak sekolah; pelatihan olahan ikan; naiknya konsumsi di luar rumah tangga karena banyaknya masyarakat purbalingga yang kerja di pabrik, tumbuhnya rumah makan dan tumbuhnya tempat wisata; dan naiknya konsumsi ikan tidak tercatat dalam kuesioner karena adanya jenis ikan uceng dan produksi olahan seperti abon, bakso ikan dan nugget ikan. Konsumsi ikan selain akan dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan/gizi, diharapkan juga akan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia agar menjadi bangsa yang sehat, kuat dan mempunyai etos kerja yang tinggi sehingga menjadi bangsa yang maju, makmur dan sejahtera. Konsumsi ikan per kapita dipengaruhi oleh banyak faktor yang antara lain dipengaruhi oleh ketersediaan ikan di masyarakat, harga ikan, daya beli masyarakat, pengetahuan masyarakat, nilai sosial budaya dan preferensi masyarakat, variabel-variabel tersebut menentukan pola dan tingkat konsumsi ikan per kapita.

- a. Program yang mendukung sasaran tersebut adalah :
- b. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
- c. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;



- d. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- e. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- g. Program Penyuluhan Pertanian;
- h. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- i. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- j. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
- k. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

**MISI 6 :**  
**"MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA"**

**TUJUAN MISI 6 (1) :**  
**TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM YANG HANDAL DAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG YANG AMAN PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN**

Pada tahun 2021 target indikator Indeks Daya Saing Infrastruktur sebesar 77,6% sedangkan realisasi capaiannya sebesar 81,88% sehingga prosentase capaiannya yaitu sebesar 105,52 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang sebesar 76,75% ada peningkatan realisasi capaian sebesar 5,1%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar 74% maka ada peningkatan yang signifikan dari realisasi capaian yaitu sebesar 7,8%. Nilai tersebut juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2018 yang sebesar 74,2 atau ada peningkatan sebesar 7,6%. Realisasi capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2017 yang sebesar 72,5% ada peningkatan realisasi capaian sebesar 9,3%.



**Tabel 2.108**  
**Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Infrastruktur Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
Indeks Daya Saing Infrastruktur	Nilai	72.5	74.2	74,00	76,75	77,6	81,88	105,52

Selanjutnya untuk mendukung capaian kinerja tujuan, maka ditetapkan sasaran Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

**SASARAN :**  
**MENINGKATNYA DAYA SAING INFRASTRUKTUR**

Terkait target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu indikator Indeks Daya Saing Infrastruktur sebesar 77,6% sedangkan capaiannya sebesar 81,88% sehingga prosentase capaiannya yaitu sebesar 105,5%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang sebesar 76,75% ada peningkatan realisasi capaian sebesar 5,1%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar 74% maka ada peningkatan yang signifikan dari realisasi capaian yaitu sebesar 7,88%. Nilai tersebut juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2018 yang sebesar 74,2 atau ada peningkatan sebesar 7,68%. Realisasi capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2017 yang sebesar 72,5% ada peningkatan realisasi capaian sebesar 9,38%.

**Tabel 2.109**  
**Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Infrastruktur Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
Indeks Daya Saing Infrastruktur	Nilai	72.5	74.2	74,00	76,75	77,6	81,88	105,52

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air. Jalan nasional merupakan jalan



arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Pemerintah dalam pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Pada tahun 2016, panjang jalan kabupaten sepanjang 784,233 km dan pada tahun 2017 ada penambahan jalan Kabupaten sebesar 103,854 km. Pada tahun 2017 sesuai dengan surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 621/22/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Purbalingga sepanjang 888,087 km.

Pada tahun 2015, jalan di Kabupaten Purbalingga yang dapat dikatakan kondisi baik atau mantap sepanjang 612.892,59 km atau 69,64persen. Pada tahun 2016 jalan di Kabupaten Purbalingga dalam kondisi baik atau mantap meningkat menjadi sepanjang 834,938,54 atau 94,87 persen. Sedangkan pada tahun 2017 ada penurunan capaian panjang jalan dalam kondisi baik atau mantap menjadi sebesar 746.577,80 atau 84,83 persen. Pada tahun 2018 jalan dalam kondisi baik atau mantap sepanjang 95,51 persen atau sepanjang 759,384 km. Dari panjang jalan kabupaten sepanjang 888,087 km yang ada di 18 Kecamatan, pada tahun 2019 sepanjang 781.619 km atau 83 persen. Pada tahun 2020 panjang jalan yang kondisinya baik sepanjang 697.146 km atau sebesar 78,50 persen, apabila dibandingkan realisasi panjang jalan dalam kondisi baik atau mantap pada tahun 2020 dengan tahun 2019 ada penurunan 4,50 persen hal ini disebabkan anggaran yang tersedia hanya sekitar 60 persen apabila dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2019. Untuk target pada tahun 2021 sebesar 82 persen sedangkan realisasinya sebesar 88,77 persen sehingga prosentase capaiannya sebesar 108,26 persen, apabila realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan



realisasi tahun 2020 ada peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 10,27 persen hal ini karena pada tahun 2021 penanganan jalan yang rusak dengan kegiatan difokuskan pada pemeliharaan jalan.

**Tabel 2.110**  
**Panjang Jalan di Kabupaten Purbalingga**

NO	KECAMATAN	PANJANG JALAN	JALAN KONDISI MANTAP	PERSENTASE
1.	Purbalingga	64,562	62,406	96.66
2.	Kalimanah	35,489	32,289	90.98
3.	Padamara	33,742	31,822	94.31
4.	Kutasari	44,448	39,648	89.20
5.	Bojongsari	44,999	42,259	93.91
6.	Kaligondang	68,428	60,083	87.80
7.	Bukateja	61,049	53,558	87.73
8.	Kejobong	61,766	54,752	88.64
9.	Kemangkong	59,927	51,927	86.65
10.	Mrebet	64,336	64,136	99.69
11.	Bobotsari	26,090	24,851	95.25
12.	Karanganyar	37,097	28,217	76.06
13.	Karangreja	44,015	33,211	75.45
14.	Karangjambu	35,511	27,311	76.91
15.	Kertanegara	20,793	19,623	94.37
16.	Karangmoncol	70,894	60,400	85.20
17.	Rembang	71,654	59,935	83.65
18.	Pengadegan	43,287	41,937	96.88
<b>Jumlah</b>		<b>888,087</b>	<b>788,365</b>	<b>88.77</b>

Sumber: DPUPR Kabupaten Purbalingga, 2021

**Tabel 2.111**  
**Jalan lebar 5,5 meter**

Panjang Jalan Kabupaten	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	km	%								
<b>888.087 km</b>	117,116 km	13,19%	180,426 km	20.32%	199,874 km	22,51%	199,874 km	22,51%	201.487 km	22,69%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purbalingga, 2021



**Tabel 2.112**  
**Jaringan Jalan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**  
**Lebar Lebih Dari 5,5 Meter**

NO	KECAMATAN	PANJANG JALAN	JALAN LEBAR LEBIH 5,5 M	PERSENTASE
1.	Purbalingga	64.562	30.328	46.98
2.	Kalimanah	35.489	16.597	46.77
3.	Padamara	33.742	10.732	31.81
4.	Kutasari	44.448	15.948	35.88
5.	Bojongsari	44.999	3.896	8.66
6.	Kaligondang	68.428	11.147	16.29
7.	Bukateja	61.049	18.293	29.96
8.	Kemangkon	61.766	14.465	23.42
9.	Kejobong	59.927	4.833	8.06
10.	Mrebet	64.336	13.793	21.44
11.	Bobotsari	26.090	10.259	39.32
12.	Karanganyar	37.097	-	0.00
13.	Karangreja	44.015	12.680	28.81
14.	Karangjambu	35.511	1.700	4.79
15.	Kertanegara	20.793	1.384	6.66
16.	Karangmoncol	70.894	18.997	26.80
17.	Rembang	71.654	13.954	19.47
18.	Pengadegan	43.287	2.481	5.73
<b>Jumlah</b>		<b>888.087</b>	<b>201.487</b>	<b>22,69</b>

Sumber: DPUPR Kabupaten Purbalingga, 2021

Jalan Kabupaten Purbalingga dengan lebar 5,5 meter pada tahun 2021 menjadi sebesar 22,69 persen ini ada peningkatan tetapi hanya sedikit hal ini disebabkan yang ada pelebaran hanya pada 3 ruas jalan yaitu ruas jalan Karangmocol – Rajawana dengan panjang 419 meter, ruas jalan Pakuncen – Tlagayasa dengan panjang 760 meter dan ruas jalan Lambur – Serayu Karanganyar dengan panjang 444 meter capain ini lebih 0,18 persen dari capaian pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 22,51 persen capainya sama apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 yaitu sebesar 22,51 persen. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 tidak ada pelebaran jalan yang menuju standar yaitu jalan yang lebarnya lebih atau sama dengan jalan dengan lebar 5,5 meter. Kecamatan Purbalingga yang paling banyak persentase lebar jalan lebih dari 5,5 meter yaitu sebanyak 3,41 persen pada tahun 2018 meningkat dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya sebesar 3,39 persen.



Kecamatan Bukateja menjadi kecamatan yang mempunyai lebar jalan lebih dari 5,5 meter urutan kedua yaitu sebesar 1,98 persen pada tahun 2018 sedangkan pada tahun 2017 hanya sebesar 1,27 persen menempati urutan ke tiga setelah Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Kemangkon. Ada 4 kecamatan yang lebar jalannya tidak ada lebih dari 5,5 meter yaitu Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Kertanegara dan Kecamatan Pengadegan. Jembatan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari jalan. Jembatan mempunyai fungsi meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang permukaannya lebih rendah. Pada tahun 2016 di Kabupaten Purbalingga mempunyai panjang jembatan dalam kondisi baik sebesar 96,03 persen, sedangkan pada tahun 2017 panjang jembatan dalam kondisi baik sebesar 95,58 persen, terjadi penurunan panjang jembatan dalam kondisi baik sebesar 0,45 persen. Pada tahun 2018 panjang jembatan dalam kondisi baik sebesar 96,23 persen. Pada tahun 2019 panjang jembatan dalam kondisi baik sebesar 95,85 persen menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2020 panjang jembatan dalam kondisi baik sebesar 90,20 persen. Pada tahun 2021 ada peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 yaitu sebesar 93,93 persen sehingga ada prosentase peningkatan sebesar 3,73 persen.

**Tabel 2.113**  
**Panjang Jembatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

NO	URAIAN	2017		2018		2019		2020		2021	
		METER	%								
1.	Panjang Jembatan Kabupaten	3.635,40	100	3.629,20	100	3.635,40	100	3.780,95	100	1.910,10	100
2.	Baik Sekali	3.474,60	95,58	3.492,40	96,23	3.484,60	95,85	3.119,45	90,20	3.429,15	93,93
3.	Rusak	112,80	3,10	112,80	3,11	112,80	3,10	453,80	7,12	377,80	6,07
4.	Rusak Berat	48,00	1,32	24,00	0,66	38,00	1,05	202,70	2,11	-	0
5.	Runtuh			-	-	-	-	5,00	0,53	-	0

Sumber: DPU - PR Kabupaten Purbalingga



Pada tahun 2021 panjang jembatan yang ada di Kabupaten Purbalingga sepanjang 3.635,40 meter. Pada tahun 2017 jembatan kondisi baik di Kabupaten Purbalingga sepanjang 3.474,60 meter atau sebesar 95,58 persen sedangkan pada tahun 2018 jembatan dalam kondisi baik sepanjang 3.492,40 meter atau sebesar 96,23 persen. Pada tahun 2019 panjang 3.484,60 meter atau setara dengan 95,85 persen. Pada tahun 2020 panjang jembatan kondisi baik sepanjang 3.119,45 meter atau setara dengan 90,20 persen. Sedangkan jembatan dalam kondisi rusak dengan panjang jembatan 453,80 meter atau 7,12 persen sedangkan jembatan dalam kondisi rusak berat 202,70 meter atau sebesar 2,11 persen, sedangkan jembatan yang runtuh dengan panjang 5 meter atau 0,53 persen.

**Tabel 2.114**  
**Kondisi Bangunan Irigasi Kewenangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	TINGKAT JARINGAN			KONDISI SALURAN			LUAS ONCORAN (HA)
			TEKNIS	SEMI TEKNIS	SEDER HANA	BAIK (%)	SEDANG (%)	RUSAK (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Purbalingga	763	703	60	0	62.50	20.0	17.5	572
2	Kalimanah	1,164	626	511	27	59.09	17.7	23.2	873
3	Padamara	2,489	1,086	789	614	49.81	22.8	27.6	1867
4	Kutasari	1,501	1,106	16	379	49.47	21.7	28.9	1126
5	Bojongsari	1,220	290	705	225	49.33	22.0	28.7	915
6	Mrebet	1,922	692	315	915	44.48	20.3	34.8	1441
7	Bobotsari	1,248	718	252	278	49.55	17.7	32.7	936
8	Karangreja	637	0	116	521	45.50	21.4	33.1	477
9	Karangjambu	986	0	0	986	42.67	21.7	35.3	739
10	Karanganyar	1,920	437	535	948	42.44	21.2	36.4	1440
11	Kertanegara	1,426	0	233	1,193	40.58	19.6	39.2	1070
12	Karangmoncol	1,089	0	541	548	47.21	18.2	34.6	817
13	Rembang	1,884	0	562	1,322	42.97	19.9	37.2	1413
14	Pengadegan	44	0	0	44	25.00	30.0	45.0	33
15	Kaligondang	811	430	264	117	53.75	20.6	25.6	608
16	Kemangkong	55	55	0	0	40.00	30.0	30.0	41
<b>Jumlah</b>		<b>19,159</b>	<b>6,143</b>	<b>4,899</b>	<b>8,117</b>	<b>46.52</b>	<b>21.6</b>	<b>31.9</b>	<b>14,368</b>
<b>Persentase Daerah Oncoran (Ha)</b>									<b>75</b>

Sumber: DPU-PR Kabupaten Purbalingga, 2021



Luas areal pertanian di Purbalingga dengan bangunan pengairan yang ada seluas 19.159 Ha. Itu terbagi menjadi 3 kriteria yaitu Teknis seluas 6.143 Ha, Semi Teknis seluas 4.899 Ha dan Sederhana seluas 8.117 Ha. Pada tahun 2021 bangunan pengairan dalam kondisi baik yaitu sebesar 46,52 persen. Kondisi bangunan irigasi akan sangat mempengaruhi luas oncoran, hal di disebabkan kalau kondisi saluran kondisi baik dan sedang secara otomatis air yang mengalir pada saluran yang baik akan sampai ke sawah dengan baik, kondisi saluran kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 46,52 persen, pada tahun 2020 kondisi saluran kondisi baik sebesar 45 persen, sedangkan pada tahun 2019 saluran kondisi baik sebesar 48,6 persen. Saluran kondisi sedang akan sedikit berpengaruh karena kondisi saluran yang kurang baik secara langsung akan ada sebagai kecil air yang keluar dari saluran dimaksud pada tahun 2021 sebesar 21,6 persen, untuk tahun 2020 sebesar 20,8 persen, pada tahun 2019 kondisinya lebih baik yaitu sebesar 21 persen. Kalau salurannya rusak secara otomatis akanberperangru pada aliran air pada saluran dimaksud dan banyak air yang keluaran dari saluran, kondisi saluran yang rusak pada tahun 2021 sebesar 31,9 persen, pada tahun 2020 saluran kondisi saluran yang rusak sebesar 34,8 persen, ini lebih besar bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 sebesar 30,4 persen

Manajemen irigasi adalah suatu bentuk pengelolaan eksploitasi dan distribusi air irigasi terutama di daerah yang kering atau yang memiliki periode musim kelangkaan air dengan tujuan meningkatkan produksi tanaman pertanian. Luas daerah irigasi di Kabupaten Purbalingga seluas 19.159 ha, yang terdiri dari 18 Kecamatan dan ada 2 Kecamatan yang tidak mempunyai saluran irigasi yaitu Kecamatan Kejobong memang tidak ada saluran irigasi, sedangkan Kecamatan Bukateja daerah irigasinya masuk ke Provinsi dan Pusat sehingga di Kabupaten tidak ada saluran irigasi. Kecamatan Padamara masuk kecamatan yang paling luas daerah luas oncorannya paling banyak yaitu seluas 1.867 Ha, Kecamatan Mrebet masuk daerah dengan luas oncoran ke dua paling luas yaitu dengan luas arean oncoran seluas 1.441 Ha, sedangkan pada urutan ketiga Kecamatan dengan luas oncoran paling luas yaitu Kecamatan Karanganyar yaitu seluas 1.440 Ha.



**Tabel 2.115**  
**Cakupan Air Irigasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	DEBIT AIR IRIGASI LITER/ DETIK	PERSENTASE
1	Kutasari	1,501	1,458	97.14
2	Bojongsari	1,220	1,182	96.89
3	Purbalingga	763	736	96.46
4	Padamara	2,486	2,374	95.49
5	Mrebet	1,922	1,820	94.69
6	Kalimanah	1,164	1,090	93.64
7	Bobotsari	1,248	1,152	92.31
8	Karanganyar	1,920	1,768	92.08
9	Kemangkon	55	50	90.91
10	Karangmoncol	1,089	989	90.82
11	Kertanegara	1,426	1,280	89.76
12	Kaligondang	811	722	89.03
13	Karangreja	637	561	88.07
14	Karangjambu	986	868	88.03
15	Rembang	1,884	1,658	88.00
16	Pengadegan	46	30	65.22
<b>Jumlah</b>		<b>19,158</b>	<b>17,738</b>	<b>90.53</b>

Sumber: DPUPR Kabupaten Purbalingga, 2021

Cakupan air irigasi di Kabupaten Purbalingga paling tinggi presentase debitnya yaitu pada daerah Kecamatan Kutasari mencapai 97,14 persen karena di daerah tersebut mempunyai banyak sumber air yang menjadi andalan untuk mengairi sawah. Sedangkan pada urutan ke dua adalah Kecamatan Bojongsari dengan presentase cakupan air irigasi sebesar 96,89 persen, untuk Kecamatan Purbalingga termasuk urutan ketiga kecamatan yang mempunyai debit terbanyak dengan presentase cakupan air irigasi mencapai 96,46 persen karena daerah tersebut juga mempunyai mata air untuk mengalir sawah dengan sistem irigasi baik irigasi teknis maupun irigasi semi teknis. Daerah yang tidak ada cakupan air irigasi yaitu Kecamatan Kejobong karena daerah tersebut tidak ada sumber mata air yang bisa digunakan untuk air pertanian, itulah sebabnya di Kecamatan Kejobong tidak ada sawah atau kebanyakan daerahnya



kering. Kecamatan Bukateja tidak ada Daerah Irigasi Kabupaten karena masuk ke Daerah Irigasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai upaya memelihara luas oncoran di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2021 telah dilakukan kegiatan yang mendukung antara lain :

- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
- b. Pemeliharaan Bendung Irigasi;
- c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
- d. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi.

Penyelenggaraan penataan ruang yaitu kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengawasan penataan ruang adalah salah satu upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya dalam mewujudkan Tertib tata ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Izin pemanfaatan ruang termasuk izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Adapun capaian kinerja atas penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Purbalingga tertuang pada tabel berikut ini :



**Tabel 2.116**  
**Permohon Rekomendasi/Informasi Kesesuaian Tata Ruang Tahun 2021**

NO	BULAN	PERMOHON	REKOMENDASI BKPRD		ITR WIUP (TAMBANG GALIAN C)	JUMLAH
			SESUAI	TIDAK SESUAI		
1	Januari	43	41	2		43
2	Februari	44	41	2	1	44
3	Maret	63	62	1		63
4	April	37	34	1	2	37
5	Mei	47	45	1	1	47
6	Juni	34	32	1	1	34
7	Juli	47	41	2	4	47
8	Agustus	18	18			18
9	September	21	19	2		21
10	Oktober	24	22	2		24
11	November	20	18	2		20
12	Desember	25	23	2		25
<b>Jumlah</b>		<b>423</b>	<b>396</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>423</b>

Sumber: DPU-PR Kabupaten Purbalingga

Permohonan rekomendasi atau kesesuaian selama tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ada sebanyak 423 pemohon. Pemohon rekomendasi atau kesesuaian yang paling banyak terjadi pada bulan Maret 2021 dengan jumlah sebanyak 63 dan yang sesuai hanya 62 pemohon atau sekitar 98,41 persen. Urutan kedua pemohon terbanyak pada bulan Mei 2021 jumlah pemohon yaitu sebanyak 47 pemohon tetapi yang sesuai ada 45 pemohon atau sebanyak 95,74 persen dan pada bulan Juli 2021 sama jumlah pemohonnya yaitu sebanyak 47 pemohon tetapi yang sesuai ada 41 pemohon atau sebanyak 87,23 persen, sedangkan pada urutan ketiga terbanyak pemohon rekomendasi atau informasi kesesuaian tata ruang pada bulan Februari 2021 sebanyak 44 pemohon dengan pemohon yang sesuai ada 41 atau sebanyak 93,18 persen.

Bangunan gedung adalah salah satu asset yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan dalam rangka untuk pelayanan kepada masyarakat luas. Kondisi gedung dan bangunan akan mempengaruhi terkait dengan kenyamanan para pihak yang menggunakan bangunan gedung tersebut. Oleh karena itu untuk mendapatkan kualitas bangunan gedung yang baik diperlukan alokasi anggaran



yang memadai.

Amanat dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No 36 Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no 28 tahun 2002, sebagai payung pengaturan nasional Bangunan Gedung yang memerlukan Pedoman Teknis sebagai peraturan pelaksanaan yang berlaku secara nasional.

Kondisi data bangunan di daerah yang belum tertata, memerlukan pedoman teknis pendataan bangunan gedung. Pedoman teknis pendataan bangunan gedung dimaksudkan menjadi acuan tertib administrasi dalam penyelenggaraan bangunan gedung di kabupaten/kota.

Pada tahun 2021 tidak ada pendataan gedung jadi yang ada yaitu pendataan bangunan gedung pada tahun 2019 melaksanakan pendataan pada 25 SKPD, dari 25 SKPD yang didata paling banyak pada SMPN 1 Kutasari dengan jumlah gedung yang terdata sebanyak 13 buah, pada urutan kedua terbanyak yaitu pada DPUPR dengan 11 buah dan terbanyak ketiga yaitu pada SMPN 3 Kutasari dan SMPN 3 Pengadegan dengan jumlah gedung masing-masing ada 10 buah. Sampai dengan tahun 2019 jumlah gedung yang terdata sebanyak 234 buah dari jumlah keseluruhan gedung pemerintahan yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 5.616 buah sehingga secara prosentase sebanyak 4,15 persen.

**Tabel 2.117**  
**Pendataan Bangunan Gedung**

No	Nama OPD	Jumlah Bangunan
1.	Pendataan Tahun 2017	137
2.	Kantor Inspektorat Daerah	5
3.	Kantor BKPPD	4
4.	Kantor Dindikbud	4
5.	Kantor Dinsos P2KB dan P3A	1
6.	Kantor Dinas Pertanian	1
7.	Kantor Dinas Kesehatan	5
8.	Kantor Dinas Tenaga Kerja	1
9.	Kantor Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil	1
10.	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	2
11.	Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
12.	Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika	2
13.	Kantor Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2
14.	Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman	1
15.	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1
16.	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga dan Parwisata	4
17.	Kantor DPMPTSP	1



No	Nama OPD	Jumlah Bangunan
18.	Kantor DPU-PR	11
19.	Kantor Dinas Perhubungan	5
20.	Kantor Pelaksana BPBD	6
21.	SMP Negeri 1 Kutasari	13
22.	SMP Negeri 3 Kutasari	10
23.	SMP Negeri 3 Pengadegan	10
24.	Kantor Kecamatan Purbalingga	2
25.	Kantor Kecamatan Karangjambu	2
<b>JUMLAH BANGUNAN</b>		<b>234</b>
<b>JUMLAH BANGUNAN KESELURUHAN</b>		<b>5.616</b>
<b>PROSENTASE</b>		<b>4,17</b>

Kebutuhan rumah layak huni tidak hanya dicukupi melalui perbaikan fisik rumah, namun juga perlu dilengkapi dengan ketersediaan akan akses sarana prasarana yang menunjang antara lain dengan adanya akses air minum dan sanitasi limbah rumah tangga, sehingga diharapkan dengan ketersediaan sarana prasarana tersebut akan meningkatkan kualitas rumah layak huni yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat.

Jumlah kepala keluarga yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebanyak 338.871 KK, yang terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah rumah tangga yang sudah mempunyai rumah sebanyak 247.852 KK atau 73,14% dan yang belum mempunyai rumah sebanyak 91.019 KK atau 26,86%. Dari data diatas, rasio kepemilikan rumah yang ada di Kabupaten purbalingga adalah 1,37%. Bisa diartikan bahwa satu rumah ditempati oleh lebih dari satu keluarga. Dari jumlah rumah tersebut, terbagi menjadi dua kategori yaitu rumah yang layak huni sebesar 240.371 rumah atau 96,96% dan rumah yang tidak layak huni sebanyak 7.535 rumah atau 3,04%.

Air bersih adalah air yang dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi dan melakukan aktifitas sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Ditinjau dari segi kualitas, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya kualitas fisik yang terdiri atas pH, kesadahan dan sebagainya serta kualitas biologi dimana air terbebas dari mikroorganisme yang menyebabkan terjadinya penyakit. Agar kelangsungan hidup manusia dapat berjalan lancar, air bersih harus tersedia dalam jumlah yang memadai sesuai dengan aktifitas manusia pada tempat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu Pada tahun 2021 jumlah rumah yang ada di Purbalingga sebanyak 247.852 rumah yang ditempati oleh 338.871 kepala keluarga. Pada



tahun 2021, jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih sebanyak 230.519 KK atau 93,01%. Pelayanan air bersih dilakukan oleh Perpipaan sebanyak 99.505 rumah dan non perpipaan sebanyak 131.014 rumah. Total sambungan rumah pada tahun 2021 sebanyak 230.519 Sambungan Rumah (SR).

**Tabel 2.118**  
**Data Sambungan Perpipaan**

No	Kecamatan	∑ Rumah	∑ rumah akses SAM		∑ Rumah Belum Akses	% Akses
			Perpipaan	Non perpipaan		
1	Bobotsari	12.320	4.618	6.882	820	93,34
2	Bojongsari	14.803	5.588	7.789	1.426	90,37
3	Bukateja	20.636	2.277	15.265	3.094	85,01
4	Kaligondang	16.400	6.318	8.585	1.497	90,87
5	Kalimanah	14.810	7.434	7.376	-	100,00
6	Karanganyar	9.542	3.496	5.740	306	96,79
7	Karangjambu	6.106	3.347	2.711	48	99,21
8	Karangmoncol	13.417	5.083	7.226	1.108	91,74
9	Karangreja	10.115	3.570	6.458	87	99,14
10	Kejobong	12.899	3.672	7.573	1.654	87,18
11	Kemangkon	18.268	7.134	10.937	197	98,92
12	Kertanegara	8.469	2.167	5.969	333	96,07
13	Kutasari	15.321	5.985	8.849	487	96,82
14	Mrebet	18.600	6.329	10.195	2.076	88,84
15	Padamara	10.846	4.685	6.161	-	100,00
16	Pengadegan	10.966	7.567	2.827	572	94,78
17	Purbalingga	14.563	10.817	3.746	-	100,00
18	Rembang	19.771	9.418	6.725	3.628	81,65
<b>Jumlah</b>		<b>247.852</b>	<b>99.505</b>	<b>131.014</b>	<b>17.333</b>	<b>93,01</b>

Sumber : Dinrumkim Tahun 2021



Pada tahun 2021 dari pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota, melalui sub kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan berupa aktivitas dan fasilitasi kegiatan sebagaimana tabel berikut :

- a. Aktivitas pembangunan SPAM dengan alokasi kegiatan pada 2 wilayah kecamatan yang meliputi 2 desa. Pembangunan di 2 lokasi tersebut hanya fasilitas SPAM berupa jaringan dan bak penampungan. Sedangkan kelengkapan sambungan SR akan dikelola oleh desa setempat.

**Tabel 2.119**  
**Desa Penerima Kegiatan Pembangunan SPAM**

NO	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH SR
1.	Pembangunan Air Bersih	Karangreja, Karangreja	0
2.	Pembangunan Bak Penampungan	Baleraksa, Karangmoncol	0
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>

- b. Fasilitasi pembangunan SPAM Pamsimas dan Hibah Khusus Pamsimas (HKP) dengan alokasi kegiatan pada 5 wilayah kecamatan yang meliputi 6 desa dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 51 SR.

**Tabel 2.120**  
**Desa Penerima Kegiatan Pembangunan SPAM Pamsimas dan HKP**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH SR
1.	Kutasari	Karangaren	20
2.	Bojongsari	Bumisari	0
3.	Pengadegan	Pasunggingan	6
		Tetel	0
4.	Kaligondang	Sidareja	0
5.	Kejobong	Pandasari	25
<b>Jumlah</b>			<b>51</b>



- c. Hibah Air Minum Pedesaan berlokasi di 11 kecamatan yang meliputi 14 desa dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 660 SR.

**Tabel 2.121**  
**Jumlah Sambungan Rumah (SR) Pada Desa Penerima Kegiatan HAMP**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH SR
1.	Pengadegan	Panunggalan	52
2.	Karanganyar	Buara	48
		Ponjen	48
3.	Bobotsari	Palumbungan	49
4.	Mrebet	Kredenan	50
		Serayukaranganyar	48
		Serayularangan	48
5.	Padamara	Karanggambas	48
6.	Kejobong	Sokanegara	49
7.	Karangmoncol	Tamansari	48
8.	Kutasari	Candiwulan	27
9.	Bukateja	Karancengis	49
10.	Karangreja	Siwarak	48
11.	Kertanegara	Adiarsa	48
<b>Jumlah</b>			<b>660</b>

- d. Peningkatan SPAM berlokasi di 10 kecamatan yang meliputi 15 desa dengan jumlah Sambungan Rumah sebanyak 782 SR.

**Tabel 2.122**  
**Jumlah Sambungan Rumah (SR)**  
**Pada Desa Penerima Kegiatan Peningkatan SPAM**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH SR
1.	Bukateja	Kembangan	39
2.	Pengadegan	Tegalpingen	50
3.	Kaligondang	Selakambang	30



NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH SR
		Arenan	39
		Pagerandong	50
		Sempor Lor	60
		Brecek	110
4.	Kutasari	Karangcegak	39
5.	Bobotsari	Talagening	39
6.	Karangreja	Tlahab Kidul	39
7.	Karanganyar	Kaliori	39
8.	Kertanegara	Karangasem	50
9.	Karangmoncol	Rajawana	50
		Sirau	58
10.	Rembang	Losari	90
<b>Jumlah</b>			<b>782</b>

- e. Perluasan SPAM berlokasi di 10 kecamatan yang meliputi 18 desa dengan jumlah Sambungan Rumah sebanyak 1.274 SR.

**Tabel 2.123**  
**Jumlah Sambungan Rumah (SR)**  
**Pada Desa Penerima Kegiatan Perluasan SPAM**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH SR
1.	Rembang	Bantarbarang	100
		Makam	80
		Sumampir	50
		Bodakarangjati	39
2.	Kutasari	Candinata	120
		Candiwulan	80
		Karangjengkol	80
3.	Padamara	Kalittinggar	55
4.	Mrebet	Kradenan	40
		Sangkanayu	120



NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH SR
		Selaganggeng	65
5.	Kemangkon	Palumutan	100
6.	Bobotsari	Banjarsari	39
7.	Karangmoncol	Karangsari	50
		Pepedan	90
		Tamansari	50
		Tanalum	86
8.	Bukateja	Kedungjati	30
<b>Jumlah</b>			<b>1.274</b>

Strategi dalam pencapaian sasaran antara lain dengan menggali potensi sumber mata air baru yang dapat dimanfaatkan serta memetakan wilayah yang rawan kekurangan air bersih, serta melakukan sinergi kegiatan yang bersumber dari Dana Desa. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar ketersediaan sanitasi limbah rumah tangga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT) adalah guna mendukung penyediaan akses sanitasi dasar masyarakat Purbalingga.

- f. Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik Setempat (Dana DAK) berlokasi di 7 kecamatan yang meliputi 11 desa dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 580 Rumah.

**Tabel 2.124**  
**Jumlah Rumah Pada Desa Penerima Kegiatan Pembangunan**  
**Sistem Air Limbah Domestik Setempat (Dana DAK)**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH RUMAH
1.	Rembang	Bantarbarang	53
2.	Kaligondang	Brecek	50
		Cilapar	53
		Sempor Lor	50



NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH RUMAH
3.	Kutasari	Candinata	50
4.	Padamara	Kalitinggar	50
5.	Mrebet	Kradenan	50
		Selaganggeng	50
		Sangkanayu	50
6.	Kemangkong	Palumutan	62
7.	Karangmoncol	Grantung	62
<b>Jumlah</b>			<b>580</b>



**Tabel 2.125**  
**Sambungan Perpipaan**

NO	KECAMATAN	Σ RUMAH	Σ RUMAH AKSES SAM		Σ RUMAH BELUM AKSES	PROSENTASE AKSES 2021 (%)
			PERPIPAAN	NON PERPIPAAN		
1	BOBOTSARI	12.320	4.618	6.882	820	93,34
2	BOJONGSARI	14.803	5.588	7.789	1.426	90,37
3	BUKATEJA	20.636	2.277	15.265	3.094	85,01
4	KALIGONDANG	16.400	6.318	8.585	1.497	90,87
5	KALIMANAH	14.810	7.434	7.376	-	100,00
6	KARANGANYAR	9.542	3.496	5.740	306	96,79
7	KARANGJAMBU	6.106	3.347	2.711	48	99,21
8	KARANGMONCOL	13.417	5.083	7.226	1.108	91,74
9	KARANGREJA	10.115	3.570	6.458	87	99,14
10	KEJOBONG	12.899	3.672	7.573	1.654	87,18
11	KEMANGKON	18.268	7.134	10.937	197	98,92
12	KERTANEGARA	8.469	2.167	5.969	333	96,07
13	KUTASARI	15.321	5.985	8.849	487	96,82
14	MREBET	18.600	6.329	10.195	2.076	88,84
15	PADAMARA	10.846	4.685	6.161	-	100,00
16	PENGADEGAN	10.966	7.567	2.827	572	94,78
17	PURBALINGGA	14.563	10.817	3.746	-	100,00
18	REMBANG	19.771	9.418	6.725	3.628	81,65
<b>JUMLAH</b>		<b>247.852</b>	<b>99.505</b>	<b>131.014</b>	<b>17.333</b>	<b>93,01</b>

Sumber : Dinrumkim Tahun 2021



Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 telah menyediakan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang melibatkan beberapa beberapa pihak. Penyediaan tanah tersebut direncanakan untuk persiapan pembangunan Rest Area Bandara Jenderal Besar Sudirman di Desa Tidu Kecamatan Bukateja. Dari lokasi yang direncanakan pada tahun 2021, dapat terealisasi. Pada tahun 2021, tanah pemda yang dimanfaatkan sebesar 1.814.559 m<sup>2</sup> atau 87,6%. Total tanah pemda seluas 2.071.414 m<sup>2</sup>. Capaian tersebut dari tahun 2020 ada peningkatan.

**Tabel 2.126**  
**Tanah Pemda Yang Dimanfaatkan**

NO	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	LUAS TANAH (m <sup>2</sup> )
1	Purbalingga Kulon	Purbalingga	70.800
2	Bojong	Purbalingga	208.725
3	Wirasana	Purbalingga	126.984
4	Kembaran Kulon	Purbalingga	150.755
5	Karangsentul	Padamara	33.075
6	Kandangampang	Purbalingga	61.079
7	Kalikabong	Kalimanah	139.173
8	Karangmanyar	Kalimanah	10.597
9	Penambongan	Purbalingga	156.800
10	Mewek	Kalimanah	29.750
11	Kedungmenjangan	Purbalingga	170.846
12	Bancar	Purbalingga	145.668
13	Toyareka	Purbalingga	71.210
<b>TOTAL</b>			<b>1.814.559</b>

Pada tahun 2021 tanah pemda yang sudah bersertifikat bertambah 17 bidang. Tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengacu data tahun 2016 sebanyak 1.216 bidang. Sampai dengan tahun 2021, capaian tanah Pemda yang berhasil disertifikat mencapai 859 bidang atau 70,64%. Pada tahun 2021 realisasinya sebesar 70,64%.



**Tabel 2.127**  
**Tanah Bersertifikat Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH BIDANG</b>
1	Mangunegara	Mrebet	1
2	Kejobong	Kejoong	1
3	Kertanegara	Kertanegara	1
4	Bedagas	Kertanegara	5
5	Wirasana	Purbalingga	5
6	Bancar	Purbalingga	1
7	Kajongan	Bojongsari	1
8	Karangsantul	Padamara	1
9	Purbalingga Wetan	Purbalingga	1
<b>TOTAL</b>			<b>17</b>

Kendala yang dihadapi antara lain :

a. Struktur tanah

Struktur tanah yang tidak stabil mengakibatkan tanah mudah bergerak, di Kabupaten Purbalingga terdapat di Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja dan Karangjambu. Tanah yang mudah bergerak terutama pada musim penghujan berakibat pada badan jalan yang mudah retak dan longsor.

b. Volume dan beban kendaraan

Faktor penyebab kerusakan yang paling sering dianggap menjadi masalah adalah arus lalu lintas yaitu volume dan beban kendaraan yang setiap hari melintas pada ruas jalan tersebut.

c. Peralatan pendukung pemeliharaan jalan

Kekurangan peralatan untuk pemeliharaan jalan terutama pada pemeliharaan rutin jalan. Peralatan yang kurang, antara lain mesin gilas mobile yang dapat digunakan pada semua medan jalan, terutama pada jalan yang memiliki kemiringan (curam).

d. Drainase jalan

Sebagian besar jalan di Kabupaten Purbalingga dalam kondisi baik, akan tetapi jalan tersebut belum didukung oleh drainase yang baik sehingga pada musim penghujan banyak jalan yang tergenang air bahkan mengalami banjir. Keluhan masyarakat terhadap proyek pelebaran jalan yang mengganggu aktifitas masyarakat untuk sementara waktu. Adanya keberatan dari masyarakat yang terdampak secara material dari proyek pelebaran jalan dan ada juga warga



- masyarakat yang mencari untung dari kompensasi proyek tersebut.
- e. Fluktuasi ketersediaan jumlah air  
Secara umum kebutuhan air akan meningkat drastis pada musim kemarau padahal jumlah air yang tersedia pada musim kemarau bisa dibilang sedikit. Pada musim penghujan terjadi hal yang sebaliknya, jumlah air sangat melimpah hingga harus dibuang melalui saluran drainase. Tantangannya adalah bagaimana cara menyimpan jumlah air yang berlebihan saat musim penghujan untuk di distribusikan pada musim kemarau.
  - f. Peran Petani Pemakai Air  
Faktor yang paling utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan irigasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Perilaku petani (selaku SDM) dalam memandang air yang masih bersifat sosial (bebas), Perilaku petani dalam mengelola sarana dan prasarana irigasi masih minim (rasa memiliki sangatlah kurang), SDM petani kita masih rendah, sebagian besar petani di Kabupaten Purbalingga kurang bekerjasama dalam pengelolaan irigasi. Salah satu contoh kurang peduli warga adalah dalam menjaga kebersihan saluran irigasi, kurang pedulinya warga terhadap keberadaan sampah yang berada pada saluran irigasi dapat menyebabkan jaringan irigasi tidak bekerja dengan lancar bahkan bisa mendatangkan bencana banjir.
  - g. Pemeliharaan Berkala  
Pemeliharaan berkala irigasi kurang mendapat perhatian yang serius tercermin dari anggaran yang tersedia masih sedikit dibandingkan dengan luas areal persawahan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

#### Proses Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

- a. Volume kendaraan setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang signifikan cara untuk mengatasinya antara lain yaitu dengan membangun jembatan baru dan peningkatan jalan sehingga ruas yang ada akan berkurang bebannya karena ada pengalihan arus lalu lintas, seperti jalur dari Purbalingga ke Kecamatan Karangmoncol yang sebelumnya melewati Kecamatan Rembang saat ini dialihkan melalui jembatan Tegalpingen Kecamatan Pengadegan ke Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol sehingga beralih ke jalur yang lebih pendek atau dekat;
- b. Untuk peralatan pendukung pemeliharaan rutin jalan pada tahun 2018 telah mendapat tambahan peralatan, antara lain baby roller, elektrik jack hammer, sepeda motor, mesin bor, mesin gerinda dan mesin las listrik;
- c. Dilaksanakan pembangunan dan pemeliharaan drainase untuk memperlancar air terutama air hujan agar jalan yang ada lebih tahan lama dan tidak mudah rusak;



- d. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk segera melaporkan kerusakan jalan dan jembatan melalui media sosial seperti facebook, twitter dan website MATUR BUPATI agar secepatnya dapat ditangani;
- e. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelebaran jalan, memasang rambu-rambu dan tulisan peringatan bahwa ada perbaikan jalan;
- f. Melakukan sosialisasi pada masyarakat terdampak secara material dari proyek pelebaran jalan agar berperan serta dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, khususnya dalam hal ganti rugi agar tidak mencari keuntungan pribadi;
- g. Melakukan survei lapangan dan mengusulkan anggaran sesuai dengan mekanisme penganggaran sehingga jembatan dapat segera diperbaiki dan tidak terjadi kerusakan yang lebih parah;
- h. Fluktuasi ketersediaan jumlah air ini menjadi persoalan tersendiri karena air pada musim penghujan banyak sedangkan pada musim kemarau sedikit, guna mengatasinya dibutuhkan anggaran yang besar untuk membangun embung yang banyak sehingga bisa menampung air pada musim penghujan dan mengalihkan pada musim kemarau, langkah yang dilakukan dengan bekerja sama dengan dinas pertanian untuk menggalakkan lagi Program Reboisasi agar air hujan dapat ditampung oleh akar-akar dari pohon-pohon besar sehingga pada musim kemarau tidak terjadi kekeringan;
- i. Faktor yang paling utama untuk pemeliharaan irigasi adalah Para Petani Pemakai Air (P3A). Langkah yang dilakukan yaitu mengaktifkan kembali peran P3A yaitu dengan cara swadaya memelihara saluran yang langsung ke sawah mereka secara mandiri. Mereka juga harus ikut bertanggungjawab, jika ada kerusan ringan maka harus segera diperbaiki secara mandiri. Sedangkan jika terjadi kerusan berat diharapkan segera melapor kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga supaya bisa segera ditangani sehingga kerusakan yang terjadi tidak meluas;
- j. Dalam pemeliharaan irigasi hal hal yang telah dilakukan untuk mempertahankan dan memperpanjang umur bangunan irigasi;
- k. Perbaikan akibat bencana alam secara permanen;
- l. Penyusunan RDTR Perkotaan Purbalingga;
- m. Peran dan fungsi Kabupaten/Kota;
- n. Rencana pembangunan Kabupaten/Kota;
- o. Memperhatikan kondisi alamiah dan tipologi Kabupaten/Kota bersangkutan, seperti struktur dan morfologi tanah, topografi, dan sebagainya;
- p. Pembangunan dilakukan dengan pendekatan pembangunan



- berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- q. Dalam penyusunan RPIJM harus memperhatikan Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan Kota;
  - r. *Logical framework* (kerangka logis) penilaian kelayakan pengembangan;
  - s. Keterpaduan penataan bangunan dan lingkungan sektor lain dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan, sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik;
  - t. Memperhatikan peraturan dan perundangan serta petunjuk/pedoman yang tersedia;
  - u. Tingkat kelayakan pelayanan, efektivitas dan efisiensi penataan bangunan dan lingkungan pada kota bersangkutan;
  - v. Sebagai suatu PS yang tidak saja penting bagi peningkatan lingkungan masyarakat tetapi juga sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan;
  - w. Sumber pendanaan dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta;
  - x. Kelembagaan yang mengelola penataan bangunan dan lingkungan,
  - y. Penataan bangunan dan lingkungan memperhatikan kelayakan terutama dalam hal pemulihan biaya investasi,
  - z. Jika ada indikasi keterlibatan swasta dalam penataan bangunan dan lingkungan, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut;
  - aa. *Safeguard* sosial dan lingkungan;
  - bb. Perlunya keterpaduan dalam perencanaan penanganan kumuh (satu data satu peta);
  - cc. Perlu penanganan kawasan potensi kumuh pada tahun berikutnya dengan dukungan anggaran yang memadai;
  - dd. Penanganan kumuh/potensi kumuh ke depan dapat dilakukan secara terfokus dan tuntas/komprehensif sehingga mampu merubah wajah permukiman;
  - ee. Perlu adanya dana yang berkelanjutan dari Pusat karena penanganan kumuh membutuhkan waktu yang tidak singkat;
  - ff. Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya pencegahan kumuh dan penanganan permukiman kumuh;
  - gg. Perhitungan dan hal penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung analisis disertakan dalam bentuk lampiran;
  - hh. Memanfaatkan dan mengembangkan jaringan dari sumber mata air yang telah dibangun;
  - ii. Menggali sumber mata air baru yang dapat dimanfaatkan;
  - jj. Memetakan wilayah yang rawan yang kekeringan;
  - kk. Penguatan kelembagaan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat.



Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektifitas wilayah adalah :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- b. Program Penataan Bangunan Gedung;
- c. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
- d. Program Penyelenggaraan Jalan;
- e. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- f. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- g. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- h. Program Perekonomian Dan Pembangunan.

**TUJUAN MISI 6 (2) :  
MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KUALITAS PELAYANAN  
DESA**

Hasil evaluasi pada sasaran strategis Meningkatnya kualitas desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 mendapatkan nilai sebesar 0,6919. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.128  
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Desa**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,6550	0,6542	0,6676	0,6785	0,6770	0,6919	102,20

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur dan mengetahui status kemajuan dan kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai 0,6919 menempati peringkat ke 145 nasional dari 434 kabupaten. Di Jawa Tengah menempati peringkat 18 dari 29 kabupaten. Meskipun mengalami peningkatan di banding tahun 2020 di peringkat 19, namun masih lebih kecil dibandingkan rata-rata IDM provinsi Jawa Tengah sebesar 0,6945 sedangkan di eks Karsidenan Banyumas masih tetap



menempati peringkat 3.

**Table 2.129**  
**Peringkat Status IDM Per Kabupaten Jawa Tengah Tahun 2021**

<b>RANK</b>	<b>NAMA KABUPATEN</b>	<b>NILAI IDM KAB 2021</b>	<b>STATUS IDM KABUPATEN 2021</b>
1	KUDUS	0.7416	MAJU
2	BOYOLALI	0.7233	MAJU
3	SUKOHARJO	0.7230	MAJU
4	KENDAL	0.7190	MAJU
5	PEMALANG	0.7167	MAJU
6	WONOGIRI	0.7120	MAJU
7	PATI	0.7105	MAJU
8	SRAGEN	0.7035	BERKEMBANG
9	BANYUMAS	0.7033	BERKEMBANG
10	CILACAP	0.7017	BERKEMBANG
11	WONOSOBO	0.6980	BERKEMBANG
12	TEMANGGUNG	0.6962	BERKEMBANG
13	MAGELANG	0.6952	BERKEMBANG
14	KARANGANYAR	0.6937	BERKEMBANG
15	PURWOREJO	0.6934	BERKEMBANG
16	JEPARA	0.6927	BERKEMBANG
17	KLATEN	0.6925	BERKEMBANG
18	PURBALINGGA	0.6919	BERKEMBANG
19	DEMAK	0.6906	BERKEMBANG
20	REMBANG	0.6895	BERKEMBANG
21	SEMARANG	0.6891	BERKEMBANG
22	KEBUMEN	0.6861	BERKEMBANG
23	GROBOGAN	0.6770	BERKEMBANG
24	BATANG	0.6766	BERKEMBANG
25	BREBES	0.6708	BERKEMBANG
26	BANJARNEGARA	0.6707	BERKEMBANG
27	PEKALONGAN	0.6668	BERKEMBANG
28	TEGAL	0.6624	BERKEMBANG
29	BLORA	0.6539	BERKEMBANG
<b>RATA-RATA STATUS IDM KABUPATEN 2021</b>		<b>0,6945</b>	<b>BERKEMBANG</b>



**Tabel 2.130**  
**Nilai IDM Eks Karsidenan Banyumas**

RANK	NAMA KABUPATEN	NILAI IDM KAB 2020	STATUS IDM KABUPATEN 2020
1	BANYUMAS	0.7033	BERKEMBANG
2	CILACAP	0.7017	BERKEMBANG
3	PURBALINGGA	0.6919	BERKEMBANG
4	BANJARNEGARA	0.6707	BERKEMBANG

Selanjutnya Klasifikasi Status Desa dari hasil perhitungan IDM dimaksud terdiri dari :

- a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ( $>$ ) dari 0,8155;
- b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,8155 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,7072;
- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,7072 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,5989;
- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,5989 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,4907;
- e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ( $<$ ) dari 0,4907.

Pemerintah akan mengukur dan mengetahui status kemajuan dan kemandirian Desa menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun berikutnya setelah Dana Desa direalisasikan atau digunakan. Dana Desa diberikan mulai tahun 2015, dan baru bisa diukur capaiannya pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016. Berdasarkan hasil pengukuran IDM Kabupaten Purbalingga, diperoleh Status Desa pada tahun 2016 dan 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.131**  
**Data Indeks Desa Membangun Kabupaten Purbalingga**

Tahun	Jumlah Desa	IKS	IKE	IKL	IDM
2016	42	0,6817	0,5992	0,6375	0,6394
2017	224	0,7318	0,5825	0,6496	0,6550



Tahun	Jumlah Desa	IKS	IKE	IKL	IDM
2018	224	0,7391	0,5940	0,6386	0,6542
2019	224	0,7680	0,5913	0,7640	0,6676
2020	224	0,7831	0,6090	0,6434	0,6785
2021	224	0.7905	0.6250	0.6601	0.6919

Sumber: Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2021

**Tabel 2.132**  
**Status Perkembangan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021**

STATUS	TAHUN						Target 2022
	CAPAIAN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0
Tertinggal	8	28	30	14	19	2	1
Berkembang	16	158	155	167	162	153	134
Maju	18	38	38	42	51	65	83
Mandiri	0	0	1	1	2	4	6
Jumlah	42	224	224	224	224	224	224

Sumber: Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2021

Tabel tersebut menggambarkan sebagai berikut :

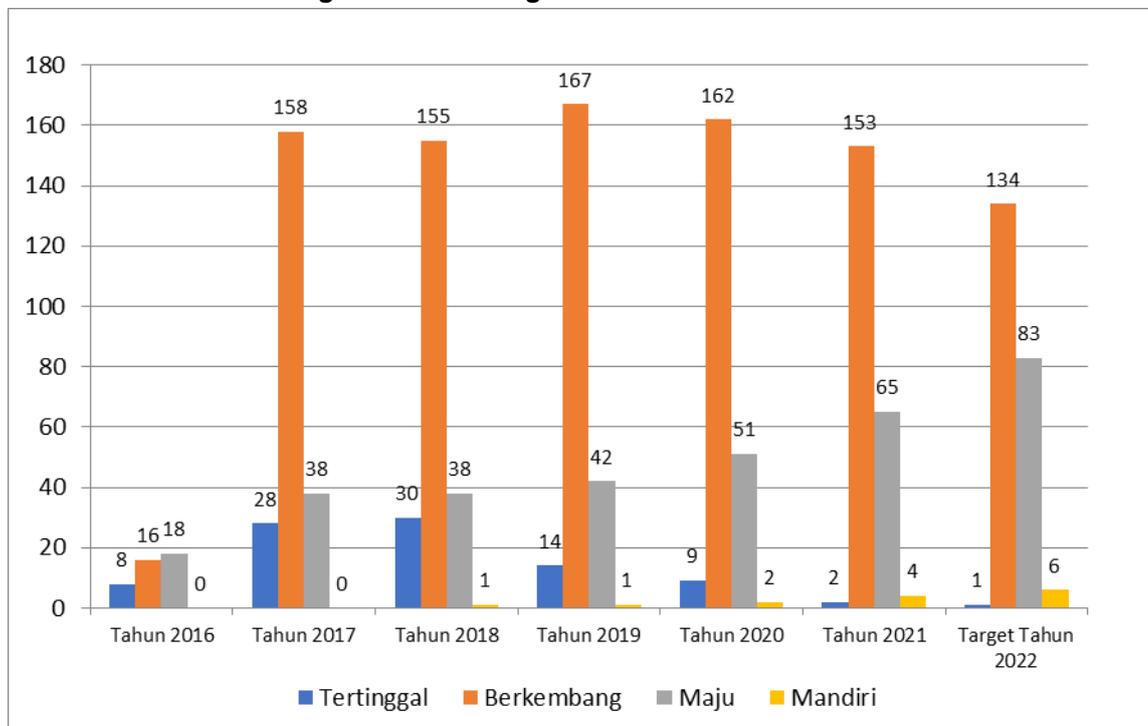
- Pada tahun 2020 terdapat 9 Desa berstatus Desa Tertinggal, di tahun 2021 berkurang menjadi 2 Desa. Artinya terdapat peningkatan status di 7 Desa yang semula berstatus TERTINGGAL menjadi BERKEMBANG;
- Pada Tahun 2020 terdapat 162 Desa berstatus berkembang, pada tahun 2021 menjadi 153. Dari sisi jumlah mengalami penurunan atau pengurangan sebanyak 9 Desa. Artinya, ada 9 Desa yang naik statusnya dari BERKEMBANG berubah atau naik status menjadi Desa MAJU;
- Sedangkan untuk Desa Maju, tahun 2020 terdapat 51 Desa, pada tahun 2021 naik menjadi 65. Artinya jumlah desa maju mengalami kenaikan sebanyak 14 Desa yang sebelumnya berstatus TERTINGGAL ATAU BERKEMBANG berubah statusnya menjadi Desa MAJU;
- Sementara untuk Desa Mandiri, pada tahun 2020 terdapat 2 Desa dan pada tahun 2021 menjadi 4 Desa, artinya terdapat peningkatan jumlah Desa Mandiri sebanyak 2 Desa;

Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan status desa di Kabupaten



Purbalingga terlihat peningkatan kualitas desa yang cukup signifikan, yang dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

**Gambar 2.26**  
**Grafik Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2016 – 2021**



Untuk proyeksi ke depan yaitu pada tahun 2022, ditargetkan sebagai berikut :

- Mengentaskan 1 desa tertinggal yang pada Tahun 2021 masih ada 2 desa, menjadi 1 desa pada tahun 2022;
- Meningkatkan 19 Desa dengan status berkembang ke status maju, sehingga dari 153 desa berkembang di tahun 2021, turun menjadi 134 desa pada tahun 2022;
- Menambah jumlah desa maju sebanyak 18 desa, sehingga dari 65 desa maju di Tahun 2021 menjadi 83 pada tahun 2022;
- Menambah jumlah desa mandiri, yaitu dari 4 desa di Tahun 2021 menjadi 6 pada tahun 2022.

Selanjutnya, berdasarkan data tahun 2021, di wilayah Kabupaten Purbalingga masih terdapat 2 (dua) Desa tertinggal atau 0,89% dari jumlah desa di Kabupaten Purbalingga yang terdapat di wilayah Kecamatan Bobotsari dan kecamatan Karangmoncol sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 2.133**  
**Desa Tertinggal Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	DESA
1.	BOBOTSARI	BANJARSARI
2.	KARANGMONCOL	SIRAU

Sumber: Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga

Komponen IDM Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 yang dinilai masih rendah adalah Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang berada pada skor "0,6250", sehingga perlu adanya langkah-langkah yang strategis untuk mendorong naiknya nilai komponen IKE melalui upaya peningkatan pemenuhan indikator Dimensi Ekonomi yang meliputi :

- a. Meningkatkan keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk;
- b. Menyediakan pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator :
  - Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen);
  - Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket);
  - Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
- c. Menyediakan akses distribusi/ logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik;
- d. Memudahkan akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator :
  - Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
  - Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
  - Akses penduduk ke kredit.
- e. Mengembangkan Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi);
- f. Meningkatkan keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator :
  - Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum);
  - Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu);
  - Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah).

Selanjutnya dalam rangka mendukung capaian Indeks Membangun Desa, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendorong capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut :



**SASARAN :**  
**MENINGKATNYA KUALITAS PEMERINTAHAN DESA DAN KELEMBAGAAN**  
**MASYARAKAT DESA**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan dijelaskan bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan dan klasifikasi kemajuan desa/kelurahan terdapat 3 klasifikasi kemajuan desa/kelurahan yang meliputi :

- a. Desa Swasembada;
- b. Desa Swakarya;
- c. Desa Swadaya.

**Tabel 2.134**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa**  
**dan Kelembagaan Masyarakat Desa**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Desa Swasembada	Desa	8	25	9	25	277,78



Perkembangan dan klasifikasi desa diarahkan pada semakin meningkatnya jumlah desa swasembada atau naiknya peringkat dari status desa swakarya menjadi swasembada, dari desa swadaya naik peringkat menjadi desa swakarya atau semakin berkurangnya desa swadaya. Desa swasembada pada akhir tahun 2021 berdasarkan laporan profil desa/kelurahan tahun 2021 dengan alat bantu aplikasi profil desa/kelurahan tahun 2021 sebanyak 25 desa/kelurahan dengan klasifikasi kemajuan desa yaitu :

- a. Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon;
- b. Desa Kalialang Kecamatan Kemangkon;
- c. Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon;
- d. Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon;
- e. Desa Tidu Kecamatan Bukateja;
- f. Desa Sokanegara Kecamatan Bukateja;
- g. Desa Krenceng Kecamatan Kejobong;
- h. Desa Kadarpan Kecamatan Kejobong;
- i. Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan;
- j. Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang;
- k. Desa Grecol Kecamatan Kalimanah;
- l. Kelurahan Mewek Kecamatan Kalimanah;
- m. Kelurahan Karangmanyar Kecamatan kalimanah;
- n. Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah;
- o. Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah;
- p. Desa Kedungwuluh Kecamatan Kalimanah;
- q. Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari;
- r. Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet;
- s. Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet;
- t. Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar;
- u. Desa Kasih Kecamatan Kertanegara;
- v. Desa Karangasem Kecamatan Kertanegara;
- w. Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol;
- x. Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol;
- y. Desa Panusupan Kecamatan Rembang

Desa Swakarya sejumlah 182 Desa/Kelurahan dan Desa Swadaya sejumlah 32 Desa/Kelurahan.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka meningkatkan kualitas desa yaitu sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah desa yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga tahun



Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 119.036.714.000,- sedangkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 246.883.240.000 yang dialokasikan kepada 224 desa di Kabupaten Purbalingga.

- b. Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga maupun dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui alokasi bantuan Gubernur Jawa Tengah (Bantuan Gubernur)

Pada tahun 2021, fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten yang difasilitasi oleh Dinpermasdes Rp 6.784.000,- yang dilokasikan untuk 85 titik kegiatan. Adapun dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di 224 desa @ Rp.5.000.000,-, total sejumlah Rp.1.120.000.000,- dan Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah Desa di 146 titik/112 Desa total sebesar Rp. 24.145.000.000,-;

- c. Untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan tertib, telah disusun Peraturan Bupati yang sebagai tindak lanjut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu diantaranya :

- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 22 Tahun 2021 tentang Standar Harga satuan untuk Pemerintah Desa di wilayah kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati purbalingga Nomor 45 Tahun 2015 tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purbalingga;
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

- d. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada Tahun 2021 dilaksanakan melalui kegiatan Gebrak Gotong Royong yang dimaksudkan menumbuhkan dan menggerakkan semangat gotong royong masyarakat dalam membangun desa serta menggali swadaya masyarakat. Kegiatan gebrak gotong royong di tahun 2021 dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu sebagai berikut :

- Gebrak gotong royong di Desa Tanalum;
- Pembukaan jalan baru menghubungkan Tanalum ke Desa



- Gunungwuled panjang 750 x 5 m yang diikuti oleh masyarakat Desa Tanalum dan lembaga keswadayaan masyarakat Di wilayah Kec. Rembang;
- Gebrak gotong royong di Desa Kaligondang;
  - Pemasangan pipa air bersih sepanjang 650 m di Dusun III Desa Kaligondang kec. Kaligondang dengan pemanfaat 54 kepala keluarga;
  - Gebrak gotong royong di Desa Bandingan dengan kegiatan :
    - Pemasangan pipa air bersih di lingkungan Dusun II Desa Bandingan dengan penerima manfaat air bersih sebanyak 76 KK
    - Melaksanakan uji fungsi air bersih Pamsimas oleh Bupati Purbalingga;
    - Peresmian Gedung BUMDes Rengga Praja Mandiri;
    - Penanaman Pohon Pelindung di lingkungan Lapangan Desa Bandingan (*Public Space*).
- e. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDEs dan Kerjasama Antar Desa Pada Tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, antara lain :
- Pendataan dan klasifikasi BUMDes yang ada di desa, dan untuk Tahun 2021 didapatkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 2.135**  
**Pendataan dan Klasifikasi BUMDes**

NO.	KLASIFIKASI BUMDES	JUMLAH DESA	KETERANGAN
1.	Dasar	101	
2.	Tumbuh	74	
3.	Berkembang	25	
4.	Maju	4	
5.	Belum ada BUMDes	20	
	TOTAL	224	



- Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Permendes PDTT Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  - Pembinaan dan pendampingan pendaftaran badan hukum BUMDes, dimana untuk tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga terdapat 23 BUMDes yang sudah berbadan hukum.
- f. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa pada tahun 2021, antara lain :
- Revitalisasi data pasar desa, dan hasilnya diperoleh jumlah pasar desa sebanyak 48 pasar;
  - Menyelenggarakan Pelatihan Kelembagaan Pasar Desa bekerjasama dengan Dinpermasdesdukcakil Provinsi Jawa Tengah, guna meningkatkan kapasitas para pengelola pasar desa, yang diikuti oleh 40 orang pengelola pasar desa dari 20 pasar desa.
- g. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya fasilitasi terhadap Pemerintah Desa dalam pemanfaatan TTG yaitu pengembangan Posyantekdes yang sudah terbentuk di tahun 2019 diantaranya Posyantekdes Kinayuh Laras Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang, Posyantek Putra Jaya Tumanggal Desa Pengadegan, Posyantek Garda Utama Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar dan Posyantek Maju Jaya Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari. Pada tahun 2021 Dinpermasdes melakukan pembinaan pemanfaatan TTG di Desa Slinga Kecamatan Kaligondang yaitu Pemanfaatan Karet Ban bekas sebagai Konstruksi penahan tanah dari longsor (Baring Tejo) berupa ban yang disusun terasering. Selanjutnya pemanfaatan TTG Baring Tejo di Desa Slinga Kecamatan Kaligondang diikuti dalam Lomba TTG Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan berupa fasilitasi dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinpermasdes sebagian besar harus dilaksanakan secara langsung ke desa-desa, sehingga dengan belum berakhirnya pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan menjadi sangat terbatas dan kurang optimal;
- b. Adanya refocusing anggaran belum diikuti dengan penyesuaian target kegiatan sehingga pencapaian target kegiatan kurang optimal;



- c. Masih rendahnya tingkat kemandirian desa (ketergantungan terhadap Pemerintah Kabupaten masih tinggi) sehingga hasil fasilitasi dan pembinaan belum sepenuhnya bisa diimplementasikan.

Solusi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan teknologi komunikasi secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di era pandemi;
- b. Memanfaatkan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai target yang ditetapkan secara maksimal;
- c. Melaksanakan pendampingan ke desa-desa secara intensif untuk meningkatkan kemampuan desa dalam menggali dan mengembangkan potensinya menuju kemandirian desa.

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Desa adalah :

- a. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- b. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- f. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- g. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;
- h. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

**MISI 7 :**  
**"MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH/INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN"**

**TUJUAN MISI 7 :**  
**TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KERAGAMAN HAYATI**

Untuk mencapai tujuan ini didukung dengan capaian kinerja :

**SASARAN :**  
**TERKENDALINYA PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Indeks atau indikator merupakan sarana yang digunakan untuk mereduksi banyaknya data dan informasi sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana namun esensinya tetap dapat dipertahankan. Indeks Kualitas



Lingkungan Hidup adalah suatu angka indeks yang menggambarkan suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia dijadikan indeks pengukuran kinerja pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Secara konseptual, nilai IKLH bersifat komparatif, artinya nilai IKLH satu daerah dengan daerah lain akan bervariasi namun tetap relatif terhadap daerah yang lainnya. IKLH daerah juga memberikan kontribusi terhadap IKLH provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya terhadap total penduduk dan luas wilayah Provinsi. Dalam perspektif IKLH, nilai indeks ini bukan semata-mata peringkat, juga merupakan indikasi upaya untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup baik di kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Nilai indeks IKLH dipengaruhi oleh 3 komponen utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hal ini menunjukkan bahwa setiap komponen utama kehidupan mempunyai peran penting dalam pengukuran IKLH. Adapun parameter dalam indeks-indeks pendukung pengukuran IKLH tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.136**  
**Indikator dan Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

NO	INDIKATOR	PARAMETER	BOBOT	KETERANGAN
1.	Kualitas Udara	SO <sub>2</sub>	0,405	
		NO <sub>2</sub>		
2.	Kualitas Air Sungai	TSS	0,376	Dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA)
		DO		
		BOD		
		COD		
		Total Fosfat		
		Fecal-Coli		
		Total Coliform		
3	Tutupan Lahan	Luas Hutan	0,219	

Berdasarkan tabel diatas, IKLH dipengaruhi oleh 0,405 dari Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan parameter yang diukur yaitu : SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>, 0,376 dari Indeks Kualitas Air (IKA) dengan parameter yang diukur yaitu : TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal – Coli, dan Total Coliform, serta 0,219 dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan parameter yang diukur yaitu : Luas Hutan. Hasil evaluasi pada sasaran strategis Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keragaman Hayati mendapatkan nilai 106,95% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran



indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.137**  
**Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target Akhir
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,70	66,78	67,91	67,00	71,66	106,95	67,22

Berdasarkan tabel diatas, nilai IKLH mengalami kenaikan sebesar 4,66 poin atau naik 4,66% dari tahun sebelumnya. Tingkat capaian ini telah memenuhi target kinerja tahun 2021 sebesar 67,00 atau sebesar 106,95%. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 memperoleh nilai 71,66 poin. Nilai IKLH tersebut dipengaruhi oleh nilai IKA sebesar 54,40 poin, nilai IKU sebesar 86,44 poin, dan nilai IKTL sebesar 73,94 poin. Berdasarkan tabel diatas, secara umum nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Serta, jika dibandingkan dengan nilai IKLH Nasional dan IKLH Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, nilai IKLH Kabupaten Purbalingga telah melampaui nilai IKLH Nasional yang memiliki nilai IKLH sebesar 66,55 poin dan IKLH Provinsi Jawa Tengah yang memiliki nilai IKLH sebesar 60,97 poin.

Penurunan nilai IKU dipengaruhi oleh penempatan titik sampel pengukuran untuk kawasan perkantoran. Salah satu kawasan yang menjadi lokasi penempatan titik sampel adalah kawasan perkantoran yang seharusnya tidak terpengaruh aktivitas transportasi, karena penempatan terlalu dekat dengan jalan (transportasi) sehingga aktivitas transportasi mempengaruhi titik sampel kawasan perkantoran. Hasil ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya nilai IKLH sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh hasil pengukuran 3 (tiga) indikator pada komponen air, udara, dan tutupan lahan. Berikut grafik peningkatan nilai IKLH Kabupaten Purbalingga :

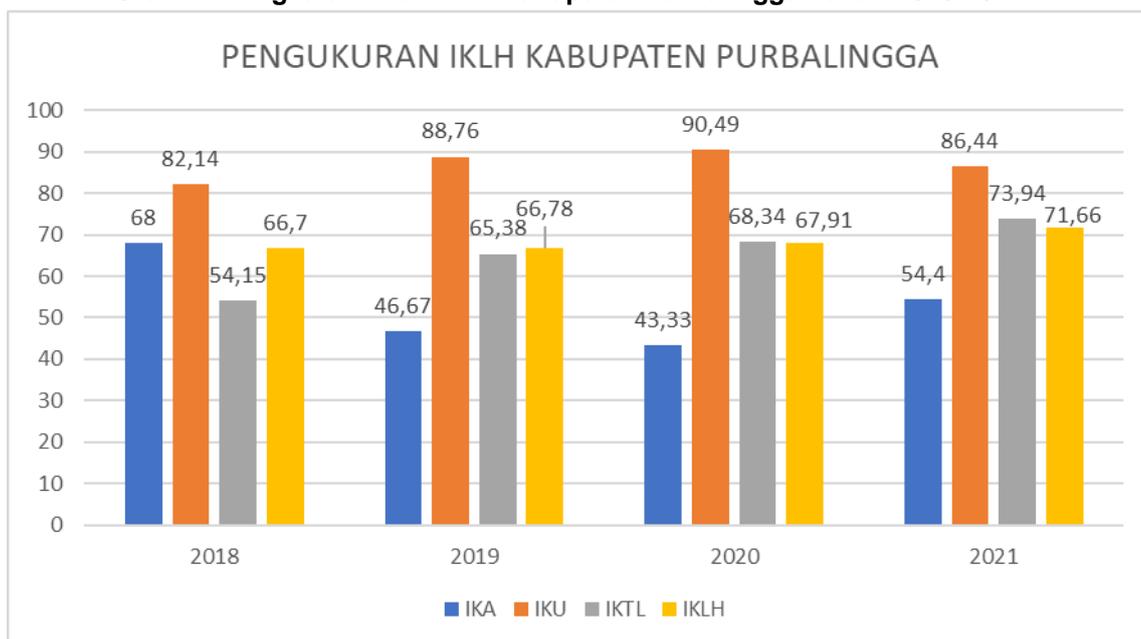
**Tabel 2.138**  
**Rekapitulasi Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

NO.	PENGUKURAN IKLH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN	IKA	IKU	IKTL	IKLH
1.	2018	68	82,14	54,15	66,70
2.	2019	46,67	88,76	65,38	66,78
3.	2020	43,33	90,49	68,34	67,91
4.	2021	54,40	86,44	73,94	71,66

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga



**Gambar 2.27**  
**Grafik Peningkatan Nilai IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2021**



#### 1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air diukur dalam Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, Total Fosfat, , Fecal Coli dan Total Coliform. Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PiJ (indeks pencemaran) adalah sebagai berikut :

- IKA = 100, untuk  $P_{ij} \leq 1$ ;
- IKA = 80, untuk  $P_{ij} > 1$  dan  $P_{ij} \leq 4,67$ ;
- IKA = 60, untuk  $P_{ij} > 4,67$  dan  $P_{ij} \leq 6,32$ ;
- IKA = 40, untuk  $P_{ij} > 6,32$  dan  $P_{ij} \leq 6,88$ ;
- IKA = 20, untuk  $P_{ij} > 6,88$ .

Pengukuran IKA Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 masih dilakukan pada 3 (tiga) sungai utama di Kabupaten Purbalingga yaitu sungai Gringsing, Sungai Klawing dan Sungai Gintung dengan 3 (tiga) titik sampel pada masing-masing sungai, yakni bagian hulu, tengah, dan hilir. Hasil pengukuran tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.140**  
**Hasil Pengukuran IKA Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

NO.	NAMA SUNGAI	MUSIM	TITIK LOKASI	INDEKS PENCEMARAN (PIJ)	KOEFISIEN	STATUS MUTU AIR
1.	Sungai Gintung	Kemarau	Hulu	0,83	70	Memenuhi
			Tengah	1,70	50	Cemar Ringan
			Hilir	1,79	50	Cemar



NO.	NAMA SUNGAI	MUSIM	TITIK LOKASI	INDEKS PENCEMARAN (PIJ)	KOEFISIEN	STATUS MUTU AIR
						Ringan
		PENGHujan	Hulu	2,58	50	Cemar Ringan
	Tengah		3,20	50	Cemar Ringan	
	Hilir		3,13	50	Cemar Ringan	
2.	Sungai Gringsing	Kemarau	Hulu	1,09	50	Cemar Ringan
			Tengah	2,00	50	Cemar Ringan
			Hilir	2,26	50	Cemar Ringan
		PENGHujan	Hulu	3,63	50	Cemar Ringan
			Tengah	0,82	70	Memenuhi
			Hilir	0,91	70	Memenuhi
3.	Sungai Klawing	Kemarau	Hulu	0,73	70	Memenuhi
			Tengah	1,69	50	Cemar Ringan
			Hilir	1,76	50	Cemar Ringan
		PENGHujan	Hulu	3,14	50	Cemar Ringan
			Tengah	2,31	50	Cemar Ringan
			Hilir	1,08	50	Cemar Ringan
<b>NILAI INDEKS KUALITAS AIR</b>					<b>54,4</b>	

Indeks Kualitas Air di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 43,33. Hasil IKA didapatkan dari 9 titik sampling dengan hasil 6 titik sampling memiliki status mutu air cemar ringan yang berada dibagian hulu dan tengah dari ketiga sungai tersebut. Sementara, status mutu air cemar sedang berada pada titik sampling di bagian hilir dari ketiga sungai. Pada tahun 2021 Indeks Kualitas Air di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan menjadi 54,4 dengan rincian 4 (empat) titik sampling mempunyai status mutu air “memenuhi”, dan 14 titik sampling mempunyai status mutu air “Cemar Ringan”. Nilai IKA dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel, antara lain :

- a. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan pada beberapa sumber air;
- b. Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
- c. Penggunaan air;



d. Tingkat erosi dan sedimentasi.

Untuk meningkatkan kualitas air di Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui pembinaan kepada pelaku usaha dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pembinaan kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai, penyediaan IPAL Komunal untuk membantu pengolahan limbah domestik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Purbalingga dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan pada 8 (delapan) lokasi yang mewakili wilayah transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran dengan metode passive sampler. Passive sampler dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program European Union. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan. Penelitian dilakukan di 4 (empat) lokasi tersebut menggambarkan kondisi udara di sektor tersebut sehingga nantinya hasil akhir menunjukkan kondisi realitas wilayah di Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2021, lokasi yang ditetapkan untuk titik pantau adalah Komplek Perkantoran Dinas Pertanian, Komplek Kawasan Industri Desa Grecol, Kawasan Transportasi Perempatan Karangsentul dan Kawasan Perumahan Wirasana Indah. Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan. Berikut hasil pengukuran passive sampler kualitas udara di Kabupaten Purbalingga.

**Tabel 2.141**  
**Hasil Pasive Sampler Tahap I dan II Tahun 2021**

PARAMETER		TRANSPORTASI	INDUSTRI	PEMUKIMAN	PERKANTORAN	RATA - RATA
NO <sub>2</sub>	Tahap I	19,67	29,67	13,73	26,45	20,08
	Tahap II	20,34	19,60	12,68	18,63	
SO <sub>2</sub>	Tahap I	3,5	3,05	4,34	4,71	3,72
	Tahap II	3,13	3,24	3,81	3,98	



Selain 4 (empat) jenis wilayah yang mewakili kualitas udara di Purbalingga, pada umumnya Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung berdasarkan 5 (lima) jenis pencemar udara yaitu oksidasi/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Timbulan sampah juga berpengaruh terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) dan kualitas udara, karena sampah organik menghasilkan gas berupa CO<sub>2</sub> dan CH<sub>4</sub>. Namun, untuk saat ini, parameter yang digunakan untuk menentukan Indeks Kualitas Udara (IKU) hanya dua parameter saja yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Parameter NO<sub>2</sub> mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO<sub>2</sub> mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Berikut hasil perhitungan IKU Kabupaten Purbalingga.

**Tabel 2.142**  
**Indeks Kualitas Udara Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

Parameter	Rerata	Rerata	Rerata	EU	IEU	IEU	IEU	IEU	
	2019	2020	2021	(Baku Mutu)	2018	2019	2020	2021	
NO <sub>2</sub>	15,66	13,94	20,08	40	0,42538	0,3916	0,3486	0,5021	
SO <sub>2</sub>	4,26	3,88	3,72	20	0,41738	0,2130	0,1938	0,1860	
	Rata-rata Indeks Udara								
	(Indeks Annual model EU-Ieu)					0,42138	0,3023	0,2712	0,3440
	<b>Indeks Kualitas Udara</b>					82,15	88,76	<b>90,49</b>	<b>86,44</b>

Berdasarkan hasil analisis Indeks Kualitas Udara ( IKU ) Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara di Kabupaten Purbalingga masih dalam di kondisi sangat baik dan mengalami kenaikan nilai IKU dari 88,76 menjadi 90,49 pada tahun 2020. Sementara itu kondisi Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 86,44. Meskipun masih sesuai dengan baku mutu, namun dengan adanya peningkatan aktivitas penduduk, kegiatan industri dan transportasi, maka upaya pengendalian pencemaran udara tetap perlu dilakukan. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara dan pengawasan kepatuhan industri terhadap emisi gas buang, insentif dan disinsentif, pemantauan air limbah dan udara emisi secara berkala, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.



### 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai IKTL meliputi Tutupan Hutan (TH) yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman, belukar dan belukar rawa dalam kawasan hutan (SBKH). Belukar dan belukar rawa dalam kawasan berfungsi lindung pada sempadan sungai, danau dan pantai serta lereng >25% (SBL). Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berupa hutan kota atau taman kota, Kebun Raya (KR) dan Taman Keanekaragaman Hayati. Komponen RTH digunakan dalam penentuan Indeks Kondisi Tutupan Tanah yang merupakan bagian dari IKTL. Komponen dalam penentuan IKTL adalah Indeks Tutupan Hutan (ITH), Indeks Performance Hutan (IPH), Indeks Kondisi Tutupan Tanah (IKT), Indeks Konservasi Badan Air (IKBA), dan Indeks Kondisi Habitat (IKH).

Nilai IKTL umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang dan alih fungsi lahan yang di jelaskan dalam Indeks Tutupan Lahan, Indeks Performance Hutan, Indeks Kondisi Tutupan Lahan, Indeks Koservasi Badan Air, dan Indeks Kondisi Habitat. Luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Purbalingga sebesar 585,05 ha juga ikut mempengaruhi dalam perhitungan IKTL. Berikut hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

**Gambar 2.28**  
**Grafik Rekapitulasi Pengukuran IKTL Kabupaten Purbalingga 2017 - 2021**



Kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), antara lain :

- a. Kegiatan pemantauan kualitas air dan udara ambien;
- b. Kegiatan pembangunan Biogas dan IPAL Domestik;
- c. Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- d. Kegiatan pengawasan lingkungan di lokasi industri;
- e. Kegiatan pemeliharaan RTH (Taman dan hutan kota);
- f. Kegiatan penanganan sampah dalam bentuk pengangkutan sampah; dan pembangunan TPA sampah dengan sistem *sanitary landfill*;
- g. Kegiatan pengurangan sampah melalui bank sampah dan TPS Sampah 3R.

Namun demikian, untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Purbalingga, diperlukan koordinasi lintas sektoral antara lain dalam manajemen pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), manajemen pengelolaan sampah, sanitasi dan kesehatan lingkungan, manajemen di sektor pertanian, serta pengawasan dan pemantauan aktivitas industri.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga tahun 2020 dapat disimpulkan :

- a. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebesar 67,91, menunjukkan klasifikasi Cukup Baik yakni mengalami peningkatan sebesar 1,77% dari tahun 2019. Pada tahun 2019 tingkat capaian IKLH sebesar 66,73 dan pada tahun 2020 naik menjadi sebesar 67,91. Sementara itu pada tahun 2021 IKLH Kabupaten Purbalingga meningkat menjadi 71,66;
- b. Target kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebesar 66,5 (RPJMD 2016-2021). Nilai IKLH kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 67,91 telah memenuhi target kinerja tahun 2020. Pada tahun 2021 IKLH Kabupaten Purbalingga sudah bisa mencapai target yang ditentukan mencapai 71,66;
- c. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yaitu sebesar 43,33, kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai IKA tahun 2019 sebesar 46,67. Turunnya IKA dipengaruhi oleh kondisi status air sungai di Kabupaten Purbalingga. Faktor lain adalah adanya metode penghitungan yang berubah pada penghitungan IKA Tahun 2020. Total terdapat 3 (tiga) titik sungai yang memiliki status sungai cemar sedang yaitu Sungai Gringsing Hilir, Sungai Klawing Hilir dan Sungai Gintung Hilir. Pengambilan sampel sungai Gringsing,



- Klawing dan Sungai Gintung dilakukan pada saat musim kemarau dan pada saat musim penghujan. Pada tahun 2021 Indeks Kualitas Air di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan menjadi 54,4 dengan rincian 4 (empat) titik sampling mempunyai status mutu air “memenuhi”, dan 14 titik sampling mempunyai status mutu air “Cemar Ringan”;
- d. Parameter yang melebihi baku mati pada sungai dengan status cemar sedang adalah parameter zat Padat tersuspensi, COD, BOD, DO, Fosfat, Total Coliform, Total Fecal Coli. Berdasarkan parameter tersebut ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kondisi status sungai yaitu kegiatan pemukiman dan pertanian. Potensi sumber pencemar lainnya berasal dari kegiatan perindustrian dan fasilitas kesehatan;
  - e. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yaitu sebesar 90,49, kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2019 sebesar 88,6. Sementara itu kondisi Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 86,44;
  - f. Nilai Indeks Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yaitu sebesar 68,34, kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai IKTL tahun 2019 sebesar 65,38 atau naik sebesar 4,53%. Sementara itu untuk IKTL tahun 2021 meningkat menjadi 73,94.

Kendala dan upaya atau solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pengendalian dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :

Kendala yang dihadapi :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha yang masih membuang sampah rumah tangga dan limbah industri ke sungai, menjaga kualitas udara serta usaha dalam pemanfaatan lahan;
- b. Kurangnya regulasi adat/*local wisdom* dalam pengelolaan sungai, misal Perdes tentang pengelolaan sungai;
- c. Tingginya biaya operasional untuk pemeliharaan dan pengendalian pencemaran udara bagi pelaku usaha;
- d. Kurangnya kerjasama masyarakat, pihak swasta dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sungai, beban pengelolaan lebih banyak diserahkan kepada pemerintah daerah;
- e. Meningkatnya aktivitas pembangunan di Kabupaten Purbalingga yang kurang memperhatikan konservasi lahan;

Upaya dan solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah, dalam rangka pengendalian dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola sungai sebagai sumber kehidupan, mengurangi beban pencemaran udara dan



- pentingnya pemanfaatan lahan serta mengurangi beban pencemaran udara dalam bentuk penggunaan BBM ramah lingkungan dan uji emisi kendaraan secara rutin;
- b. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan pengelolaan limbah dan memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran;
  - c. Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Desa yang mengatur pemanfaatan sungai dan konservasi lahan;
  - d. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan sungai antara masyarakat, pihak swasta dengan Pemerintah Daerah;
  - e. Perlu adanya regulasi upaya konservasi lahan sehingga terwujud proses pembangunan berwawasan lingkungan/berkelanjutan;
  - f. Perlu adanya sistem pengawasan dan penegakan aturan/hukum terkait pemanfaatan lahan;
  - g. Dalam perencanaan RTRW Kabupaten Purbalingga untuk lebih memperhatikan perbaikan kualitas tutupan lahan dan tetap menjaga agar tutupan lahan dan hutan tetap terjaga fungsinya;
  - h. Peningkatan partisipasi;
  - i. Melaksanakan penyuluhan dan pendampingan terhadap petani agar menggunakan pupuk dan pestisida sesuai dengan dosis anjuran serta dapat menggunakan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia;
  - j. Melaksanakan penyuluhan mengenai sanitasi lingkungan untuk mengurangi BAB dan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Akses jamban sehat terus ditingkatkan utamanya di wilayah bantaran sungai;
  - k. Meningkatkan program Pembangunan IPAL Domestik untuk mengurangi beban pencemaran limbah domestik ke sungai;
  - l. Meningkatkan data base sumber pencemar, untuk melakukan kegiatan identifikasi dan pemetaan sumber pencemar dari kegiatan industri dan pertanian serta pemantauan pembuangan limbah industri;

Program dan kegiatan yang mendukung tujuan tersebut adalah :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;



- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- i. Program Pengelolaan Persampahan.



### C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap hasil kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.144**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Hasil Kinerja**

TUJUAN SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase	% Capaian Kinerja	Keterangan
1	3	4	5	6	7
<b>MISI 1 MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, INOVATIF, BERSIH, AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT</b>					
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ( <i>Good Governance and Clean Governance</i> )					
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel	410.351.364.000,00	154.516.174.116,00	37,65	Belum Release dari BPK	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1.106.848.429.454,00	1.051.485.290.756,00	94,97	Belum Release	EFISIEN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	38.733.620.689,00	35.040.047.666,00	90,46	103,87	EFISIEN



TUJUAN SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase	% Capaian Kinerja	Keterangan
1	3	4	5	6	7
Meningkatnya efisiensi kelembagaan dengan penggunaan TI dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	5.266.061.840,00	4.231.531.279,00	80,35	79,64	TIDAK EFISIEN
<b>MISI 2 MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEHADIRAT ALLAH SWT/TUHAN YME, SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA RASA AMAN DAN TENTERAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA</b>					
Terwujudnya ketentraman, ketertiban, rasa aman dan paham wawasan kebangsaan dalam masyarakat					
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan Keamanan dalam masyarakat.	6.403.308.698,00	5.674.457.672,00	88,62	87,65	TIDAK EFISIEN
Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	3.494.996.500,00	2.849.185.543,00	81,52	66,7	TIDAK EFISIEN



TUJUAN SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase	% Capaian Kinerja	Keterangan
1	3	4	5	6	7
Meningkatnya Paham dan wawasan Kebangsaan	1.301.048.000,00	1.285.104.000,00	98,77	-	EFISIEN
<b>MISI 3 MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK</b>					
Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin					
Meningkatnya status pangan masyarakat	520.000.000,00	512.454.182,00	98,54	92,19	TIDAK EFISIEN
Meningkatnya Ketersediaan dan kepemilikan Rumah Layak Huni	33.672.521.600,00	31.278.945.522,00	92,89	100,47	EFISIEN
<b>MISI 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT</b>					
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing					
Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	204.407.394.589,00	189.135.860.840,00	92,53	95,26	EFISIEN
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	104.732.534.430,00	88.964.676.789,00	84,94	98,88	EFISIEN



TUJUAN SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase	% Capaian Kinerja	Keterangan
1	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	19.582.863.009,00	17.354.091.440,00	88,62	103,77	EFISIEN
<b>MISI 5 MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA DALAM INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFaktur, PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA</b>					
Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat					
Menurunnya pengangguran terbuka	1.611.183.210,00	1.358.905.483,00	84,34	48,75	TIDAK EFISIEN
Meningkatnya Realisasi Investasi	684.879.900,00	541.992.302,00	79,14	218,23	EFISIEN
Meningkatnya Pendapatan dari Sektor Pariwisata	19.104.679.000,00	18.181.575.921,00	95,17	21,89	TIDAK EFISIEN
Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro	46.070.551.500,00	36.270.954.301,00	78,73	95,10	EFISIEN
Meningkatnya Daya Saing Industri dan Pelayanan Perdagangan	25.906.288.100,00	23.187.719.486,00	89,51	79,50	TIDAK EFISIEN



TUJUAN SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase	% Capaian Kinerja	Keterangan
1	3	4	5	6	7
<b>MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>					
Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan					
Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur	103.574.782.241,00	77.317.151.245,00	74,65	105,52	EFISIEN
Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa					
Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa	26.307.682.364,00	24.355.685.412,00	92,58	102,20	EFISIEN
<b>MISI 7 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH/INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN</b>					
Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keragaman Hayati					
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	10.365.724.158,00	9.410.706.910,00	90,79	107,75	EFISIEN

Dari tabel analisis efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah melaksanakan efisiensi sumber daya anggaran. Efisiensi tersebut dapat terlihat dari rata-rata persentase penggunaan anggaran sebesar 85,06 telah mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan rata-rata persentase sebesar "94,55" atau kategori "Sangat Berhasil".



#### D. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Rincian program dan kegiatan dan penggunaan biaya/anggaran guna mendukung pencapaian target kinerja serta dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.145**  
**Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja dan Realisasi Anggaran**

TUJUAN SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
<b>MISI 1 MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, INOVATIF, BERSIH, AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT</b>				
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ( <i>Good Governance and Clean Governance</i> )				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel</li> </ul>	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	407.264.725.000,00	152.398.780.726,00	37,42
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.744.707.000,00	1.811.438.998,00	66,00
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	341.932.000,00	305.954.392,00	89,48
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan</li> </ul>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.103.119.428.954,00	1.048.209.967.314,00	95,02
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.235.240.000,00	1.066.756.021,00	86,36
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	826.394.000,00	773.855.710,00	93,64



TUJUAN SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	937.406.000,00	920.004.235,00	98,14
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	239.934.000,00	167.441.476,00	69,79
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	490.026.500,00	347.266.000,00	70,87
• Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pendaftaran Penduduk	2.145.983.000,00	2.048.817.098,00	95,47
	Program Pencatatan Sipil	712.017.000,00	681.832.400,00	95,76
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	495.340.889,00	484.913.521,00	97,89
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	72.000.000,00	71.498.500,00	99,30
	Program Pengelolaan Arsip	1.166.742.400,00	1.018.216.881,00	87,27
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	18.299.567.400,00	16.125.689.210,00	88,12
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	15.841.970.000,00	14.609.080.056,00	92,22
• Meningkatnya efisiensi kelembagaan dengan penggunaan TI dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.244.462.840,00	1.197.212.636,00	96,20
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.381.260.000,00	1.360.288.344,00	98,48
	Program Kepegawaian Daerah	2.640.339.000,00	1.674.030.299,00	63,40



TUJUAN SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
<b>MISI 2 MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEHADIRAT ALLAH SWT/TUHAN YME, SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA RASA AMAN DAN TENTERAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA</b>				
Terwujudnya ketentraman, ketertiban, rasa aman dan paham wawasan kebangsaan dalam masyarakat				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan Keamanan dalam masyarakat.</li> </ul>	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.684.447.698,00	4.270.054.282,00	91,15
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	78.674.000,00	25.694.000,00	32,66
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	553.511.000,00	506.720.890,00	91,55
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	104.995.000,00	101.912.500,00	97,06
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	981.681.000,00	770.076.000,00	78,44
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana</li> </ul>	Program Penanggulangan Bencana	2.232.257.500,00	1.644.930.116,00	73,69
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.262.739.000,00	1.204.255.427,00	95,37



<b>TUJUAN SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Paham dan wawasan Kebangsaan</li> </ul>	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.301.048.000,00	1.285.104.000,00	98,77
<b>MISI 3 MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK</b>				
Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya status pangan masyarakat</li> </ul>	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	520.000.000,00	512.454.182,00	98,55
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Ketersediaan dan kepemilikan Rumah Layak Huni</li> </ul>	Program Pengembangan Perumahan	41.719.000,00	30.777.800,00	73,77
	Program Kawasan Permukiman	21.422.059.000,00	19.235.178.798,00	89,79
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1.821.510.000,00	1.804.361.000,00	99,06
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.619.473.600,00	9.463.113.043,00	98,37
	Program Penatagunaan Tanah	247.760.000,00	233.060.699,00	94,07
<b>MISI 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT</b>				
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat</li> </ul>	Program Pengembangan Kebudayaan	158.487.638.619,00	148.504.423.467,00	93,70



TUJUAN SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Pembinaan Sejarah	1.076.816.400,00	853.742.207,00	79,28
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	281.743.850,00	277.922.400,00	98,64
	Program Pengelolaan Permuseuman	734.234.000,00	301.743.300,00	41,10
	Program Pengelolaan Pendidikan	43.826.961.720,00	39.198.029.466,00	89,44
• Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	103.396.139.430	88.076.139.489	85,18
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	422.957.000,00	270.845.100,00	64,04
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	199.291.000,00	82.441.500,00	41,37
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	714.147.000,00	535.250.700,00	74,95
• Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	2.864.847.000,00	2.553.960.268,00	89,15
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.210.362.600,00	6.459.354.069,00	89,58
	Program Rehabilitasi Sosial	3.329.542.900,00	2.758.951.149,00	82,86
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	5.498.975.949,00	5.143.656.750,00	93,54
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	127.042.560,00	122.062.100,00	96,08



TUJUAN SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Perlindungan Khusus Anak	552.092.000,00	316.107.104,00	57,26
<b>MISI 5 MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA DALAM INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDISIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA</b>				
Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat				
• Menurunnya pengangguran terbuka	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.455.354.500,00	1.207.218.808,00	82,95
	Program Penempatan Tenaga Kerja	56.261.850,00	53.088.470,00	94,36
	Program Hubungan Industrial	99.566.860,00	98.598.205,00	99,03
• Meningkatnya Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	49.350.000,00	29.443.000,00	59,66
	Program Promosi Penanaman Modal	45.270.500,00	45.000.000,00	99,40
	Program Pelayanan Penanaman Modal	177.997.400,00	146.821.941,00	82,49
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	409.762.000,00	318.415.526,00	77,71
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2.500.000,00	2.311.835,00	92,47



TUJUAN SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Pendapatan dari Sektor Pariwisata</li> </ul>	Program Pemasaran Pariwisata	8.380.640.000,00	8.108.103.728,00	96,75
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	38.642.000,00	24.860.500,00	64,34
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.954.757.000,00	1.590.507.965,00	81,37
	Program Pemasaran Pariwisata	8.380.640.000,00	8.108.103.728,00	96,75
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro</li> </ul>	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	62.724.100,00	56.263.850,00	89,70
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	63.198.000,00	60.386.070,00	95,55
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	242.250.000,00	179.379.950,00	74,05
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	202.147.000,00	184.002.417,00	91,02
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.347.799.400,00	1.338.629.437,00	99,32
	Program Pengembangan UMKM	1.356.793.000,00	1.309.815.397,00	96,54
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Daya Saing Industri dan Pelayanan Perdagangan</li> </ul>	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	26.182.330.000,00	19.296.578.560,00	73,70



TUJUAN SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	15.936.420.000,00	13.179.961.437,00	82,70
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	444.791.000,00	435.026.750,00	97,80
	Program Pengembangan Ekspor	1.024.500,00	1.024.500,00	100,00
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	231.074.500,00	229.885.933,00	99,49
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.503.999.500,00	6.066.539.494,00	71,34
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.924.801.507,00	6.873.597.600,00	99,26
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	243.334.000,00	239.808.676,00	98,55
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	405.439.000,00	398.076.491,00	98,18
	Program Penyuluhan Pertanian	1.545.171.193,00	1.517.192.592,00	98,19
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.854.265.000,00	4.834.570.151,00	99,59
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.274.074.000,00	3.112.071.645,00	95,05
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	84.330.000,00	80.348.810,00	95,28



TUJUAN SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	70.873.900,00	65.514.027,00	92,44
<b>MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				
Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur</li> </ul>	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.915.708.000,00	7.535.850.950,00	76,00
	Program Penataan Bangunan Gedung	4.729.774.000,00	3.900.705.806,00	82,47
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	601.605.000,00	536.423.760,00	89,17
	Program Penyelenggaraan Jalan	76.256.273.000,00	56.145.454.644,00	73,63
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	148.957.000,00	131.261.780,00	88,12
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	552.610.000,00	402.119.375,00	72,77
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7.154.051.241,00	6.077.379.918,00	84,95
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.215.804.000,00	2.587.955.012,00	61,39
Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat</li> </ul>	Program Peningkatan Kerjasama Desa	54.750.000,00	53.893.971,00	98,44



TUJUAN SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	792.399.000,00	739.394.638,00	93,31
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	452.886.000,00	390.000.836,00	86,11
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	11.853.806.182,00	10.994.553.261,00	92,75
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	54.750.000,00	53.893.971,00	98,44
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	792.399.000,00	739.394.638,00	93,31
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	452.886.000,00	390.000.836,00	86,11
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	11.853.806.182,00	10.994.553.261,00	92,75
<b>MISI 7 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH/INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN</b>				
Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keragaman Hayati				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup</li> </ul>	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	211.116.581,00	190.868.400,00	90,41
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.516.311.000,00	1.511.278.399,00	99,67



TUJUAN SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.040.007.876,00	1.029.522.793,00	98,99
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	17.372.000,00	7.587.500,00	43,68
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	60.942.000,00	54.120.913,00	88,81
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	7.000.000,00	6.568.000,00	93,83
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	41.102.000,00	30.388.000,00	73,93
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	31.187.000,00	28.122.500,00	90,17
	Program Pengelolaan Persampahan	7.440.685.701,00	6.552.250.405,00	88,06

